

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi DIY. (Mengenai Balai PISAMP)
2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas DPUP ESDM. (Mengenai Balai PISAMP)
3. Renstra DPUP ESDM 2012-2017. (Mengenai Balai PISAMP)
4. Lakip DPUP ESDM 2013. (Mengenai Balai PISAMP)
5. Lakip DPUP ESDM 2014. (Mengenai Balai PISAMP)



**RANCANGAN AKHIR**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN  
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
PEMDA DIY**

**TAHUN 2012 - 2017**

## PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DPUP-ESDM DIY) Tahun 2012-2017 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUP-ESDM DIY serta berpedoman kepada RPJMD DIY Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rancangan Akhir Renstra ini dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Renstra Dinas PUP-ESDM DIY selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012-2017, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Yogyakarta, 20 Mei 2013  
Kepala  
Dinas PUP-ESDM DIY

Ir. RANI SJAMSINARSI,MT  
NIP.19570524 198603 2 001

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	II-1
2.2 Sumber Daya SKPD .....	II-4
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	II-6
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	II-21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-10
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Daerah .....	III-22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-36
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-51
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	IV-1
4.1 Visi dan Misi SKPD .....	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	IV-4
4.3 Strategi dan Kebijakan .....	IV-15
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	VI-1
BAB VII PENUTUP .....	VII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan...	II-4
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	II-5
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	II-5
Tabel 2.4. Aset yang dikelola oleh Dinas PUP-ESDM DIY .....	II-5
Tabel 2.5. Indikator Kinerja Dinas PUP-ESDM yang tertuang dalam RPJMD 2009-2013 .....	II-6
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Dinas PUP-ESDM .....	II-8
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM .....	III-5
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUP-ESDM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta....	III-29
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .....	IV-5
Tabel 4.2. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang .....	IV-16
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PUP-ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TAHUN 2013 – 2017 .....	V-2
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VI-4

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi..	I-2
Gambar 1.2. : Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi .....	I-2
Gambar 1.3. : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD .....	I-3
Gambar 1.4. : Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra SKPD .....	I-3
Gambar 1.5. : Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renja SKPD..	I-4
Gambar 2.1. : Struktur Organisasi Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2008 .....	II-3
Gambar 2.2. : Struktur Organisasi UPTD pada Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2008 ....	II-3

# BAB I

## PENDAHULUAN

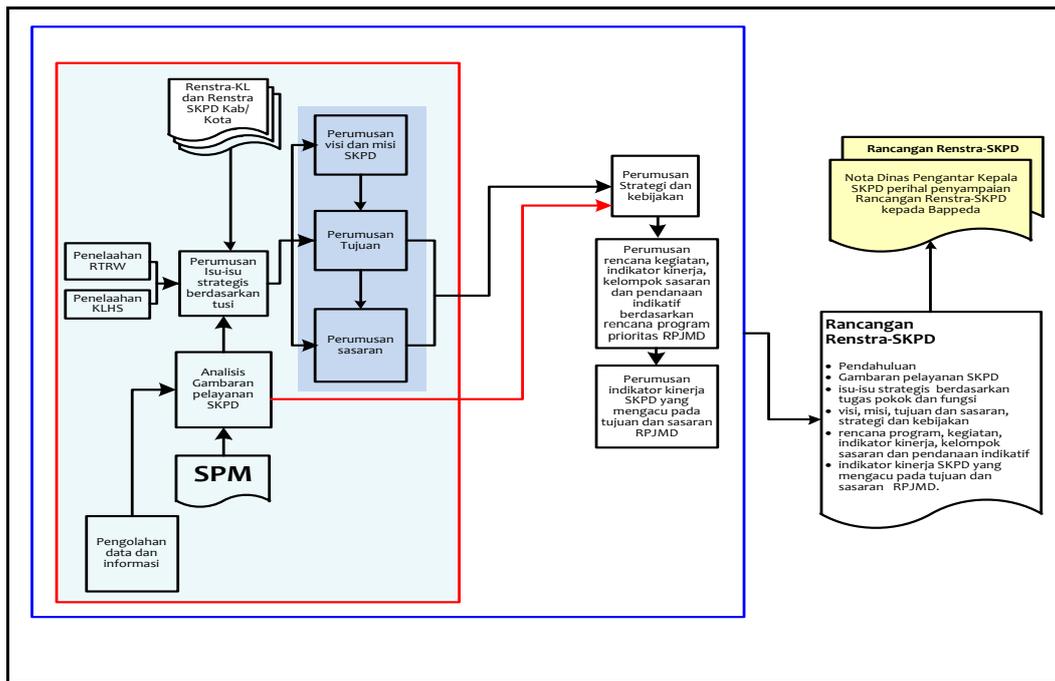
### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

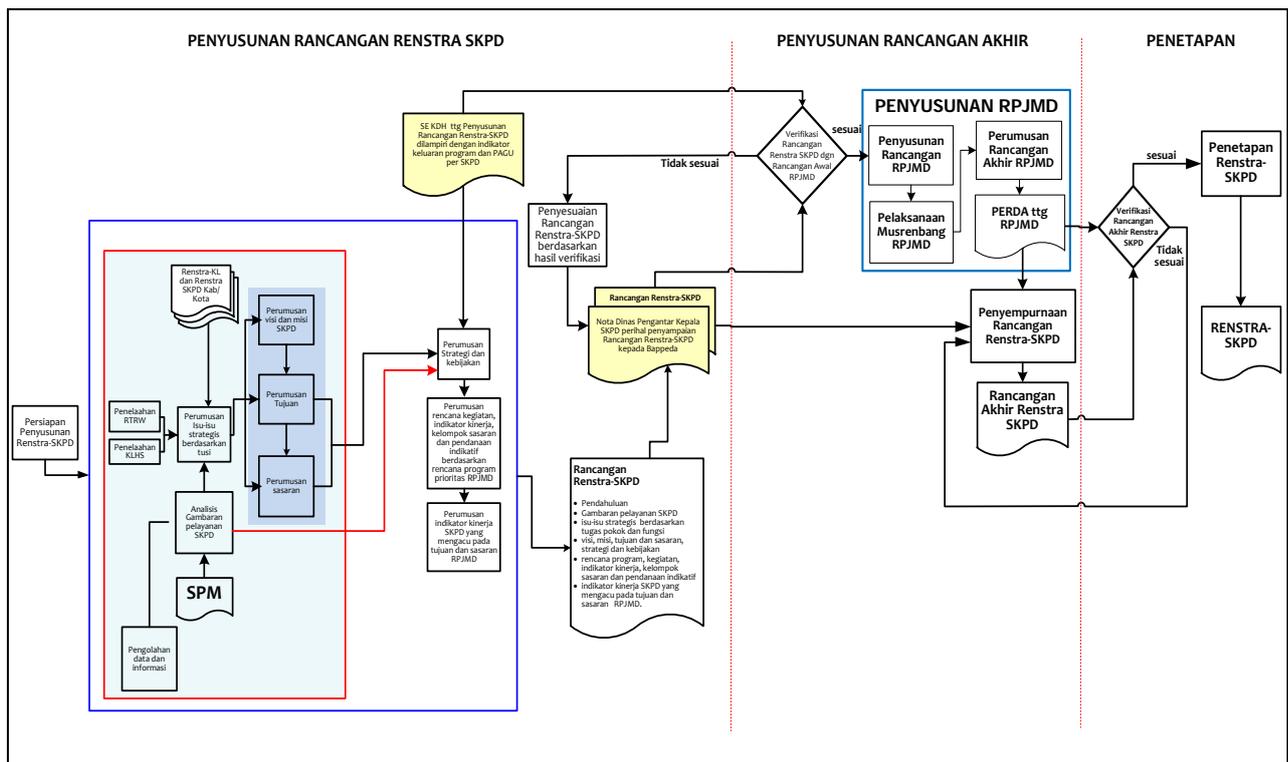
Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Pekerjaan Umum, urusan bidang Penataan Ruang, urusan bidang Perumahan dan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DPUP-ESDM DIY). Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RenstraDinas PUP-ESDM DIY disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas PUP-ESDM DIY untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan tahapan sampai dengan penetapan Renstra SKPD terlihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1. : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi

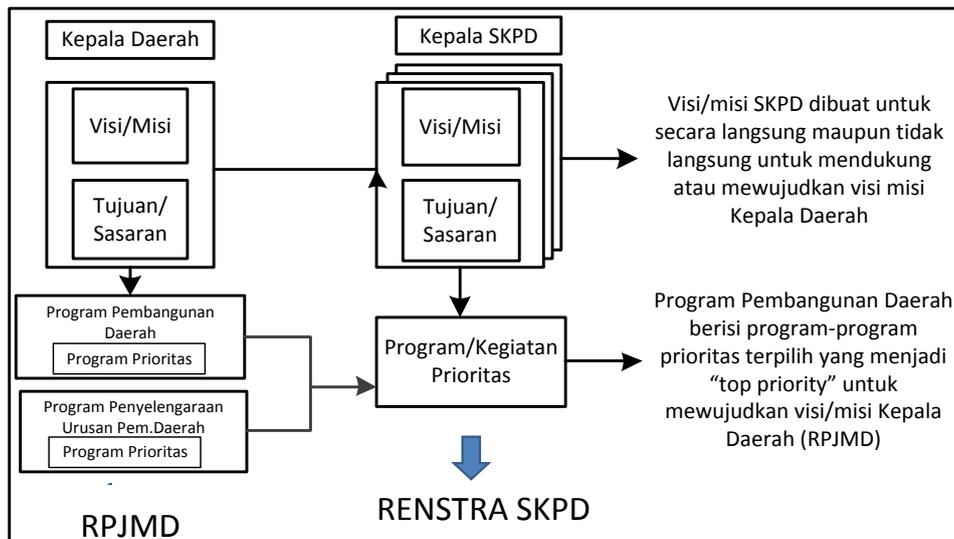


Gambar 1.2. : Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

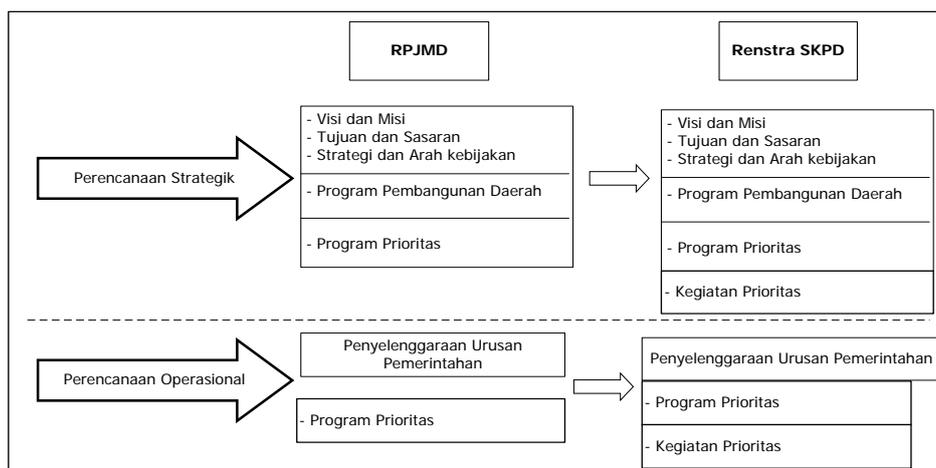
Penyusunan Renstra Dinas PUP-ESDM DIY 2012-2017 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta(RPJMD) 2012-2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM)Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD.



Gambar 1.3. : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD



Gambar 1.4. : Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra SKPD

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas bisa dilihat pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5. : Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renja SKPD

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD meliputi :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30);

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Renstra Dinas adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait urusan pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya mineral. Undang-undang tersebut meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta aturan turunannya;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta aturan turunannya;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta aturan turunannya;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air beserta aturan turunannya;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta aturan turunannya;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta aturan turunannya;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta aturan turunannya;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta aturan turunannya;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Mineral dan Batubara beserta aturan turunannya;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman beserta aturan turunannya;

## **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012-2017 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan bidang energi & sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

### **1.3.2. Tujuan**

Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012-2017 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas PUP-ESDM DIY ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2012-2017;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2012-2017.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2013-2017 dan RPJM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota untuk urusan yang sama.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Visi dan Misi SKPD
  - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
  - 4.3 Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Susunan penulisan Renstra Dinas 2012-2017 dimulai dengan latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas, gambaran terkait pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY, pemaparan tentang isu strategis, kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan energi dan sumberdaya mineral di DIY; visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas PUP-ESDM DIY; strategi dan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur; serta program dan kegiatan prioritas disertai dengan pagu indikatif.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan energi sumberdaya mineral, terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan bidang Penataan Ruang, Perumahan, Energi dan Kelistrikan. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diatur sebagai berikut :

- 1) Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari sub bidang pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya, pengembangan kawasan dan pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi;
- 2) Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi;
- 3) Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya (perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
- 4) Urusan energi dan sumber daya mineral, merupakan urusan pilihan untuk pemerintah daerah. Urusan energi dan sumber daya mineral di DIY meliputi sub bidang mineral, air tanah, geologi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi. Urusan ESDM yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan DIY adalah air tanah, mineral, dan geologi.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas PUP-ESDM DIY tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tugas Dinas PUP-ESDM DIY adalah : melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

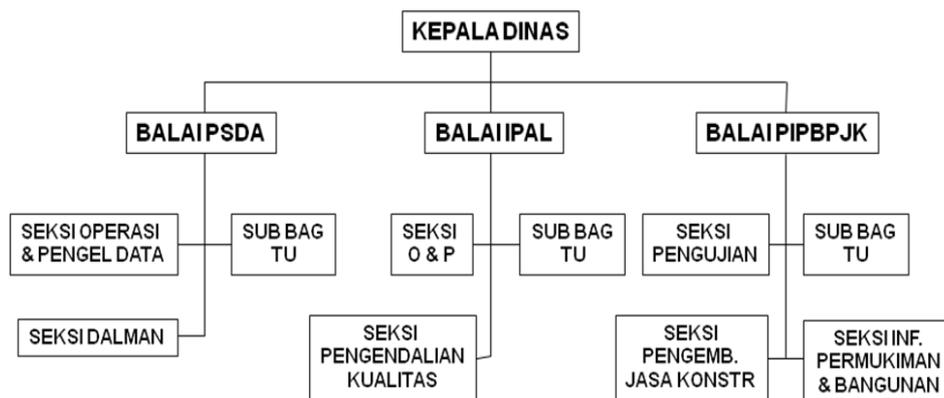
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya air;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan binamarga;
- f. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan cipta karya;
- g. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;
- i. pelaksanaan pengembangan kawasan;
- j. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat;
- k. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- l. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- m. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- n. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan tata ruang;
- o. pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumber daya mineral Kabupaten/Kota;
- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- q. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- r. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- s. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Sedangkan Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1. dan Gambar 2.2.



Gambar 2.1. : Struktur Organisasi Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2008



Gambar 2.2. : Struktur Organisasi UPTD pada Dinas PUP-ESDM DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2008

Adapun Peran Dinas PUP-ESDM DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

- a. Di bidang penataan Ruang, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun merencanakan tata ruang skala provinsi dan tata ruang keistimewaan, serta melakukan pemanfaatan dan pengendalian atas rencana tata ruang yang menjadi ketugasan Pemerintah Provinsi.
- b. Di bidang sumber daya air, Pemerintah D IY berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan tiga pilar pengelolaan

sumberdaya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

- c. Bidang kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus Jalan dan Jembatan Provinsi , baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di wilayah DIY.
- d. Bidang keciptakarya melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Khusus bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan pada bidang ini merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurrent atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah serta Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- e. Bidang Jasa Konstruksi, kewenangan lebih terfokus pada sub bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- f. Bidang Perumahan, mempunyai peran untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan, melakukan pembinaan perumahan formal dan swadaya, mengembangkan kawasan, mengembangkan kompetensi pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat;
- g. Bidang Energi dan sumber daya mineral, berperan dalam pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral; pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi; pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;

## **2.2. SUMBER DAYA SKPD**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY per 1 Januari 2013 ada 454 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1., Tabel 2.2., dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Gol.	Jumlah SDM (Orang)				Jumlah
	a	b	c	d	
IV	16	4	1	-	21
III	44	142	18	35	239
II	27	96	24	16	163
I	1	7	4	-	31
JUMLAH					454

Tabel 2.2. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Gol.	Jumlah Pegawai dengan Pendidikan (Orang)						
	S2	S1	DIV	SM	SMA	SMP	SD
IV	20	1	-	-	-	-	-
III	11	86	3	14	125	-	-
II	-	-	-	11	122	21	9
I	-	-	-	-	-	23	8
JUMLAH	31	87	3	25	247	44	17

Tabel 2.3. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)	
	Laki-laki	Perempuan
IV	16	5
III	193	46
II	142	21
I	31	-
JUMLAH	382	72

### 2.2.1. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas PUP-ESDM DIY per 1 Januari 2013 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.4. Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

Tabel 2.4. Aset yang dikelola oleh Dinas PUP-ESDM DIY

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor	3
1	Kendaraan roda 6	2
2	Kendaraan roda 4	19
3	Kendaraan roda 2	73
4	Komputer <i>Desktop</i>	71
5	Komputer <i>Laptop</i>	64
6	UPS	35
7	Server	1
8	Pendingin Ruangan (AC)	39
9	Alat Berat	50

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas PUP-ESDM D.I. Yogyakarta ber dasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Ada 18 indikator kinerja yang diterapkan dalam RPJMD 2009-2013, sedangkan dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam Ranstra Dinas PUP-ESDM tahun 2009 – 2013 terdapat 20 Indikator Kinerja dan 8 Indikator kinerja kunci, ada indikator yang berhenti sebelum berakhirnya RPJMD 2009 – 2013, ada pula yang tambah, dan ada pula yang menerus, berdasarkan kebutuhannya saat itu, adapun Indikator awal yang tertuang dalam RPJMD 2009 – 2013 seperti diperlihatkan pada tabel 2.5., sedang Pencapaian Kinerja Dinas PUP-ESDM sesuai indikator perubahan diperlihatkan pada tabel 2.6., dan Indikator kinerja kunci diperlihatkan pada tabel 2.7.

Tabel 2.5.

Indikator Kinerja Dinas PUP-ESDM yang tertuang dalam RPJMD 2009-2013

INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Persentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan Perumahan	Persen	1	2	2	2	3
2	Persentase Peningkatan Lingkungan sehat Perumahan	Persen	10	10	10	10	10
3	Persentase jumlah komunitas Perumahan yang difasilitasi	Persen	5	5	5	5	5

INDIKATOR		SATUAN	TARGET				
			2009	2010	2011	2012	2013
4	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	Persen	10	10	10	10	10
5	Jumlah Kawasan yang Dikembangkan	Jumlah	1	1	1	2	3
6	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	Persen	65	70	75	80	85
7	Persentase Luasan DI yang Terlayani air Irigasi	Persen	60	65	70	75	80
8	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	40	50	60	70	75
9	Persentase Daerah yang dikonversi terhadap luasan Total lahan	Persen	5	6	7	8	9
10	Persentase Layanan jaringan Air Limbah Terpusat di APY	Persen	10	20	30	40	50
11	Persentase Penanganan banjir Terhadap Daerah Potensi	Persen	55	60	65	70	75
12	Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat	Ltr/det	100	100	100	100	100
13	Persentase Penurunan Genangan	Persen	10	10	10	10	10
14	Persentase penduduk Yang Terlayani Pengelolaan Sampah	Persen	55	60	65	70	75
15	Jumlah TPA Sampah yang Menggunakan Sanitary Landfill	Jumlah	1	1	1	2	2
16	Rasio Elektrifikasi	Persen	0,02	0,02	0,02	0,015	0,015
17	Peningkatan Kapasitas Energi Listrik	Persen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
18	Pemenuhan Kebutuhan Air di daerah Sulit Air	Persen	6	6	6	6	6

**TABEL 2.6.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPUP-ESDM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**2009 SD 2013**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Prediksi)	1	2	3	4	5 (Prediksi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan Perumahan			10 %	1 %	2 %	2 %	2 %	3 %	1 %	2 %	14,90 %	20,44 %	3 %	100,00 %	100,00 %	745,00 %	1022,00 %	100,00 %
2	Prosentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan			10 % / Tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	13,05 %	10,26 %	10 %	100,00 %	100,00 %	130,50 %	102,60 %	100,00 %
3	Prosentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi			5 % / tahun	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	10,27 %	5 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	205,40 %	100,00 %
4	Prosentase Pengurangan Kawasan Kumuh			10 % / Tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	13,05 %	10,15 %	10 %	100,00 %	100,00 %	130,50 %	101,50 %	100,00 %
5	Jumlah Kawasan Yang Dikembangkan			2	1	1	1	2	2	1	1	2	2,00	2	100,00 %	100,00 %	200,00 %	100,00 %	100,00 %
6	Prosentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik			85 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	65 %	70 %	83,89 %	84,32 %	85 %	100,00 %	100,00 %	111,85 %	105,40 %	100,00 %
7	Prosentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi			80 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	60 %	65 %	70,09 %	75,06 %	80 %	100,00 %	100,00 %	100,13 %	100,08 %	100,00 %
8	Prosentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan			1 % / Th	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	5 %	6 %	7 %	8,20 %	9 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	102,50 %	100,00 %
9	Prosentase Penduduk Berakses Air Minum			75 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	40 %	50 %	65,29 %	70,38 %	75,09 %	100,00 %	100,00 %	108,82 %	100,54 %	100,12 %
10	Prosentase Layanan Air Limbah Terpusat di APY			50 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	10 %	20 %	55,00 %	53,30 %	67,00 %	100,00 %	100,00 %	183,33 %	133,25 %	134,00 %
11	Prosentase Penanganan banjir Terhadap Daerah Potensi			75 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	55 %	60 %	65 %	70,06 %	75 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,09 %	100,00 %
12	Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat			100 l/dtk/ tahun	100 ltr/ Dt	100 l/det	100 l/det	293 l/set	311,6 l/det	100 ltr/ Dt	100 l/det	100 l/det	293 l/set	311,6 l/det	100,00 %				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Prediksi)	1	2	3	4	5 (Prediksi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Prosentase Penurunan Genangan			10 %/ Tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	5,90 %	8,43 %	10,00 %	100,00 %	100,00 %	59,00 %	84,30 %	100,00 %
14	Prosentase Penduduk yang terlayani Pengelolaan Sampah			75 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	55 %	60 %	66,40 %	71,40 %	76,40 %	100,00 %	100,00 %	102,15 %	102,00 %	101,87 %
15	Jumlah TPA Sampah yang Menggunakan Sistem Sanitary			2 buah	1 Jml	1 Jml	1 Jml	2 Jml	2 Jml	1 Jml	1 Jml	2 Jml	2,00 Jml	2,00 Jml	100,00 %	100,00 %	200,00 %	100,00 %	100,00 %
16	Peningkatan Rasio Elektrifikasi			0,09 %	0,02 %	0,02 %	0,015 %	0,015 %	0,015 %	0,02 %	0,02 %	0,79 %	0,590 %	0,015 %	100,00 %	100,00 %	5266,67 %	3933,33 %	100,00 %
17	Peningkatan Kapasitas Energi Listrik			1,5 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	1,33 %	0,47 %	1,00 %	100,00 %	100,00 %	443,33 %	156,67 %	333,33 %
18	Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air			30 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	8,00 %	6,00 %	6,00 %	100,00 %	100,00 %	133,33 %	100,00 %	100,00 %
19	Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian			1,85%	0,37 %	0,37 %	0,37 %	0,37 %	0,37 %	1,14 %	1,15 %	1,07 %	1,84 %	0,37 %	308,11 %	310,81 %	289,19 %	497,30 %	100,00 %
20	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku			100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	102,50 %	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	102,50 %	100,00 %	100,00 %

**TABEL 2.7.**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAYANAN SKPD DPUP-ESDM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2009 SD 2013**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Prediksi)	1	2	3	4	5 (Prediksi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	INDIKATOR KINERJA KUNCI																		
1	Rumah layak huni									60,03 %	66,67 %	67,78 %	91,22 %						
2	Kawasan Kumuh									33,33 %	32,99 %	21,08 %	17,38 %						
3	Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Nasional									20,99 %	83,49 %	83,89 %	84,32 %						
4	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih									72,69 %	77,15 %	78,58 %	70,74 %						
5	Rumah Tangga Bersantiasi									65,99 %	70,97 %	71,90 %	80,20 %						
6	Ratio Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah ber HPL/HGB									30,06 %	30,06 %	30,06 %	22,39 %						
7	Pertambangan tanpa izin									2,90 %	2,90 %	12,13 %	5,81 %						
8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB									0,66 %	0,66 %	0,71 %	0,68 %						

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Seluas 17.112,87 ha jaringan sawah beririgasi yang sudah terbangun yang menjadi kewenangan propinsi seluruhnya berfungsi. Namun demikian, masih ada kerusakan jaringan irigasi, tercatat mencapai lebih kurang 25 %, yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) DI dengan jumlah GP3A sebanyak 24 (dua puluh empat) dan P3A sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) buah.

Berkembangnya daerah permukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (seperti Waduk Sermo, Embung/telaga). Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri (termasuk perhotelan) yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang cenderung meningkat yang kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan *land subsidence*.

Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diairi selama ini merupakan sawah tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya. Sampai dengan Tahun 2012 capaian penambahan penyediaan air baku sebesar 600 liter/detik.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan (seperti banjir di wilayah-wilayah permukiman tepi sungai). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Setiap terjadi banjir, tebing sungai mengalami gerusan yang mengakibatkan longsor tebing sungai. Untuk penanganan hal tersebut diperlukan konstruksi penahan tebing yang aman dan ramah lingkungan berupa konstruksi bronjong.

Kondisi sampai bulan Juli tahun 2012 untuk penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir sebesar 67,2%, terdiri dari :

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, yaitu dengan perkuatan tebing sungai yang mengalami gerusan dengan konstruksi yang ramah lingkungan berupa pasangan bronjong.
2. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan, yaitu dengan melakukan monitoring dan persiapan menghadapi banjir serta pengadaan bahan banjir berupa bronjong dan karung plastik.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya berupa bantuan teknis serta pemberian bantuan bahan banjir kepada masyarakat yang berada di daerah potensi banjir.
4. Pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi sebanyak 67 pos yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo (20 pos), Kabupaten Sleman (19 pos), Kabupaten Bantul (18 pos), Kabupaten Gunungkidul (10 pos).

Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi pengerukan sedimen dan normalisasi sungai, terutama di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi.

Pemerintah Daerah DIY melalui DPUP-ESDM DIY telah melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap beberapa sungai. Ditinjau dari segi kewenangan pengelolaan sungai, maka seluruh DAS yang melintas di wilayah DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Sampai dengan saat ini kesepakatan pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan secara informal, sehingga diperlukan Nota Kesepakatan/MoU.

Total panjang jaringan jalan berstatus Jalan Provinsi sebelum tahun 2012 adalah 690,25 Km, dengan total panjang jembatan sepanjang 4.393,09 m. Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 151/ KEP/2012 Tahun 2012, Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, panjang jalan berstatus jalan provinsi berkurang dari semula 690,25Km menjadi 619,34Km. Hal ini menyebabkan kondisi jalan mantap pada ruas jalan berstatus jalan provinsi menjadi berkurang, dari semula 83,89% menjadi 71,09%. Penurunan kondisi ini disebabkan karena terdapat beberapa ruas jalan berstatus provinsi yang beralih status menjadi jalan berstatus nasional maupun jalan berstatus kabupaten. Selain itu, terdapat juga perubahan status dari jalan

berstatus kabupaten menjadi jalan berstatus provinsi, tetapi dengan kondisi awal rusak dan rusak berat. Keadaan ini tentunya akan mengurangi kondisi jalan berstatus provinsi secara keseluruhan.

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 117,60 km terbagi menjadi 4 (empat) segmen. Untuk Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela)/JJLS, pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional Belum Tersambung dengan panjang 125,125 km. Sampai dengan tahun 2011 tahapan pembangunan JJLS meliputi studi kelayakan, penyusunan AMDAL, penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), pembebasan tanah seluas 37,26 Ha serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan sepanjang 9,40 km.

Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, drainase, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam.

Untuk sub bidang air minum, dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas.

Jumlah penduduk yang terlayani air minum sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum di DIY sampai dengan bulan Juli tahun 2012 sebanyak 2.263.914 jiwa, yang terlayani melalui layanan SPAMDES dan layanan SPAM IKK. Sedang dalam pengelolaan air bersih untuk air minum, sebagai wujud peran serta masyarakat di DIY, telah terbentuk PAMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) yang beranggotakan kelompok-kelompok masyarakat pengelola air minum di perdesaan. Sampai dengan bulan Juli tahun 2012 jumlah anggota PAMASKARTA telah mencapai 482 kelompok, dimana masing-masing kelompok mengelola sumber air rata-rata 1-2 liter/detik.

Dalam sub bidang ini upaya pembinaan terhadap PDAM belum memperlihatkan hasil yang signifikan seperti tergambar dari 5 PDAM, sekitar 70% kondisinya masih tidak sehat. Ini berarti hanya 1 PDAM yang sehat, sehingga pada tahun 2008, utang non pokok PDAM yang dinyatakan sakit yang mencapai Rp. 33 milyar terpaksa dihapuskan. Demikian halnya dengan utang PDAM yang dikategorikan sehat juga dihapus melalui skema *debt to swap investment* yang mencapai Rp. 11 milyar. Dengan demikian, jumlah keseluruhan hutang yang dihapus mencapai Rp. 44 milyar. Sementara kinerja pengelolaan air minum dengan target penurunan angka kebocoran daerah baru pada kisaran 6-7% sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai angka 20% yang ditargetkan sebagai angka kebocoran secara nasional.

Secara total target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan dalam RPJMD 2009-2013 ditargetkan sebesar 66% sedangkan perdesaan mencapai 30%. Pada akhir tahun 2012 pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45% dan perdesaan 10%, sehingga cakupan pelayanan air minum perpipaan DIY baru tercapai 20%.

Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah pada skala regional di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* pada TPA Piyungan di Bantul. Adapun untuk wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo telah dibangun masing-masing satu TPA dengan sistem *controlled landfill*, secara umum dapat dikatakan bahwa sampai saat ini sampah belum dikelola menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Penerapan pengelolaan sampah ramah lingkungan sampai dengan Tahun 2012 baru dapat terlaksana sebesar 45%. masih di bawah target RPJMD (75% pada 2009) dan MDGs (70% pada 2015).

Upaya untuk mengurangi kuantitas sampah sebesar 20% pada periode 2009–2013 juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga halnya dengan infrastruktur pengelolaan persampahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kenaikan timbunan sampah yang meningkat 2–4% per tahun, sedangkan di sisi yang lain percontohan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) saat ini masih terbatas di 3 kawasan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase. Di sisi lain banyak dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkan kelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah. Sementara itu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 tentang Klasifikasi Rumah Tangga Menurut Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumah menunjukkan bahwa keadaan air got lancar baru mencapai 53,83%, yaitu di perkotaan 42,76% dan di perdesaan 66,09%; mengalir sangat lambat mencapai 10,63%, yaitu di perkotaan 9,30% dan di perdesaan 12,37%; keadaan tergenang 3,86%, yaitu di perkotaan 3,98% dan di

perdesaan 3,69%; serta yang tidak ada got mencapai 32,68%, yaitu di perkotaan 43,96% dan di perdesaan 17,84%.

Dalam penanganan air limbah secara nasional berdasarkan Laporan MDGs, pada tahun 2007 akses sanitasi layak nasional mencapai 69,3%. Ini berarti bahwa angka tersebut telah melampaui target *Millennium Development Goals* (MDGs) sebesar 65,5% pada tahun 2015. Saat ini 77,15% penduduk nasional sudah memiliki akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi (90,50% di perkotaan dan 67,00% di perdesaan). Prosentase aksesibilitas jumlah keluarga terhadap sarana sanitasi dasar telah meningkat dari 77,5% pada tahun 2004 menjadi 81,8% pada tahun 2007 di kawasan perkotaan. Sementara untuk kawasan perdesaan, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat dari 52,2% pada tahun 2004 menjadi 60% pada tahun 2007. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun 2007, banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman) sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah tangga melakukan praktik pembuangan tinja tidak aman (di kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan prosentase di perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%.

Penduduk DIY yang terlayani sanitasi layak sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 70% (dengan jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 501.464 rumah tangga). Cakupan pelayanan air limbah terpusat yang melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta sampai dengan tahun 2012 telah dapat menjangkau sebanyak 13.329 sambungan rumah (SR) masing-masing di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan data *Masterplan* Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di KPY. Capaian penanganan sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 27,90%. Kondisi tersebut disebabkan oleh besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganannya termasuk kebutuhan penanganan diluar KPY.

Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan sebanyak 5 (lima) kali di setiap provinsi dengan target 5 kabupaten/kota; serta pendataan Peraturan Daerah (Perda) terkait bangunan gedung di 5 kabupaten/kota pada provinsi D.I. Yogyakarta.

Revitalisasi /penataan bangunan dan lingkungan dilakukan melalui tahapan penyusunan regulasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada kawasan cagar budaya dan kawasan yang mempunyai nilai dan fungsi budaya. Penataan kawasan tersebut bertujuan untuk melestarikan sekaligus memperkuat

eksistensi kawasan tersebut. Terdapat 18 Kawasan Budaya dengan tingkatan dan klasifikasi tertentu, yaitu Kawasan Malioboro, Kraton, Puro Pakualaman, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, Pleret, Ambarketawang, Ambarbinangun, Sokoliman, Parangkusumo, Kembang Lampir, Candi Gebang, Nglanggeran, Suralaya dan Kiskendo, Girigondo, Gunung Gambar dan Candi Kedulan. Sampai dengan tahun 2011, terdapat 6 kawasan cagar budaya mendapatkan SK Gubernur No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY sebagai kawasan cagar budaya kelas C (kewenangan setingkat provinsi), yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, dan Imogiri.

Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya peraturan daerah tentang bangunan gedung di 5 kabupaten/kota. Selain itu, telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 5 kabupaten/kota; Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) di 1 kota Yogyakarta; sistem ruang terbuka hijau telah ditangani di 15 kawasan di 5 kabupaten/kota; revitalisasi kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional telah ditangani di 5 kabupaten/kota; dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nelayan.

Selain itu, sejumlah peraturan mengenai bangunan gedung dan penataan lingkungan telah berhasil diselesaikan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Disamping itu telah diterbitkan pula berbagai NSPK untuk bangunan gedung yang meliputi: (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.

Di sisi lain sampai saat ini tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 400 unit rumah yang perlu difasilitasi. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 6.325 unit rumah. Terdapat *backlog* pembangunan perumahan yang terus meningkat dari 69.306 unit rumah pada tahun 2005 menjadi sebesar 94.604 unit rumah pada akhir tahun 2008. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Untuk pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan mencapai 5 unit (2009). Sementara itu berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 91.200 keluarga yang

belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan.

Upaya mengatasi penurunan *backlog* (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY untuk mengatasi masalah perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
2. Pengembangan Perumahan Swadaya.
3. Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Upaya Pemerintah DIY untuk mengatasi permasalahan penyediaan perumahan dilakukan melalui Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Pengembangan Perumahan Swadaya, Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan pembangunan rumah formal melalui pengembang. Namun upaya ini berjalan lambat karena ada beberapa kendala yang dihadapi.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan. Sampai dengan Tahun 2012, jumlah prosentase rumah tidak layak huni terhadap keseluruhan jumlah rumah sebesar 8,5%.

Sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah, maka pemerintah provinsi setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan.

Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan *dynamic phenomenon of urbanization*. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah. Di sisi lain seiring dengan otonomi daerah (kota) yang semakin menguat membawa dampak pula pada “egoisme kedaerahan” yang semakin tinggi dan disertai kekuatan-kekuatan pasar (swasta) yang terus memperlihatkan dominasinya sehingga membawa dampak pada kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran permukiman yang semakin sulit diantisipasi. Luas kawasan permukiman kumuh yang mencapai 107 lokasi (54.000 ha) pada tahun 2009 menjadi 57.800 ha pada akhir tahun 2012, terutama pada kiri dan kanan sungai yang melintas di DIY. Di sisi lain, penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa potensial melalui agropolitan, dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan maupun perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dimana kawasan tersebut berada. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan yang merupakan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter

dan intra regional. Sampai tahun 2012 sudah sekitar 28% dari kawasan agropolitan, minapolitan, dan desa-desa pusat pertumbuhan yang dikembangkan.

Selama periode pelaksanaan pembangunan tahun 2009–2012 sejumlah hasil penting dalam bidang penataan ruang telah dicapai, antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, kondisi pada bidang penataan ruang yang ditemui sampai saat ini masih cukup memprihatinkan, khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan pembangunan saat ini masih lebih fokus pada perencanaan, sehingga terjadi inkonsistensi dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang akibat lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.

Berdasarkan Status Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Bulan Oktober 2009, saat ini dari 530 wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk melakukan penyesuaian RTRW-nya, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU. Di tingkat kabupaten, dari total 4 kabupaten dan 1 (satu) kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, semuanya sedang melakukan revisi RTRW.

Sebagai tindak lanjut dari RTRW DIY adalah minimal sebanyak 11 kajian untuk Rencana Struktur Ruang, 14 Kajian untuk Rencana Pola Ruang dan 19 Kajian untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Pada saat ini telah disusun 21 Kajian serta 9 Peraturan Daerah terkait Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis.

Target perencanaan kawasan yang akan dikembangkan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, antara lain kawasan pantai selatan, hal ini sejalan dengan Visi Gubernur 2012–2017 dengan tema Yogyakarta menyongsong peradaban baru dengan membalik paradigma —*among tani* menjadi *dagang layar* yang konsekwensinya laut selatan tidak lagi ditempatkan sebagai halaman belakang melainkan menjadi halaman depan. Untuk itu diperlukan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung kawasan strategis pantai selatan atau kawasan strategis baru yang akan ditumbuhkan. Kawasan pansela merupakan:

1. Kawasan strategis Provinsi DIY *Pasal 97 Perda 2 Th. 2010* tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;

2. Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi (untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunungkidul);
3. Kawasan strategis lindung dan budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kab. Bantul); dan
4. Kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut.

Pada saat ini di kawasan Pansela direncanakan pembangunan bandara dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pansela. Disamping itu potensi pariwisata, perikanan, dan pertanian di Kawasan Pansela juga perlu ditingkatkan perkembangannya.

Di bidang jasa konstruksi saat ini masih dihadapi permasalahan-permasalahan klasik seputar lemahnya penguasaan teknologi dan ak ses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terlihat mutu konstruksi yang belum sesuai standar. Sementara pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai lebih menjadi bagian dari tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan. Di sisi lain Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi. Praktik-praktik KKN dalam industri konstruksi masih terlihat dalam perilaku bisnis jasa konstruksi. Kondisi ini telah membuat persaingan di industri konstruksi bukan berdasarkan kompetensi tetapi lebih mengedepankan upaya-upaya negosiasi atau *lobby*. Globalisasi bisnis konstruksi merupakan suatu keniscayaan. Liberalisasi perdagangan jasa konstruksi merupakan sesuatu yang telah terjadi. Indonesia sebagai negara anggota WTO akan dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar konstruksi domestik. Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong perdagangan sektor konstruksi nasional untuk berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.

Adapun pada sisi manajemen, yang juga tidak kalah penting perannya dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, kondisi saat ini yang masih dirasakan adalah belum fokus dan berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal. Kondisi mencolok yang paling terasa adalah implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang/sub bidang yang menjadi

kewenangan Dinas PUP-ESDM yang masih lemah termasuk dengan sektor pembangunan lainnya. Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan risiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup mendapat perhatian. Kondisi manajerial tersebut diperlemah pula oleh sistem pengendalian internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Pada tahun 2012, jumlah Rumah tangga tercatat 1.037.976 RT, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2012, dapat dilaksanakan penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 225 R T sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,023% dari target sebesar 0,015 %. Sedangkan melalui dana APBN jumlah rumah tangga ber listrik meningkat sebanyak 5.851 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,564%. Secara total ratio elektrifikasi pada tahun 2012 tercapai 76,80%, meningkat sebesar 0,59% dari tahun 2011. Masih terdapat kurang lebih 238 dusun yang sebagian besar rumah tangga nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang.

Sampai dengan tahun 2011, total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 582,35 kW dari total potensi 10.000 kW. (10 MW). Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2012 sebesar 47 kW, sehingga meningkat 0,47% dari target sebesar 0,30%.

Sedangkan untuk mewadahi kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi, maka disusun program baru yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi. Program ini bertujuan untuk implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, pemenuhan air baku di daerah sulit air tercapai sebesar 6% sesuai target kinerja tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 6%, salah satunya dicapai melalui pembangunan sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air. Sedangkan sampai dengan tahun 2012 ini, sudah terbangun sumur bor di 9 lokasi dari total 46 lokasi daerah sulit air.

Produksi dari 7 (tujuh) mineral non logam dan batuan pada tahun 2012 yang banyak diusahakan di DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 741.783 m<sup>3</sup>, batu gamping/kapur dengan produksi 146 m<sup>3</sup>, tanah liat dengan produksi 789 m<sup>3</sup>,

andesit dengan produksi 109.280 m<sup>3</sup>, zeolit dengan produksi 350 m<sup>3</sup>, breksi batupung dengan produksi 600 m<sup>3</sup>, dan tanah urug dengan produksi 70.463 m<sup>3</sup>. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012, total peningkatan nilai produksi bahan galiandari 7 mineral non logam dan batuan sebesar 551,39 juta Rupiah atau meningkat 1,84 % dari target yang hanya sebesar 0,37 %.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar pada tahun 2012, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 504.632 KL atau 99,7% dari kuota, solar 130.527 KL atau 108,8% dari kuota, serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 61.961,06 Ton atau 102,8% dari kuota. Kelancaran distribusi Bahan Bakar Bersubsidi didukung melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, Kabupaten/Kota, PT. Pertamina (Persero), dan HISWANA MIGAS DIY.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Selanjutnya tantangan masing-masing bidang urusan penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan dan energi & sumber daya mineral diuraikan di bawah ini.

### **2.4.1. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang**

Tantangan pembangunan bidang penataan ruang, meliputi :

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan, khususnya terkait keistimewaan DIY.
2. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

### **2.4.2. Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA)**

Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence* dan *intrusi* air asin/laut.
2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target *Millennium Development Goals* (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

#### **2.4.3. Tantangan pembangunan Bidang ke Bina Marga-an**

Tantangan pembangunan bidang Jalan meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan ber wawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
4. Menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Selatan DIY, Kawasan perkotaan Yogyakarta dan percepatan pembangunan Jaringan Jalan *Outer Ring Road*.
5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.
6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah perkotaan Yogyakarta.
7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

8. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

#### **2.4.4. Bidang ke Cipta Karya-an**

Tantangan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an meliputi :

1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan.
2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
3. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi.
4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
5. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
6. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
7. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
8. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
10. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
11. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
12. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.
13. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

#### 2.4.5. Bidang Jasa Konstruksi

Tantangan pembangunan bidang jasa konstruksi, meliputi :

1. Pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Dinas PUP-ESDM DIY semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
2. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum *intens* dan kurang maksimal melakukan pembinaan.
3. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi.
4. Masih adanya mutu konstruksi yang belum sesuai standar.
5. Masih kurangnya tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang konstruksi, terutama untuk mendukung pelaksanaan keistimewaan.
6. Permintaan keterlibatan badan usaha/tenaga kerja konstruksi di luar negeri terus meningkat.
7. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jasa konstruksi, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

#### 2.4.6. Bidang Perumahan

Tantangan pembangunan sub bidang Perumahan meliputi :

1. Memenuhi bac klog perumahan sebesar 25.298 unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
2. Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah.
3. Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Pembangunan Perumahan dan Permu-kiman
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman
5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman,
6. Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan Permukiman melalui Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa
7. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
8. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembang-an perumahan dan permukiman;

9. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat;

#### **2.4.7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Tantangan pembangunan bidang ESDM meliputi :

1. Bauran energi nasional masih didominasi oleh BBM
2. Belum optimalnya pengembangan energi non fosil khususnya panas bumi,
3. Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional,
4. Belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM,
5. Harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya,
6. Pemanfaatan energi belum efisien,
7. Nilai tambah industri pertambangan dan local content rendah
8. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices d
9. Belum terungkapnya seluruh informasi geologi DIY
10. Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi.
11. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
12. Penyediaan energi energi daerah, dengan Desa mandiri Energi nya, dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi energi setempat, yaitu berbasis bahan bakar nabati.

#### **2.4.8. Sekretariat Dinas**

**Tantangan Sekretaris Dinas meliputi :**

1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
4. Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

# BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perencanaan Strategis Dinas PUP-ESDM daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas PUP-ESDM DIY telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktorfaktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
  - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.

- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas PUP-ESDM DIY, dan UPTD Dinas PUP-ESDM belum optimal.
  - d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas PUP-ESDM DIY yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - e. Peran aktif Dinas PUP-ESDM DIY sebagai perpanjangan tangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih perlu ditingkatkan.
2. Bidang Perumahan
- a. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung
  - b. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
  - c. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Bidang Tata Ruang
- a. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
  - b. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain, serta belum tertatanya ruang warisan budaya, yang menjadi cirinya keistimewaan DIY.
4. Bidang Sumberdaya Air
- a. Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa DI / Water District di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
  - b. Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di propinsi, yaitu Wilayah Sungai Progo dan Opak menjadi kewenangan pusat.
  - c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;
5. Bidang Bina Marga
- Belum seluruhnya jalan dan jembatan propinsi dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi.

## 6. Bidang Cipta karya

- a. Belum sepenuhnya pengelolaan TPA Regional Piyungan, ditangani dengan baik, karena pengelolaannya masih dilakukan bersama kabupaten/kota dalam Kartamantul yang dilakukan secara bergantian antara kabupaten /kota tersebut, padahal sebetulnya TPA Regional pengelolannya dapat dilakukan oleh propinsi,
- b. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
- c. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar,
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,
- e. Belum optimalnya pelayanan pemeriksaan teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang.

## 7. Bidang Energi Sumber Daya Mineral

- a. Belum optimalnya penyediaan listrik untuk perdesaan bagi masyarakat kurang mampu , disebabkan keterbatasan anggaran daerah,
- b. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang disebabkan keterbatasan penguasaan teknologi energi baru terbarukan dan pemahaman masyarakat mengenai energi baru terbarukan masih terbatas,
- c. Belum optimalnya pengawasan pengambilan air tanah melalui sumur dalam di wilayah terutama di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY),
- d. Belum efisiennya konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi dan kemampuan SDM yang masih terbatas.
- e. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengubah mineral bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.

## 8. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

- a. Belum adanya kepastian pembagian peran dalam pengelolaan sumber daya air di DAS Progo dan DAS Opak, mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan SDA Provinsi.
- b. Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan sumberdaya air.

## 9. UPTD Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, Pengembangan Jasa Konstruksi (BPIPBPJK).

- a. Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand.

- b. Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang pekerjaan umum
- c. Belum sepenuhnya penyedia jasa mengujikan hasil pelaksanaan konstruksi pada BPIPBPJK, dikarenakan peralatan uji yang masih kurang.

10. UPTD Balai Instalasi Pengelolaan Air Limbah

- a. Belum optimalnya pengelolaan air limbah terpusat, karena kapasitas air limbah yang masuk masuk (*inlet*), masih lebih kecil dibanding kapasitas pengolahan air limbah.
- b. Belum optimalnya pemeliharaan peralatan pengolahan air limbah, karena banyak peralatan yang sudah melebihi umur alatnya, sehingga diperlukan pemeliharaan yang lebih besar.
- c. Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan laboratorium, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan air limbah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan Perumahan	20,44 %	10 %	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu		Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengaki-batkan alih fungsi lahan tidak terbandung
2	Prosentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan	10,26 %	10 %/ Tahun	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat		Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan
3	Prosentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi	5,27 %	5 %/ tahun			
4	Prosentase Pengurangan Kawasan Kumuh	10,15 %	10 %/ Tahun	Pengurangan kawasan kumuh di DIY dilakukan melalui program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh melalui kegiatan : Penataan Kawasan Kumuh. Berupa Pembangunan /Peningkatan PSU Kawasan Kumuh (dana APBD)	Pengurangan kawasan kumuh di DIY dilakukan melalui program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh melalui kegiatan : Penataan Kawasan Kumuh. berupa Pembangunan /Peningkatan PSU Kawasan Kumuh (dana APBN)	Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5	Jumlah Kawasan Yang Dikembangkan	2	2			
6	Prosentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	85 %	85 %	Jaringan jalan Propinsi sepanjang 690,19 km merupakan kewenangan propinsi.		Kewenangan penanganan hanya di jalan propinsi sesuai dengan Undang-undang tentang jalan

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
7	Prosentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi	80 %	80 %	DI yang menjadi kewenangan Provinsi adalah : 36 DI Lintas seluas 4.890,87 Ha dan 0 8 DI Utuh Kabupaten / Kota (1.000 – 3.000 Ha) seluas 12.222 Ha		Terdapat defisit imbangan air irigasi pada bebe-rapa DI / Water District di musim kemarau; sehingga perlu diperlukan peningkatan dan pengembang-an infrastruktur pendayagunaan sumber daya air yang berkelanjutan;
8	Prosentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan	9 %	1 %/ Th			
9	Prosentase Penduduk Berakses Air Minum	75,09 %	75 %		Pembangunan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah pusat dan swadaya masyarakat	Kewenangan Penyediaan Air minum di Pemerintah Kabupaten, sehingga Pemerintah Provinsi, sebatas fasilitasi
10	Prosentase Layanan Air Limbah Terpusat di APY	67 %	50 %	Kewenangan Provinsi adalah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah, serta fasilitasi jaringan service.	Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya memfasilitasi pembangunan baru pembangunan untuk saluran Induk dan Lateral	Kewenangan Sambungan Rumah untuk Air limbah Terpusat berada di kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul, untuk memenuhi kapasitas IPAL
11	Prosentase Penanganan banjir Terhadap Daerah Potensi	75 %	75 %		Kewenangan penanganan banjir di DIY berada di kementerian Pekerjaan Umum, yaitu pada DAS Progo dan DAS Opak.	Tingginya areal terbangun pada kawasan resapan air hujan, sehingga aliran limpasan (run off) semakin tinggi;

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
12	Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat	100 Ltr/ Det	100 lt/dtk/ tahun	Untuk memenuhi target 100 lt/det, yaitu dengan pengambilan air tanah dan air permukaan, Propinsi terkendala dengan kewenangan penanganan seperti kewenangan pengambilan air permukaan dari sungai yang menjadi kewenangan pusat	Pemerintah pusat dapat mengambil peran agar target penyediaan air baku bagi masyarakat dapat terpenuhi	Untuk memenuhi target penambahan Air baku perlu dilakukan bersama, antara pemerintah Pusat dan daerah, karena keterbatasan anggaran daerah dan kewenangan
13	Prosentase Penurunan Genangan	10 %	10 %/ Tahun	Penanganan genangan akibat tidak berfungsinya drainase lingkungan, Propinsi dapat memfasilitasi sebagian pembangunan dan normalisasi drainasi	Perlu fasilitasi yang lebih besar melalui pusat (kementerian PU) agar jumlah genangan semakin menurun	Kurangnya kesadaran masyarakat dlm pengelolaan dan pemeliharaan drainase; serta belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase, sehingga g) Sistem drainase kota tidak mampu lagi melayani perkembangan kota yang pesat
14	Prosentase Penduduk yang terlayani Pengelolaan Sampah	76,40 %	75 %	Kewenangan Propinsi ada di TPA Regional (lintas kabupaten/kota), dan saat ini belum dilakukan pengelolaan oleh Propinsi karena masih dilakukan oleh Kabupaten di Kartamantul.	Pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan baru, merehabilitasi TPA Regional, asal ada pengelola yang difinitif	Saat ini penanganan TPA Regional ada Kabupaten/kota secara bergantian sesuai kesepakatan di Kartamantul, dan belum ada pengelola yang difinitif, sehingga belum optimal pengelolaannya

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini		Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
					Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3		4	5	6	7
15	Jumlah TPA Sampah yang Menggunakan Sistem Sanitary Landfill	2,00	Jml	2 buah	Pembangunan TPA yang menggunakan sistem Sanitary Landfill ada di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul, dan kewenangan sepenuhnya berada di kabupaten yang bersangkutan bukan di Propinsi.	Pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan TPA Regional tersebut	Karena pengelolaan TPA berada di kabupaten, maka Propinsi tidak bisa memfasilitasinya, kecuali kabupaten yang bersangkutan memintanya
16	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	0,590	%	0,09 %	Penyediaan listrik yang dilakukan oleh propinsi untuk meningkatkan rasio kelistrikan di kabupaten/kota karena keterbatasan anggaran yang dimiliki kabupaten kota		Kewenangan penyediaan listrik untuk perdesaan berada di kabupaten/kota, dengan keterbatasan anggaran maka untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di DI Yogyakarta, maka propinsi memfasilitasi penyelesaian masalah pembangunannya
17	Peningkatan Kapasitas Energi Listrik	0,47	%	1,5 %			
18	Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air	6,00	%	6 %	Kebutuhan Air di daerah sulit air, dilakukan dengan mengambil air dalam pada cekungan air tanah, melalui cara pengeboran, Kewenangan propinsi berada pada cekungan lintas kabupaten kota		Pengambilan air tanah melalui sumur dalam yang tidak dapat dikontrol dan dibatasi di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) dapat menurunkan muka air tanah;

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini		Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
					Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3		4	5	6	7
19	Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian	0,37	%	0,37 %	Kewenangan Propinsi ada di usaha pertambangan lintas kabupaten/kota, dengan cara meningkatkan nilai tambah pada produksi pertambangan tersebut		Nilai tambah industri pertambangan masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya industri pengolahan yang mengubah mineral bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi
20	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar	100	%	1,00	Kewenangan propinsi berada pada pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar lintas kabupaten kota, dengan menyeimbangkan antara kebutuhan dan kebutuhan bahan bakar, baik bahan bakar dari minyak bumi maupun bahan bakar dari non minyak bumi.		Masih adanya ketidaklancaran distribusi bahan bakar besubsidi khususnya LPG tabung 3 Kg di beberapa wilayah terpencil yang disebabkan karena belum merata sebaran sub penyalur/ pangkalan di kabupaten

## 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta tersebut.

Hasil identifikasi Dinas PUP-ESDM DIY tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2010-2014.

Visi, Misi dan Program Calon Gubernur DIY Tahun 2012-2017 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD DIY pada tanggal 21 September 2012 dengan tema “Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru” merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma „*among tani*” menjadi „*dagang layar*”, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan.

Perubahan paradigmatis ini paralel, bahkan terdukung oleh kebijakan ekonomi nasional dengan ditempatkannya wilayah Kulon Progo dalam program MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia).

Pembangunan di wilayah Kulon Progo meliputi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, Bandara Internasional, Kawasan Industri, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Wisata Maritim, serta Kawasan Industri Baja yang mengandung *deposit vanadium*, yang di dunia hanya ditemukan di Kulonprogo dan Meksiko. Selain itu, juga direncanakan pembangunan Pelabuhan Samudera untuk memfasilitasi transportasi ekspor produk-produk hasil industri.

Secara konseptual, strategi pembangunan yang meletakkan wilayah Pantura sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*), asas pemerataannya sudah sulit dipenuhi. Akibatnya, terjadi marginalisasi di luar *growth-pole*, di Jawa bagian Selatan. Makin padatnya transportasi di jalur utara membawa implikasi melemahnya *carrying capacity* Pantura sebagai *growth-pole*. Konsekuensinya, perlu melakukan kaji ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara komprehensif, menyeluruh dan lengkap, dengan menempatkan Jawa bagian Selatan sebagai lokasi penyebaran pertumbuhan. Maka, mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansel) dengan berkembangnya klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan selatan-selatan, menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 -2017 dirumuskan sebagai berikut :

**“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsional melaksanakan Pengaturan, Pembinaan dan pengawasan (trubinwas) urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan yaitu :

No	Kondisi 5 tahun kedepan	Peran Dinas PUP-ESDM
1	2	3
1	Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih <b>berkarakter</b> dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiaikan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter	Melalui Bidang Cipta Karyadan Bidang Perumahan dengan didukung bidang lainnya diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam

	sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya	mewujudkan pencapaian kondisi “lebih berkarakter” dan “Berbudaya” melalui, kegiatan-kegiatan yang mengikutkan masyarakat sehingga menjadi motor penggerak pembangunan.
2	Daerah Istimewa Yogyakarta yang <b>berbudaya</b> dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.	
3	Daerah Istimewa Yogyakarta yang <b>maju</b> dimaknai sebagai masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. DIY yang Maju juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis pada ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga perguruan tinggi harus menjadi pusat keunggulan -- center of excellence-- yang sekaligus memiliki tiga predikat, sebagai teaching, research and entrepreneurial university.	Melalui Bidang Bina Marga, Bidang Cipta karya, dan Bidang Perumahan diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “lebih maju” dan “merata” melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan minat masyarakat serta kondisi infrastruktur lebih baik, sehingga masyarakatnya akan maju dan makmur.

4	Daerah Istimewa Yogyakarta yang <b>mandiri</b> adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	Melalui Bidang Cipta karya, Bidang Sumberdaya Air, Bidang Tata Ruang, Bidang Energi Sumberdaya Mineral diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi masyarakat yang mandiri, sejahtera untuk menyongsong peradaban baru yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.
5.	Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta yang <b>sejahtera</b> dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.	
6.	<b>Menyongsong Peradaban Baru</b> dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.	

## 2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Dari keempat Misi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas, maka misi keempat adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral. Misi keempat tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral, berperan agar infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui :

- Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan;
- Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.
- Pemenuhan listrik perdesaan bagi masyarakat kurang mampu, pemanfaatan energi baru terbarukan, konservasi energi, lancarnya bahan bakar bersubsidi, serta memfasilitasi pengolahan bahan tambang yang mempunyai nilai tambah.
- Pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor. 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Misi 4 : Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Mewujudkan peningkatan pelayanan publik dalam kondisi mantap	Mewujudkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Persentase kesesuaian program/kegiatan di wilayah DIY dengan sasaran yang telah ditetapkan.
		Mewujudkan Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau	Persentase Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan memadai
		Mewujudkan Pemenuhan listrik perdesaan bagi masyarakat kurang mampu, energi baru terbarukan, konservasi energi, nilai tambah bahan tambang serta lancarnya bahan bakar	Persentase peningkatan listrik perdesaan, energi baru terbarukan, konservasi energi, nilai tambah bahan tambang serta lancarnya bahan bakar
		Meningkatkan kualitas Pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukannya

### **3. Program Pembangunan :**

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 – 2017, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas PUP-ESDM berdasarkan visi, misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

**Misi 4 : Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.**

#### **I. Urusan Pekerjaan Umum**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
7. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
8. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
10. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
12. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
13. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
14. Program Pengelolaan Persampahan
15. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
16. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
17. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
18. Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong
19. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan
20. Program Pengendalian Banjir
21. Program Pelayanan Jasa Pengujian
22. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
23. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

#### **II. Urusan Perumahan**

1. Program Pengurangan Kawasan Kumuh
2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
3. Program Pengembangan Perumahan

#### **III. Urusan Penataan Ruang**

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### **IV. Urusan ESDM**

1. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan
3. Program Pembinaan , Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan , pendayagunaan Air Tanah
4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi
5. Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar
6. Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan

#### **V. Keistimewaan DIY**

1. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
2. Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan DIY

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas PUP-ESDM DIY adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 3 k ementerian yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke tiga kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum**

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014.

##### **3.3.1.1. Kondisi Pekerjaan Umum**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

- a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
- b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Yogyakarta sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
- e. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- f. Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta.
- g. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- h. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR, akibat masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.
- i. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan perusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

### **3.3.1.2. VISI Kementerian Pekerjaan Umum**

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

## **“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.**

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

### **3.3.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum**

Misi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional

### **3.3.1.4. Tujuan**

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

#### **3.3.1.5. Sasaran**

Sasaran strategis Kementerian PUDalam periode 2010-2017 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung

peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.

6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

### **3.3.2. Telaah Renstra pada Kementerian Perumahan rakyat**

Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014.

#### **3.3.2.1. Kondisi Perumahan Rakyat**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

- a. **Keterbatasan penyediaan rumah.** Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.
- b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
- c. Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
- d. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
- e. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.
- f. Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum

efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan.

- g. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/ memperbaiki rumah.

### **3.3.2.2. Visi Kementerian perumahan Rakyat**

Visi dari Kementerian Perumahan rakyat adalah :

**“Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni “**

Visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani.

### **3.3.2.3. Misi Kementerian perumahan Rakyat**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal.
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

### **3.3.2.4. Tujuan**

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.
4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan.

7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman.
9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman
10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman.

### **3.3.2.5. Sasaran Strategis**

Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

1. Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Terlaksana fasilitasi PSU Kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 700.000 unit.
3. Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa.
4. Terlaksana pembangunan rumah susun sederhana berupa Rusunawa sebanyak 36.480 unit.
5. Terlaksana pembangunan Rumah Khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah sederhana sewa dan rumah pasca bencana.
6. Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa pembangunan baru sebanyak 50.000 unit.
7. Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa peningkatan kualitas sebanyak 50.000 unit.
8. Terlaksana fasilitasi penyediaan PSU Perumahan Swadaya berupa bantuan stimulan PSU Swadaya sebanyak 50.000 unit.
9. Terlaksana fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi lahan dan bangunan rumah bagi MBR sebanyak 30.000 unit.
10. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal.
11. Terlaksana penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 1.350.000 unit.
12. Meningkatnya mobilisasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Terselenggara fungsi pelayanan bidang perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah (33 Provinsi).
14. Terlaksana DAK Perumahan dan Permukiman berupa fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 320.000 unit.
15. Terlaksana kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) bidang perumahan dan permukiman.

16. Terselenggara tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien.

### **3.3.3. Telaah Renstra pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral**

Renstra Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 04 tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2010-2014.

#### **3.3.3.1. Kondisi Energi dan Sumberdaya Mineral**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian ESDM yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

- a. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM.
- b. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM.
- c. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah kehutanan
- d. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenaga listrikan oleh pemerintah.
- e. Rasio desa berlistrik sekitar 90% sehingga, masih 10% perlu desa yang belum mempunyai akses tenaga listrik.
- f. Masih banyaknya perizinan Kjawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal.
- g. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin (PATTI) serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.

#### **3.3.3.2. VISI Kementerian Energi Sumberdaya Mineral**

Visi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2014.

Adapun Visi tersebut adalah :

**“ Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”**

#### **3.3.3.3. MISI Kementerian ESDM**

Misi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kementerian ESDM

Misi Kementerian ESDM adalah :

1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada energi, mineral dan informasi geologi
3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral
4. Meningkatkan kemampuan dalam negeri mengelola energi, mineral, dan geologi
5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral
6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian usaha energi dan mineral
7. Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor ESDM
9. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

#### **3.3.3.4. Tujuan Strategis**

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian ESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun (di akhir tahun 2014) :

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik
2. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara
4. Terwujudnya peningkatan peran ESDM dalam pembangunan daerah
5. Terwujudnya pengurangan beban subsidi di BBM dan Listrik
6. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor
7. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan.

#### **3.3.3.5. Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian ESDM setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun, mulai tahun 2010 sd 2014.

#### **3.3.4. Telaah Renstra Dinas Terkait Pemda Kabupaten/Kota**

##### **1. Kota Yogyakarta**

###### **a. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah**

**Visi** Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta

## **" Terwujudnya Ruang Kawasan Dan Sarana Prasarana Kota Yang Berkualitas , Bermanfaat Bagi Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan"**

Dengan Visi seperti tersebut diatas maka Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta mempunyai **Misi** sebagai berikut :

1. Pengelolaan kebinamargaan agar memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas
2. Pengelolaan pengairan dan drainase yang berkualitas,representative bangunan,memadai dan kelancaran aliran air
3. Pengelolaan perumahan , permukiman dan saluran air limbah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
4. Pengelolaan , penataan lampu penerangan jalan umum sampai ke jalan lingkungan dan lampu hias yang berkualitas
5. Pengelolaan dan penataan spot kawasan untuk mewujudkan identitas suatu kawasan tertentu

### **b. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dan sejalan dengan visi Kota Yogyakarta 2012-2016, serta paradigma baru pemerintahan saat ini yang menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme, maka telah dirumuskan **visi** dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk kondisi 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu :

**"Menjadi Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup yang Handal dalam Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Berwawasan Lingkungan."**

Berdasarkan visi tersebut maka telah ditetapkan **misi** dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Mewujudkan ruang terbuka hijau kota yang fungsional dan estetik.
3. Mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang handal untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

## **2. Kabupaten Bantul**

### **a. Dinas Pekerjaan Umum**

Untuk mendukung VISI Pemerintah Kabupaten Bantul " Bantul Progotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis ", maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul menetapkan VISI sebagai berikut :

**"Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Jalan Dan Cipta Karya di Kabupaten Bantul "**.

Untuk mewujudkan VISI Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul tersebut disusun MISI Organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan di sektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan pelayanan di sektor Perumahan dan Permukiman serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul.
3. Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor Kesehatan, Pendidikan, Perdagangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bantul.
4. Melaksanakan penyusunan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan;
5. Memberikan pelayanan yang optimal dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan sampah, tinja, taman dan permakaman.

#### **b. Dinas Sumber Daya Air**

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul menetapkan Visi sebagai berikut :  
**“Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Air Yang Berkualitas Dan Berkuantitas Serta Terwujudnya Pengolahan Sumber Daya Alam Yang Berpihak Kepada Masyarakat Dan Berwawasan Lingkungan”**

Untuk mewujudkan visi tersebut , misi organisasi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Memberikan pelayanan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan pengoptimalisasian fungsi sarana bangunan pengairan
2. Melindungi kawasan budidaya (permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan s ebagainya) dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir
3. Mengelola potensi sumber daya air, mineral dan energi, serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi
4. Memberikan pelayanan pengelolaan mineral dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan
5. Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang ketugasannya

### **3. Kabupaten Kulon Progo**

#### **a. Dinas Pekerjaan Umum**

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo menetapkan visi sebagai penjabaran dari visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2016, yaitu:

**“Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Handal”**

Adapun misi yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur untuk mewujudkan tata kelola Dinas yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Meningkatkan sarana prasarana dan kelestarian sumber daya air
4. Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi wilayah
5. Meningkatkan pelayanan terhadap penyediaan rumah layak huni
6. Meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana keciptakarya
7. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan jasa konstruksi
8. Meningkatkan pelayanan kebersihan dan pertamanan

**b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perindag dan ESDM Kabupaten Kulon Progo menetapkan Visi untuk tahun 2011 – 2016 sebagai berikut :

**“ Menjadi Akselarator Yang Handal Bagi Usaha Ekonomi Kerakyatan”**

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi yang akan diemban SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM yaitu:

1. Mewujudkan produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi baik secara kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas.
2. Mewujudkan usaha perdagangan yang mandiri, berdaya saing dan profesional melalui penguatan / pemberdayaan sumber daya lokal
3. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya mineral, geologi, energi, dan tata lingkungan.
4. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance.

#### **4. Kabupaten Gunungkidul**

**a. Dinas Pekerjaan Umum**

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah **“Terwujudnya pelayanan dan penyediaan infrastruktur pengairan, kebinamargaan, dan keciptakarya yang memadai untuk mendukung Gunungkidul yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.”**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan dan mengurangi risiko daya rusak air.
2. Melaksanakan pelayanan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan memantapkan integrasi wilayah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wilayah.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan daerah dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
5. Menyediakan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum yang mantap untuk mendukung pengembangan sektor-sektor pembangunan.
6. Mewujudkan dinas pekerjaan umum sebagai penyelenggara pelayanan infrastruktur yang profesional, produktif dan akuntabel.

**b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan (Perindagkoptam)**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana Dinas Perindagkoptam Kabupaten Gunungkidul harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Adapun Visi Dinas Perindagkoptam Kabupaten Gunungkidul adalah :

**“Menjadi Penggerak Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Menuju Kesejahteraan Masyarakat.”**

Untuk mendukung Visi Dinas Perindagkoptam Kabupaten Gunungkidul, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Pemanfaatan hasil-hasil sumber daya alam sebagai bahan baku industri dan kerajinan untuk pengembangan IKM yang produktif dan berdaya saing.
2. Peningkatan pertumbuhan dan kualitas pengelolaan usaha perdagangan.
3. Peningkatan pengelolaan sentra industri potensial untuk mendukung pengembangan pariwisata.
4. Pengembangan kelembagaan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM, serta pertambangan yang lebih sehat dan dinamis.
5. Pengembangan sumber daya manusia di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, serta pertambangan terampil, profesional dan peduli.
6. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air dan energi baru dan terbarukan.

7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN.

## 5. Kabupaten Sleman

### a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah  
**“ Terwujudnya Pelayanan Kebinamargaan, Permukiman, Sanitasi, Penataan Bangunan Dan Perumahan Yang Lebih Berkualitas Dan Responsif Gender”**.

Untuk mendukung Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman , maka ditetapkan misi sebagai berikut

1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan
2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan
4. Meningkatkan cakupan layanan sarana, prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas

### b. Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral

Terlaksananya program dan kegiatan akan membawa pengaruh terhadap pencapaian tujuan maupun visi dan misi yang telah dicanangkan. Adapun **visi** dari Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral (Dinas SDAEM) Kabupaten Sleman adalah:

**“terwujudnya pengelolaan sumber daya air, energi dan mineral yang berwawasan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat”**.

Visi Dinas SDAEM Kabupaten Sleman tersebut diterjemahkan kedalam misi yang akan dicapai dengan memperhatikan lingkungan internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaiannya. Misi dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman yaitu :

1. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelayanan masyarakat dan swasta pada bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Mempertahankan standar kualitas dan kuantitas daya dukung lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM dan RenstraSKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan dalam upayamenyusun daftarfaktor

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PUP-ESDM D.I. Yogyakarta yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUP-ESDM**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**

Visi: “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
4	Misi 4 : Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.			
	Program-Program pada Dinas PUP-ESDM			
1	Urusan Pekerjaan Umum			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan energi sumberdaya mineral.	Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait.

1	2	3	4	5
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang melokata terbatas	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan, serta diperlukan Sistem informasi yang memadai	Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik.	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan propinsi yang dipelihara dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi	Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, sesuai dengan standar NSPM	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penangangan jalan
6	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan propinsi dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi	Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan peningkatan jalan	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penangangan jalan
7	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan			
8	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Belum optimalnya peran Lembaga Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah untuk pembangunan, karena masih ada masyarakat yang masih belum setuju harga yang diminta	Adanya gejolak harga tanah, bila tanah tersebut akan akan dipakai untuk pembangunan	Adanya optimisme masyarakat akan adanya peningkatan ekonomi disekitar proyek pembangunan
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terdapat defisit imbalanced air irigasi pada beberapa DI / Water District di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur	Tidak terintegrasinya DI /Water District yang menjadi kewenangan propinsi	Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang tergabung ke dalam P3A.

1	2	3	4	5
10	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-ngelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;	Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasa-lahan banyak melibatkan daerah	Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang meliwati kota untuk ikut mengelola dan menguri-uri sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelo-laan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir
11	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak se-penuhnya berada di propinsi, yaitu Wilayah Sungai Progo dan Opak menjadi kewenangan pusat.	Belum terpetanya semua daerah yang perlu penambahan air baku sesuai dengan prioritas	Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola air baku yang di ambil dari mata air setempat
12	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	Adanya kesulitan mencari lokasi sumber air, yang akan dipakai untuk air minum	Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak
13	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyrakat tentang pengelolaan air limbah yang benar	Belum semua penduduk mengelola air limbah yang benar dan ramah likungan	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola air limbah yang benar
14	Program Pengelolaan Persampahan	Belum sepenuhnya pengelolaan TPA Regional Piyungan, ditangani dengan baik, karena pengelolaannya masih dilakukan bersama kabupaten/kota dalam Kartamantul yang dilakukan secara bergantian antara kabupaten /kota tersebut, padahal sebetulnya TPA Regional pengelolannya dapat dilakukan oleh propinsi	Belum sepenuhnya kabupaten Bantul rela akan menyerahkan pengelolaan persampahan TPA Regional kepada Propinsi, karena saat ini sampah sudah menjadi komoditi ekonomi.	Saat ini sudah di undangkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2013, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi acuan Kabupaten kota dalam pengelolaan sampahnya
15	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung akseibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah	Belum terpetanya seluruh kebutuh-an sarana dan sarana dasar pendukung akseibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan	Adanya kemauan masyarakat untuk mendukung program kebutuh-an sarana dan sarana dasar pendukung akseibilitas
16	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan			

1	2	3	4	5
17	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi, karena sarana dan prasarana masih belum memadai	Belum semua pengembangan dan pengelola agropolitan dan minapolitan, mau berbagi kegiatan untuk memajukan kawasannya	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
18	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat.	Belum berfungsinya sistem drainase sesuai dengan fungsi jaringan (primer, sekunder, tersier) se-rta, Kurangnya kesadaran masyarakat dlm ikut pemeliharaan drainase;	Tersedianya forum koordinasi antar daerah Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul), yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan drainase antar wilayah kabupaten/kota
19	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Belum Seluruh bangunan gedung negara dikelola dengan benar mengikuti peraturan perundangan yang berlaku bagi bangunan gedung	Belum seluruh pembangunan bangunan gedung diselenggarakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan	Adanya keinginan pengelola bangunan gedung, untuk menyelenggarakan secara tertib administrasi dan teknis
20	Program Pengendalian Banjir	Semakin banyaknya areal terbangun pada kawasan resapan air hujan, sehingga aliran limpasan (run off) semakin tinggi; serta belum optimalnya pembiayaan dalam upaya pengendalian daya rusak air	Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah	Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang meliwati kota untuk ikut mengelola dan menguri-uri sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir

1	2	3	4	5
21	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Belum sepenuhnya penyedia jasa mengujikan hasil pelaksanaan konstruksi pada BPIPBPJK dikarenakan peralatan uji yang masih kurang.	Belum seluruh komponen uji yang diminta oleh penyedia jasa terpenuhi di BPIPBPJK, serta semakin berkurangnya tenaga laboratorium dikarenakan banyak yang sudah pensiun	Sudah tersertifikatnya laboratorium Uji di BPIPBPJK ini, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, akan hasil uji di laboratorium ini
22	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand	Masih lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar	Adanya potensi kegiatan konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dengan digelontorkannya anggaran keistimewaan, terutama untuk kegiatan konstruksi yang menyangkut dengan kebudayaan.
23	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang pekerjaan umum	Masih belum optimalnya pelayanan informasi dikaitkan dengan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum	Adanya portal Informasi di Pusat Informasi Pengembangan pemukiman daan bangunan, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses, informasi harga, pedoman teknis, peraturan yang terkait dengan pekerjaan umum dan perumahan
<b>II</b>	<b>Urusan Perumahan</b>			
1	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan pada permukiman kumuh, serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan pada permukiman kumuh, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Kekurang mampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga terjadinya kawasan menjadi kumuh.	Masih kentalnya adat masyarakat bergotong royong, sehingga menjadi potensi untuk membangun kawasan.
2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam memberdayakan masyarakat untuk	Masih belum tertibnya masyarakat berperilaku bersih dan sehat pada	Adanya kemauan masyarakat untuk bergotong royong untuk member-

1	2	3	4	5
		berperilaku bersih dan sehat pada lingkungan perumahan.	lingkungannya	sihkan lingkungannya agar lingkungan bisa bersih dan sehat
3	Program Pengembangan Perumahan	Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak huni, yang semakin meningkat di perkotaan dan perdesaan.	Kekuarangmampuan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah untuk mempunyai rumah yang layak huni	Masih kentalnya adat masyarakat bergotong royong, sehingga menjadi potensi untuk membangun rumah yang layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu.
<b>III</b>	<b>Urusan Penataan Ruang</b>			
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.	Masih belum terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan perda RTRW Provinsi yang ada.	Sudah adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 2 tahun 2010, sehingga pemanfaatan ruang dapat disesuaikan dengan perda ini.
2	Program Pemanfaatan Ruang			
3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain, serta belum tertatanya ruang warisan budaya, yang menjadi ciri keistimewaan DIY	Belum semua wilayah di DIY, terdeteksi adanya zonasi yang berbahaya, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang masih terkendala	Sudah dimasukkannya aturan tentang zonasi yang sudah terdeteksi, pada perda kabupaten kota.
4	Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY			
<b>IV</b>	<b>Urusan ESDM</b>			
1	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Belum optimalnya penyediaan listrik perdesaan bagi masyarakat kurang mampu, serta belum terjangkaunya jaringan listrik untuk perdesaan disebabkan keterbatasan anggaran daerah	Tidak semua penduduk mampu untuk menyambung listrik, dikarenakan masalah ekonomi, serta masih belum meratanya jaringan listrik untuk perdesaan	Adanya kemauan masyarakat untuk menyambung listrik.

1	2	3	4	5
2	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan	Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti biogas, mikro hidro dll yang disebabkan keterbatasan penguasaan teknologi	Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai energi baru terbarukan pengganti energi fosil yang selama ini dipakai	Adanya kemauan masyarakat untuk memakai energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan
3	Program Pembinaan , Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan , Pendayagunaan Air Tanah	Belum optimalnya pengawasan pengambilan air tanah melalui sumur dalam terutama di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) ;	Terjadinya penurunan permukaan air tanah setiap tahun, mengakibatkan ketersediaan air tanah yang semakin berkurang	Adanya usaha dari semua pihak untuk mengisi adanya air tanah, antara lain dengan membuat sumur resapan air .
4	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	Belum efisiennya konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi dan kemampuan SDM yang masih terbatas	Belum semua gedung bangunan milik pemerintah mempunyai budaya hemat energi, sehingga pemakaian energinya berlebihan	Adanya usaha dari pengelola gedung milik pemerintah mulai memikirkan penghematan energi, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dipunyai
5	Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar	Masih adanya ketidaklancaran distribusi bahan bakar besubsidi khususnya LPG tabung 3 Kg di beberapa wilayah terpencil yang disebabkan karena belum merataanya sebaran sub penyalur/pangkalan di kabupaten	Masih adanya tabung LPG 3 Kg yang meledak dikarenakan tabungnya tidak memenuhi standar.	Semakin sadarnya masyarakat untuk memakai energi yang murah dan ramah lingkungan
6	Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengubah mineral bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.	Belum seluruhnya menerapkan industri pengolahan tambang yang ramah lingkungan, serta mengolah hasil tambang sehingga mempunyai nilai tambah	Adanya usaha pengelola usaha pertambangan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.4.1. Rencana Struktur Tata Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

##### A. Sistem Perkotaan;

- 1) PKN Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), meliputi Kota Yogyakarta, Kecamatan Depok, sebagian Kecamatan Ngaglik, sebagian Kecamatan Mlati, sebagian Kecamatan Godean, sebagian Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon, sebagian Kecamatan Banguntapan;
- 2) PKW Kawasan Perkotaan Sleman, Bantul;
- 3) PKNp Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari;
- 4) Kawasan Perkotaan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Pundong, Jetis, Pleret, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen, Tepus, Ponjong, Mlati, Ngaglik, Prambanan, Piyungan, Srandakan, Godean.

##### B). Sistem Prasarana Wilayah

Sistem Prasarana Wilayah meliputi :

###### 1) Jaringan Jalan

- a. jalan bebas hambatan : Yogyakarta - Bawen, Yogyakarta - Solo, Yogyakarta – Cilacap;
- b. jalan arteri primer : ruas jalan Yogyakarta-Semarang, Jalan Lingkar Yogyakarta, Yogyakarta-Surakarta, Yogyakarta-Cilacap; dan
- c. jalan kolektor primer : ruas jalan Yogyakarta, Wonosari, Ngeposari, Pacucak, Bedoyo, Duwet, Prambanan–Piyungan, Prambanan–Pakem, Pakem Tempel, Klangon–Tempel, Sedayu–Pandak, Palbapang–Barongan, Sampakan–Singosaren, Ruas jalan Pantai Selatan (PANSELA), jalan Yogyakarta–Kaliurang, jalan Yogyakarta–Parangtritis, Yogyakarta–Nanggulan (Kenteng), Sentolo–Nanggulan-Kalibawang, Dekso–Samigaluh, Dekso–Minggir–Jombor, Bantul–Srandakan-Toyan, Wonosari-Semin-Bulu, Wonosari-Nglipar, Semin-Blimbing, Pandanan-Candirejo, Sambipitu– Nglipar-Semin- Nglipar-Gedangsari, Wonosari–Baron–Tepus–Baran- Duwet, Sentolo–Pengasih-Sermo, Kembang–Tegalsari-Temon, Galur-Congot, Sentolo-Galur, Milir–Dayakan-Wates, Prambanan-Piyungan, Prambanan–Pakem–Tempel-Klangon,

Palbapang-Samas, Sampakan-Singosaren, Sedayu-Pandak, Palbapang-Barongan, Srandakan-Kretak, Yogyakarta-Pulowatu, Yogyakarta-Imogiri-Panggung, Panggang-Parangtritis, Playen-Paliyan-Panggung, Pandean-Playen, Gading-Gledak, Sumur-Tunggul-Sumuluh-Bedoyo.

- d. Pada sistem jaringan jalan jaringan jalan primer ditetapkan terminal penumpang sebagai berikut :
  - 1. terminal tipe A di Kota Yogyakarta;
  - 2. terminal tipe B di Kabupaten Sleman;
  - 3. terminal tipe A di Kabupaten Gunungkidul;
  - 4. terminal tipe A di Kabupaten Kulon Progo; dan
  - 5. terminal tipe B di Kabupaten Bantul.
- e. Pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal barang sebagai berikut :
  - 1. terminal barang Sedayu di Kabupaten Bantul untuk jangka pendek dan Sentolo di Kabupaten Kulon Progo untuk jangka panjang; dan
  - 2. sub terminal barang sebagai hub di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- f. Pada jalan arteri/kolektor primer ditetapkan rest area di Tempel dan Kalasan Kabupaten Sleman, Temon Kabupaten Kulon Progo dan Bunder Kabupaten Gunungkidul.

## 2). Jaringan Jalan Kereta Api

- a. jaringan jalan kereta api Jakarta– Yogyakarta- Surabaya;
- b. jalur ganda Kutoarjo–Yogyakarta–Surakarta;
- c. jaringan jalan kereta api Metropolitan Yogyakarta–Surakarta; dan
- d. jaringan jalan kereta api Parangtritis–Yogyakarta–Borobudur.

Sistem Jaringan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:

- a. Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang;
- b. Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api;
- c. Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandara Adisucipto;
- d. Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan; dan
- e. Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus Bahan Bakar Minyak.

## 3) Jaringan Prasarana Transportasi Laut

jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di Kabupaten Kulon

Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai.

4) Jaringan Prasarana Transportasi Udara

- a. bandara Adisutjipto sebagai Pusat Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung (auxilliary field ).
- b. memperkuat simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan.

5) Jaringan Prasarana Telematika

- a. pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional di setiap permukiman perdesaan;
- c. merencanakan pusat pelayanan dan teknologi informasi Daerah di kota Yogyakarta; dan
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata.

6) Prasarana Sumber Daya Air

Dengan mengembangkan :

- a. waduk Tinalah di Kabupaten Kulon Progo;
- b. embung-embung di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman;
- c. tandon air dan kolam tampungan di semua Kabupaten dan Kota di Daerah;
- d. sumber air sungai bawah tanah Bribin, Seropan, Ngobaran, dan Baron di Kabupaten Gunungkidul;
- e. daerah Irigasi Sistem Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo, Sistem Mataram Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan jaringan irigasi lainnya di Kabupaten/Kota;
- f. waduk Sermo, bendung Sapon di Kabupaten Kulon Progo, embung Tambakboyo Kabupaten Sleman, bendung Tegal Kabupaten Bantul dan prasarana lainnya;
- g. sumur resapan dan biopori di semua wilayah Daerah; dan
- h. air tanah di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman, Wates dan Wonosari.

7) Jaringan Energi

- a. Rencana Umum Energi Daerah disesuaikan dengan Rencana Umum Energi Nasional;
- b. jaringan listrik tegangan menengah dan jaringan listrik tegangan rendah di daerah terpencil;
- c. jaringan pipa minyak dan gas bumi Cilacap–Yogyakarta;

- d. sumber energi angin dan gelombang laut di wilayah pantai Selatan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul;
  - e. energi air di Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul;
  - f. energi tenaga surya di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; dan
  - g. energi biomassa dan bahan bakar nabati serta bahan bakar lainnya di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- 8) Prasarana Lingkungan
- a. unit pengelolaan air minum di seluruh kabupaten/kota;
  - b. instalasi pengolahan air limbah/limbah terpusat untuk area pelayanan Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
  - c. tempat Pengolahan Sampah Terpadu untuk area pelayanan Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
  - d. sistem jaringan drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta; dan
  - e. jalan lingkungan di seluruh Kabupaten/Kota

### **3.4.2. Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Rencana pola ruang wilayah provinsi yang termuat dalam Perda RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

#### **A. Kawasan Lindung**

1. Kawasan Lindung Bawah :
  - a. penetapan hutan lindung seluas 2.312,8000 ha di :
    - 1) Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri seluas 1.041,2000 ha;
    - 2) Kabupaten Kulon Progo terletak di Kecamatan Kokap seluas 254,9000 ha; dan
    - 3) Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Karangmojo, Playen dan Panggang seluas 1.016,7000 ha.
  - b. penetapan hutan fungsi lindung di :
    - 1) Kabupaten Sleman terletak di Kecamatan Tempel;
    - 2) Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo;
    - 3) Kabupaten Kulon Progo terletak di Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, dan Temon; dan
    - 4) Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Gedangsari, Ngawen, dan Semin, dan zone Gunungsewu meliputi Kecamatan Ponjong, Purwosari, dan Rongkop.
  - c. penetapan kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Kawasan Lindung Setempat

- a. penetapan Kawasan Sempadan Pantai di sepanjang dataran Pantai Selatan dengan daerah selebar minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. penetapan Kawasan Sempadan Sungai :
  - 1) sungai di luar kawasan perkotaan :
    - (a) sungai tak bertanggung pada Sungai Bogowonto, Progo dan Opak selebar 100 meter diukur dari tepi badan sungai, untuk sungai lainnya 50 meter diukur dari tepi badan sungai; dan
    - (b) sungai bertanggung 5 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
  - 2) sungai di dalam kawasan perkotaan bertanggung dan tak bertanggung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- c. penetapan kawasan sempadan waduk, embung, telaga dan laguna yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul meliputi dataran sepanjang tepinya yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimum 50 meter dan maksimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- d. penetapan kawasan sempadan Mata Air yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul meliputi dataran di sekitarnya dengan radius minimum 200 meter.

## 3. Kawasan Suaka Alam

- a. penetapan cagar alam geologi dan hutan penelitian terletak di Kabupaten Gunungkidul;
- b. penetapan cagar alam di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman seluas 0.0150 ha dan Cagar Alam di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul seluas 11,4000 ha;
- c. penetapan taman hutan raya yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung terletak di Kecamatan Patuk dan Playen Kabupaten Gunungkidul seluas 617 ha; dan
- d. penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terletak di seluruh Kabupaten/Kota.

## 4. Kawasan Suaka Margasatwa

penetapan kawasan suaka margasatwa terletak di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo seluas 181 ha dan di Kecamatan Paliyan Gunungkidul seluas 434,6000 ha.

## 5. Kawasan Bencana Alam

- a. penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman;

- b. penetapan kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul;
- c. penetapan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo;
- d. penetapan kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo;
- e. penetapan kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota;
- f. penetapan kawasan rawan gempa bumi di Kabupten/Kota; dan
- g. penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

## **B. Kawasan Budidaya**

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
  - a. kawasan hutan produksi di Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha;
  - b. kawasan hutan produksi Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian
  - a. penetapan kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman; dan
  - b. penetapan kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
3. Kawasan Peruntukan Pertambangan
  - a. Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong, Panggang, dan untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin;
  - b. Kabupaten Kulon Progo yaitu :
    - 1) Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangaan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih; dan
    - 2) Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.
  - c. Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir.
4. Kawasan Peruntukan Industri
 

penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 61 kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
5. Kawasan Peruntukan Pariwisata
  - a. kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

- b. kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman; dan
  - c. kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
6. Kawasan Peruntukan Permukiman
- penetapan kawasan peruntukan permukiman desa di luar kota-kota dan kota di dalam kota-kota adalah sesuai dengan :
- a. kota besar : Kota Yogyakarta;
  - b. kota sedang: IKB Bantul, IKB Sleman, IKB Wates, IKB Wonosari, IKK Depok; dan
  - c. kota kecil : IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKK Srandakan, IKK Kretek, IKK Piyungan IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Imogiri, IKK Pleret, IKK Sentolo, IKK Nanggulan, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, IKK Temon, IKK Galur, IKK Panjatan, IKK Lendah, IKK Kokap, IKK Girimulyo; IKK Tempel, IKK Turi, IKK Pakem, IKK Godean, IKK Gamping, IKK Seyegan, IKK Prambanan, IKK Kalasan, IKK Mlati, IKK Ngaglik, IKK Patuk, IKK Playen, IKK Semanu IKK Karangmojo, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK Ngawen, IKK Ponjong, IKK Semin;
7. Kawasan Pendidikan Tinggi
- penetapan kawasan pendidikan tinggi :
- a. kawasan pendidikan tinggi meliputi kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;
  - b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul; dan
  - c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
8. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah :
- a. kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul; dan
  - b. kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul.
9. Kawasan Militer dan Kepolisian
- penetapan lokasi Kawasan Militer dan Kepolisian adalah :
- a. AAU dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
  - b. Lapangan Terbang TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gunungkidul;
  - c. Komplek Batalyon 403 TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sleman;

- d. Sekolah Polisi Negara di Kabupaten Bantul;
- e. Satuan Radar di Kabupaten Kulon Progo;
- f. Kompi Brimob Polda DIY Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
- g. Kompi Brimob Polda DIY Gondowulung di Kabupaten Bantul;
- h. Kompi Kavaleri dan Kompi Senapan C Yonif 403 Demak Ijo di Kabupaten Sleman.dan
- i. Kawasan latihan militer Paliyan di Kabupaten Gunungkidul.

### **3.4.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PUP-ESDM DIY dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan SKPD Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terdapat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan (pasal 144-152) Kelembagaan (pasal 153) Penyidikan (pasal 154)	Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan energi sumberdaya mineral..	Keterbatasan SDM di bidang penataan ruang	Kemajuan bidang teknologi komunikasi dan informasi
2		Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	Keterbatasan anggaran dan SDM	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiring perkembangan ekonomi masyarakat
3	Arahan pengendalian pemanfaatan ruang (pasal 114-142)	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan, serta diperlukan Sistem informasi yang memadai	Belum tersedianya data yang akurat, lengkap, berkualitas dan terupdate setiap periode/waktu	Kemajuan bidang teknologi komunikasi dan informasi; Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi dari pusat
4	Rencana pengembangan jaringan jalan (pasal 12, 13, 14)	Belum seluruhnya jalan dan jembatan propinsi dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi	Integritas dan komitmen kerja yang belum optimal dari pihak ketiga, pengawas dan perencana; Penggunaan infrastruktur yang melebihi kapasitas	Reformasi birokrasi dan pengetatan pengawasan pengguna jalan
5	Rencana pengembangan prasarana lingkungan (pasal 33, 34,35)	Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat.	Koordinasi yang belum optimal	Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6	Rencana pengembangan jaringan jalan (pasal 12, 13, 14)	Belum seluruhnya jalan dan jembatan propinsi yang dipelihara dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi	Keterbatasan SDM yang mengawasi infrastruktur	Peningkatan SDM yang berkualitas, ahli dalam bidangnya dan berintegritas
7	Rencana pengembangan prasarana sumber daya air (pasal 27, 28, 29)	Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa DI / Water District di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur	Peningkatan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun sehingga mengurangi imbuhan air tanah	Penataan ruang berbasis lingkungan hidup semakin digalakkan yang melindungi fungsi lindung kawasan dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
8	Rencana pengembangan prasarana sumber daya air (pasal 27, 28, 29)	Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di propinsi, yaitu Wilayah Sungai Progo dan Opak menjadi kewenangan pusat.	Belum terpetanya semua daerah yang perlu penambahan air baku sesuai dengan prioritas	Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola air baku yang di ambil dari mata air setempat
9	Rencana pengembangan prasarana sumber daya air (pasal 27, 28, 29)	Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-ngelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;	Egosektoral yang masih tinggi	Penataan ruang secara komprehensif semakin digalakkan yang melibatkan semua stakeholder dan mengharuskan semua sektor turut berperan aktif dalam penataan ruang
10	Rencana pengelolaan kawasan lindung (pasal 81)	Semakin banyaknya areal terbangun pada kawasan resapan air hujan, se-hingga aliran limpasan (run off) semakin tinggi; serta belum optimalnya pembiayaan dalam upaya pengendalian daya rusak air	Pengendalian pemanfaatan ruang masih belum berjalan secara optimal, arahan insentif, disinsentif yang belum jelas	Penambahan PPNS diharapkan dapat menjadi tonggak pengendalian pemanfaatan ruang
11	Rencana pengembangan prasarana lingkungan (pasal 33, 34,35)	Belum sepenuhnya penyedia jasa mengujikan hasil pelaksanaan konstruksi pada BPIPBPJK dikarenakan peralatan uji yang masih kurang.		BPIPBPJK sudah mulai berbenah diri dengan meningkatkan kapasitas pelayanannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
12	Rencana pengembangan prasarana lingkungan (pasal 33, 34,35)	Belum sepenuhnya pengelolaan TPA Regional Piyungan, ditangani dengan baik, karena pengelolaannya masih dilakukan bersama kabupaten/kota dalam Kartamantul yang dilakukan secara bergantian antara kabupaten /kota tersebut, padahal sebetulnya TPA Regional pengelolannya dapat dilakukan oleh propinsi	Belum sepenuhnya kabupaten Bantul rela akan menyerahkan pengelolaan persampahan TPA Regional kepada Propinsi, karena saat ini sampah sudah menjadi komoditi ekonomi.	Saat ini sudah di undangkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2013, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi acuan Kabupaten kota dalam pengelolaan sampahnya
13	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah	Keterbatasan anggaran daerah	Program pro rakyat semakin banyak dilaksanakan, dan semakin banyak LSM yang mengawasi berjalannya program tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program
14	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan (pasal 144-152)	Belum optimalnya peran Lembaga Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah untuk pembangunan, karena masih ada masyarakat yang masih belum setuju harga yang diminta	Pesimisme masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi seiring banyaknya kasus yang melibatkan pejabat pemerintah	Pelibatan masyarakat dalam setiap proses penataan ruang diharapkan dapat mendukung setiap program pemerintah
15	Rencana pengembangan prasarana lingkungan (pasal 33, 34,35)	Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	Keterbatasan sumber daya air di beberapa tempat	Partisipasi masyarakat, keterlibatan LSM dan swasta semakin tinggi untuk turut serta mengatasi permasalahan lingkungan dan kemiskinan
16	Rencana pengembangan prasarana lingkungan (pasal 33, 34,35)	Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar	Keterbatasan aparat/SDM	Partisipasi masyarakat, keterlibatan LSM dan swasta semakin tinggi untuk turut serta mengatasi permasalahan lingkungan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
17	Kawasan peruntukan permukiman (pasal 67, 68, 69)	Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi, karena sarana dan prasarana masih belum memadai	Belum semua pengembangan dan pengelola agropolitan dan minapolitan, mau berbagi kegiatan untuk memajukan kawasannya	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
18	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan (pasal 144-152)	Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang pekerjaan umum	Keterbatasan aparat/SDM	Pesatnya perkembangan teknologi informasi
19	Kawasan peruntukan permukiman (pasal 67, 68, 69)	Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak huni, yang semakin meningkat di perkotaan dan perdesaan	Hunian vertikal belum membudaya di DIY	Kebijakan pemerintah semakin mendorong berdirinya perumahan vertikal yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah
20	Kawasan peruntukan permukiman (pasal 67, 68, 69)	Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Keterbatasan lahan dan anggaran untuk pengembangan perumahan baru yang bisa diakses oleh masyarakat menengah ke bawah dan dekat dengan sumber penghidupan mereka	Kebijakan pemerintah semakin mendorong berdirinya perumahan vertikal yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah
21	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan (pasal 144-152)	Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam memberdayakan masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat pada lingkungan perumahan	Perumahan semakin dikuasai oleh sektor swasta yang berorientasi profit	Kebijakan pemerintah yang mendorong pengadaan perumahan untuk semua kalangan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
22	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan (pasal 144-152)	Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.	Egosektoral yang masih tinggi	Peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peduli terhadap tata ruang
23	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan (pasal 144-152)	Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain, serta belum tertatanya ruang warisan budaya, yang menjadi ciri keistimewaan DIY	Kebutuhan ekonomi masyarakat yang seringkali bertentangan dengan penataan ruang	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah dan peningkatan peran dan jumlah PPNS diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan penataan ruang yang efektif
24	Rencana pengembangan jaringan energi (pasal 30, 31, 32)	Belum optimalnya penyediaan listrik perdesaan bagi masyarakat kurang mampu, serta belum terjangkaunya jaringan listrik untuk perdesaan disebabkan keterbatasan anggaran daerah	Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai energi baru terbarukan pengganti energi fosil yang selama ini dipakai	Adanya kemauan masyarakat untuk memakai energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan
25	Rencana pengembangan jaringan energi (pasal 30, 31, 32)	Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti biogas, mikro hidro dll yang disebabkan keterbatasan penguasaan teknologi	Kebiasaan masyarakat yang sulit diubah Butuh sumber daya yang tidak sedikit untuk mengembangkan energi baru terbarukan	Kesadaran berbagai elemen masyarakat sudah mulai tumbuh untuk peduli dengan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat mendorong perkembangan sumber daya energi baru terbarukan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUP-ESDM DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
26	Rencana pengembangan prasarana sumber daya air (pasal 27, 28, 29)	Belum optimalnya pengawasan pengambilan air tanah melalui sumur dalam terutama di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) ;	Meningkatnya jumlah kebutuhan air bersih dengan semakin berkembangnya pembangunan	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah dan peningkatan peran dan jumlah PPNS diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan penataan ruang yang efektif
27	Rencana pengembangan jaringan energi (pasal 30, 31, 32)	Belum efisiennya konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi dan kemampuan SDM yang masih terbatas energi dan kemampuan SDM yang masih terbatas	Kebiasaan masyarakat yang sulit diubah Butuh sumber daya yang tidak sedikit untuk mengembangkan energi baru terbarukan	Kesadaran berbagai elemen masyarakat sudah mulai tumbuh untuk peduli dengan lingkungan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat mendorong perkembangan sumber daya energi baru terbarukan
28	Kawasan peruntukan industri (pasal 61, 62, 63)	Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengubah mineral bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.	Kebiasaan masyarakat sulit untuk diubah jika belum ada trigger	Teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi modal utama pengembangan industri kreatif

#### **3.4.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY dan Dinas PU/Perumahan/ESDM kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

#### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan

telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUP-ESDM adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PUP-ESDM diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUP-ESDM di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

### **3.5.1. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang**

1. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RTRW DIY tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota untuk peraturan yang lebih rinci;
2. Pentingnya review dan penyesuaian RTRW provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
3. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
4. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

### **3.5.2. Isu strategis Bidang Sumber Daya Air (SDA)**

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 17.112,87 ha luas daerah irigasi yang telah dibangun dan menjadi kewenangan DI Yogyakarta, diperkirakan masih sekitar 30% daerah irigasi yang belum dapat

berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.

2. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan irigasi.
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadahnya air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
4. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas PUP-ESDM dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
6. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
7. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.
8. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan irigasi.
9. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadahnya air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
10. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.

### **3.5.3. Isu strategis Bidang Bina Marga**

1. Mulai banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan Yogyakarta, yaitu jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pendidikan.
2. Sebagian ruas-ruas baru untuk Jalur jalan Lintas Selatan (JJLS) yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
3. Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas jalan menuju kota pelabuhan, seperti Semarang dan Cilacap.

4. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah.
5. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
7. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRWP, yang meliputi pemantapan jaringan jalan kolektor di D.I Yogyakarta.

#### **3.5.4. Isu strategis Bidang ke Cipta Karya**

1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
  - a. Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.
  - b. Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk DIY.
  - c. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk DIY akan mendiami kawasan perkotaan.
2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
  - a. Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
  - b. Saat ini sekitar 10,15 % atau 350.000 jiwa penduduk DIY tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 700 Hektar.
3. Kota sebagai *engine of growth*
  - a. Perkotaan Yogyakarta mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) daerah.
4. Desentralisasi
  - a. Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa.
  - b. Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.
  - c. Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar dan metropolitan.
5. Kerusakan lingkungan hidup
 

Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
6. Daya saing kota dan demokratisasi
  - a. Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.

- b. Bentuk persaingan pun bergeser dari *comparative advantages* menuju ke era *competitive advantages*.
7. Perubahan Iklim dan bencana alam  
Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.
  8. Posisi Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
  9. Modal sosial
    - a. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial.
    - b. Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

### 3.5.5. Isu strategis Bidang Jasa Konstruksi

1. Kompetensi SDM Konstruksi Indonesia masih harus ditingkatkan untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki standar internasional.
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup.
4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga).
5. Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.
6. Penerapan konsep *green construction* yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.
7. Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.
8. Praktik-praktik KKN dalam industri konstruksi nasional dan dalam perilaku bisnis jasa konstruksi masih menjadi sorotan publik sampai saat ini. Kondisi ini telah membuat persaingan di industri konstruksi belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, tetapi lebih berdasarkan pada kemampuan negosiasi atau *lobby*.
9. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan

jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.

10. Globalisasi bisnis konstruksi merupakan suatu keniscayaan. Liberalisasi perdagangan jasa konstruksi merupakan suatu yang akan terjadi. Indonesia sebagai negara anggota WTO akan dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar konstruksi domestik.
11. Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong perdagangan sektor konstruksi nasional menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.

### **3.5.6. Isu strategis Bidang Perumahan**

1. Keterbatasan penyediaan rumah, Sepanjang periode 2006–2010, penambahan rumah tangga baru di DIY mencapai 6.325 unit. Hal ini tidak mampu diikuti dengan pembangunan rumah baru dan rumah dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan rumah (backlog) diperkirakan meningkat dari 69.306 unit pada tahun 2005 menjadi 106.454 unit pada akhir tahun 2010.
2. Permukiman kumuh yang semakin meluas, Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas.
3. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan belum didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban.
4. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
5. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Sebagian besar masyarakat DIY di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan, karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah.
6. Kesenjangan pelayanan untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah

# BAB IV

## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. VISI DAN MISI SKPD

#### 4.1.1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidaklindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan energi & sumberdaya mineral diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2013-2017), yaitu:

**“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**

Mengacu pada Visi Kementerian Pekerjaan Umum umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang yaitu :

**“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.**

Mengacu pada Visi kementerian ESDM, merupakan rumusan yang ingin dicapai tahun 2014 adalah :

**“Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”**

Dan mengacu pada Visi Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010 – 2014 yaitu :

**“Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”**

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY pada tahun 2028, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

**“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan ”**

1. Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal dan memadai, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:
  - a. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
  - b. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
  - c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
  - d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
  - e. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
  - f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
  - g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.
  
2. Makna dari ketersediaan jumlah rumah layak huni bagi pemenuhan visi Perumahan :
  - a. Pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

- b. Fasilitasi dan dorongan bagi terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
  - c. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendukung seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
  - d. Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
  - e. Fasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh terutama bagi masyarakat perkotaan di DIY.
3. Makna pendayagunaan energi dan sumber daya mineral bagi pemenuhan visi ESDM :
- a. Peningkatan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
  - b. Peningkatan nilai tambah energi dan mineral.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

#### **4.1.2. Misi**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas PUP-ESDM DIY sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang ada, maka untuk mencapai Visi Pemerintah DIY tahun 2028, ditetapkan Misi Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2013 – 2017, yaitu:

1. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara.
4. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.
5. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA .

6. Mengurangi resiko daya rusak air.
7. Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral.
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah
12. Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan.
13. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

## **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUP-ESDM DIY beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
1 Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.	1.1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	Peningkatan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi	12 kawasan	19 kawasan	Pembuatan RTR pada kawasan Strategis Provinsi	Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	12 Kawasan Strategis	14 Kawasan Strategis	16 Kawasan Strategis	18 Kawasan Strategis	19 kawasan strategis
	1.2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang, melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah.	Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	50%	90%	Peningkatan pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan RTRW Provinsi	50%	60%	70%	80%	90 %
	1.3.													

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
	Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi	Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	20%	100%	pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi	Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian tata ruang pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawah	20%	40%	60%	80%	100%
		1.3.2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan tentang kawasan strategis yg mempunyai nilai budaya	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan tentang kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya	20%	100%	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya	Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya	Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY	Prosentase Pengaturan dan Pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	20%	40%	60%	80%	100%
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian	2.1. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase, persampahan, jalan lingkungan, dan penataan	.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas	73,87 %	87,85 %	peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Prosentase meningkatnya Penduduk Berakses Air Minum	73,87 %	77,36 %	80,85 %	84,34 %	87,85 %
	2.1.2													

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas	bangunan dan lingkungan).	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah, yang memadai baik kuantitas dan kualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah, yang memadai	14.400 SR	20.000 SR	Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan Pelayanan sambungan rumah jaringan air limbah terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta	14.400 SR	15.800 SR	17.200 SR	18.600 SR	20.000 SR
		2.1.3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur persampahan, yang memadai baik kuantitas dan kualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan	50%	70%	Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengembangan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah ramah lingkungan TPST 3R	50%	55%	60%	65%	70%
		2.1.4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	57%	73%	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan perkotaan	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Prosentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	57%	61%	65%	69%	73%
		2.1.5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung	43%	59%	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Prosentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan	43%	47%	51%	55%	59%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
		pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	aksesibilitas kawasan perdesaan			aksesibilitas kawasan perdesaan	aksebilitas pembangunan kawasan perkotaan		miskin					
		2.1.6 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi					.Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	2.1.6.1. Prosentase aksesibilitas kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	34%	40%	46%	52%	58 %
		2.1.7. Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	33,9 %	57%	Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan kawasan budaya	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Prosentase pengurangan jumlah titik genangan air di wilayah perkotaan	33,90 %	39,90 %	45,90 %	51,9%	57 %
	2.2. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata DIY	Meningkatnya ketersediaan kawasan budaya	Peningkatan ketersediaan kawasan budaya	43,9 %	66,3 %	Peningkatan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan		Prosentase peningkatan kawasan budaya	43,9%	49,5%	55,1%	60,7%	66,3 %

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
						kawasan budaya	kawasan budaya							
3. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara	3.1. Meningkatkan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Peningkatan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	80%	88%	Peningkatan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Presentase peningkatan pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	80%	82%	84%	86%	88%
4. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi	4.1. Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Peningkatan penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,04 %	77,44 %	Penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun	Program Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,04 %	72,64 %	73,24 %	73,84 %	77,44 %
				100%	100%			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	100%	100%	100%	100%	100%
				24,91 %	63,75 %			Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Posentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan startegis dan kawasan startegis baru	24,91 %	34,62 %	44,33 %	54,04 %	63,75 %
5. Menyelenggarakan pengelolaan	5.1. Meningkatkan keandalan sistem	Meningkatnya layanan jaringan	Peningkatan layanan jaringan	76,5 %	82,5 %	Pendayagunaan sumber daya air untuk	Melaksanakan rehabilitasi pada areal	Program Pengembangan, Pengelo-	Presentase peningkatan kinerja pe-	76,5%	78%	79,5%	81%	82,5 %

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA.	jaringan irigasi dan rawa	irigasi dan rawa,	irigasi dan rawa,			pemenuhan kebutuhan air irigasi	irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan	laan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	ngelolaan sumber daya air					
	5.2. meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air	Meningkatnya ketersediaan air baku	Peningkatan Ketersediaan air baku	700 lt/det	2.100 lt/det	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air	Penambahan penyediaan air baku	Penambahan Penyediaan air baku	700 lt/det	900 lt/det	1.200 lt/det	1.600 lt/det	2.100 lt/det
6. Mengurangi resiko daya rusak air	6.1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infra-struktur sumber daya air	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	Peningkatan kualitas pengendalian banjir	40 titik	120 titik	Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air.	Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air terutama pada 3 sungai di DIY	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	40 titik	60 titik	80 titik	100 titik	120 titik
7. Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni	7.1. Meningkatkan pengembangan sarana dan pra-sarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat,	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	29%	51%	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat.	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin.	29,0 %	34,0 %	40,0 %	46,0 %	51 %

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
		7.1.2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat..	Peningkatan pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman	44%	64%	Pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Prosentase program pemberdayaan berbasis komunitas	44 %	49 %	54 %	59 %	64 %
8. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	8.1. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	8%	6 %	Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni pertahun	8%	7,5%	7%	6,5%	6 %
9. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan	9.1. Mempertahankan kelestarian dan ketersediaan air tanah	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	Peningkatan upaya perlindungan, pelestarian dan pengawetan air tanah	<20%	<20%	Memfaatkan air tanah dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan berkelanjutan	Menjamin ketersediaan air tanah bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan Air Tanah	Rerata penurunan muka air tanah	<20%	<20%	<20%	<20%	< 20 %

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
	9.2. Mendorong pemanfaatan secara optimal hasil pertambangan	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian petambangan	Peningkatan pengelolaan usaha pertambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian	9%	13%	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan nilai tambah produk pertambangan	Meningkatkan nilai tambah mineral	Pembinaan , pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	9%	10%	11%	12%	13%
	9.3. Mengimplemen-tasikan pelaksanaan konservasi energi	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	Peningkatan upaya penyediaan energi daerah	3%	15%	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan konservasi energi	Meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan konservasi Energi	3%	6%	9%	12%	15 %
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral	10.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi ketenagalistrikan	Terwujudnya perluasan pembangunan infrastruktur energi ketenagalistrikan	Peningkatan akses rumah tangga DIY berlistrik	77,40 %	79,80 %	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan pasokan listrik	Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik	Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	77,40 %	78,00 %	78,60 %	79,20 %	79,80 %
	10.2. Meningkatkan ketersediaan energi	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	107,79 SBM	130,10 SBM	Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di pedesaan maupun di perkotaan	Meningkatkan kemampuan pasokan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal (bauran energi)	Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	107,79 SBM	112,00 SBM	117,95 SBM	123,59 SBM	130,10 SBM

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
	10.3. Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	Peningkatan upaya pengelolaan bahan bakar	40%	80%	Meningkatkan penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan bakar	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bahan bakar	Pencapaian Kinerja pengelolaan bahan bakar dan gas	40%	50%	60%	70%	80%
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah	11.1. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan.	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.	Peningkatan pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi	77,5 %	87,5 %	Peningkatan pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.	Meningkatkan turbin usaha konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase peningkatan performance/ kinerja jasa konstruksi	77,5%	80%	82,5%	85%	87,5 %
12. Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan.	12.1. Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan Informasi teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Peningkatan arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	75%	85%	Pemberian pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Meningkatkan cakupan pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Prosentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum	75%	77,5%	80%	82,5%	85%
	12.2. Memberikan pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/ Sertifikat hasil uji da-	Peningkatan pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji	75%	100%	Pemberian pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu	Meningkatkan kualitas pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu ling-	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium	75%	81,25%	87,50%	93,75%	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target 2013	Target th 2017	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator program	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
										2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
	mutu konstruksi	lam rangka pelayanan yang memenuhi standar.				lingkungan dan mutu konstruksi yang memenuhi standar.	kungan dan mutu konstruksi yang memenuhi standar.		pengujian					
13.. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.	13.1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran pada DPUP-ESDM	.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik	Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
	13.2. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparatur	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
	12.3. Melaksanakan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya hasil pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Peningkatan hasil pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Pelaporan hasil pencapaian kinerja dan keuangan yang lebih baik	Meningkatkan upaya pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%

### **4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2017.

**Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang**, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

<b>VISI :“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan</b>			
<b>Misi : 1. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1.1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah .	1.1.1. Tersedianya rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi	1.1.1.1 Pembuatan RTR pada kawasan Strategis Provinsi	1.1.1.1 Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan
1.2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	1.2.1. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang , melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah utk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah & antar pemangku kepentingan.	1.2.1.1. Peningkatan pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	1.2.1.1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.
1.3. Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	1.3.1. Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneraan sanksi	1.3.1.1. pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneraan sanksi	1.3.1.1. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
	1.3.2. Meningkatnya pengendalian pemanfaat ruang melalui penetapan perturan tentang kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya	1.3.2.1. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya	1.3.2.1. Mengefektifkan pengendalian pemanfaat ruang pada kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya
<b>MISI 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
2.1.Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase, persampahan, jalan lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan).	2.1.1.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas	2.1.1.1. peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum	2.1.1.1. Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.
	2.1.2.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah, yang memadai baik kuantitas dan kualitas	2.1.2.1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah	2.1.2.1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah

	2.1.3.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan, yang memadai baik kuantitas dan kualitas	2.1.3.1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan	2.1.3.1. Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mencapai sasaran pem-bangunan persampahan
	2.1.4.Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	2.1.4.1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	2.1.4.1. Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan perkotaan
	2.1.5.Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	2.1.5.1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	2.1.5.1. Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan perkotaan
	2.1.6.Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	2.1.6.1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	2.1.5.1. Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan Agropolitan, Mina-politan dan Desa Potensi
	2.1.7. Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	2.1.7.1. Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase.	2.1.7.1. Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mengurangi titik genangan air
2.2. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata DIY	2.2.1. Meningkatnya ketersediaan kawasan budaya	2.2.1.1. Peningkatan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan kawasan budaya	2.2.1.1. Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan kawasan budaya
<b>Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara</b>			
3.1. Meningkatkan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	3.1.1. Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	3.1.1.1. Peningkatan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	2.3.1.1. Meningkatkan pengawasan dan pembina-an teknis keamanan dan keselamatan gedung.
<b>MISI 4 : Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4.1. Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan	4.1.1 Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	4.1.1.1 Penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	4.1.1.1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
<b>MISI 5 : Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
5.1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa	5.1.1. Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa,	5.1.1.1 Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi	5.1.1.1 Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
5.2. meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air	5.2.1. Meningkatnya ketersediaan air baku	5.2.1.1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	5.2.1.1. Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air

MISI 6 : Mengurangi resiko daya rusak air			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
6.1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air	6.1.1. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	6.1.1. Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air.	6.1.1.1. Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air terutama pada 3 sungai di DIY
MISI 7 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
7.1. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat,	7.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	7.1.1.1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	7.1.1.1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
	7.1.2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat.	7.1.2.1. Pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman	7.1.2.1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat.
MISI 8: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
8.1. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	8.1.1. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	8.1.1.1. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	8.1.1.1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat
MISI 9. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
9.1. Mewujudkan perlindungan, pelestarian dan pengawetan air tanah	9.1.1. Meningkatnya upaya perlindungan, pelestarian dan pengawetan air tanah	9.1.1.1. Perlindungan, pelestarian dan pengawetan air tanah	9.1.1.1. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pengawetan air pada cekungan air tanah
9.2. Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian	9.2.1. Meningkatnya pengelolaan usaha pertambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian	9.2.1.1. Pengelolaan usaha pertambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian	9.2.1.1. Meningkatkan nilai tambah pertambangan
9.3. Mewujudkan penyediaan energi daerah, berbasis bahan bakar nabati.	9.3.1. Meningkatnya upaya penyediaan energi daerah	9.3.1.1. Penyediaan energi daerah	9.3.1.1. Meningkatkan upaya penyediaan energi daerah
MISI 10 :Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral (Bid ESDM)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
10.1. Meningkatkan akses masyarakat DIY terhadap energi komersial	10.1.1. Meningkatnya akses rumah tangga DIY berlistrik	10.1.1.1 Peningkatan akses rumah tangga DIY berlistrik	10.1.1.1. Meningkatkan rumah tangga di DIY yang berlistrik
10.2. Mewujudkan pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi	10.2.1. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	10.2.1.1. Pemanfaatan energi baru terbarukan	10.2.1.1. Meningkatkan upaya pemanfaatan energi baru terbarukan

10.3. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap bahan bakar minyak dan gas	10.3.1. Meningkatnya upaya pengelolaan bahan bakar dan gas	10.3.1. Pengelolaan bahan bakar dan gas	10.3.1.1. Meningkatkan kinerja pengelolaan bahan bakar dan gas
<b>MISI 11 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah (BPIPBPJK)</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
11.1. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan.	11.1.1. Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.	11.1.1.1. Peningkatan pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.	11.1.1.1. Meningkatkan turbinwas usaha konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional
<b>MISI 12 : . Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan. (BPIPBPJK)</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
12.1. Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan Informasi teknologi pembangunan bidang PUPESDM	12.1.1. Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pemba-ngunan bidang PUPESDM	12.1.1.1. Pemberian pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pemba-ngunan bidang PUPESDM yang berkualitas.	12.1.1.1 Meningkatkan cakupan pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pemba-ngunan bidang PUPESDM
12.2. Memberikan pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi	12.2.1. Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar.	12.2.1.1 Pemberian pelayanan jasa pengujian labotrartorium kualitas mutu ling-kungan dan mutu konstruksi yang memenuhi standar.	12.2.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa pengujian labotrartorium kualitas mutu ling-kungan dan mutu konstruksiyang memenuhi standar.
<b>MISI 13 Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
12.1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas PUPESDM	12.1.1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12.1.1.1. Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik	12.1.1.1. Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran
12.2. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparat	12.2.1. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparat	12.1.1.1. Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparat	12.2.1.1. Meningkatkan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparat
12.3. Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.3.1. Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.3.1.1. Pelaporan hasil capaian kinerja dan keuangan yang lebih baik.	12.3.1.1. Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

# **BAB V**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2012-2017 Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan 23 program pada urusan Pekerjaan Umum, 3 Program pada urusan Perumahan, 3 Program pada urusan Tata Ruang, 6 Program pada Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral serta 2 Program pada Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1 .

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**TAHUN 2012 – 2017**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)		
1	Urusan Wajib																	
13	Urusan Pekerjaan Umum																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RPJM)	100%		100%	Rp 2.446.019.510		100,00%	Rp 2.568.320.486		100,00%	Rp 2.852.000.000		100,00%	Rp 2.831.573.335		100,00%	Rp 2.973.152.002
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat		Pemda DIY	12 Bulan	Rp 12.000.000	Pemda DIY	12 bulan	Rp 12.600.000	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 14.000.000	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 13.891.500	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 14.586.075
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penediaan jasa komunikasi, air dan listrik		Pemda DIY	12 Bulan	Rp 1.009.560.000	Pemda DIY	12 bulan	Rp 1.060.038.000	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 1.200.000.000	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 1.168.691.895	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 1.227.126.490
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan berijin		Pemda DIY	71 kendaraan	Rp 60.600.000	Pemda DIY	71 kendaraan	Rp 63.630.000	Pemda DIY	71 kendaraan	Rp 62.000.000	Pemda DIY	71 kendaraan	Rp 70.152.075	Pemda DIY	71 kendaraan	Rp 73.659.679
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan		Pemda DIY	12 Bulan	Rp 123.840.000	Pemda DIY	12 bulan	Rp 130.032.000	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 130.000.000	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 143.360.280	Pemda DIY	12 Bulan	Rp 150.528.294
5	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah kantor yang dibersihkan		Pemda DIY	7 lokasi	Rp 155.000.000	Pemda DIY	7 lokasi	Rp 162.750.000	Pemda DIY	7 lokasi	Rp 170.000.000	Pemda DIY	7 lokasi	Rp 179.431.875	Pemda DIY	7 lokasi	Rp 188.403.469
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		Pemda DIY	95 unit	Rp 200.000.000	Pemda DIY	95 unit	Rp 210.000.000	Pemda DIY	95 unit	Rp 270.000.000	Pemda DIY	95 unit	Rp 231.525.000	Pemda DIY	95 unit	Rp 243.101.250
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis yang disediakan		Pemda DIY	79 jenis	Rp 175.000.000	Pemda DIY	79 jenis	Rp 183.750.000	Pemda DIY	79 jenis	Rp 175.000.000	Pemda DIY	79 jenis	Rp 202.584.375	Pemda DIY	79 jenis	Rp 212.713.594
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang cetakan yang disediakan		Pemda DIY	26 jenis	Rp 150.175.810	Pemda DIY	26 jenis	Rp 157.684.601	Pemda DIY	26 jenis	Rp 152.000.000	Pemda DIY	26 jenis	Rp 173.847.272	Pemda DIY	26 jenis	Rp 182.539.636
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan yang disediakan		Pemda DIY	8 jenis	Rp 39.978.700	Pemda DIY	8 jenis	Rp 41.977.635	Pemda DIY	8 jenis	Rp 42.000.000	Pemda DIY	8 jenis	Rp 46.280.343	Pemda DIY	8 jenis	Rp 48.594.360
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		Pemda DIY	3 SKH dan 3 jenis buku	Rp 10.000.000	Pemda DIY	3 SKH dan 3 jenis buku	Rp 10.500.000	Pemda DIY	3 SKH dan 3 jenis buku	Rp 22.000.000	Pemda DIY	3 SKH dan 3 jenis buku	Rp 11.576.250	Pemda DIY	3 SKH dan 3 jenis buku	Rp 12.155.063
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat		Pemda DIY	1 tahun	Rp 59.895.000	Pemda DIY	1 tahun	Rp 62.889.750	Pemda DIY	1 tahun	Rp 65.000.000	Pemda DIY	1 tahun	Rp 69.335.949	Pemda DIY	1 tahun	Rp 72.802.747
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah		Pemda DIY	12 bulan	Rp 449.970.000	Pemda DIY	12 bulan	Rp 472.468.500	Pemda DIY	12 bulan	Rp 550.000.000	Pemda DIY	12 bulan	Rp 520.896.521	Pemda DIY	12 bulan	Rp 546.941.347
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		100%	Rp 4.821.648.545		100%	Rp 2.437.730.973		100%	Rp 2.730.000.000		100%	Rp 2.687.598.397		100%	Rp 2.821.978.317
1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		Pemda DIY	2 unit	Rp 2.500.000.000		-	-		-	-		-		-	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		Pemda DIY	7 macam barang	Rp 142.768.200	Pemda DIY	9 jenis, 3 jenis	Rp 149.906.610	Pemda DIY	7 macam barang	Rp 160.000.000	Pemda DIY	7 macam barang	Rp 165.272.038	Pemda DIY	7 macam barang	Rp 173.535.639
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		Pemda DIY	5 jenis	Rp 721.255.200	Pemda DIY	15 unit	Rp 757.317.960	Pemda DIY	5 jenis	Rp 730.000.000	Pemda DIY	5 jenis	Rp 834.943.051	Pemda DIY	5 jenis	Rp 876.690.203
4	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair yang diadakan		Pemda DIY	5 jenis	Rp 99.607.615	Pemda DIY	5 unit	Rp 104.587.996	Pemda DIY	5 jenis	Rp 120.000.000	Pemda DIY	5 jenis	Rp 115.308.265	Pemda DIY	5 jenis	Rp 121.073.679
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin		Pemda DIY	7 lokasi	Rp 300.000.000	Pemda DIY	4 lokasi	Rp 315.000.000	Pemda DIY	7 lokasi	Rp 500.000.000	Pemda DIY	7 lokasi	Rp 347.287.500	Pemda DIY	7 lokasi	Rp 364.651.875

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Pemda DIY	18 roda 4, 2 roda 6, 51 roda 2	Rp 1.008.017.530	Pemda DIY	18 roda 4, 2 roda 6, 51 roda 2	Rp 1.058.418.407	Pemda DIY	18 roda 4, 2 roda 6, 51 roda 2	Rp 1.150.000.000	Pemda DIY	18 roda 4, 2 roda 6, 51 roda 2	Rp 1.166.906.293	Pemda DIY	18 roda 4, 2 roda 6, 51 roda 2	Rp 1.225.251.608
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang dipelihara		Pemda DIY	11 jenis	Rp 25.000.000	Pemda DIY	10 unit	Rp 26.250.000	Pemda DIY	11 jenis	Rp 35.000.000	Pemda DIY	11 jenis	Rp 28.940.625	Pemda DIY	11 jenis	Rp 30.387.656
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Luas taman kantor yang dipelihara		Pemda DIY		Rp 25.000.000	Pemda DIY		Rp 26.250.000	Pemda DIY		Rp 35.000.000	Pemda DIY		Rp 28.940.625	Pemda DIY		Rp 30.387.656
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RPJMD)	100%	Pemda DIY	100%	Rp 50.000.000	Pemda DIY	100%	Rp -	Pemda DIY	100%	Rp -	Pemda DIY	100%	Rp -	Pemda DIY	100%	Rp -
1	Investarisasi, Integrasi Dan Pengelolaan Barang	Pelaporan hasil inventarisasi barang		Pemda DIY	100%	Rp 50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RPJMD)	100%	Pemda DIY	100%	Rp 332.346.190	100%	Rp 347.735.621	100%	Rp 365.000.000	100%	Rp 383.763.928	100%	Rp 401.702.124	100%	Rp 401.702.124	100%	Rp 401.702.124
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun		Pemda DIY	1 laporan	Rp 36.218.200	Pemda DIY	1 laporan	Rp 38.029.110	Pemda DIY	1 laporan	Rp 40.000.000	Pemda DIY	1 laporan	Rp 40.000.000	Pemda DIY	1 laporan	Rp 40.000.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun		Pemda DIY	4 laporan	Rp 72.597.980	Pemda DIY	4 laporan	Rp 75.000.000	Pemda DIY	4 laporan	Rp 80.000.000	Pemda DIY	4 laporan	Rp 85.000.000	Pemda DIY	4 laporan	Rp 90.000.000
3	Penyusunan Rencana Program/Kegiatan SKPD serta pengembangan data & Informasi	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan SKPD		Pemda DIY	3 dokumen	Rp 163.511.000	Pemda DIY	3 dokumen	Rp 171.686.550	Pemda DIY	3 dokumen	Rp 175.000.000	Pemda DIY	3 dokumen	Rp 189.284.421	Pemda DIY	3 dokumen	Rp 198.748.642
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev pelaksanaan program/kegiatan		Pemda DIY	1 laporan	Rp 60.019.010	Pemda DIY	1 laporan	Rp 63.019.961	Pemda DIY	12 bulan	Rp 70.000.000	Pemda DIY	12 bulan	Rp 69.479.506	Pemda DIY	12 bulan	Rp 72.953.482
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (RPJMD)	71,09%		72,04%	Rp 28.054.585.000		72,64%	Rp 54.887.968.410		73,24%	Rp 67.280.762.220		73,84%	Rp 69.736.646.610		74,44%	Rp 72.325.123.710
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan provinsi yang direhabilitasi		Lcbts : Rehabilitasi 7 Ruas jalan Provinsi	11,45 Km	Rp 17.768.400.000	Lcbts : Rehabilitasi 14 Ruas jalan Provinsi	29,41 Km	Rp 37.315.019.500	D.I. Yogyakarta	36,62 Km	Rp 48.778.552.610	D.I. Yogyakarta	36,14 Km	Rp 50.559.068.790	D.I. Yogyakarta	35,70 Km	Rp 52.435.714.690
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Panjang jembatan provinsi yang direhabilitasi		Kabupaten Sleman	7,00 M	Rp 546.000.000	Lcbts : Rehabilitasi 5 Buah Jembatan	48,7 m	Rp 3.899.197.720	D.I. Yogyakarta	46 Km	Rp 4.036.845.730	D.I. Yogyakarta	44 M'	Rp 4.184.198.800	D.I. Yogyakarta	43 M'	Rp 4.339.507.420
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan provinsi yang dipelihara secara rutin		D.I. Yogyakarta	512,50 Km	Rp 7.343.830.000	D.I. Yogyakarta	566,13 km	Rp 11.075.991.494	D.I. Yogyakarta	565,38 Km	Rp 11.774.133.390	D.I. Yogyakarta	564,49 Km	Rp 12.203.913.160	D.I. Yogyakarta	563,43 Km	Rp 12.656.896.650
4	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan provinsi yang dipelihara secara rutin		D.I. Yogyakarta	3.686,70 M	Rp 2.396.355.000	D.I. Yogyakarta	3.548 m	Rp 2.597.759.696	D.I. Yogyakarta	3543,7 M	Rp 2.691.230.490	D.I. Yogyakarta	3547,7 M	Rp 2.789.465.860	D.I. Yogyakarta	3545,7 M'	Rp 2.893.004.950
6	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (RPJMD)	71,09%		72,04%	Rp 62.538.691.525		72,64%	Rp 74.467.384.000		73,24%	Rp 72.834.384.000		73,84%	Rp 82.484.939.880		74,44%	Rp 93.549.393.240
1	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan		Lcbts : Peningkatan 6 Ruas Jalan	8,02 Km	Rp 34.334.691.525	D.I. Yogyakarta	16,10 km	Rp 41.867.384.000	D.I. Yogyakarta	17,34 Km	Rp 47.342.349.600	D.I. Yogyakarta	18,70 Km	Rp 53.615.210.920	D.I. Yogyakarta	20,20 Km	Rp 60.807.105.610
2	Peningkatan Jembatan	Panjang jembatan yang ditingkatkan		Lcbts : Peningkatan 3 buah Jembatan	171,00 M	Rp 28.204.000.000	D.I. Yogyakarta	100,00 M	Rp 32.600.000.000	D.I. Yogyakarta	97 M'	Rp 25.492.034.400	D.I. Yogyakarta	95 Km	Rp 28.869.728.960	D.I. Yogyakarta	98 M'	Rp 32.742.287.630

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(9)	(10)		(9)	(10)		
7	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi (RPJMD)	100%	100%	Rp 486.854.000		100%	Rp 535.539.400		100%	Rp 589.093.350	100%	Rp 648.002.680		100%	Rp 712.802.940		
1	Inspeksi Kondisi Jalan / IRMS	Panjang Jalan yang diinspeksi		D.I. Yogyakarta	619,34 Km	Rp 242.590.500	D.I. Yogyakarta	619,34 Km	Rp 266.849.550	D.I. Yogyakarta	619,34 Km	Rp 293.534.510	D.I. Yogyakarta	619,34 Km	Rp 322.887.960	D.I. Yogyakarta	619,34 Km	Rp 355.176.750
2	Inspeksi kondisi Jembatan / BMS	Panjang Jembatan yang diinspeksi		D.I. Yogyakarta	3.686,70 M	Rp 244.263.500	D.I. Yogyakarta	3.686,70 M	Rp 268.689.850	D.I. Yogyakarta	3.686,70 M	Rp 295.558.840	D.I. Yogyakarta	3.686,70 M	Rp 325.114.720	D.I. Yogyakarta	3.686,70 M	Rp 357.626.190
8	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru (RPJMD)	24,02%	24,91%	Rp 12.000.000.000		25,79%	Rp 15.000.000.000		26,67%	Rp 16.500.000.000	27,55%	Rp 18.150.000.000		28,44%	Rp 19.965.000.000		
1	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	Penyediaan lahan untuk pembangunan infrastuktur Jalur Pansela, Pembangunan jalan Selokan Mataram, Ruas Jalan Yogyakarta-Imogiri dan Akses Bandara Baru	40,82 Ha	1. JLS Kab. Gunungkidul 2. JLS Kab. Bantul 3. JLS Kab. Kulon Progo. 4. Yogyakarta-Imogiri	1,50 ha	Rp 12.000.000.000	1. JLS Kab. Gunungkidul 2. JLS Kab. Bantul 3. JLS Kab. Kulon Progo. 4. Yogyakarta-Imogiri	1,50 ha	Rp 15.000.000.000	1. JLS Kab. Gunungkidul 2. JLS Kab. Bantul 3. JLS Kab. Kulon Progo. 4. Selokan Mataram 5. Akses Bandara Baru	1,50 ha	Rp 16.500.000.000	1. JLS Kab. Gunungkidul 2. JLS Kab. Bantul 3. JLS Kab. Kulon Progo. 4. Selokan Mataram 5. Akses Bandara Baru	1,50 ha	Rp 18.150.000.000	1. JLS Kab. Gunungkidul 2. JLS Kab. Bantul 3. JLS Kab. Kulon Progo. 4. Selokan Mataram 5. Akses Bandara Baru	1,50 ha	Rp 19.965.000.000
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi (RPJMD)	75,06%	76,5%	Rp 25.878.007.900		78,00%	Rp 27.070.000.000		79,50%	Rp 30.510.000.000	81,00%	Rp 32.131.000.000		82,5%	Rp 35.394.500.000		
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Aset dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi		Sleman-Bantul (DI Lintas), Bantul	3 Dokumen DED Inventarisasi & Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rp 500.000.000	Bantul, Kulonprogo, Kota Yogya-Bantul (DI Lintas), Sleman-Bantul (DI Lintas)	- 5 Dokumen DED Inventarisasi & Rehabilitasi Jaringan Irigasi - 1 Dokumen Pengelolaan Aset Irigasi - 1 Dokumen AKNPI	Rp 1.220.000.000	Sleman-Bantul (DI Lintas), Bantul	- 5 Dokumen DED Inventarisasi & Rehabilitasi Jaringan Irigasi - 1 Dokumen Pengelolaan Aset Irigasi - 1 Dokumen AKNPI	Rp 1.250.000.000	Sleman-Bantul (DI Lintas), Gunungkidul	- 5 Dokumen DED Inventarisasi & Rehabilitasi Jaringan Irigasi - 1 Dokumen Pengelolaan Aset Irigasi - 1 Dokumen AKNPI	Rp 1.350.000.000	Kulonprogo, Sleman-Bantul (DI Lintas), Gunungkidul	- 5 Dokumen DED Inventarisasi & Rehabilitasi Jaringan Irigasi - 1 Dokumen Pengelolaan Aset Irigasi - 1 Dokumen AKNPI	Rp 1.625.000.000
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terselenggaranya Rehabilitasi Jaringan Irigasi		Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman-Bantul (DI Lintas)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 14 DI	Rp 17.902.000.000	Sleman-Bantul, Sleman-Kota Yogya (DI Lintas), Bantul, Gunungkidul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 13 DI	Rp 16.550.000.000	Sleman-Bantul, Sleman-Kota Yogya (DI Lintas), Kulonprogo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 9 DI	Rp 17.500.000.000	Sleman-Bantul (DI Lintas), Kulonprogo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 9 DI	Rp 18.556.000.000	Sleman, Bantul	Sleman-Bantul (DI Lintas), Gunungkidul	Rp 20.000.000.000
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan rutin Daerah Irigasi: 36 DI lintas kabupaten/kota dan 8 DI kewenangan DIY					4 kabupaten dan 1 kota	36 DI lintas kabupaten/kota dan 8 DI kewenangan DIY	Rp 5.500.000.000	4 kabupaten dan 1 kota	36 DI lintas kabupaten/kota dan 8 DI kewenangan DIY	Rp 6.510.000.000	4 kabupaten dan 1 kota	36 DI lintas kabupaten/kota dan 8 DI kewenangan DIY	Rp 7.500.000.000	4 kabupaten dan 1 kota	36 DI lintas kabupaten/kota dan 8 DI kewenangan DIY	Rp 8.742.000.000
4	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi secara rutin dan berkala		4 kabupaten dan 1 kota	20 DI	Rp 4.691.307.900												
5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya Jaringan Irigasi secara berkala					4 kabupaten dan 1 kota	22 DI	Rp 2.500.000.000	4 kabupaten dan 1 kota	24 DI	Rp 3.750.000.000	4 kabupaten dan 1 kota	26 DI	Rp 3.025.000.000	4 kabupaten dan 1 kota	30 DI	Rp 6.327.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 ( 2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)			
6	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	Terselenggaranya Peningkatan Kinerja dan Lembaga Pengelola Wilayah Sungai; serta Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif		11 Di Kesepakatan WISMP Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman-Bantul (Di Lintas)	Dokumen Desain, Laporan Pelatihan, Laporan Quality Assurance, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif	Rp 2.784.700.000	11 Di Kesepakatan WISMP Bantul, Kulonprogo, Sleman-Bantul (Di Lintas)	Dokumen Desain, Laporan Pelatihan, Laporan Quality Assurance, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif	Rp 1.300.000.000	11 Di Kesepakatan WISMP Bantul, Kulonprogo, Sleman-Bantul (Di Lintas)	Dokumen Desain, Laporan Pelatihan, Laporan Quality Assurance, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif	Rp 1.500.000.000	11 Di Kesepakatan WISMP Bantul, Kulonprogo, Sleman-Bantul (Di Lintas)	Dokumen Desain, Laporan Pelatihan, Laporan Quality Assurance, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif	Rp 1.700.000.000	11 Di Kesepakatan WISMP Bantul, Kulonprogo, Sleman-Bantul (Di Lintas)	Dokumen Desain, Laporan Pelatihan, Laporan Quality Assurance, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif	Rp 1.700.000.000
10	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Penambahan Penyediaan Air Baku (RPJMD)	600 l/det		700 l/det	Rp 14.583.228.953		900 l/det	Rp 19.500.000.000		1.200 l/det	Rp 19.750.000.000		1.600 l/det	Rp 21.250.000.000		2.100 l/det	Rp 22.750.000.000
1	Pembangunan Embung dan bangunan penampung air lainnya	Terbangunnya Embung di Lokasi		Sleman, Bantul	3 Paket Pembangunan Embung	Rp 11.500.000.000	Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo	4 Paket Pembangunan Embung	Rp 15.700.000.000	Gunungkidul	3 Paket Pembangunan Embung	Rp 15.200.000.000	Kulonprogo, Gunungkidul	4 Paket Pembangunan Embung	Rp 16.400.000.000	Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo	4 Paket Pembangunan Embung	Rp 17.100.000.000
2	Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai, Danau, dan SDA Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sungai dan bangunan sarpras SDA lainnya		DIY	4 sungai	Rp 786.826.945												
3	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan penampung air lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan embung dan bangunan sarpras SDA lainnya		DIY	4 embung	Rp 1.165.365.008	DIY	6 embung	Rp 1.650.000.000	DIY	7 embung	Rp 2.100.000.000	DIY	8 embung	Rp 2.550.000.000	DIY	9 embung	Rp 3.200.000.000
4	Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi	Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan pos dan peralatan hidroklimatologi		DIY	69 pos hidroklimatologi	Rp 331.047.000	DIY	69 pos hidroklimatologi	Rp 500.000.000	DIY	69 pos hidroklimatologi	Rp 500.000.000	DIY	69 pos hidroklimatologi	Rp 600.000.000	DIY	69 pos hidroklimatologi	Rp 700.000.000
5	Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya dokumen Detail Desain Embung		Kulonprogo	2 Dokumen DED Embung	Rp 587.700.000	Kulonprogo, Gunungkidul	5 Dokumen DED Embung	Rp 1.250.000.000	Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul	6 Dokumen DED Embung	Rp 1.500.000.000	Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul	5 Dokumen DED Embung	Rp 1.250.000.000	Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul	5 Dokumen DED Embung	Rp 1.250.000.000
6	Koordinasi Kelembagaan S D A	Terselenggaranya Kampanye Pengelolaan SDA, Terfasilitasinya Kegiatan Wadah Koordinasi SDA (Dewan SDA dan Komir) serta Tersusunnya Peraturan Perundangan Daerah		Yogyakarta	3 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan : Kampanye SDA, Dewan SDA dan Komir DIY	Rp 212.290.000	Yogyakarta	3 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan : Kampanye SDA, Dewan SDA dan Komir DIY  2 Laporan Penyusunan Peraturan Perundangan Daerah	Rp 400.000.000	Yogyakarta	3 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan : Kampanye SDA, Dewan SDA dan Komir DIY  2 Laporan Penyusunan Peraturan Perundangan Daerah	Rp 450.000.000	Yogyakarta	3 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan : Kampanye SDA, Dewan SDA dan Komir DIY  2 Laporan Penyusunan Peraturan Perundangan Daerah	Rp 450.000.000	Yogyakarta	3 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan : Kampanye SDA, Dewan SDA dan Komir DIY  1 Laporan Penyusunan Peraturan Perundangan Daerah	Rp 500.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(9)	(10)		(9)	(10)		(9)	(10)	
11	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Penambahan Penyediaan Air Baku (RPJMD)	600 l/det		700 l/det	Rp 2.213.130.740		900 l/det	Rp -		1.200 l/det	Rp -		1.600 l/det	Rp -		2.100 l/det	Rp -
1	Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Tersedianya air baku bagi masyarakat		Gunungkidul	1 Paket Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Sistem Pompa (JIAT)	Rp 1.200.000.000												
2	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Operasi sarpras irigasi di Daerah Irigasi		4 kabupaten dan 1 kota	35 DI lintas kabupaten/kota dan 7 DI kewenangan DIY	Rp 1.013.130.740												
12	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (RPJMD)	70,38%		70,38%	Rp 1.574.270.000		77,36%	Rp 1.700.000.000		80,85%	Rp 2.000.000.000		84,34%	Rp 2.300.000.000		87,85%	Rp 2.500.000.000
1	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	terfasilitasinya SPAMDES kelompok PAMASKARTA		Lainnya : DIY	15 KELOMPOK PAMASKARTA	Rp 1.499.270.000	Lainnya : DIY	15 KELOMPOK PAMASKARTA	Rp 1.700.000.000	Lainnya : DIY	15 KELOMPOK PAMASKARTA	Rp 2.000.000.000	Lainnya : DIY	15 KELOMPOK PAMASKARTA	Rp 2.300.000.000	Lainnya : DIY	15 KELOMPOK PAMASKARTA	Rp 2.500.000.000
2	Penyusunan NSPK Air minum	tersusunnya dokumen NSPK air minum		DIY	1 dokumen	Rp 75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di KPY (RPJMD)	13.329 SR		14.300 SR	Rp 4.081.741.000		15.800 SR	Rp 6.000.000.000		17.300 SR	Rp 6.420.168.750		18.800 SR	Rp 6.870.000.000		20.000 SR	Rp 7.320.000.000
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Terbangunya jaringan pipa lateral		- Kasihan - Depok	2 km	Rp 2.475.000.000	DIY	600 m	Rp 750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan air Limbah	tersedianya dokumen NSPK Air Limbah		DIY	1 dokumen	Rp 75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembangan sistem sanitasi berbasis masyarakat	tersedianya bangunan sanitasi berbasis masyarakat		Dusun gilang kec. Banguntapan bantul	1 bangunan	Rp 350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Terpeliharanya jaringan pipa air limbah		Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta	52 km	Rp 503.514.300	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta	180 km	Rp 1.500.000.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta	180 km	Rp 1.800.000.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta	180 km	Rp 2.800.000.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta	236 km	Rp 3.500.000.000
5	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Terpeliharanya Instalasi Air Limbah		Lainnya : Balai IPAL Sewon, Bantul	1 tahun	Rp 251.435.600	Lainnya : Balai IPAL Sewon, Bantul	1 tahun	Rp 1.070.000.000	Lainnya : Balai IPAL Sewon, Bantul	1 tahun	Rp 1.370.468.750	Lainnya : Balai IPAL Sewon, Bantul	1 tahun	Rp 1.700.000.000	Lainnya : Balai IPAL Sewon, Bantul	1 tahun	Rp 2.000.000.000
6	Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	Tersusunnya laporan hasil pemantauan kualitas air dan lingkungan sistem jaringan limbah		Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Yogyakarta, Sleman, Bantul)	6 laporan	Rp 326.791.900	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Yogyakarta, Sleman, Bantul)	6 laporan	Rp 700.000.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Yogyakarta, Sleman, Bantul)	6 laporan	Rp 2.379.700.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Yogyakarta, Sleman, Bantul)	6 laporan	Rp 1.650.000.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Yogyakarta, Sleman, Bantul)	6 laporan	Rp 1.500.000.000
7	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah	Dokumen kajian penguatan kelembagaan pengelolaan limbah		Lainnya : Kab. Bantul	1 dokumen	Rp 100.000.000	Lainnya : Kab. Bantul	2 dokumen	Rp 480.000.000	Lainnya : Kab. Bantul	2 dokumen	Rp 220.000.000		2 dokumen	Rp 220.000.000		2 dokumen	Rp 220.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(9)	(10)		(9)	(10)		(9)	(10)	
8	Penyediaan dan Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan air limbah		-	-	-	Lainnya : Kab. Bantul	1 unit IPLT 1 DED 2,5 km pipa air limbah	Rp 1.500.000.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 DED 2 unit	Rp 650.000.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 DED 1 unit 1 unit	Rp 500.000.000	Lainnya : Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 DED 1 unit	Rp 100.000.000
14	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan (RPJMD)</b>	<b>45%</b>		<b>50%</b>	<b>Rp 174.950.000</b>		<b>55%</b>	<b>Rp 1.500.000.000</b>		<b>60%</b>	<b>Rp 2.000.000.000</b>		<b>65%</b>	<b>Rp 2.500.000.000</b>		<b>70%</b>	<b>Rp 2.500.000.000</b>
1	Koordinasi Pengelolaan Persampahan	terlaksananya kegiatan koordinasi persampahan				Rp 99.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyusunan NSPK Persampahan	tersedianya dokumen NSPK persampahan				Rp 75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan	terbangunya prasarana dan sarana persampahan dan pelaksanaan pelatihan persampahan		-	-	-	- Banguntapan - Umbulharjo	2 unit bangunan, 2 alat persampahan, 2 kali pelatiha	Rp 1.500.000.000	- ngawen - serut - sukunan	2 unit bangunan, 2 alat persampahan, 2 kali pelatiha	Rp 2.000.000.000	- sedayu - cokrodining - ratan	2 unit bangunan, 2 alat persampahan, 2 kali pelatihan	Rp 2.500.000.000	- srimulyo, - bejoharjo, - gondolayu	3 unit bangunan, 2 alat persampahan, 2 kali pelatihan	Rp 2.500.000.000
15	<b>Program Pengembangan Kawasan Perkotaan</b>	<b>Prosentase Peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin (RPJMD)</b>	<b>53%</b>		<b>57%</b>	<b>Rp 2.649.950.000</b>		<b>61%</b>	<b>Rp 2.000.000.000</b>		<b>65%</b>	<b>Rp 2.000.000.000</b>		<b>69%</b>	<b>Rp 2.000.000.000</b>		<b>73%</b>	<b>Rp 2.000.000.000</b>
1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	tersusunya dokumen pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan			4 dokumen	Rp 1.099.950.000	- Danurejan	1 dokumen	Rp 400.000.000	- danurejan	1 dokumen	Rp 400.000.000	- danurejan	1 dokumen	Rp 400.000.000	- danurejan	1 dokumen	Rp 400.000.000
2	Penyusunan kriteria dan kawasan induk perkotaan	tersusunya dokumen perencanaan perkotaan			1 dokumen	Rp 150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	terbangunya infrastruktur kawasan perkotaan			14 lokasi	Rp 1.400.000.000	- Gedongtengen - Mergangsan - Tegalrejo - Umbulharjo	14 lokasi	Rp 1.600.000.000	- Gedongtengen - Mergangsan - Tegalrejo - Umbulharjo	14 lokasi	Rp 1.600.000.000	- Gedongtengen - Mergangsan - Tegalrejo - Umbulharjo	14 lokasi	Rp 1.600.000.000	- Gedongtengen - Mergangsan - Tegalrejo - Umbulharjo	14 lokasi	Rp 1.600.000.000
16	<b>Program Pengembangan Kawasan Pedesaan</b>	<b>Prosentase Peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin (RPJMD)</b>			<b>43%</b>	<b>Rp 18.900.000.000</b>		<b>47%</b>	<b>Rp 15.000.000.000</b>		<b>51%</b>	<b>Rp 15.000.000.000</b>		<b>55%</b>	<b>Rp 15.000.000.000</b>		<b>59%</b>	<b>Rp 15.000.000.000</b>
1	Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan	Terbangunya infrastruktur pendukung agropolitan, minapolitan, dan desa potensi		ngemplak, srandakan	2 paket	Rp 1.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	terbangunya infrastruktur pedesaan		DIY	173 lokasi	Rp 17.300.000.000	- Banguntapan - Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Karangmojo - Playen - Ponjong - Semanu - Semin - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Seyegan	48 lokasi	Rp 5.000.000.000	- Banguntapan - Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Karangmojo - Playen - Ponjong - Semanu - Semin - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Seyegan		Rp 5.500.000.000	- Banguntapan - Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Karangmojo - Playen - Ponjong - Semanu - Semin - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Seyegan		Rp 6.000.000.000	- Banguntapan - Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Karangmojo - Playen - Ponjong - Semanu - Semin - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Seyegan		Rp 6.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)					
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
17	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi	Dukungan Infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi	28%	34%				40%	Rp 5.000.000.000			46%	Rp 5.000.000.000			52%	Rp 5.000.000.000			58%	Rp 5.000.000.000
1	Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan	terbangunnya infrastruktur dan tersusunnya dokumen perencanaan agropolitan, minapolitan dan desa potensi		-	-	-	- Sanden - Saptosari - Tanjungsari - Temon	4 paket, 1 dokumen	Rp 5.000.000.000	- brotot - ngobaran - ngemplak - ngangeran	3 paket, 1 dokumen	Rp 5.000.000.000	- Ngawen - Banguntapan - Turi - Samigaluh	3 paket, 1 dokumen	Rp 5.000.000.000	- Playen - Samas - berbah - Samigaluh	3 paket, 1 dokumen	Rp 5.000.000.000			
18	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pengurangan Jumlah Titik Genangan (RPJMD)	27,90%	33,90%	Rp 3.424.916.000			39,90%	Rp 5.000.000.000			45,90%	Rp 6.000.000.000			51,90%	Rp 6.000.000.000			57,90%	Rp 6.000.000.000
1	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Drainase Berwawasan Lingkungan		- Kotagede - Tegalrejo - Umbulharjo - Godean - gondomanan	5 dokumen	Rp 350.000.000	- Danurejan - Gondokusuman - Umbulharjo - Depok - Mlati	5 dokumen	Rp 290.000.000	KPY	5 dokumen	Rp 500.000.000	KPY	5 dokumen	Rp 400.000.000	KPY	5 dokumen	Rp 500.000.000			
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terlaksanaan Pembangunan Saluran Drainase		- Sewon - Mantrijeron	2 paket	Rp 3.000.000.000	- Sewon - Kotagede - Tegalrejo - Godean	5 paket	Rp 4.350.000.000	KPY	5 paket	Rp 4.500.000.000	KPY	5 paket	Rp 4.400.000.000	KPY	5 paket	Rp 4.500.000.000			
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi saluran drainase		-	-	-	DIY	1 laporan	Rp 100.000.000	-	-	-	DIY	1 laporan	Rp 200.000.000	-	-	-			
4	Pengembangan Saluran Drainase Lingkungan	Tersusunnya Dokumen NSPK drainase		DIY	1 dokumen	Rp 74.916.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Prosentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku (RPJMD)	78%	80%	Rp 128.987.000			82%	Rp 2.500.000.000			84%	Rp 2.750.000.000			86%	Rp 3.000.000.000			88%	Rp 3.250.000.000
1	Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara	terlaksananya sosialisasi pembangunan gedung negara			2 kali	Rp 29.000.000	Lainnya : DIY	10 kali	Rp 250.000.000	Lainnya : DIY	10 kali	Rp 300.000.000	Lainnya : DIY	10 kali	Rp 350.000.000	Lainnya : DIY	10 kali	Rp 400.000.000			
2	Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah	tersusunnya dokumen inventarisasi bangunan gedung pemerintah		Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 99.987.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 200.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 300.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 500.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 550.000.000			
20	Program Pengendalian Banjir	Prosentase Penanganan Banjir terhadap daerah (RPJMD)	20 titik	40 titik	Rp 1.518.497.075			60 titik	Rp 3.300.000.000			80 titik	Rp 3.630.000.000			100 titik	Rp 4.400.000.000			120 titik	Rp 4.400.000.000
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Terbangunnya Perkuatan Tebing Sungai		Bantul (Sungai Winongo)	1 Paket Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Rp 1.000.000.000	DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	4 Paket Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Rp 1.800.000.000	DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	4 Paket Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Rp 2.000.000.000	DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	4 Paket Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Rp 2.300.000.000	DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	4 Paket Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai	Rp 2.600.000.000			
2	Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan	Pemeliharaan bangunan prasarana sungai, pengadaan bronjong dan karung plastik		DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	750 Bronjong dan 95000 Karung Plastik	518.497.075	DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	4 sungai dan 750 Bronjong dan 95000 Karung Plastik	Rp 1.500.000.000	DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	4 sungai dan 750 Bronjong dan 95000 Karung Plastik	Rp 1.630.000.000	DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	4 sungai dan 800 Bronjong dan 95000 Karung Plastik	Rp 1.700.000.000	DAS Opak 4 sungai : Winongo, Gadjah Wong, Code/Boyong, Bedog.	4 sungai dan 800 Bronjong dan 95000 Karung Plastik	Rp 1.800.000.000			

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun-1 (2013)			Tahun-2 (2014)			Tahun-3 (2015)			Tahun-4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)			
21	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji dalam Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	70,00%	DIY	75,00%	Rp 680.000.000	DIY	81,25%	Rp 650.000.000	DIY	87,50%	Rp 700.000.000	DIY	93,75%	Rp 750.000.000	DIY	100%	Rp 800.000.000
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap pelaksana konstruksi		DIY	3 angkatan	Rp 60.000.000	DIY	2 angkatan	Rp 40.000.000	DIY	2 angkatan	Rp 40.000.000	DIY	2 angkatan	Rp 40.000.000	DIY	2 angkatan	Rp 40.000.000
2	Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	Terlaksananya Pengujian kualitas mutu air dan kualitas mutu bahan bangunan		DIY	300 Sertifikat Hasil Uji	Rp 195.000.000	DIY	325 Sertifikat Hasil Uji	Rp 250.000.000	DIY	350 Sertifikat Hasil Uji	Rp 275.000.000	DIY	375 Sertifikat Hasil Uji	Rp 300.000.000	DIY	400 Sertifikat Hasil Uji	Rp 325.000.000
3	Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian	Dipertahankan Sertifikat SNI ISO 17025 : 2008 Laboratorium Balai PIPBPIK secara berkesinambungan dan tercapainya penambahan jumlah parameter terakreditasi		DIY	Persiapan dalam rangka REAKREDITASI ke-1 untuk 31 parameter uji terakreditasi	Rp 425.000.000	DIY	Memperoleh Sertifikat AKREDITASI untuk 31 parameter uji dalam rangka REAKREDITASI dan penambahan ruang lingkup 5 parameter terakreditasi	Rp 360.000.000	DIY	Survailen I terhadap 36 parameter terakreditasi (konsistensi penggunaan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2008) dan penambahan ruang lingkup 6 parameter terakreditasi	Rp 385.000.000	DIY	Survailen II terhadap 42 parameter terakreditasi (konsistensi penggunaan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2008) dan penambahan ruang lingkup 5 parameter terakreditasi	Rp 410.000.000	DIY	Persiapan REAKREDITASI ke-II untuk 47 parameter terakreditasi dan penambahan ruang lingkup 4 parameter terakreditasi	Rp 435.000.000
22	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Peningkatan Performance / Kinerja Jasa Konstruksi (RPJMD)	75%		77,50%	Rp 985.000.000		80%	Rp 1.015.000.000		82,50%	Rp 1.125.000.000		85,00%	Rp 1.200.000.000		87,50%	Rp 1.200.000.000
1	Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya sosialisasi dan desiminasi peraturan perundangan jasa konstruksi (10 kegiatan/500 orang)		DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	100 orang	Rp 100.000.000	DIY	100 orang	Rp 100.000.000	DIY	100 orang	Rp 100.000.000	DIY	100 orang	Rp 100.000.000
2	Sistem Database Jasa Konstruksi	Terkelolanya database jasa konstruksi yang handal dan terbaru ( 1 sistem informasi)		DIY	1 Paket	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	1 Paket	Rp 50.000.000	DIY	1 Paket	Rp 75.000.000	DIY	1 Paket	Rp 75.000.000	DIY	1 Paket	Rp 75.000.000
3	Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Terselenggaranya pembinaan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi ( 5 kab/kota)		DIY	1 kegiatan	Rp 60.000.000	Lainnya : DIY	1 Perda IUJK	Rp 40.000.000	DIY	1 Perda IUJK	Rp 50.000.000	DIY	1 Perda IUJK	Rp 50.000.000	DIY	1 Perda IUJK	Rp 50.000.000
4	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis bagi penyedia jasa konstruksi (10 kegiatan/500 orang)		DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 125.000.000	Lainnya : DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 125.000.000	DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 125.000.000	DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 125.000.000	DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
5	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis bagi pengguna jasa konstruksi (10 kegiatan/500 orang)		DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 100.000.000	DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 100.000.000	DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 100.000.000	DIY	2 kegiatan/100 orang	Rp 100.000.000
6	Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah	Terselenggaranya Forum jasa konstruksi daerah (10 kegiatan/600 orang)		DIY	2 kegiatan/120 orang	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	2 kegiatan/120 orang	Rp 50.000.000	DIY	2 kegiatan/120 orang	Rp 50.000.000	DIY	2 kegiatan/120 orang	Rp 50.000.000	DIY	2 kegiatan/120 orang	Rp 50.000.000
7	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi		DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 75.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 100.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 100.000.000
8	Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya pemanfaatan jasa konstruksi		DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 75.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 75.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 75.000.000
9	Pengawasan Terhadap Perizinan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya pengawasan Perizinan Jasa Konstruksi		DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 75.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 100.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 100.000.000
10	Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya pengawasan ketentuan keteknikan jasa konstruksi		DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 75.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 75.000.000
11	Pengawasan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Terselenggaranya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi		DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000	DIY	1 dokumen pengawasan	Rp 50.000.000
12	Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan	Terselenggaranya pembinaan konstruksi berkelanjutan					Lainnya : DIY	5 kegiatan	Rp 300.000.000	DIY	5 kegiatan	Rp 300.000.000	DIY	5 kegiatan	Rp 300.000.000	DIY	5 kegiatan	Rp 300.000.000
<b>23</b>	<b>Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum</b>	<b>Prosentase Peningkatan Penguasaan Teknologi dan Penyebaran Informasi Bidang PU (RPJMD)</b>	<b>72,50%</b>		<b>75,00%</b>	<b>Rp 693.455.400</b>		<b>77,50%</b>	<b>Rp 800.000.000</b>		<b>80,00%</b>	<b>Rp 850.000.000</b>		<b>82,50%</b>	<b>Rp 900.000.000</b>		<b>85,00%</b>	<b>Rp 950.000.000</b>
1	Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam	Terpublikasinya kajian potensi SDA		Lainnya : DIY	5 kab/kota	Rp 49.499.600	Lainnya : DIY	5 kab/kota	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	5 kab/kota	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	5 kab/kota	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	5 kab/kota	Rp 50.000.000
2	Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan penerapan teknologi ke-PU-an					Lainnya : DIY	2 unit dan 4 materi	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	3 unit dan 4 materi	Rp 150.000.000	Lainnya : DIY	2 unit dan 4 materi	Rp 200.000.000	Lainnya : DIY	3 unit dan 4 materi	Rp 250.000.000
3	Survey Bahan Bangunan Keciptakarya	Terpublikasinya informasi harga satuan bahan bangunan		Lainnya : DIY	20 toko	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	20 toko	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	20 toko	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	20 toko	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	20 toko	Rp 50.000.000
4	Informasi Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan penyebaran/sosialisasi informasi teknologi ke-PU-an		Lainnya : DIY	8 angkatan dan 8 laman	Rp 593.955.800	Lainnya : DIY	8 angkatan dan 8 laman	Rp 600.000.000	Lainnya : DIY	8 angkatan dan 8 laman	Rp 600.000.000	Lainnya : DIY	8 angkatan dan 8 laman	Rp 600.000.000	Lainnya : DIY	8 angkatan dan 8 laman	Rp 600.000.000
<b>14</b>	<b>Usuran Perumahan</b>					<b>Rp 21.499.165.000</b>			<b>Rp 13.446.800.000</b>			<b>Rp 13.446.800.000</b>			<b>Rp 13.446.800.000</b>			<b>Rp 13.446.800.000</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengurangan Kawasan Kumuh</b>	<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Berwujudan yang teraksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan permukiman di kawasan kumuh</b>	<b>23,20%</b>		<b>29,00%</b>	<b>Rp 4.000.000.000</b>		<b>34,00%</b>	<b>Rp 3.600.000.000</b>		<b>40,00%</b>	<b>Rp 3.600.000.000</b>		<b>46,00%</b>	<b>Rp 3.600.000.000</b>		<b>51,00%</b>	<b>Rp 3.600.000.000</b>
1	Penataan Kawasan Kumuh			DIY	3 kawasan	Rp 4.000.000.000	- Imogiri - Karangmojo - Ponjong - Mergansan - Samigaluh - Prambanan	6 kawasan	Rp 3.600.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	6 kawasan	Rp 3.600.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	6 kawasan	Rp 3.600.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	6 kawasan	Rp 3.600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas (RPJMD)	38,58%	5 kab/kota	44,00%	Rp 6.150.000.000	20 kec. Miskin	49,00%	Rp 2.350.000.000	54,00%	Rp 2.350.000.000		59,00%	Rp 2.350.000.000		64,00%	Rp 2.350.000.000	
1	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	terkoordinasinya dan terkendalinya kebijakan pembangunan perumahan		DIY	4 kegiatan (5 Kab/kota)	Rp 150.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	4 dokumen	Rp 150.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	4 dokumen	Rp 150.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	4 dokumen	Rp 150.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	4 dokumen	Rp 150.000.000
2	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan	terbangunnya Prasarana dan sarana Umum di kawasan permukiman perdesaan		5 kab/kota	20 Komunitas	Rp 1.900.000.000	-Kasihian -Gedang sari -Semanu -Umbulharjo -Kalibawang -Kokap -Gamping	7 Komunitas	Rp 700.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	7 komunitas	Rp 700.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	7 komunitas	Rp 700.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	7 komunitas	Rp 700.000.000
3	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	terfasilitasinya pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman		5 kab/kota	41 komunitas	Rp 4.100.000.000	-Kasihian -Sewon -Gedang sari -Playen -Semanu -Semin	15 Komunitas	Rp 1.500.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	15 Komunitas	Rp 1.500.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	15 Komunitas	Rp 1.500.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	15 Komunitas	Rp 1.500.000.000
3	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun (RPJMD)	8,50%		8,00%	Rp 11.349.165.000		7,50%	Rp 7.496.800.000		7,00%	Rp 7.496.800.000		6,50%	Rp 7.496.800.000		6,00%	Rp 7.496.800.000
1	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	tersusunnya bahan rancangan kebijakan, strategi dan program perumahan DIY		DIY		Rp 538.705.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	6 dokumen	Rp 450.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	5 dokumen	Rp 450.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	5 dokumen	Rp 450.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	5 dokumen	Rp 450.000.000
2	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	tersusunnya Norma, Standar, Pedoman dan Manual bidang perumahan DIY		DIY	6 Dokumen	Rp 97.960.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	2 dokumen	Rp 200.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	2 dokumen	Rp 200.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	2 dokumen	Rp 200.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	2 dokumen	Rp 200.000.000
3	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	terfasilitasinya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni		Banguntapan - Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Karangmojo - Playen - Ponjong - Semanu - Semin - Gedongtengen - Mergangsan - Tegalrejo - Umbulharjo - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Sevegan	1234 rumah	Rp 10.712.500.000	-Banguntapan - Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Karangmojo - Playen - Ponjong - Semanu - Semin - Gedongtengen - Mergangsan - Tegalrejo - Umbulharjo - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Sevegan	768 rumah	Rp 6.796.800.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	768 rumah	Rp 6.796.800.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	768 rumah	Rp 6.796.800.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	768 rumah	Rp 6.796.800.000
4	Monitoring dan Evaluasi program pusat di Daerah	termonitornya dan terevaluasinya program pusat dan daerah				Rp	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen	Rp 50.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen	Rp 50.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen	Rp 50.000.000	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen	Rp 50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
<b>15</b>	<b>Urusan Penataan Ruang</b>																	
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi (RPMJD)</b>	<b>10 Kawasan Strategis</b>		<b>12 Kawasan strategis</b>	<b>Rp 994.357.000</b>		<b>14 Kawasan strategis</b>	<b>Rp 1.850.000.000</b>		<b>16 Kawasan strategis</b>	<b>Rp 1.700.000.000</b>		<b>18 Kawasan strategis</b>	<b>Rp 1.800.000.000</b>		<b>19 Kawasan strategis</b>	<b>Rp 1.800.000.000</b>
1	Penyusunan RTR kawasan	1. Tersusunnya RTR Kawasan Strategis Koridor Tempel-Parangtritis, 2. Tersusunnya RTR Kawasan pelestarian alam ekogeowisata karst		Temon - Prambanan	1 dokumen	Rp 700.000.000	Lainnya : 1) Tempel-Parangtritis; dan 2) Kabupaten Gunungkidul	2 dokumen	Rp 1.200.000.000	Kab. Bantul (Kec. Sewon, Kec. Kasihan) mrp sub pusat pelayanan bag kota	2 dokumen	Rp 1.000.000.000	Kab. Sleman (Kec. Pakem, Kec. Godean)	2 dokumen	Rp 1.000.000.000	Kab Bantul (Kec. Piyungan, Kec. Sedayu)	2 dokumen	Rp 1.000.000.000
2	Penyusunan draft Raperda ttg RTR kws strategis koridor Temon-Prambanan	Tersusunnya draft Raperda/Rapergub ttg RTR kws strategis koridor temon - prambanan		Yogyakarta - Sadeng	3 dokumen	Rp 99.958.000	Lainnya : Temon-Prambanan	3 dokumen	Rp 250.000.000	1. Tempel – Parangtritis, 2. Ekogeowisata Kart Kab. Gunungkidul	6 dokumen	Rp 500.000.000	Kab. Bantul (Kec. Sewon, Kec. Kasihan) mrp sub pusat pelayanan bag kota	6 dokumen	Rp 500.000.000	Kab. Sleman (Kec. Pakem, Kec. Godean)	6 dokumen	Rp 500.000.000
3	Sosialisasi Peraturan PerUU tentang RTR	Tersosialisasikannya peraturan PerUU ttg RTR		DIY	1 laporan	Rp 100.000.000	RTR KSP kawasan perkotaan Yogyakarta, RTS KSP Pantai selatan, RTS KSP Yogyakarta	3 Laporan	Rp 300.000.000	RTR KSP Temon-Prambanan	1 Laporan	Rp 100.000.000	RTR KSP Tempel-Parangtritis, RTR Ekogeowisata Karst Gn.Kidul	1 Laporan	Rp 200.000.000	RTR KSP Kab.Bantul (Kec.Sewon, Kasihan)	2 Laporan	Rp 200.000.000
4	Pelatihan Aparat dalam perencanaan tata ruang	Terlatihnya aparat dalam perencanaan tata ruang		DIY	1 laporan	Rp 94.399.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000
<b>2</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW kab/ kota dan RTRW Provinsi (RPJMD)</b>	<b>45%</b>		<b>50%</b>	<b>Rp 874.600.000</b>		<b>60%</b>	<b>Rp 2.300.000.000</b>		<b>70%</b>	<b>Rp 2.500.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>Rp 2.000.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>Rp 2.400.000.000</b>
1	Penyusunan NSPK	1. Tersusunnya NSPK pemodelan daya dukung & daya tampung keruangan kws strategis ekonomi 2. Tersusunnya NSPK kawasan Longsor		DIY	1 dokumen	Rp 600.000.000	-	-	-	Kawasan lindung setempat DIY (Waduk)	1 Dokumen	Rp 400.000.000	Kawasan lindung setempat DIY (mata air)	2 dokumen	Rp 400.000.000	Ekogeowisata karst, Gumuk pasir	2 Dokumen	Rp 800.000.000
2	Penyusunan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang	Ditetapkannya kriteria penentuan & kriteria perubahan fungsi ruang suatu kws yg berskala besar & berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.					Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 700.000.000									
3	Kampanye publik penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya Kampanye publik penyelenggaraan penataan ruang					Lainnya : DIY	1 kegiatan	Rp 400.000.000	DIY	1 dokumen	Rp 600.000.000	DIY	1 dokumen	Rp 400.000.000	DIY	1 dokumen	Rp 400.000.000
4	Penyusunan kebijakan pengembangan infrastruktur dan pengembangan kapasitas pengelolaan di KPY	Tersusunnya kebijakan pengembangan infrastruktur & pengembangan kapasitas pengelolaan di KPY					Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 500.000.000	Yogyakarta-Sadeng	1 dokumen	Rp 500.000.000	Temon - Prambanan	1 dokumen	Rp 500.000.000	Tempel - Parangtritis	1 dokumen	Rp 500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 ( 2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(9)	(10)		(9)	(10)		(9)	(10)	
5	Pelatihan Aparat dalam pemanfaatan ruang	Terlatihnya aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang		DIY	1 laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000
6	Monitoring & evaluasi pelaporan pemanfaatan ruang	Tersusunnya laporan movev pemanfaatan ruang		DIY	1 laporan	Rp 74.600.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 100.000.000
8	Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis, draft Rapergub	Tersusunnya Materi Teknis/ Naskah Akademis / draft Rapergub		-	-	-	DIY	3 Dokumen	Rp 500.000.000	DIY	6 Dokumen	Rp 800.000.000	DIY	3 Dokumen	Rp 500.000.000	Sempadan waduk, mata air DIY	6 dokumen	Rp 500.000.000
<b>3</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Prosentase Pengendalian Tata Ruang Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahh (RPJMD)</b>	<b>10%</b>		<b>20%</b>	<b>Rp 847.360.000</b>		<b>40%</b>	<b>Rp 2.000.000.000</b>		<b>60%</b>	<b>Rp 1.500.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>Rp 1.600.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 1.600.000.000</b>
1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		DIY	1 dokumen	Rp 496.452.000	Lainnya : Daerah Istimewa	1 dokumen	Rp 700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelatihan Aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Terlatihnya aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang		DIY	1 laporan	Rp 83.040.000	Lainnya : DIY	5 angkatan	Rp 100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	penyusunan insentif dan disinsentif kabupaten dengan kab/kota	Tersusunnya insentif & disinsentif kabupaten dg kabupaten/kota					Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 600.000.000	DIY (Pemda ke masy)	1 dokumen	Rp 800.000.000	DIY (KCB)	1 dokumen	Rp 800.000.000	DIY (prasarana perkotaan)	1 dokumen	Rp 800.000.000
4	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya laporan pengawasan pemanfaatan ruang		DIY	1 dokumen	Rp 173.514.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 250.000.000	DIY	1 dokumen	Rp 250.000.000	DIY	1 dokumen	Rp 350.000.000	DIY	1 dokumen	Rp 350.000.000
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang oleh PPNS	Tersusunnya pengendalian pemanfaatan ruang					Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 250.000.000	DIY	1 laporan	Rp 250.000.000	DIY	1 laporan	Rp 250.000.000	DIY	1 laporan	Rp 250.000.000
6	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersosialisasikannya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		DIY	1 laporan	Rp 94.354.000	Lainnya : DIY	3 angkatan	Rp 100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang		-	-	-	-	-	-	DIY	1 laporan	Rp 200.000.000	DIY	1 laporan	Rp 200.000.000	DIY	1 laporan	Rp 200.000.000
<b>2</b>	<b>Urusan Pilihan</b>																	
<b>23</b>	<b>Urusan ESDM</b>																	
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan</b>	<b>Pencapaian rasio elektrifikasi (RPJMD)</b>	<b>76,80%</b>		<b>77,40%</b>			<b>78,00%</b>	<b>Rp 4.056.000.000</b>		<b>78,60%</b>	<b>Rp 4.440.000.000</b>		<b>79,20%</b>	<b>Rp 4.530.000.000</b>		<b>79,80%</b>	<b>Rp 5.382.000.000</b>
1	Penyusunan DED Lisdes	Terlaksananya penyusunan DED Lisdes untuk pembangunan listrik pedesaan		Kec. Kokap, KP; Kec. Piyungan dan Imogiri, Bantul; Kec. Paliyan dan Panggang, GK; Kec. Prambanan, Sleman	1 dokumen	Rp 360.000.000	Lainnya : Kec. Kokap, Samigaluh KP; Kec. Imogiri, Bantul; Kec. Gedangsari,	1 dokumen	Rp 360.000.000	Kec. Kokap, Samigaluh, Kalibawang KP; Kec. Imogiri, Dlingo Bantul; Kec. Gedangsari, Saptosari GK;	1 dokumen	Rp 375.000.000	Kec. Kokap, Pengasih KP; Kec. Pajangan, Pleret Bantul; Kec. Tepus, Semanu GK;	1 dokumen	Rp 400.000.000	Kec. Kokap, Pengasih KP; Kec. Pajangan, Kasihan Bantul; Kec. Tepus, Girisubo GK;	1 dokumen	Rp 425.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	Pembangunan Jaringan listrik Pedesaan	Terlaksananya pembangunan listrik pedesaan		Kec. Kokap dan Girimulyo, KP; Kec.Imogiri, Btl; Kec.Semanu, GK; Kec.Prambanan, Sleman; Kec. Kokap dan Samigaluh, KP; Kec. Dlingo, Pajangan, Sewon, Bambanglipuro, Pleret, Pundong, Banguntapan, dan Kasihan, Bantul; Kec. Paliyan, Playen, Wonosari dan Saptosari, GK	8 dusun, 493 rumah, 4 dokumen, 4 kali	Rp 2.644.000.000	Lainnya : DIY; Kec. Kokap dan Girimulyo, KP; Kec.Imogiri, Piyungan, Bantul	8 dusun, 300 rumah, 2 gedung pemerintah	Rp 3.346.000.000	Kec. Kokap, Samigaluh KP; Kec. Imogiri, Bantul; Kec. Gedangsari, GK; Kec. Kokap, KP; Kec. Piyungan Bantul; Kec. Paliyan, Karangasem, GK;	8 DUSUN, 300 rumah, 2 gedung	Rp 3.965.000.000	Kec. Kokap, Samigaluh, Kalibawang KP; Kec. Imogiri, Dlingo Bantul; Kec. Gedangsari, Saptosari GK;	8 DUSUN, 300 rumah, 2 gedung	Rp 4.005.000.000	Kec. Kokap, Pengasih Samigaluh, Kalibawang KP; Kec. Pajangan, Pleret, Imogiri, Dlingo Bantul; Kec. Tepus, Semanu, Kec. Gedangsari, Saptosari GK;	8 DUSUN, 300 rumah, 2 gedung	Rp 4.832.000.000
3	Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan		DIY	2 dokumen, 4 kali, 1 laporan	Rp 335.000.000	Lainnya : DIY; Kec. Kokap, KP; Kec. Piyungan Bantul; Kec. Paliyan, Karanga	1 dokumen, 4 kali sosialisasi, 1 laporan	Rp 250.000.000	Kec. Kokap, Samigaluh KP; Kec. Imogiri, Bantul; Kec. Gedangsari, GK;	Sosialisasi 4 kali, Workshop 1 laporan	Rp 100.000.000	Kec. Kokap, Samigaluh, Kalibawang KP; Kec. Imogiri, Dlingo Bantul; Kec. Gedangsari, Saptosari GK;	7 kali, 1 laporan	Rp 125.000.000	Kec. Kokap, Pengasih KP; Kec. Pajangan, Pleret Bantul; Kec. Tepus, Semanu GK;	6 kali 1 laporan	Rp 125.000.000
4	Koordinasi Penyediaan dan Pemenuhan Listrik	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan dan Pemenuhan Listrik				Rp	Lainnya : DIY	1 dokumen, 2 workshop	Rp 100.000.000									
<b>2</b>	<b>Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan</b>	<b>Pencapaian pangsa energi baru terbarukan (RPJMD)</b>	<b>104,720 SBM</b>	<b>107.790 SBM</b>	<b>Rp 1.776.850.000</b>	<b>112.000 SBM</b>	<b>Rp 2.982.000.000</b>	<b>117.950 SBM</b>	<b>Rp 3.276.000.000</b>	<b>123.590 SBM</b>	<b>Rp 3.675.000.000</b>	<b>130.100 SBM</b>	<b>Rp 3.964.000.000</b>					
1	Penyusunan DED Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya penyusunan DED energi baru terbarukan					Lainnya : Kabupaten	1 dokumen	Rp 100.000.000	Kab. Gunungkidul	1 dokumen	Rp 144.400.000	Kab. Gunungkidul	1 dokumen	Rp 200.000.000	Kab. Sleman	1 dokumen	Rp 250.000.000
2	Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan		Kecamata Kalibawang dan Kecamatan Kokap Kulon Progo, DIY	1 unit, 25 unit, 1 dokumen	Rp 1.014.278.300	Lainnya : DIY; Kec. Kokap dan Kalibawang, KP	PLTS 25 unit, 1 dok, PLTMH 1 unit	Rp 1.500.000.000	Kec. Kokap, KP Kab. Bantul	PLTS : 50 unit PLTMH 1 unit	Rp 1.700.000.000	Kec. Samigaluh, KP, Kab. Gunungkidul, DIY	PLTS :50 unit, PLTB 1 unit, 1 dokumen	Rp 1.768.750.000	Kec. Samigaluh, KP, Kab. Gunungkidul	PLTS :50 unit, PLTS (kmunal) 1 unit, 1 dokumen	Rp 1.916.600.000
3	Pengembangan Biogas untuk Listrik	Terlaksananya Pengembangan Biogas yang dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga Listrik		Kec. Kalibawang KP; Kec. Tempel, Moyudan Sleman; Kec. Pandak, Sanden, Kretek, Bambanglipuro, Pundong Bantul; Kec Purwosari GK	10 unit	Rp 365.832.000	- Pandak - Spto sari - Wonosari - Kalibawang - Sleman	5 unit	Rp 340.000.000	Kec. Kalibawang KP; Kec. Sleman Sleman; Kec. Pandak Bantul; Kec Wonosari GK	5 unit	Rp 200.000.000	Kec. Lendah KP; Kec. Cangkringan Sleman; Kec. Pundong Bantul; Kec Nglipar GK	5 unit	Rp 200.000.000	Kec. Kalibawang KP; Kec. Cangkringan Sleman; Kec. Pandak Bantul; Kec Wonosari GK	5 unit	Rp 230.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 ( 2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(9)	(10)		(9)	(10)		(9)	(10)	
4	Pengembangan Biogas Untuk Bahan Bakar	Terlaksananya pemanfaatan bahan bakar alternatif berbasis biogas		-	-	Rp -	- Piyungan - Pundong - Seyeagan - Tempel	80 unit	Rp 627.000.000,00	Kec. Pengasih, KP; Kec. Playen, GK; Kec. Prambanan dan Kalasan, Sleman	80 unit	Rp 750.000.000	Kec. Bambanglipuro, Kretek, Bantul, Bantul; Kec. Karangmojo, GK	80 unit	Rp 810.000.000	Kec. Imogiri, Pleret, Bantul; Kec. Lendah, KP; Kec. Ngawen, GK; Kec. Berbah, Sleman	80 unit	Rp 835.400.000
5	Pengembangan Bahan Bakar Berbasis Bioenergi	Terlaksananya pemanfaatan bahan bakar alternatif berbasis bioenergi		-	-	Rp -	- Girisubo - Paliyan	2 lokasi	Rp 165.000.000,00	Kec. Girisubo, Palyan, GK	1 dokumen	Rp 180.000.000	Kec. Girisubo, Paliyan, GK	1 Dokumen	Rp 210.000.000	1 paket	Rp 220.000.000	
6	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Baru Terbarukan	Terbentuknya kelembagaan pengelola energi baru terbarukan yang handal/kuat		DIY	2 laporan, 1 dokumen	Rp 76.464.000	Lainnya : DIY, Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul	1 dokumen, 1 dokumen, 1 tim	Rp 150.000.000,00	Kec. Piyungan, Pundong, Bantul; Kec. Tempel dan Sayegan, Sleman	1 dokumen	Rp 175.000.000	Kec. Pengasih, KP; Kec. Playen, GK; Kec. Prambanan dan Kalasan, Sleman	2 dokumen	Rp 131.250.000	Kec. Bambanglipuro, Kretek, Bantul, Bantul; Kec. Karangmojo, GK DIY	2 dokumen	Rp 142.000.000
7	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan		Kec. Minggir Sleman, Kec Sewon Bantul; Kec. Kalibawang KP; Kec. Tempel, Moyudan Sleman; Kec. Pandak, Sanden, Kretek, Bambanglipuro, Pundong Bantul; Kec Purwosari GK; DIY	3 unit, 3 dokumen, 3 laporan, 11 kali	Rp 320.275.700	Lainnya : DIY; Kec. Kalibawang, Kokap, Samigaluh, KP; Kec. Sleman, Turi, S	3 unit, 1 dokumen, 1 laporan	Rp 100.000.000,00	Kec. Turi Sleman, Kec Samigaluh KP, Kec. Kalibawang, Kokap KP; Kec. Sleman Sleman; Kec. Pandak Bantul; Kec Wonosari GK	4 dokumen, 7 Kali, 3 unit	Rp 126.600.000	Kec. Lendah, Samigaluh KP; Kec. Cangkringan Kec. Turi Sleman; Kec. Pundong Bantul; Kec Nglipar GK; Kab GK	3 unit 2 dokumen 3 laporan 7 kali	Rp 355.000.000	Kec. Cangkringan Sleman; Kec. Pleret Kec. Pandak Bantul; Kec. Kalibawang, Samigaluh KP; ; Kec Wonosari, Kec Nglipar GK	3 unit 2 dokumen 3 laporan 7 kali	Rp 370.000.000
3	<b>Program Pembinaan , Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan , pendayagunaan Air Tanah</b>	<b>Rerata penurunan muka air tanah (RPJMD)</b>	<b>&lt; 20%</b>		<b>&lt; 20%</b>	<b>Rp 3.475.000.000</b>		<b>&lt; 20%</b>	<b>Rp 4.000.000.000</b>		<b>&lt; 20%</b>	<b>Rp 4.300.000.000</b>		<b>&lt; 20%</b>	<b>Rp 4.600.000.000</b>		<b>&lt; 20%</b>	<b>Rp 2.665.000.000</b>
1	Pembangunan Sarana Pemantauan Air Tanah	Tersedianya sarana pemantauan air tanah		Kec.Ngemplak, Sleman; Kec.Jetis, Gondomanan, Gondokusuman Kota Yogyakarta; CAT Yogyakarta-Sleman.	1 unit; 3 lokasi; 1 laporan	Rp 290.000.000	Lainnya : CAT Yogyakarta-Sleman	1 unit, 2 lokasi, 1 laporan, 1 unit	Rp 400.000.000	Kec.Tegalrejo, Kec.Pakualaman, Kota Yogyakarta, Kec.Pandowoharjo, Kec.Sardonoharjo. Sleman	2 lokasi, 2 Unit	Rp 450.000.000	Kec.Kraton Kec.Gondomanan, Kec.Panggunharjo, CAT Yogyakarta-Sleman	1 unit 2 lokasi 1 laporan	Rp 320.000.000	Kec.Mantrijeron, Kota Yogyakarta, CAT Yogyakarta-Sleman Kec.Gamping, dan Kec.Tirtomartani, Kab. Sleman	1 unit 2 lokasi 1 laporan	Rp 320.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(9)	(10)		(9)	(10)		(9)	(10)	
2	Pendayagunaan Air Tanah	Tersedianya sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air		Kec.Pandak, Kec.Piyungan, Kec.Dlingo, Kec.Pajangan, Kec.Nglipar dan Kec.Gamping; Kec.Nglipar, Kec. Minggir, Kec.Moyudan, Kec.Imogiri, Kec.Dlingo, dan Kec.Kasihah; CAT Yogyakarta-Sleman; Kec.Pandak, Kec.Piyungan, Kec.Dlingo, Kec.Pajangan, Kec.Nglipar dan Kec.Gamping	6 lokasi; 1 dokumen (6 lokasi); 1 dokumen; 120 unit	Rp 2.760.000.000	Lainnya : CAT Yogyakarta-Sleman	6 lokasi, 6 lokasi	Rp 2.700.000.000	Kec.Minggir, Kec.Moyudan, Kec.Imogiri, Kec.Pleret, Kec.Kasihah, Kec.Prambanan	6 lokasi	Rp 2.860.000.000	Kec.Minggir, Kec.Moyudan, Kec.Imogiri, Kec.Pleret, Kec.Kasihah, Kec.Prambanan	12 Lokasi	Rp 3.050.000.000	Kec.Moyudan, Kec.Kasihah, Kec.Prambanan	6 lokasi	Rp 1.450.000.000
3	Pengendalian daya rusak Air Tanah melalui Pembuatan Sumur Peresapan	Tersedianya sumur resapan					Lainnya : CAT Yogyakarta-Sleman	200 unit, 1 dokumen	Rp 500.000.000	Kec.Minggir, Kec.Moyudan, Kec.Imogiri, Kec.Pleret, Kec.Kasihah, Kec.Prambanan, Kec.Pakualaman, Kec.Ngemplak, Kec.Sewon	180 unit 1 dokumen	Rp 460.000.000	Kec.Minggir, Kec.Moyudan, Kec.Imogiri, Kec.Pleret, Kec.Kasihah, Kec.Prambanan, Kec.Mlati, Kec.Depok, Kec.Ngemplak	180 unit	Rp 625.000.000	Kec.Minggir, Kec.Moyudan, Kec.Imogiri, Kec.Pleret, Kec.Kasihah, Kec.Prambanan, Kec.Ngaglik, Kec.Danurejan, Kec.Gondomanan	180 unit	Rp 410.000.000
4	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan air tanah		Kab.Sleman; DIY; CAT Yogyakarta-Sleman	1 dokumen; 9 draft rapergub dan 9 draft rakepgub; 1 laporan; 500 eks dan 500 eks; 1 dokumen	Rp 350.000.000	Lainnya : CAT Yogyakarta-Sleman	1 dokumen, 500 eks	Rp 250.000.000	CAT Yogyakarta-Sleman	2 dokumen, 1 laporan	Rp 480.000.000	Kota Yogyakarta, CAT Yogyakarta-Sleman	2 dokumen, 1 laporan	Rp 545.000.000	CAT Yogyakarta-Sleman; Kab. Bantul	2 dokumen, 1 laporan	Rp 425.000.000
5	Pemantauan dan Evaluasi Air Tanah	Terlaksananya monitoring pengambilan dan pemanfaatan air tanah		CAT Yogyakarta-Sleman; DIY	1 laporan; 2 unit	Rp 75.000.000	Lainnya : CAT Yogyakarta-Sleman	1 laporan	Rp 50.000.000	CAT Yogyakarta-Sleman	1 laporan	Rp 25.000.000	CAT Yogyakarta-Sleman	1 laporan	Rp 30.000.000	CAT Yogyakarta-Sleman	1 laporan	Rp 30.000.000
6	Penyusunan Strategi dan Regulasi Konservasi Air Tanah	Tersedianya strategi dan regulasi konservasi air tanah					Lainnya : DIY	1 dokumen, 1 kali	Rp 100.000.000	CAT Yogyakarta-Sleman	1 laporan	Rp 25.000.000	CAT Yogyakarta-Sleman	1 laporan	Rp 30.000.000	CAT Yogyakarta-Sleman	1 laporan	Rp 30.000.000
<b>4</b>	<b>Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi</b>	<b>Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi (RPJMD)</b>	<b>3%</b>		<b>3%</b>	<b>Rp -</b>		<b>6%</b>	<b>Rp 600.000.000</b>		<b>9%</b>	<b>Rp 650.000.000</b>		<b>12%</b>	<b>Rp 700.000.000</b>		<b>15%</b>	<b>Rp 750.000.000</b>
1	Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi	Tersusunnya Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi				Rp -	Lainnya : DIY	2 dokumen	Rp 200.000.000	DIY	2 dokumen	Rp 190.000.000	DIY	2 dokumen	Rp 200.000.000	DIY	2 dokumen	Rp 210.000.000
2	Pelaksanaan Audit Energi	Terlaksananya Audit Energi				Rp -	Lainnya : DIY	10 gedung	Rp 400.000.000	DIY	5 gedung	Rp 260.000.000	DIY	5 gedung	Rp 290.000.000	DIY	5 gedung	Rp 310.000.000
3	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Energi									DIY	1 laporan	Rp 50.000.000	DIY	1 laporan	Rp 50.000.000	DIY	1 laporan	Rp 50.000.000
4	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi									DIY	5 kali	Rp 150.000.000	DIY	7 kali, 1 laporan	Rp 160.000.000	DIY	7 kali, 1 laporan	Rp 180.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun -1 (2013)			Tahun -2 (2014)			Tahun -3 (2015)			Tahun -4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(9)	(10)		(9)	(10)		(9)	(10)	
5	Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar (RPJMD)	30%		40%	Rp 1.226.834.000		50%	Rp 600.000.000		60%	Rp 650.000.000		70%	Rp 700.000.000		80%	Rp 750.000.000
1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi	Terlaksananya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi		Lainnya : DIY	1 Dokumen, 1 kali sosialisasi, 1 kali Bimtek, 1 kali Raker	Rp 78.221.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk IKM	Terlaksananya Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk IKM		Kabupaten, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul	72 unit digister biogas	Rp 550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi		Lainnya : DIY	1 laporan, 3 kali sosialisasi	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 150.000.000	Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 160.000.000	Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 165.000.000	Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 167.000.000
4	Pembinaan dan Pengawasan K2LL Usaha Migas	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan K2LL usaha hilir migas		Lainnya : DIY	1 laporan, 1 dokumen	Rp 39.990.000	Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 50.000.000	Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 60.000.000	Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 65.000.000	Lainnya : DIY	1 laporan	Rp 70.000.000
5	Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Terlaksananya Pengembangan Bahan Bakar Nabati		Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 150.000.000												
6	Peningkatan Fasilitas Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	Tersedianya fasilitas distribusi bahan bakar bersubsidi		Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul	1 dokumen, 1 unit Sub Penyalur LPG Bersubsidi	Rp 200.000.000	Lainnya : Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen dan 2 unit	Rp 300.000.000	Lainnya : Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen, 2 unit pangkalan LPG	Rp 320.000.000	Lainnya : Kabupaten Bantul	1 dokumen, 2 unit pangkalan LPG	Rp 350.000.000	Lainnya : Kabupaten Sleman	1 dokumen, 2 unit pangkalan LPG	Rp 375.000.000
7	Penyusunan Sistem Informasi Minyak dan Gas	Tersedianya data base dan informasi minyak dan gas bumi		Lainnya : DIY	1 SIM	Rp 108.623.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 100.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 110.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 120.000.000	Lainnya : DIY	1 dokumen	Rp 138.000.000
6	Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan (RPJMD)	8%		9%	Rp 696.828.672		10%	Rp 775.000.000		11%	Rp 800.000.000		12%	Rp 825.000.000		13%	Rp 850.000.000
1	Pemetaan Wilayah Potensi Pengembangan Usaha Pertambangan	Tersedianya data dan informasi potensi pengembangan usaha pertambangan		DIY	1 dokumen; 1 laporan; 1000 eks	Rp 350.000.000	Lainnya : DIY, Kabupaten Kulonprogo	1 laporan, 1 dokumen	Rp 340.000.000	Sleman, DIY	1 dokumen 1 laporan	Rp 340.000.000	Kab.Gunungkidul	1 dokumen, 1 laporan	Rp 360.000.000	Kec.Kokap, KP; DIY	1 dokumen, 1 laporan	Rp 385.000.000
2	Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral	Tersedianya alat dan rumah mesin pengolah mineral batuan batuan		Kec.Kokap, KP; Kec.Gedangsari Gunungkidul dan Pantai Selatan Kulonprogo	1 unit; 1 unit; 1 kali; 1 kali; 1 dokumen	Rp 299.828.672	-Temon -Tempel	1 unit, 1 unit, 1 kali, 1 kali, 1 dokumen	Rp 345.000.000	Kec.Temon, Kec.Kokap, KP	2 unit 1 dokumen 2 kali	Rp 365.000.000	Kec.Kokap, Kec.Girimulyo, KP	2 unit, 2 kali, 1 dokumen	Rp 370.000.000	Kec.Gedangsari GK; Kec. Kokap, KP	2 unit, 2 kali, 1 dokumen	Rp 370.000.000
3	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan		DIY, Kab.Sleman -Kab.Magelang	1 kali; 1 dokumen	Rp 47.000.000	Lainnya : DIY, Kec. Temon, Kulonprogo	1 kali, 1 dokumen	Rp 90.000.000	Kec.Girimulyo, KP DIY	1 dokumen 1 kali	Rp 95.000.000	Kec.Gedangsari ,GK, DIY	1 kali, 1 dokumen	Rp 95.000.000	Kec.Sentolo, KP; DIY	1 kali, 1 dokumen	Rp 95.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Tahun-1 (2013)			Tahun-2 (2014)			Tahun-3 (2015)			Tahun-4 (2016)			Tahun-5 (2017)		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)			
	<b>Program Keistimewaan</b>																	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>																	
<b>1</b>	<b>Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY</b>	<b>Persentase Pengaturan Dan Pengembangan Kawasan Strategis Yang Mempunyai Nilai dan Fungsi Budaya (RPJMD)</b>	<b>10%</b>		<b>20%</b>	<b>Rp 5.000.000.000</b>		<b>40%</b>	<b>Rp 6.000.000.000</b>		<b>60%</b>	<b>Rp 6.500.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>Rp 7.000.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 7.500.000.000</b>
1	Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Laporan Hasil Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten		DIY	1 Laporan	Rp 2.000.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 1.500.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 2.500.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 3.000.000.000	DIY	1 Laporan	Rp 3.000.000.000
2	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen RTR Kawasan Kasultanan dan Kadipaten		DIY	1 Dokumen	Rp 1.100.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 1.500.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 2.600.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 3.000.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 3.500.000.000
3	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten		DIY	1 Dokumen	Rp 500.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 500.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 500.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 500.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 500.000.000
4	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen Kebijakan Pengendalian Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten		DIY	1 Dokumen	Rp 500.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 500.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 500.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 300.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 300.000.000
5	Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) DIY	Dokumen RTRWP DIY		DIY	1 Dokumen	Rp 300.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 200.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 100.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 100.000.000
6	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) DIY	Dokumen KLHS Review RTRWP DIY		DIY	1 Dokumen	Rp 600.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 200.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 100.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 100.000.000
<b>2</b>	<b>Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan DIY</b>	<b>Persentase Penataan Kawasan Budaya (RPJMD)</b>	<b>38,30%</b>		<b>43,90%</b>	<b>Rp 20.000.000.000</b>		<b>49,50%</b>	<b>Rp 175.000.000.000</b>		<b>55,10%</b>	<b>Rp 180.000.000.000</b>		<b>60,70%</b>	<b>Rp 185.000.000.000</b>		<b>66,30%</b>	<b>Rp 190.000.000.000</b>
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Kasultanan dan Kadipaten		DIY	1 Dokumen	Rp 2.000.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 5.000.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 5.000.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 5.000.000.000	DIY	1 Dokumen	Rp 5.000.000.000
2	Revitalisasi Kawasan Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Kasultanan dan Kadipaten		DIY	1 Kawasan	Rp 18.000.000.000	DIY	1 Kawasan	Rp 170.000.000.000	DIY	1 Kawasan	Rp 175.000.000.000	DIY	1 Kawasan	Rp 180.000.000.000	DIY	1 Kawasan	Rp 185.000.000.000



# BAB VI

## INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

### 6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas PUP-ESDM D.I. Yogyakarta untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas PUP-ESDM DIY, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral.

Prestasi Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas PUP-ESDM DI Yogyakarta, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas PUP-ESDM DIY kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas PUP-ESDM itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 - 2017.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan di buktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas PUP-ESDM D.I. Yogyakarta yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013 – 2017 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
1	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	Persentase jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap	71,06	72,04%	72,64%	73,24%	73,84%	74,44	Capaian kinerja berdasarkan persentase pajang jalan kondisi mantap terhadap pajang jalan provinsi. Sesuai keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 151/KEP/2012 panjang jalan Provinsi DIY tahun 2012 menjadi 619,34 Km. Pada Th 2012 jalan kondisi mantap sepanjang 440,30 km atau 71,06% Target Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah : Th 2013 : 72,04% atau 446,17 Km Th 2014 : 72,64% atau 449,89 Km Th 2015 : 73,24% atau 453,60 Km Th 2016 : 73,84% atau 457,32 Km Th 2017 : 74,44% atau 461,04Km
2	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan,								
3	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.	Cakupan jalan dan Jembatan yang diinspeksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian Kinerja berdasarkan panjang jalan dan jembatan yang diinspeksi Pada tahun 2012 dilakukan inspeksi kondisi jalan dan jembatan provinsi ke seluruh jalan dan jembatan DIY sepanjang 619,34 Km atau 100% Target cakup jalan dan jembatan yang diinspeksi adalah : Th 2013 : 100 % atau 619,34 Km Th 2014 : 100 % atau 619,34 Km Th 2015 : 100 % atau 619,34 Km Th 2016 : 100 % atau 619,34 Km Th 2017 : 100 % atau 619,34 Km

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
4	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persentase penyediaan Aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	24,02%	24,91%	25,79%	26,67%	27,55%	28,44%	Capaian kinerja berdasarkan luasan ketersediaan tanah (lahan) untuk aksesibilitas kawasan strategis Total luas tanah(lahan) untuk aksesibilitas kawasan strategis dan baru yang diperlukan adalah 169,93ha. Sampai tahun 2012 telah disediakan/dibebaskan lahan seluas 40,82 atau 24,02%. Persentase penyediaan lahan untuk aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru adalah : s/d Th 2013 : 24,91% atau 42,32 Ha s/d Th 2014 : 25,79 % atau 58,82 Ha s/d Th 2015 : 26,67% atau 75,32 Ha s/d Th 2016 : 27,55% atau 97,82 Ha s/d Th 2017 : 28,44% atau 108,32 Ha
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi	75,06%	76,5%	78%	79,5%	81%	82,5%	Di DIY terdapat 44 Daerah Irigasi (DI) dengan luasan 17.112,87 ha. Sampai dengan tahun 2012 yang terlayani air irigasi seluas 12.844,54 ha (75,06 %). Target setiap tahun daerah irigasi yang terlayani air irigasi bertambah 1,5% luasan DI
6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Penambahan Penyediaan Air Baku	600 lt/det	700 lt/detik	900 lt/dt	1.200 lt/det	1.600 lt/det	2.100 lt/det	Penambahan penyediaan air baku sampai dengan tahun 2017 sebesar 2.100 lt/dt diupayakan dengan pembangunan embung dan sumber air lainnya.
7	Program penyediaan dan pengelolaan air baku								

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
8	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum,	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	70,38%	73,87%	77,36%	80,85%	84,34%	87,85%	Jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2012 adalah sejumlah 2.460.555 jiwa atau 70,38% dari keseluruhan jumlah penduduk DIY 3.496.100 jiwa, diharapkan tahun 2017 cakupan pelayanan air minum dapat meningkat menjadi 87,84 % atau meningkat sebesar 3,49% pertahun dengan catatan perlu peningkatan Pengembangan (7 s/d 8 Unit SPAM IKK) dan Optimalisasi SPAM IKK yang didanai oleh APBN sebesar 150% (Asumsi 1 Pengembangan SPAM IKK dengan kapasitas 20 lt/det melayani 8000 jiwa, dan 1 Optimalisasi SPAM IKK melayani 2000 jiwa)
9	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah,	Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di KPY	13.329 SR	14.400 SR	15.800 SR	17.200 SR	18.600 SR	20.000SR	Pelayanan sambungan rumah jaringan air limbah terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta pada akhir tahun 2012 adalah 13.329SR, ditargetkan setiap tahunnya dapat meningkat 1400 SR sehingga, pada akhir tahun 2017 pelayanan sambungan rumah jaringan air limbah IPAL Sewon dapat mencapai 20.000 SR
10	Program Pengelolaan Persampahan.	Persentase penerapan Sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	45%	50%	55%	60%	65%	70%	DIY memiliki 3 TPA dan 6 TPST 3R yang baru mendukung kinerja pengelolaan sampah ramah lingkungan di DIY sebesar 45% pada akhir tahun 2012, ditargetkan pada akhir tahun 2017 dapat meningkat menjadi 70% dengan pengembangan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah ramah lingkungan sejumlah 10 unit TPST 3R.(penambahan 3 Unit per tahun) (Asumsi: TPA Piyungan berkontribusi 25%, TPA Kulon Progo berkontribusi 5%, TPA Gunungkidul = 5%, dan 1 Unit TPST berkontribusi 1,5%)

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
11	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Prosentase Peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	53%	57%	61%	65%	69%	73%	Sampai dengan akhir tahun 2012 telah teridentifikasi 4 kecamatan miskin di kawasan perkotaan DIY, namun baru sekitar 53% dari kawasan-kawasan di 4 kecamatan miskin tersebut telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan, ditargetkan aksesibilitas kawasan perkotaan tersebut dapat meningkat 4% setiap tahunnya sehingga diharapkan pada akhir tahun 2017 dapat meningkat menjadi 73%
12	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan,	Prosentase Peningkatan Aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	39%	43%	47%	51%	55%	59%	Sampai dengan tahun 2012 telah teridentifikasi 16 kecamatan miskin di kawasan perdesaan DIY, namun baru sekitar 39% dari kawasan-kawasan di 16 kecamatan miskin tersebut telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan, ditargetkan aksesibilitas kawasan perdesaan tersebut dapat meningkat 4% setiap tahunnya sehingga diharapkan pada akhir tahun 2017 dapat meningkat menjadi 59%
13	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	28%	34%	40%	46%	52%	58%	Pada tahun 2012 telah teridentifikasi terdapat 30 Kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial, dari jumlah kawasan tersebut baru sekitar 8 kawasan atau 28% yang telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung, ditargetkan pada tahun 2017 mencapai 58% atau sekitar 18 kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial yang dapat terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung
14	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,	Pengurangan Jumlah Titik Genangan	27,90%	33,90%	39,90%	45,90%	51,9%	57,90%	Pada tahun 2012 telah tertangani 15 titik genangan (27,90%) dari 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, ditargetkan pada tahun 2017 dapat tertangani sekitar 30 titik genangan atau 57,90% dari 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
15	Program Penataan Kawasan Budaya pendukung keistimewaan DIY	Prosentase Penataan Kawasan Budaya	38,3%	43,9%	49,5%	55,1%	60,7%	66,3%	Pada tahun 2012 telah teridentifikasi terdapat 18 kawasan budaya, baru sekitar 6 kawasan atau 38,30% telah tertata, ditargetkan sampai tahun 2017 meningkat menjadi 66,30% atau menjadi 12 kawasan tertata

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
16	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	Prosentase keandalan Bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	78%	80%	82%	84%	86%	88%	Pada tahun 2012 telah teridentifikasi terdapat .... unit bangunan gedung negara, baru sekitar ..... unit atau 78% keandalannya telah memenuhi peraturan yang berlaku, ditargetkan sampai tahun 2017 meningkat menjadi 88% atau menjadi ..... keandalannya telah memenuhi peraturan yang berlaku.
17	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	70%	75%	81,25%	87,50%	93,75%	100%	Capaian Kinerja berdasarkan target jumlah sertifikat Hasil Uji dengan peningkatan setiap tahunnya mencapai 6,67% sertifikat hasil uji . Target persentase jumlah sertifikat hasil uji adalah: Tahun 2013 :75,00% atau 300 sertifikat hasil uji Tahun 2014 :81,25% atau 325 sertifikat hasil uji Tahun 2015 :87,50% atau 350 sertifikat hasil uji Tahun 2016 :93,75% atau 375 sertifikat hasil uji Tahun 2017 :100,00% atau 400 sertifikat hasil uji
18	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi	75%	77,5%	80%	82,5%	85%	87,5%	Indikator kinerja Pembinaan jasa konstruksi diperoleh dari penjumlahan capaian 3 sub-Program yaitu Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan. Pengaturan terkait dengan pemahaman terhadap regulasi (tercapai 80% dari target 100%) dengan bobot 40% sehingga capaiannya sebesar 32%. Pemberdayaan terkait jumlah tenaga ahli dan terampil bersertifikat (tercapai 3266 orang dari target 4000 orang) dengan bobot 50% sehingga capaiannya sebesar 41%. Kinerja Pengawasan dihitung dari jumlah Perda IUJK di Kabupaten/Kota (tercapai 1 Perda dari target 5 Perda) dengan bobot 10% sehingga capaiannya sebesar 2%. Dengan demikian capaian program sebesar 75% dari 32%+41%+2%.

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
19	Program Pengkajiandan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Prosentase Peningkatan Penguasaan Teknologi dan Penyebaran Informasi ( <i>centre of excellence</i> ) Bidang Pekerjaan Umum	72,5%	75%	77,5%	80%	82,5%	85%	Capaian kinerja berdasarkan cakupan pelayanan informasi kepada masyarakat yang dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu : aparat pemerintah yang terkait dengan bidang pekerjaan umum di tingkat provinsi dan kab/kota, perangkat daerah di desa/kelurahan dan kecamatan, pelajar dan mahasiswa, organisasi profesi/ masyarakat, masyarakat umum. Pada tahun 2012 cakupan pelayanan mencapai 72,5 % dihitung berdasarkan pelayanan informasi yang telah diberikan terutama kepada aparat pemerintah, pelajar dan masyarakat umum. Untuk tahun-tahun selanjutnya cakupan pelayanan yang telah tercapai harus tetap dipertahankan sambil dilakukan peningkatan pelayanan terhadap segmen yang lain, shg pada tahun 2017 cakupan pelayanan mencapai 85 %
20	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	20 titik	40 titik	60 titik	80 titik	100 titik	120 titik	Penentuan target indikator ini berdasarkan jumlah titik lokasi rawan banjir yang ditangani setiap tahun rata-rata 20 titik.
	Perumahan								

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR									
21	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	23,20 %	29,0 %	34,0 %	40,0 %	46,0 %	51,0 %	<p>Indikator ini pada RPJMD 2013-2017 didukung 1 (satu) program dalam LKPJ 2012 yaitu : PROGRAM PENATAAN KAWASAN PADAT PENDUDUK DAN KUMUH</p> <p>Berdasarkan data LKPJ 2012 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>10,00 %</td> <td>10,00 %</td> </tr> <tr> <td>Capaian</td> <td>13,05 %</td> <td>10,15 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total capaian akhir Thn. 2012 adalah : 13,05 % + 10,15 % = 23,20 %.</p> <p>Jumlah kawasan kumuh di DIY ada <b>107 lokasi</b>, yang <b>sudah tertangani sampai dengan Thn. 2012</b> adalah = 23,20 % x 107 lokasi = <b>25 lokasi</b>, dengan demikian start awal adalah 23,20 % (sejumlah 25 lokasi telah tertangani dari 107 lokasi kumuh di DIY).</p> <p>Kawasan kumuh di DIY yang <b>belum tertangani</b> = 107 lokasi - 25 lokasi = <b>82 lokasi</b></p> <p><b>Akan ditangani tiap tahun 6 lokasi = 5,61 %</b></p> <p>Target cakupan kawasan kumuh yang telah tertangani thn. 2013- 2017 adalah :</p> <p>Th 2013 : 29 % x 107 lokasi = 31 lokasi  Th 2014 : 34 % x 107 lokasi = 36 lokasi  Th 2015 : 40 % x 107 lokasi = 43 lokasi  Th 2016 : 46 % x 107 lokasi = 49 lokasi  Th 2017 : 51 % x 107 lokasi = 55 lokasi</p>		2011	2012	Target	10,00 %	10,00 %	Capaian	13,05 %	10,15 %
	2011	2012																
Target	10,00 %	10,00 %																
Capaian	13,05 %	10,15 %																

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR																											
22	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program Pemberdayaan berbasis komunitas	38,58 %	44,0 %	49,0 %	54,0 %	59,0 %	64,0 %	<p>Indikator ini pada RPJMD 2013-2017 didukung 2 (dua) program dalam LKPJ 2012 yaitu :</p> <p>1. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN DATA lnpj 2012 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>10,00 %</td> <td>10,00 %</td> </tr> <tr> <td>Capaian</td> <td>13,05 %</td> <td>10,26 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN DATA lnpj 2012 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>5,00 %</td> <td>5,00 %</td> </tr> <tr> <td>Capaian</td> <td>5,00 %</td> <td>10,27 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL CAPAIAN PROGRAM 1 DAN 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>15,00 %</td> <td>15,00 %</td> </tr> <tr> <td>Capaian</td> <td>18,05 %</td> <td>20,53 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total capaian s.d. thn 2012 = 18,05 % + 20,53 % = 38,58 %. Di DIY terdapat 438 komunitas (desa/kelurahan), sehingga total komunitas yg. telah tertangani s.d.thn. 2012 = 38,58 % x 438 komunitas = 169 komunitas, yang belum tertangani = (438 - 169) komunitas = 269 komunitas. Tiap tahun akan ditangani 5 % = 22 komunitas. Target cakupan komunitas yang telah tertangani thn. 2013-2017 adalah :</p> <p>Th 2013 : 44 % x 438 komunitas = 192 komunitas Th 2014 : 49 % x 438 komunitas = 214 komunitas Th 2015 : 54 % x 438 komunitas = 236 komunitas Th 2016 : 59 % x 438 komunitas = 258 komunitas Th 2017 : 64 % x 438 komunitas = 280 komunitas</p>		2011	2012	Target	10,00 %	10,00 %	Capaian	13,05 %	10,26 %		2011	2012	Target	5,00 %	5,00 %	Capaian	5,00 %	10,27 %		2011	2012	Target	15,00 %	15,00 %	Capaian	18,05 %	20,53 %
	2011	2012																																		
Target	10,00 %	10,00 %																																		
Capaian	13,05 %	10,26 %																																		
	2011	2012																																		
Target	5,00 %	5,00 %																																		
Capaian	5,00 %	10,27 %																																		
	2011	2012																																		
Target	15,00 %	15,00 %																																		
Capaian	18,05 %	20,53 %																																		

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR									
23	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	8,5%	8,00%	7,5%	7%	6,5%	6%	<p>Indikator ini pada RPJMD 2013-2017 didukung 1 (satu) program dalam LKPJ 2012 yaitu : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Berdasarkan data LKPJ 2012 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>2,00 %</td> <td>2,00 %</td> </tr> <tr> <td>Capaian</td> <td>14,90 %</td> <td>20,44 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total capaian s.d. 2012 : 35,34 % (backlog akhir 2012).            Jumlah Rumah thn. 2011 = 1.038.233 unit.            Jumlah RTLH thn. 2011 = 91.200 unit ( 8,78 % dari total jml. Rumah di DIY).            Focus RPJMD 2013-2017 adalah penanganan RTLH bukan backlog (backlog rumah ditangani stakeholder lain).            Sesuai data s.d. thn 2011 tertangani 4.234 RTLH ( LKPJ 2012), sehingga yang belum tertangani = 91.200 - 4.234 = 86.966 RTLH.            Awal thn 2012 yg belum tertangani = 86.966/1.038.233 x 100 = 8,37 = 8,50 %            Akan ditangani tiap tahun 0,5 % = 400 unit.            2012 : 86.966 unit (8,5%)            2013 : 86.966 - 400 = 86.566 (8%)            2014 : 86.566 - 400 = 86.166 (7,5%)            2015 : 86.166 - 400 = 85.266 (7%)            2016 : 85.266 - 400 = 85.366 (6,5%)            2017 : 85.366 - 400 = 84.966 (6%)</p>		2011	2012	Target	2,00 %	2,00 %	Capaian	14,90 %	20,44 %
	2011	2012																
Target	2,00 %	2,00 %																
Capaian	14,90 %	20,44 %																
	<b>Penataan Ruang</b>																	
24	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi	10 Kawasan Strategis	12 Kawasan Strategis	14 Kawasan Strategis	16 Kawasan Strategis	18 Kawasan Strategis	19 Kawasan Strategis	<p>Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar &amp; implementasi program pembangunan daerah            Proses kajian Perencanaan Tata Ruang meliputi studi, naskah akademik, materi teknis, dan draft raperda, kajian yang sudah dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tahun 2012 : Pansela (3), Kaw Industri Sentolo, KPY, Koridor Yk-Sadeng, Kotagede, Melioboro, RDTR Gn Merapi, Kraton.</li> <li>-Tahun 2013 : Koridor Temon-Prambanan, Review kajian RTRWP, KLHS</li> <li>-Tahun 2014 : RDTR Kawasan inti Sumbu filosofi, RDTR Puro Pakualaman, RDTR Imogiri, RDTR Kawasan Tanah Keprabon, RDTR Kawasan Tanah Non Keprabon</li> <li>-Tahun 2015 : Koridor Tempel-Paris, Kawasan Wedi Ombo</li> <li>-Tahun 2016 : pembangkit Listrik tenaga angin dan Gelobalaut</li> <li>-Tahun 2017 : Kawasan Ekogeowisata Karst, Kawasan Parangtritis dan Gumuk Pasir,</li> </ul>									

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
25	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan RTRW Provinsi	45%	50%	60%	70%	80%	90%	Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanf ruang terutama melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah utk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah & antar pemangku kepentingan. kajian yang sudah dilakukan : -Tahun 2012 : NSPK banjir, gempabumi, tsunami, NSPK Gerakan Tanah, Mikrozonasi Gempa, Kawasan sempadan pantai, Kawasan perbatasan. -Tahun 2013 : NSPK Permodelan daya dukung & daya tampung keruangan kws strategis ekonomi, NSPK Kws Longsor -Tahun 2014 : Penyusunan kajian dan regulasi kawasan lindung setempat (sempadan waduk, sungai di luar kawasan perkotaan) -Tahun 2015 : Penyusunan kajian dan regulasi kawasan rawan bencana alam lindung setempat (mata air) -Tahun 2016 : Penyusunan kajian dan regulasi kawasan lindung setempat (telaga, waduk) -Tahun 2017 : Penyusunan kajian dan regulasi kawasan pelestarian alam (ekogeowisata karst, gumuk pasir)
26	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	Prosentase Pengaturan zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawah	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneanan sanksi kajian yang sudah dilakukan : -Tahun 2012 : Peraturan Zonasi sebagian KPY, kriteria KRA -Tahun 2013 : Evaluasi KRA Kab. Sleman, Pengaturan kawasan lindung setempat -Tahun 2014 : Pengaturan pemanfaatan & pengendalian ruang di kawasan lindung bawah (Hutan lindung, KRA di Kulon Progo), -Tahun 2015 : Penyusunan Insentif dan disinsentif KRA di Kab.Sleman -Tahun 2016 : Penyusunan Insentif dan disinsentif Kawasan cagar budaya -Tahun 2017 : Penyusunan insentif dan disinsentif prasarana perkotaan di Kab.Bantul

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
27	Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY	Prosentase Pengaturan dan Pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	10%	20%	40%	60%	80%	100%	
	<b>Energidan Sumberdaya Mineral</b>								
28	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	76,80%	77,40%	78,00%	78,60%	79,20%	79,80%	Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah total rumah tangga dalam persen. Sampai dengan tahun 2012 pencapaian rasio elektrifikasi di DIY sebesar 76,80%. Target pencapaian rasio elektrifikasi adalah : Th 2013 : 77.40% Th 2014 : 78.00% Th 2015 : 78.60% Th 2016 : 79.20% Th 2017 : 79.80%

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
29	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan,	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	104.720 SBM	107.790 SBM	112.000 SBM	117.950 SBM	123.590 SBM	130.100 SBM	<p>Mulai tahun 2013 satuan target pencapaian penyediaan energi baru terbarukan diubah dari satuan kilo watt (kW) menjadi setara barrel minyak (SBM) dengan alasan menyesuaikan pencapaian bauran energi baru terbarukan di daerah. Hal ini berakibat pada penyesuaian nama program, dari semula Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi menjadi Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan. Program ini mewadahi seluruh kegiatan di sektor energi baru terbarukan. Kemudian mulai tahun 2014 program ini mendapat tambahan kegiatan baru yang di RPJMD sebelumnya masuk pada program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar, yaitu Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi diubah menjadi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Baru Terbarukan; Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk IKM diubah menjadi Pengembangan Biogas Untuk Bahan Bakar; Pengembangan Bahan Bakar Nabati diubah menjadi Pengembangan Bahan Bakar Berbasis Bioenergi.</p> <p>Indikator kinerja berdasarkan capaian penyediaan energi baru terbarukan (EBT) total di DIY yang berasal dari biodiesel, tenaga air, biogas, angin, biomassa, matahari, dan kayu bakar dalam satuan Setara Barel Minyak (SBM)</p> <p>Pada tahun 2012 telah tersedia 1 EBT sebesar 104.720 SBM (setara barel minyak). Target pencapaian penyediaan energi baru terbarukan adalah :</p> <p>Th 2013 : 107,790 SBM  Th 2014 : 112,000 SBM  Th 2015 : 117,950 SBM  Th 2016 : 123,590 SBM  Th 2017 : 130,100 SBM</p>

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
30	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah	Rerata penurunan muka Air tanah	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	Mulai tahun 2013 indikator kinerja program berubah dari terpenuhinya kebutuhan air di daerah sulit air sebesar 6% per tahun menjadi rerata penurunan muka air tanah sebesar <20% per tahun dengan alasan menyesuaikan dengan kebijakan pada PERDA DIY No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Hal ini berakibat pada penyesuaian nama program, dari semula Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi menjadi Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah. Pada tahun 2012 rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer air tanah sebesar 10% (rerata tebal akuifer 100 m). Diharapkan rerata penurunan muka air tanah dipertahankan <20% terhadap ketebalan akuifer air tanah sampai dengan tahun 2017.
31	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi	3%	3%	6%	9%	12%	15%	Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan peningkatan kinerja pelaksanaan konservasi energi sebesar 3% melalui audit energi di 4 gedung/bangunan pemerintah daerah dari total 150 gedung/bangunan milik pemerintah daerah. Target pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi adalah : Th 2013 : 3% atau total 4 gedung Th 2014 : 6% atau total 9 gedung Th 2015 : 9% atau total 14 gedung Th 2016 : 12% atau total 19 gedung Th 2017 : 15% atau total 24 gedung

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
32	Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar	30%	40%	50%	60%	70%	80%	<p>Mulai pada tahun 2013 dilakukan perubahan indikator kinerja program, dari semula Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bakar Sebesar 100% Kuota dirubah menjadi Pencapaian Kinerja Pengelola Bahan Bakar, disebabkan karena menyesuaikan dengan tugas pemerintah daerah dalam rangka pengawasan kelancaran distribusi bahan bakar. Pada program ini terdapat kegiatan yang masuk ke dalam Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan sektor energi baru terbarukan, yaitu kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi diubah menjadi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Baru Terbarukan; Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk IKM diubah menjadi Pengembangan Biogas Untuk Bahan Bakar; Pengembangan Bahan Bakar Nabati diubah menjadi Pengembangan Bahan Bakar Berbasis Bioenergi.</p> <p>Di DIY terdapat 600 penyalur bahan bakar yang kinerja kelancaran distribusinya belum optimal. Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan peningkatan kinerja pengelolaan bahan bakar sebanyak 180 penyalur bahan bakar (30%) melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</p> <p>Target peningkatan kinerja pengelolaan bahan bakar adalah :</p> <p>Sampai Th 2013 : 40% atau total 240 penyalur  Sampai Th 2014 : 50% atau total 300 penyalur  Sampai Th 2015 : 60% atau total 360 penyalur  Sampai Th 2016 : 70% atau total 420 penyalur  Sampai Th 2017 : 80% atau total 480 penyalur</p>

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
33	Pembinaan dan pengembangan pengawas usaha pertambangan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	8%	9%	10%	11%	12%	13%	<p>Mulai tahun 2013 indikator kinerja program berubah dari peningkatan nilai produksi bahan galian sebesar 0,37% per tahun menjadi pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan per tahun dengan alasan menyesuaikan dengan kebijakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa ketugasan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan nilai tambah bahan galian. Hal ini berakibat pada penyesuaian nama program, dari semula Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan menjadi Program Pembinaan dan Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan.</p> <p>Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian di 9 lokasi (8%) dari total 22 lokasi potensi tambang dengan rata-rata peningkatan nilai tambah per lokasi sebesar 20%. Peningkatan nilai tambah per lokasi meningkatkan capaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan sebesar 1%. Target peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan adalah :</p> <p>Th 2013 : 9% atau total 10 lokasi  Th 2014 : 10% atau total 11 lokasi  Th 2015 : 11% atau total 12 lokasi  Th 2016 : 12% atau total 13 lokasi  Th 2017 : 13% atau total 14 lokasi</p>
	Pendukung Kinerja Aparatur (Sekretariat)								

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	2013	2014	2015	2016	KONDISI AKHIR (2017)	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR
34	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD diperlukan ketersediaan 12 jenis fasilitas administrasi perkantoran, yaitu (1) surat menyurat, (2) penyediaan air/listrik/ telepon, (3) pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, (4) adm.keuangan, (5) kebersihan kantor, (6) perbaikan peralatan kerja, (7) ATK, (8) barang cetakan, (9) instalasi listrik, (10) bahan bacaan, (11) penyediaan makanan dan minuman, (12) menghadiri rapat-rapat koordinasi. Pada tahun 2012-2017 akan dilaksanakan 12 jenis fasilitas administrasi perkantoran setiap tahun atau sebesar 100% per tahun.
35	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk mendukung tugas dan fungsi SOPD diperlukan penyediaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana/ prasarana aparatur yaitu: (1) Gedung dan taman kantor, (2) perlengkapan gedung kantor, (3) mebeleur, (4) kendaraan dinas Pada tahun 2012-2017 akan dilaksanakan penyediaan 4 jenis sarana/prasarana kantor setiap tahun atau sebesar 100% per tahun.
36	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk mendukung tugas dan fungsi SOPD diperlukan 3 dokumen perencanaan (RENJA, RKA, DPA) dan 1 dokumen pelaporan (LAKIP) yang didukung sistem informasi dan jaringan Local Area Network (LAN). Pada tahun 2012-2017 setiap tahun akan dilaksanakan penyusunan 3 dokumen perencanaan, 1 dokumen pelaporan serta operasional Sistem Informasi dengan dukungan LAN atau sebesar 100% per tahun.

# BAB VII

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUP-ESDM DIY 2012-2017 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas PUP-ESDM DIY guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas PUP-ESDM 2012-2017 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perumahan dan energi sumberdaya mineral, dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat sejahtera menyongsong peradapan baru.

Yogyakarta, 20 Mei 2013  
Kepala Dinas PUP-ESDM  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ir. RANI SYAMSINARSI, MT  
NIP 19570524 198603 2 001



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LAKIP)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN**  
**ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**  
**PEMDA DIY**

**TAHUN 2013**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	I-1
I.1.Latar Belakang	I-1
I.2. Struktur Organisasi	I-1
I.3. Tugas Dan Fungsi Organisasi	I-3
I.4. Potensi Organisasi	I-5
I.5. Sistematika Pembahasan	I-9
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	II-1
II.1. Visi dan Misi	II-1
II.2. Tujuan Dan Sasaran	II-4
II.3. Strategi	II-9
II.4. Program Dan Kegiatan	II-10
II.5. Penetapan Kinerja	II-25
II.6. Anggaran	II-40
BAB III Akuntabilitas Kinerja	III-1
III.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-2
III.2. Analisis Capaian Kinerja	III-5
III.3 Akuntabilitas Keuangan	III-45
IV Penutup	IV-1
A. Simpulan	IV-1
B. Permasalahan dan Solusi	IV-1
Lampiran	
1. Struktur Organisasi Dinas PUP ESDM DIY	
2. Daftar Penghargaan	
3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013	
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2013	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2013.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sebagai bentuk aktualisasi Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemda DIY menyusun LAKIP Tahun 2013 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja SKPD.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya..

Yogyakarta, Februari 2014  
Kepala  
Dinas PUP-ESDM DIY

**Ir. Rani Sjamsinarsi, MT**  
NIP. 19570524 1986 03 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi Tahun 2012-2017 adalah **“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan ”**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 13 misi, yaitu (a) Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar; (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas; (c) Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara; (d) Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi; (e) Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA; (f) Mengurangi resiko daya rusak air; (g) Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni; (h) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; (i) Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; (j) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral; (k) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah; (l) Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan dan (m) Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012-2017.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dari analisis 30 sasaran, terdapat 28 indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2013, 28 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta. didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **I.1 Struktur Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Pimpinan : Kepala Dinas
- 2) Sekretariat : Sekretaris yang terdiri dari sub bagian –sub bagian
- 3) Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
  - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
  - Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Program dan Informasi.
- b. Bidang Perumahan, terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Perumahan;
  2. Seksi Pengembangan Perumahan;
  3. Seksi Penataan Kawasan.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
  3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- d. Bidang Sumber Daya Air , terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Sumberdaya Air;
  2. Seksi Pengaturan Sumberdaya Air;
  3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumberdaya Air.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya;
  3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya.
- g. Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terdiri dari :
1. Seksi Energi dan Geologi;
  2. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
  3. Seksi Pertambangan Umum.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), terdiri dari :
    - a) Kepala Balai;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Seksi Operasi dan Pengelolaan Data;
    - d) Seksi Pengamanan dan Pengendalian;
    - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. Balai Pengujian , Informasi Permukiman dan Bangunan, Pengembangan Jasa Konstruksi (PIPBPJK), terdiri dari :
    - a) Kepala Balai;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Seksi Pengujian;
    - d) Seksi Informasi Permukiman dan Bangunan;
    - e) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi;
    - f) Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Balai Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL), terdiri dari :
    - a) Kepala Balai;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
    - d) Seksi Pengendalian Kualitas;
    - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

## **I.2 Fungsi dan Tugas**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan binamarga;
- f. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan cipta karya;
- g. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;
- i. pelaksanaan pengembangan kawasan;
- j. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat;
- k. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- l. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- m. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- n. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan tata ruang;
- o. pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumber daya mineral Kabupaten/Kota;

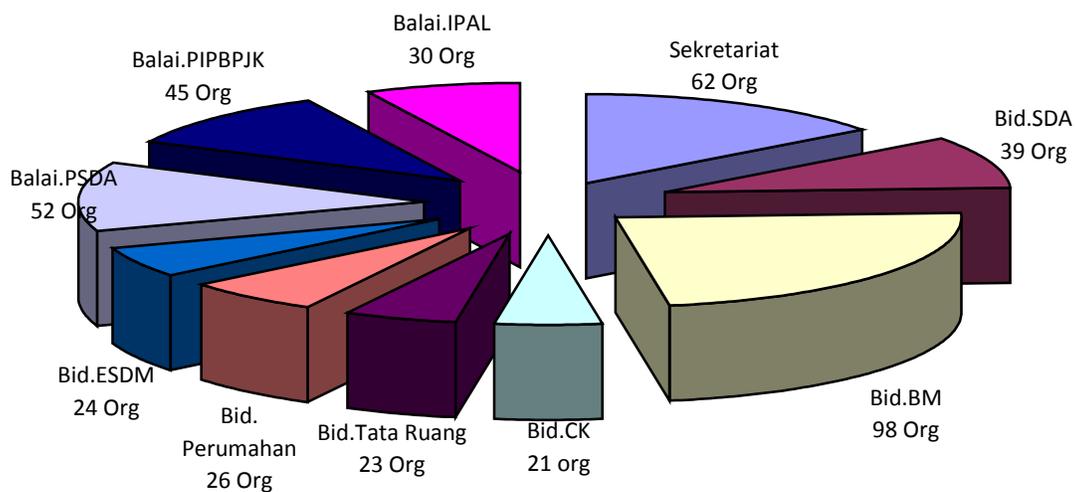
- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- q. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- r. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- s. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

### I.3 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemda DIY sampai akhir tahun 2013 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 419 orang Pegawai Negeri Sipil (data per 31 Desember 2013). Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (sekretariat, bidang dan balai) disajikan pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar I.1

Grafik Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Pada Sekretariat, Bidang Dan Balai Per 31 Desember 2013



Sumber Data: Daftar Nominatif Pegawai DPUP-ESDM DIY TH.2013

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2013

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Jabatan Struktural :	
	a. Eselon IIa	1
	b. Eselon IIIa	11
	c. Eselon IVa	31
2	Jabatan Fungsional Umum :	376
3	Jabatan Fungsional Tertentu	0
<b>JUMLAH</b>		<b>419</b>

Sumber data : Daftar Nominatif PNS DPUP-ESDM DIY TH. 2013

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM Pemda DIY Berdasarkan Pangkat / Golongan Per 31 Desember 2013

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda/IVc	1
2	Pembina Tingkat I/lvb	6
3	Pembina/IVa	9
4	Penata Tingkat I/IIId	31
5	Penata/IIIc	18
6	Penata Muda Tingkat I/III b	137
7	Penata Muda/IIIa	27
8	Pengatur Tingkat I/lid	18
9	Pengatur/lic	19
10	Pengatur Muda Tingkat I/IIb	105
11	Pengatur Muda/lia	15
12	Juru Tingkat I/Id	21
13	Juru/lc	3
14	Juru Muda Tk I/lb	8
15	Juru Muda/la	1
<b>JUMLAH</b>		<b>419</b>

Sumber data : Daftar Nominatif PNS DPUP-ESDM DIY TH. 2013

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2013

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	26
2	Sarjana	74
3	Diploma IV	2
4	Diploma III	26
5	SLTA /sederajat	235
6	SLTP/sederajat	39
7	SD/sederajat	17
<b>JUMLAH</b>		<b>419</b>

Sumber data : Daftar Nominatif PNS DPUP-ESDM DIY TH. 2013

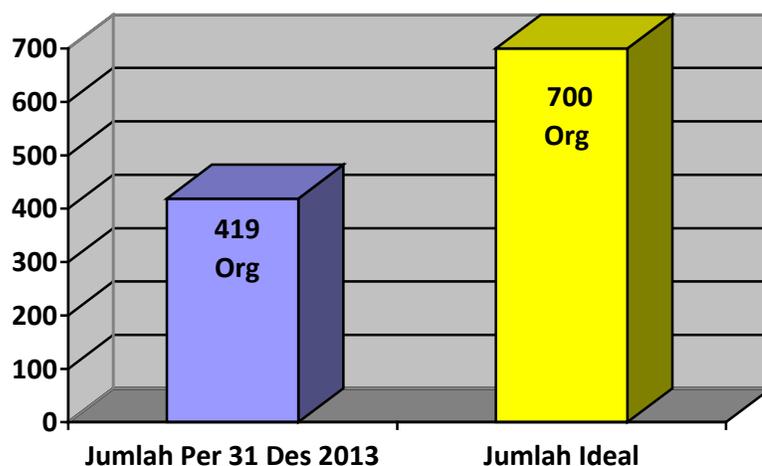
Tabel 1.3.4 Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Berdasarkan Gender per 31 Desember 2013

No	Gender	Jumlah (orang)
1	Pria	351
2	Wanita	68
<b>JUMLAH</b>		<b>419</b>

Sumber data : Daftar Nominatif PNS DPUP-ESDM DIY TH. 2013

Gambar 1.2

Grafik Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Pekerjaan (Berdasarkan Pergub DIY Nomor 66,67 dan 68 Tahun 2012)



#### I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana SKPD yang memadai, adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PUP-ESDM DIY per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel 1.4

Tabel. 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas PUP-ESDM DIY per 31 Desember 2013

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (unit)
		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	7	-	-	7
2	Kendaraan Roda 6	8	-	-	8
3	Kendaraan Roda 4	19	5	-	24
4	Kendaraan Roda 2	43	16	-	59
5	Komputer Desktop	82	9	5	96
6	Komputer Laptop	74	7	2	83
7	UPS	54	8	2	64
8	Air Conditioning	44	18	8	70

Sumber data : Buku Inventaris DPUP-ESDM DIY TH. 2013

Tabel I.5 Jumlah Ideal Sarana Dan Prasarana Dibandingkan Dengan Beban Pekerjaan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Saat Ini (Unit)	Jumlah Ideal Yang Dibutuhkan (Unit)	Unit Kerja
1	Gedung Kantor	7	11	Dinas dan Balai
2	Kendaraan roda 6	8	16	Dinas dan Balai
3	Kendaraan roda 4	24	37	Dinas dan Balai
4	Kendaraan roda 2	59	114	Dinas dan Balai
5	Komputer <i>Desktop</i>	96	191	Dinas dan Balai
6	Komputer <i>Laptop</i>	83	178	Dinas dan Balai
7	Printer	85	100	Dinas dan Balai
8	UPS	64	159	Dinas dan Balai
9	Pendingin Ruangan (AC)	70	165	Dinas dan Balai

## I.5 Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 359.160.302.468 dengan rincian disajikan pada tabel.7

Tabel.I.6 Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Yang Dikeloka Dinas PUP-ESDM DIY Tahun Anggaran 2013

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>203.290.000</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>203.290.000</b>
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	165.790.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah	37.500.000
5	<b>BELANJA</b>	<b>358.957.012.468</b>
5.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>21.322.359.034</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	21.322.359.034
5.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>337.634.653.434</b>
5.2.1	- Belanja Pegawai	17.216.018.471
5.2.2	- Belanja Barang dan Jasa	143.672.150.218
5.2.3	- Belanja Modal	176.746.484.745
	<b>Jumlah Total Anggaran</b>	<b>359.160.302.468</b>

Sumber data : DPPA DPUP-ESDM DIY TA 2013

## I.6 Sistematika LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY dan sekilas pengantar lainnya

## Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi , misi , tujuan , sasaran, strategi , kebijakan serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja (dokuemen Penetapan Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY

## Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

## Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY

Lampiran-lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1 Perencanaan Strategis

##### II.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat, sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan antar wilayah serta mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 serta tugas dan fungsi Dinas PUP-ESDM DIY dalam mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral DIY periode tahun 2012-2017 yakni :

**“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan ”**

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

- a. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
- b. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;

- c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
- d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
- e. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
- g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Makna dari ketersediaan jumlah rumah layak huni bagi pemenuhan visi Perumahan adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- b. Fasilitasi dan dorongan bagi terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- c. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendukung seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
- d. Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
- e. Fasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh terutama bagi masyarakat perkotaan di DIY.

Makna pendayagunaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan bagi pemenuhan visi energi sumber daya mineral adalah :

- a. Peningkatan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- b. Peningkatan nilai tambah energi dan mineral.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas PUP-ESDM DIY sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 maka misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara.
4. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.
5. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA .
6. Mengurangi resiko daya rusak air.
7. Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral.
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah
12. Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan.

13. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan kata lain, pernyataan misi Dinas PUPESDM adalah mengintegrasikan penataan ruang wilayah dalam kerangka menjamin kinerja tinggi dari pelayanan infrastruktur dasar, kehadiran kelayakan hunian/permukiman, pemanfaatan energi baru terbarukan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya mineral serta konservasi sumber daya air sehingga mampu mendukung pembangunan sektor lain, pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

## **II.1.2 Tujuan dan Sasaran**

### **II.1.2.1 Tujuan**

Untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 3) Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4) Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase, persampahan);
- 5) Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas kawasan;
- 6) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang keistimewaan DIY;
- 7) Meningkatkan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 8) Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas;
- 9) Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa;
- 10) Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air;
- 11) Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air;
- 12) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat;

- 13) Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif;
- 14) Mempertahankan kelestarian dan ketersediaan air tanah;
- 15) Mendorong pemanfaatan secara optimal hasil pertambangan;
- 16) Mengimplementasikan pelaksanaan konservasi energi;
- 17) Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi ketenagalistrikan;
- 18) Meningkatkan ketersediaan energi;
- 19) Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar;
- 20) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan;
- 21) Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan Informasi teknologi pembangunan bidang PUPESDM;
- 22) Memberikan pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi;
- 23) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;
- 24) Memberikan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparatur;
- 25) Memberikan layanan penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program.

### II.1.2 Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun disajikan pada tabel II.1.2 berikut :

Tabel II.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2012)	TARGET AKHIR 2017
1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada	1 Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan strategis	10	19

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2012)	TARGET AKHIR 2017	
	kawasan strategis provinsi					
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	2	Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR Kab/kota dan RTR Provinsi	%	45	90
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi	3	Peresentase pengaturan zonasi pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan Kawasan lindung bawahan	%	10	100
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	4	Presentase penduduk berakses air minum	%	70,38	87,83
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	5	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	13.329	20.000
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	6	Persentase penerapan system pengelolaan sampah ramah lingkungan	%	45	70
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	7	Presentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	%	53	73
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan pedesaan	8	Presentase aksesibilitas kawasan pedesaan pada wilayah kecamatan miskin	%	39	59

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2012)	TARGET AKHIR 2017
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	9	Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	%	28	58
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	10	Persentase titik genangan yang tertangani	%	27,90	57,90
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	11	Persentase keandalan bangunan gedung Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	78	88
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	12	Persentase aksesibilitas dengan kondisi mantap	%	71,09	77,44
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	13	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	%	24,20	63,75
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	14	Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	%	75,06	82,5
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	15	Penambahan penyediaan air baku	Lt/det	600	2.100 lt/det
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	16	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	20	120
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	17	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin	%	23,20	51

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2012)	TARGET AKHIR 2017
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	18	Persentase komunitas perumahan yang telah diberdayakan	%	38,58	64
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	19	Persentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani	%	8,5	6
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	20	Rerata penurunan muka air tanah	%	<20	<20
21	Terwujudnya pengembangan kegiatan pengelolaan dan permukiman pertambangan	21	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	%	8	13
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	22	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	%	3	15
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	23	Rasio elektrifikasi	%	76,80	79,80
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	24	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	104,72	130.10
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	25	Persentase kinerja pengelolaan bahan bakar	%	30	80
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses dan produk konstruksi yang berkualitas	26	Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi	%	75	87,5
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang	27	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan	%	72,50	85

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2012)	TARGET AKHIR 2017
	PUPESDM		penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum			
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/ Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	28	Pencapaian jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	%	70,00	100

### II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

#### II.1.3.1 Misi 1 : Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.

- Strategi 1 : Pembuatan RTR pada kawasan Strategis Provinsi  
 Kebijakan : Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan  
 Program : Program Perencanaan Tata Ruang  
 Kegiatan : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang  
 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan  
 3. Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang  
 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

- Strategi 2 : Peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah
- Program : Program Pemanfaatan Ruang
- Kegiatan : 1. Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang  
2. Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang  
3. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang  
4. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
- Strategi 3 : Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi
- Kebijakan : Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
- Program : Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
2. Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang  
4. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Strategi 4 : Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya
- Kebijakan : Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya
- Program : Program Penataan Ruang Keistimewaan Yogyakarta

- Kegiatan : 1. Fasilitasi Perdas Tata Ruang DIY  
2. Penyusunan Materi Teknis Review RTRW DIY  
3. Penyusunan KLHS Review RTRW DIY  
4. Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi  
Pelestarian Sosial Budaya Makam Imogiri  
5. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY

**II.1.3.2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas**

- Strategi 1 : peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum  
Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.  
Program : Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum  
Kegiatan : 1. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum  
2. Penyusunan NSPK Air Minum
- Strategi 2 : Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah  
Kebijakan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah  
Program : Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah  
Kegiatan : 1. Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah  
2. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah  
3. Pengembangan Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat  
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah  
5. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah  
6. Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah  
7. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah

- Strategi 3 : Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mencapai sasaran pem-bangunan persampahan
- Program : Program Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan : 1. Koordinasi Pengelolaan Persampahan  
2. Penyusunan NSPK Persampahan
- 
- Strategi 4 : Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase.
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mengurangi titik genangan air
- Program : Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Kegiatan : 1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong  
2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong  
3. Pengembangan Saluran Drainase Lingkungan
- 
- Strategi 5 : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan perkotaan
- Program : Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kegiatan : 1. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan  
2. Penyusunan Kriteria dan Rencana Induk Penanganan Kawasan Perkotaan Prov. DIY  
3. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
- 
- Strategi 6 : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan
- Kebijakan : Meningkatkan peran serta seluruh stake-holders dalam

- upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan perkotaan
- Program : Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
- Kegiatan : 1. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan  
2. Penyusunan Kriteria dan Rencana Induk Penanganan Kawasan Perdesaan Prov. DIY
- Strategi 7 : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan Agropolitan, Mina-politan dan Desa Potensi
- Program : Program Pengembangan kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- Kegiatan : Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan
- Strategi 8 : Peningkatan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan kawasan budaya
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh stake-holders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan kawasan budaya
- Program : Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan DIY
- Kegiatan : 1. Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imagener)  
2. Penyusunan RTBL Kawasan Kraton sampai Krapyak  
3. Penataan Kawasan Cagar Budaya Ambar Binangun (Penyusunan Detail Desain Engineering)  
4. Penyusunan Rencana Induk Penataan Kawasan Kraton  
5. Penyusunan Rencana Induk Penataan Kawasan Puro Pakualaman  
6. Penyusunan Rencana Induk Penataan Kawasan Pantai Depok Parangkusumo Bantul

7. Penataan Kawasan Petilasan Watugilang Kotagede
8. Penataan Kawasan Petilasan Kyai Jonge Gunungkidul
9. Penataan Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran Gunungkidul
10. Fasilitasi Kawasan Budaya Petilasan Brawijaya V di Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul
11. Fasilitasi Kawasan Budaya Petilasan Buyut Paluombo, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul

**II.1.3.3 Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara**

- Strategi : Peningkatan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku
- Kebijakan : Meningkatkan pengawasan dan pembina-an teknis keamanan dan keselamatan gedung.
- Program : Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan
- Kegiatan : 1. Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara  
2. Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah

**II.1.3.4. Misi 4 : Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.**

- Strategi 1 : Penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap
- Kebijakan : Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
- Program 1 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Kegiatan : 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan  
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan  
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (D A K)  
4. Pemeliharaan Rutin Jalan  
5. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Program 2 : Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

Kegiatan : 1. Perencanaan Peningkatan Jalan  
2. Peningkatan Jalan  
3. Perencanaan Peningkatan Jembatan  
4. Peningkatan Jembatan  
5. Peningkatan Jalan (D A K)  
6. Penyusunan Kebijakan Kebinamargaan

Program 3 : Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Kegiatan : 1. Inspeksi Kondisi Jalan  
2. Inspeksi Kondisi Jembatan

Strategi 2 : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur untuk aksesibilitas bagi kawasan startegis dan kawasan startegis

Kebijakan : Menyediakan sarana dan prasarna untuk infrastruktur

Program : Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur

Kegiatan : Pengadaan Tanah Untuk Jalan Dan Jembatan

#### **II.1.3.5. Misi 5 : Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA**

Strategi : Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi

Kebijakan : Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan

Program : Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan : 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi  
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi  
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi (D A K)  
4. Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
5. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

(WISMP) - Loan

6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

(WISMP) - APBD

- Strategi : Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
- Kebijakan : Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air
- Program : Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
- Kegiatan : 1. Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya  
2. Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya  
3. Pemeliharaan Pos Dan Peralatan Hidrologi  
4. Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya  
5. Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya  
6. Koordinasi Kelembagaan S D A
- Program : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
- Kegiatan : 1. Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa  
2. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

**II.1.3.6. MISI 6 : Mengurangi resiko daya rusak air**

- Strategi : .Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualita sungai yang disebabkan oleh daya rusak air
- Kebijakan : Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air terutama pada 3 sungai di DIY

- Program : Program Pengendalian Banjir
- Kegiatan : 1. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan bantaran Dan Tanggul Sungai  
2. Pengendalian Banjir Dan penanggulangan Kekeringan

#### **II.1.3.7. MISI 7 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman**

Strategi 1 : Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh

Kebijakan : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

Program : Program Pengurangan Kawasan Kumuh

Kegiatan : Penataan Kawasan Kumuh

Strategi 2 : Pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman

Kebijakan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat

Program : Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan perumahan

Kegiatan : 1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat  
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

#### **II.1.3.8. MISI 8: Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan**

Strategi : Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman

Kebijakan : Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat

- Program : Program Pengembangan Perumahan
- Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan
2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual (NSPM)
3. Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
4. Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
5. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan Pedesaan

**II.1.3.9. Misi 9 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan**

- Strategi 1 : Perlindungan, pelestarian dan pengawetan air tanah
- Kebijakan : Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pengawetan air pada cekungan air tanah
- Program : Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengelolaan Air Tanah
- Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana Pemantauan Air Tanah
2. Pembinaan Dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah
3. Pendayagunaan Air Tanah Di Daerah Sulit Air
4. Pemantauan Dan Evaluasi Air Tanah
- Strategi 2 : Pengelolaan usaha pertambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian
- Kebijakan : Meningkatkan nilai tambah pertambangan
- Program : Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan
- Kegiatan : 1. Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Lintas Propinsi
2. Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian

### 3. Pemetaan Geologi Teknik Dan Wilayah Pertambangan

- Strategi 3 : Penyediaan Energi Daerah  
Kebijakan : Meningkatkan upaya penyediaan energi daerah  
Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi  
Kegiatan : 1. Peningkatan Kinerja Pengelola Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan

#### **II.1.3.10. Misi 10 :Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral**

- Strategi 1 : Peningkatan akses rumah tangga DIY berlistrik  
Kebijakan : Meningkatkan rumah tangga di DIY yang ber listrik  
Program : Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan ketenagalistrikan  
Kegiatan
1. Pembangunan Pembangkit Listrik
  2. Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
  3. Perbaikan, Pemeliharaan Dan Pemindahan Pembangkit Listrik
  4. Penyusunan Desain Detail Jaringan Listrik Pedesaan
  5. Penyediaan Dan Pemenuhan Listrik

- Strategi 2 : Pemanfaatan energi baru terbarukan  
Kebijakan : Meningkatkan upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan  
Program : Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan  
Kegiatan
1. Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Terbarukan
  2. Pengembangan Biogas Untuk Masyarakat Pedesaan
  3. Penyusunan Rencana Umum Energi
  4. Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
  5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

- Strategi 3 : Pengelolaan bahan bakar dan gas
- Kebijakan : Meningkatkan kinerja pengelolaan bahan bakar dan gas
- Program : Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar
- Kegiatan : 1. Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi
2. Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk I K M
3. Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi
4. Pengawasan Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Usaha Bahan Bakar Dan Energi
5. Pengembangan Bahan Bakar Nabati
6. Penyusunan Sistem Informasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Bahan Bakar Lain
7. Fasilitasi Ketersediaan Bahan Bakar Bersubsidi

**II.1.3.11. Misi 11 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah**

- Strategi : Peningkatan pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.
- Kebijakan : Meningkatkan pengaturan , pembinaan dan pengawasan usaha konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional
- Program : Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- Kegiatan : 1. Sosialisasi Dan Diseminasi PeraturanPerundang-Undangan
2. Sistem Database Jasa Konstruksi
3. Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
4. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi
5. Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
6. Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah
7. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
8. Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

9. Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi
10. Pengawasan Terhadap KetentuanKeteknikan Jasa Konstruksi
11. Pengawasan Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K - 3)

**II.1.3.12. Misi 12 : . Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan**

Strategi 1 : Pemberian pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM yang berkualitas.

Kebijakan : Meningkatkan cakupan pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM

Program : Program Pengkaji Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan : 1. Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam  
2. Survey Bahan Bangunan Keciptakarya  
3. Informasi Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

Strategi 2 : Pemberian pelayanan jasa pengujian labotrartorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi yang memenuhi standar.

Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan jasa pengujian labotrartorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksiyang memenuhi standar.

Program : Program Pelayanan Jasa Pengujian

Kegiatan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
2. Pelayanan Jasa Laboratoriumpengujian  
3. Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian

**II.1.3.13. MISI 13 Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.**

Strategi 1 : Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik  
Kebijakan : Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran  
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan :  
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik  
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
8. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan  
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
10. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan  
11. Penyediaan Makanan Dan Minuman  
12. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Strategi 2 : Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur  
Kebijakan : Meningkatkan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur  
Program : Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan :  
1. Pembangunan Gedung Kantor  
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  
4. Pengadaan Mebeleur  
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur  
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman
- Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Kegiatan : Investarisasi, Integrasi Dan Pengelolaan Barang
- Strategi 3 : Pelaporan hasil capaian kinerja dan keuangan yang lebih baik.
- Kebijakan : Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- Kegiatan
1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
  2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data Dan Informasi
  4. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

#### II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas PUP-ESDM Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan	12
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTR kab/kota dan RTRW Provinsi	%	50
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta penerapan sanksi	Persentase pengaturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawah	%	20
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang	Persentase penduduk berakses air minum	%	73,87

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	memadai baik aspek kuantitas dan kualitas			
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	Layanan jaringan air limbah terpusat di APY	SR	14.400
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	%	50
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Persentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	%	57
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin	%	43
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	%	34
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	Persentase titik genangan yang tertangani	%	33,90
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	80
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase prnyrdiaan aksesibilitas dengan kondisi mantap	%	72,04
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan startegis dan kawasan startegis baru	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan startegis dan kawasan startegis baru	%	26,97
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Persentase Luasan DI yang Terlayanani Air Irigasi	%	76,5
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	Penambahan Penyediaan air baku	lt/det	700
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	40
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin	%	29

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	Persentase Pemberdayaan berbasis masyarakat	%	44
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Prosentase berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%	8
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	Rerata penurunan muka air tanah	%	< 20
21	Terwujudnya pengembangan kegiatan pengelolaan dan pemurnian pertambangan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	%	9
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan konservasi Energi	%	3
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	77,4
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	107,79
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	Persentase kinerja pengelolaan bahan bakar	%	40
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas	Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi	%	77,5
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Prosentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	%	75
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	Persentase jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	%	75

## II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 Dinas PUP-ESDM disajikan pada tabel II.2

Tabel II.2 . Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 Dinas PUP-ESDM DIY

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	12 Kawasan	<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>992.534.800</b>
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	99.999.000
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	699.996.000
				Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	93.558.800
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR	98.981.000
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang terhadap RTR kab/kota dan RTRW Provinsi	50%	<b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>1,012,909,450</b>
				Penyusunan Norma,Standar,Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	747,500,000
				Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang	99.140.000
				Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang	92.820.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	73.449.450
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneanaan sanksi	Persentase pengendalian tata ruang pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan	20%	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>837,318,500</b>
				Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	538.138.000
				Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	68.636.000
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang	163.717.000
				Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	66.827.500
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	Persentase penduduk berakses air minum	73,87%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM</b>	<b>4.373.100.000</b>
				Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4.299.270.000
				Penyusunan NSPK Air Minum	73.830.000
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	Layanan jaringan air limbah terpusat di APY	14.400 SR	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>	<b>4.358.575.431</b>
				Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	2,699,360,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
				Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah	73.830.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	505.757.931
				Pengembangan Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat	350.000.000
				Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	251.435.600
				Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	378.191.900
				Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah	100.000.000
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	50%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>173.780.000</b>
				Koordinasi Pengelolaan Persampahan	99.950.000
				Penyusunan NSPK Persampahan	73.830.000
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan	Persentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	57%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN</b>	<b>3.099.950.000</b>
				Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	1.549.950.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	perkotaan			Penyusunan Kriteria dan Rencana Induk Penanganan Kawasan Perkotaan	150.000.000
				Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1.400.000.000
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin	43%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN</b>	<b>17.499.579.800</b>
				Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	17.349.579.800
				Penyusunan Kriteria dan Rencana Induk Penanganan Kawasan Perdesaan	150.000.000
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Persentase Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	34%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA POTENSI</b>	<b>1.597.030.000</b>
				Pengembangan desa pusat pertumbuhan	1.597.030.000
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	Persentase titik genangan yang tertangani	33,90%	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG</b>	<b>3.420.226.000</b>
				Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	347.660.000
				Pembangunan Saluran	2.997.650.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
				Drainase/Gorong-Gorong	
				Pengembangan Saluran Drainase Lingkungan	74.916.000
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	80%	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN</b>	<b>127.343.000</b>
				Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara	28.526.000
				Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah	98.817.000
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase penyediaan aksesibilitas dengan kondisi mantap	72,04%	<b>PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>108.354.544.377</b>
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	92.258.630.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	546.000.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (D A K)	5.243.441.387
				Pemeliharaan Rutin Jalan	7.910.117.990
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.396.355.000
				<b>PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>70.132.617.725</b>
				Perencanaan Peningkatan Jalan	596.000.000
				Peningkatan Jalan	34.322.851.525

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Perencanaan Peningkatan Jembatan	444.000.000
				Peningkatan Jembatan	28.196.820.000
				Peningkatan Jalan (DAK)	6.318.946.200
				Penyusunan Kebijakan Kebinamargaan	254.000.000
				<b>PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>486,854,000</b>
				Inspeksi Kondisi Jalan	242.590.500
				Inspeksi Kondisi Jembatan	244.263.500
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	26,97%	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR</b>	<b>16.346.194.000</b>
				Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	16.346.194.000
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa	Persentase Luasan DI yang terlayani air irigasi	76,50%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b>	<b>26.155.387.793</b>
				Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	500,000,000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4.700.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	13.202.009.893
				Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4.690.917.900
				Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	2.784.790.000
				Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	277.670.000
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	Penambahan Penyediaan air baku	700 lt/det	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU</b>	<b>2.213.130.740</b>
				Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa	1.200.000.000
				Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	1.013.130.740
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA</b>	<b>14.582.538.953</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
				Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya	11.500.000.000
				Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.165.365.008
				Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi	331.047.000
				Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya	587.000.000
				Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	786.826.945
				Koordinasi Kelembagaan S D A	212.300.000
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	40 Titik	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR</b>	<b>1.518.497.075</b>
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	1.000.000.000
				Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan	518.497.075
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada	Persentase peningkatan kualitas	29%	<b>PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH</b>	<b>3.999.040.000</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	permukiman yang padat dan kumuh	lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin		Penataan kawasan kumuh	3.999.040.000
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	Persentase Pemberdayaan berbasis masyarakat	44%	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN</b>	<b>9.959.927.800</b>
				Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	9.460.517.800
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan	499.410.000
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Prosentase berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni	8,0%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>13.407.250.000</b>
				Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan	550.000.000
				Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual (NSPM)	100.00.000
				Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	10.708.600.000
				Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian	148.650.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	
				Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan Pedesaan	1.900.000.000
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	Rerata penurunan muka air tanah	<20%	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN AIR TANAH</b>	<b>3.499.200.000</b>
				Pembangunan Sarana Pemantauan Air Tanah	290.000.000
				Pembinaan Dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah	374.200.000
				Pendayagunaan Air Tanah Di Daerah Sulit Air	2.760.000.000
				Pemantauan dan Evaluasi Air Tanah	75.000.000
21	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian pertambangan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	9%	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN</b>	<b>696.828.672</b>
				Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Lintas	47.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
				Batas	
				Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian	299.828.672
				Pemetaan Geologi Teknik dan Wilayah Pertambangan	350.000.000
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan konservasi Energi	3%	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI</b>	<b>75.000.000</b>
				Peningkatan Kinerja Pengelola Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan	75.000.000
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	Rasio Elektrifikasi	77,40%	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>4.843.000.000</b>
				Pembangunan Pembangkit Listrik	190.000.000
				Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	3.204.000.000
				Perbaikan, Pemeliharaan Dan Pemindahan Pembangkit Listrik	100.000.000
				Penyusunan Desain Detail Jaringan Listrik Pedesaan	1.049.000.000
				Penyediaan Dan Pemenuhan Listrik	300.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
24	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	107.790 SBM	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	<b>1.775.810.000</b>
				Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Terbarukan	100.000.000
				Pengembangan Biogas Untuk Masyarakat Pedesaan	398.960.000
				Penyusunan Rencana Umum Energi	400.000.000
				Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	775.000.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	101.850.000
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	40%	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR</b>	<b>1.225.259.000</b>
				Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi	78.221.000
				Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk I K M	550.000.000
				Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi	98.425.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Pengawasan Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Usaha Bahan Bakar Dan Energi	39.990.000
				Pengembangan Bahan Bakar Nabati	150.000.000
				Penyusunan Sistem Informasi Minyak&Gas Bumi Serta Bhn bakar Lain	108.623.000
				Fasilitasi Ketersediaan Bahan Bakar Bersubsidi	200.000.000
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas	Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi	77,5%	<b>PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>925.517.110</b>
				Sosialisasi dan diseminasi peraturan perUndang-Undangan	79.000.000
				Sistem Database Jasa Konstruksi	92.687.110
				Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	57.250.000
				Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	110.150.000
				Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	99.100.000
				Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah	47.600.000
				Pengawasan Tertib Penyelenggaraan	97.610.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
				Jasa Konstruksi	
				Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	48.800.000
				Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	99.610.000
				Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi	97.000.000
				Pengawasan Terhadap K3	96.710.000
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Persentase penguasaan teknologi dan penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum	75,05%	<b>PROGRAM PENKAJI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>	<b>693.275.400</b>
				Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam	49.499.600
				Survey Bahan Bangunan Ke-Cipta Karya-an	50.000.000
				Informasi Teknologi Bidang PU	593.775.800
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	Persentase jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	75,00%	<b>PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN</b>	<b>687.850.000</b>
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	60.000.000
				Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	194.750.000
				Peningkatan Manajemen Laboratorium	424.100.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Pengujian	

### II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2013 Dinas PUP-ESDM DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.256.633.471.583,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2013 menjadi Rp.358.957.012.468,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 21.322.359.034,- dan Belanja Langsung Rp 337.634.653.434,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 332.994.093.161,- (92,77%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 20.316.482.495,- (95,28%) belanja langsung sebesar Rp 312.677.610.666,- (92,61%).

#### II.3.1 Target Belanja Dinas PUP-ESDM DIY

Tabel II.3. Target Belanja Dinas PUP-ESDM DIY

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 21.322.359.034,-	100 %
Belanja Langsung	Rp. 337.634.653.434,-	100 %
Jumlah	Rp. 358.957.012.468,-	100%

#### II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2013 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas PUP-ESDM DIY adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	992.534.800	96,57	-

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1.012.909.450	89,43	Efisiensi
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneanaan sanksi	837.318.500	95,70	-
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	2.546.028.130	58,22	Sisa anggaran pengadaan tanah karena tidak ada yang dapat dibebaskan
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	4.126.107.225	94,67	-
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	146.864.360	84,51	Sisa akomodasi penyelenggaraan koordiansi pengelolaan persampahan
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	3.099.950.000	93,06	-
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	17.499.579.800	95,21	-
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	1.597.030.000	92,85	-
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang	2.899.263.360	84,77	Sisa pengadaan barang/jasa

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
	optimalnya drainase di wilayah perkotaan			
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	127.343.000	81,13	Sisa pengadaan barang/jasa
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	178.974.016.102	96,60	-
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	16.346.194.000	97,96	-
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa	26.155.387.793	87,69	Sisa pengadaan barang/jasa
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	16.795.669.693	89,81	Sisa pengadaan barang/jasa
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	1.518.497.075	93,22	-
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	3.999.040.000	89,90	Sisa pengadaan barang/jasa
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	9.959.927.800	94,57	-
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	13.407.250.000	94,10	-
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	3.499.200.000	97,29	-
21	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengelolaan dan pemurnian pertambangan	696.828.672	97,03	-

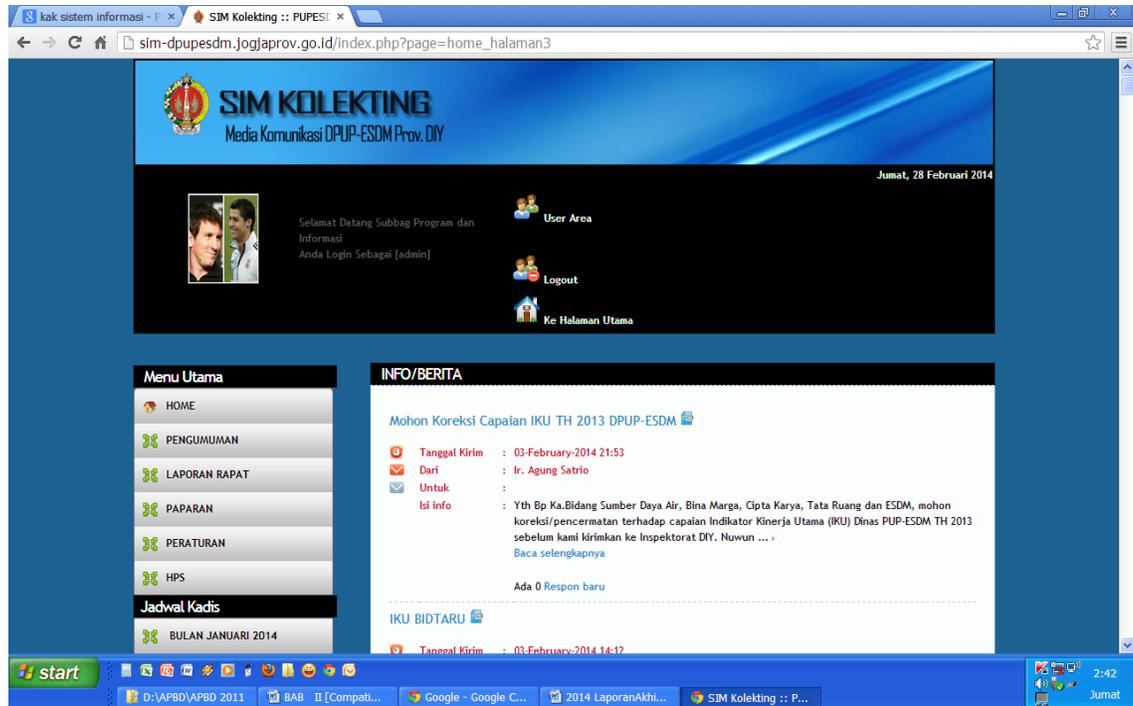
No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	75.000.000	94,85	-
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	4.843.000.000	88,19	Sisa pengadaan barang/jasa
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	1.775.810.000	93,11	-
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	1.225.259.000	97,01	-
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas	925.517.110	93,88	-
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	693.275.400	98,72	-
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	678.850.000	99,33	-

#### II.4 Instrumen Pendukung

Kebutuhan Teknologi Informasi (TI) di masa sekarang ini merupakan sebuah keniscayaan untuk memperoleh kinerja yang lebih optimal. Semua proses pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD harus dapat berjalan dengan baik tanpa saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Salah satu peran TI adalah membantu meringankan beban pekerjaan dengan melakukan proses otomasi, sehingga kesalahan yang muncul dari sisi *human error* dapat diminimalkan

Untuk mendukung komunikasi dalam penyampaian data dan informasi, Dinas PUP-ESDM DIY telah menyusun sistem informasi manajemen berbasis WEB yang dikenal dengan SIM Kolekting . Melalui SIM Kolekting tersebut penyampaian data dan informasi dapat dilaksanakan dapat lebih efisien dan efektif. Tampilan SIM Kolekting Dinas PUP-ESDM dapat dilihat pada Gambar I.3

Gambar I.3. Tampilan Halaman Depan SIM Kolekting Dinas PUP-ESDM DIY



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1. Capaian Kinerja Tahun 2013

Dinas PUP-ESDM DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2013 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel III.1.

Tabel III.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Keterangan : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas PUP-ESDM DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2013**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE
1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan strategis provinsi	1 Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan strategis	12	12	100,00%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR Kab/kota dan RTR Provinsi	%	50	63,93	127,86%	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	3 Peresentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan Kawasan lindung bawahan	%	20	44,85 %	224,25 %	Sangat Baik
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	4 Persentase penduduk berakses air minum	%	73,87	74,25	100,51%	Sangat Baik
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	5 Layanan jaringan air limbah terpusat di APY	SR	14.400	16.191	113,22%	Sangat Baik
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	6 Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	%	50	53	106%	Sangat Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	7 Presentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	%	57	64	112,28%	Sangat Baik
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	8 Presentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin	%	43	47	109,30%	Sangat Baik
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa potensi	9 Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa potensi	%	34	34	100%	Sangat Baik
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	10 Persentase titik genangan yang tertangani	%	33,90	35,29	104%	Sangat Baik
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	11 Presentase keandalan bangunan gedung Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	80	82	102,50%	Sangat Baik
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	12 Persentase penyediaan aksesibilitas dalam kondisi mantap	%	72,04	72,75	100,99%	Sangat Baik
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan	13 Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan	%	26,97	28,55	105,86%	Sangat Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
	strategis baru		kawasan strategis baru					
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	14	Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	%	76,50	77,00	100,41%	Sangat Baik
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	15	Penambahan penyediaan air baku	Lt/det	700	767,6	109,66%	Sangat Baik
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	16	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	40	43	107,50%	Sangat Baik
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	17	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin	%	29	32,71%	112,79%	Sangat Baik
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	18	Persentase komunitas perumahan yang telah diberdayakan	%	44	50	105,16%	Sangat Baik
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	19	Persentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani	%	8,00	8	100,00%	Sangat Baik
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	20	Rerata penurunan muka air tanah	%	< 20	< 20	100,00%	Sangat Baik
21	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengelolaan dan pemurnian pertambangan	21	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	%	9	9	100,00%	Sangat Baik
22	Terwujudnya penguatan	22	Pencapaian kinerja	%	3	3,33	111,00%	Sangat Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
	kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi		pelaksanaan konservasi energi					
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	23	Rasio elektrifikasi	%	77,40	80,60	104,13%	Sangat Baik
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	24	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	107.790	114.035,02	105,79%	Sangat Baik
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	25	Persentase kinerja pengelolaan bahan bakar	%	40	45	112.50%	Sangat Baik
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses dan produk konstruksi yang berkualitas	26	Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi	%	77,5	77,5	100%	Sangat Baik
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	27	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum	%	75,0	75,0	100%	Sangat Baik
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/ Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	28	Persentase jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	%	75,0	75,0	100%	Sangat Baik

Dari tabel di atas terdapat 28 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 28 indikator. Pada tahun 2013, terdapat 28 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator.

### III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas PUP-ESDM DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

#### III.2.1. Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan strategis provinsi

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan strategis provinsi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Ketersediaan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan Strategis Provinsi

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	10 Kawasan Strategis	12 Kawasan Strategis	12 Kawasan Strategis	100	19 Kawasan Strategis	63 %

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Urusan Penataan Ruang mempunyai tanggung jawab menyusun regulasi untuk Kawasan yang harus dikembangkan, sehingga pemanfaatan ruang serta sarana dan prasarana pendukung kawasan bisaterlaksana dengan pola dan struktur ruang yang benar dan pengembangan kawasan didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk menciptakan ruang yang aman,nyaman,produktif,dan berkelanjutan.

Untuk mendukung tujuan tersebut di atas pada tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mengarah pada Penyusunan Rencana

Rincian Peraturan Zonasinya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program.

Sampai dengan Tahun 2012 ketersediaan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan Strategis Provinsi sejumlah 10 kawasan startegis.

Melalui program penataan ruang pada tahun 2013 telah disusun 2 (dua) dokumen perencanaan untuk mendukung ketersediaan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Tempel – Prambanan.
- 2) Penyusunan Naskah Akademik, materi teknis dan draft raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Yogyakarta – Sadeng.

Sehingga sampai dengan Tahun 2013 ketersediaan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi sejumlah 12 kawasan strategis atau sebesar 100 % terhadap target . Bila dibandingkan dengan capaian pada akhir tahun 2012 telah meningkat 2 kawasan strategis (10 %).

### III.2.2. Sasaran meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR Kab/kota dan RTR Provinsi

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Peresentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR Kab/Kota Dan RTR Provinsi

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR Kab/kota dan RTR Provinsi	45%	50%	63,93%	127,86	90%	71,03

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Keluarnya Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta regulasi Penataan Ruang yang lebih operasional akan memperkuat pengendalian pemanfaatanruangmenjadi lebih intensif.

Luas total wilayah pemanfaatan ruang DIY sebesar : 318.085,75 Ha.

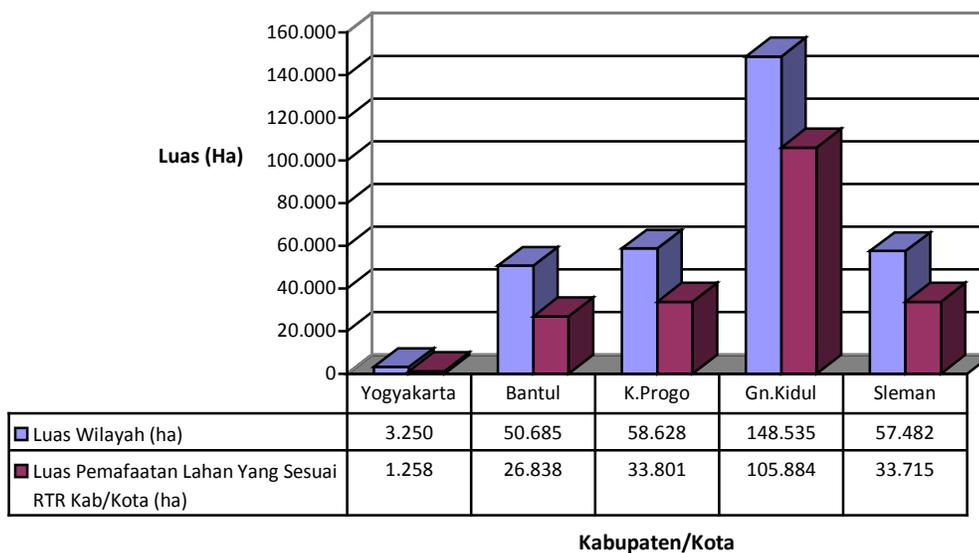
Pada tahun 2013 Luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Provinsi/Kab/ Kota sebesar 201.495,85 Ha dengan rincian :

- a. Kota Yogyakarta : 1.258,21 ha;
- b. Kab. Bantul : 26.838,42 ha;
- c. Kab. Kulon Progo : 33.800,58 ha;
- d. Kab. Gunungkidul : 105.883,70 ha;
- e. Kab. Sleman : 33.714,93 ha;

Sampai dengan Tahun 2013 capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR Kab/Kota dan RTR Provinsi sebesar . 63,93 % atau sebesar 127,86 % terhadap target (50%).

Bila dibandingkan dengan capaian sampai tahun 2012, sampai tahun 2013 kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang telah meningkat sebesar 18,93%.

Gambar III.1 Grafik Luas Wilayah Kab/kota dan Luas Pemanfaatan Lahan Sesuai RTR Kab/Kota



III.2.3. Sasaran meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneanaan sanksi.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneanaan sanksi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Peresentase pengaturan zonasi pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan kawasan lindung bawahan

Tabel III.5 Target dan Realisasi indikator Kinerja Peresentase pengaturan zonasi pada Kawasan Kerkotaan Yogyakarta dan Kawasan lindung bawahan

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase pengaturan zonasi pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan Kawasan lindung bawahan	10%	20%	44,85%	224,25,00	100%	44,85%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pengaturan zona kawasan perkotaan yogyakarta telah ditetapkan sejumlah 66 Blok. Peraturan Zonasi kawasan lindung bawahan sesuai RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 4 Kawasan Lindung Bawahan yaitu mencakup Kawasan Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo yang berupa kawasan resapan air dan kawasan hutan lindung.

Pola penghitungan didasarkan pada 2 bagian besar target kinerja, yaitu Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang terdiri dari 66 Blok dengan total bobot 50%. Kawasan Lindung Bawahan (KLB) terdiri dari 5 Kawasan yang tersebar di Kab. Sleman 2 kawasan, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo, masing-masing 1 Kawasan . Dalam perhitungannya Kawasan Lindung Bawahan yang berupa Kawasan Resapan Air (KRA) dan Hutan Lindung diberi bobot 50%.

Dari pelaksanaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada tahun 2013 telah tersusun pengaturan zonasi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta sejumlah 46 Blok. Pada Tahun Anggaran 2013 terjadi percepatan penyusunan aturan zonasi di kawasan Perkotaan Yogyakarta, dimana pada tahun tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta. Pada penyusunan RDTR tersebut didalamnya sudah termasuk penyusunan aturan zonasi di Kota Yogyakarta. Dengan adanya kegiatan tersebut, dalam waktu 1 (satu) tahun tersusun tambahan aturan zonasi sejumlah 21 blok di Kota Yogyakarta. Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan ruang, pada tahun 2013 dilakukan pembuatan dokumen Pemantauan Dan Evaluasi Kawasan Resapan Air sebagai panduan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung Bawah. Kegiatan tersebut dilakukan secara kontinue sebagai upaya pengendalian pemanfaatan Kawasan Lindung Bawaahan dari fungsinya sebagai kawasan Resapan Air serta Kawasan Hutan Lindung untuk mempertahankan fungsi hidrologi.

Dari hasil pelaksanaan program tersebut di atas, maka Pengaturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawah pada tahun 2013 telah tercapai sebanyak 46 blok atau 34,8 % dari total zonasi yang harus dibuat dan untuk Kawasan Lindung Bawah telah dibuat 1 dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kawasan resapan Air dari 5 kawasan yang akan dilakukan pengawasan dan pengendaliannya atau 10% dari total kawasan lindung bawahan, sehingga total secara keseluruhan sejumlah 44,8%

#### III.2.4. Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas .

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase penduduk berakses air minum

Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja indikator persentase penduduk berakses air minum

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	persentase penduduk berakses air minum	70,38%	73,87%	74,25	100,51	87,85%	84.52%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Penduduk berakses air minum dicapai melalui pelaksanaan program-program pendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar pelayanan air minum berupa Pengembangan Pengelolaan Air Minum.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perkotaan dan juga perdesaan. Ketersediaan sumber daya air di wilayah DIY yang terbatas mengharuskan penyediaan air minum yang memperhatikan permintaan kebutuhan air masyarakat kini dan mendatang dilakukan dengan upaya-upaya komprehensif. Program pengembangan pengelolaan air minum juga merupakan salah satu upaya untuk percepatan pencapaian Target Tujuan 7C MDGs yaitu Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015.

Pelaksanaan program pengembangan pengelolaan air minum yang telah dilaksanakan melalui pendanaan APBD DIY adalah Pengadaan Bahan Pendukung Air Minum (SPAMDES) terhadap 15 kelompok masyarakat pengelola SPAM Perdesaan (PAMASKARTA), dan juga telah dilaksanakan kegiatan penyusunan NSPK Air Minum. Sedangkan melalui pendanaan APBN tahun anggaran 2013 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ini.

a. Kegiatan Optimalisasi SPAM IKK:

- 1) Kabupaten Kulon Progo (6 IKK): SPAM IKK: Clereng, Sidorejo, Sentolo, Kalibawang, Panjatan & Sermo,
- 2) Kabupaten Bantul (5 IKK): SPAM IKK: Pundong, Piyungan, Jetis, Dlingo, & Bangunjiwo

- 3) Kabupaten Gunungkidul (5 IKK): SPAM IKK: Panggang, Patuk, Semanu, Bribin & Karang Sari
  - 4) Kabupaten Sleman (3 IKK): SPAM IKK: Ngaglik, Tambakbayan dan Gamping
- b. Kegiatan Pembangunan SPAM IKK
- 1) Kabupaten Kolon Progo (1 IKK): IKK Kalibawang
  - 2) Kabupaten Gunungkidul (2 IKK): SPAM IKK: Gedangsari, Gading dan Karang Sari.
- c. Kegiatan Pembangunan SPAM Perdesaaan
- 1) Kabupaten Kulon Progo (5 Desa)
  - 2) Kabupaten Bantul (3 Desa)
  - 3) Kabupaten Gunungkidul (18 Desa)
  - 4) Kabupaten Sleman (5 Desa)
  - 5) Kegiatan Pembangunan SPAM Kawasan Khusus
  - 6) Kabupaten Kulon Progo (4 TPI): TPI: Trisik, Bugel, Karangwuni dan Jangkaran.
  - 7) Kabupaten Bantul (2 TPI): TPI Samas & Depok
  - 8) Kabupaten Gunungkidul (7 TPI): TPI: Sundak, Siung, Kukup, Baron, Drini, Ngrenahan & Gesing.
- d. Kegiatan Pembangunan SPAM melalui pendanaan DAK Kabupaten
- 1) Kabupaten Sleman: 3 lokasi
  - 2) Kabupaten Bantul: 6 lokasi
  - 3) Kabupaten Gunungkidul: 22 lokasi
  - 4) Kabupaten Kulon Progo: 4 lokasi.

Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013 (APBN dan APBD) dapat memfasilitasi penduduk berakses air minum layak sebanyak 2.631.014 jiwa atau sebesar 74,25% dari jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 3.543.583 Jiwa( DIY Dalam Angka Tahun 2013) yang melebihi target RPJMD tahun 2013 sebesar 73,87%.

Tabel III.7. Capaian Penduduk Berakses Air minum

No	Kegiatan Pembangunan	Sumber Pendanaan	Keluaran		Pertambahan Penduduk Teryani (jiwa)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum
			Vol.	Satuan		
1	Pengembangan SPAM IKK	APBN	4	Sistem	40.000	1,13%
2	Optimalisasi SPAM IKK	APBN	19	Sistem	47.500	1,34%
3	Pengembangan SPAM Rusunawa	APBN	1	Sistem	1.000	0,03%
4	Pengembangan SPAM Desa	APBN	31	Sistem	31.000	0,87%
5	Pengembangan SPAM TPI	APBN	13	Sistem	13.000	0,37%
6	Pengembangan SPAM DAK	DAK Kab./Kota	35	Sistem	35.000	0,99%
7	Optimalisasi SPAM Desa	APBD DIY	12	Sistem	3.000	0,08%
Pertambahan Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2013					170.500	4,81%
Penduduk berakses Air Minum s.d Tahun 2012					2.460.514	69,44%
<b>Penduduk berakses Air Minum s.d Tahun 2013</b>					<b>2.631.014</b>	<b>74,25%</b>

Sumber data : DPPA Dinas PUP-ESDM TA.2013, DIPA Satker PLP DIY TA.2013

### III.2.5. Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik kuantitas dan kualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu layanan jaringan air limbah terpusat di APY

Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja indikator layanan jaringan air limbah terpusat di APY

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Layanan jaringan air limbah terpusat di APY	13.329 SR	14.400 SR	16.191	113,22%	20.000	80,96%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pencapaian layanan jaringan air limbah terpusat di KPY melalui pelaksanaan program-program pendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.

Air limbah dan sanitasi adalah bagian kunci dari kesehatan lingkungan. Selain itu pelaksanaan program pengembangan pengelolaan air limbah merupakan salah satu upaya untuk percepatan pencapaian target tujuan 7C MDGs yakni menurunkan hingga 50% proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2012-2017, mengamanatkan pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon.

Upaya pengembangan jaringan IPAL Sewon dilaksanakan melalui Program Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) berdasarkan nota kesepahaman antara Ditjend. Cipta Karya, Pemerintah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang secara umum mengatur kedudukan, tugas dan tanggungjawab masing masing pihak dalam pengelolaan sistem air limbah terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Program MSMHP telah dimulai pada tahun 2009 dan masih berlanjut hingga sekarang dengan target penambahan Sambungan Rumah (SR) IPAL Sewon sejumlah 25.000 SR pada akhir Tahun 2015.

Hingga tahun 2013 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar 16.191 SR yang dapat melayani 8.445 jiwa. Angka ini telah melampaui target di RPJMD 2012-2017, namun masih terdapat gap terhadap pencapaian target MSMHP hingga tahun 2015. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan kabupaten/kota untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam penyediaan SR. Pada tahun anggaran 2103 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Lateral Air Limbah Terpusat di Kawasan Depok Kabupaten Sleman dan di Kawasan Kasihan Kabupaten Bantul serta melalui pendanaan APBN telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Induk Air Limbah Terpusat di Kawasan

Perkotaan Yogyakarta tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sesuai skenario kesepakatan MSMHP yang dapat melayani penduduk sejumlah 62.865 jiwa, sehingga sampai tahun 2013 jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan jaringan air limbah sejumlah 71.310 jiwa

### III.2.6 Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian indikator persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja indikator persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	45%	50%	53%	106%	70%	76,71

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pencapaian indikator persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan dicapai melalui pelaksanaan program-program pendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar pelayanan Pengelolaan Persampahan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Hingga saat ini di DIY telah terbangun dua TPA dengan

sistem Controlled Landfill yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun anggaran 2013 melalui pendanaan APBN telah melaksanakan kegiatan optimalisasi kinerja TPA Sanitary Landfill Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, kegiatan penyediaan TPST 3R di Kabupaten Bantul 2 TPST 3R (Panggunharjo & Mrisi), di Kabupaten Sleman 1 TPST 3R (Bayen), dan di Kabupaten Gunungkidul 1 TPST 3R (Selang) yang dapat melayani 44.000 jiwa. Melalui pendanaan APBD DIY pada TA 2013 telah dilaksanakan penyusunan NSPM Pengelolaan Persampahan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut presentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan pada tahun 2013 telah meningkat mencapai 53%.

### III.2.7. Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan perkotaan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin.

Tabel III.10 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Aksesibilitas Kawasan Perkotaan Pada Wilayah Kecamatan Miskin.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	persentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin.	53%	57%	64%	112,28%	73%	88%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Tujuan pengembangan permukiman pada hakikatnya adalah mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan difokuskan kegiatan penyediaan aksesibilitas kawasan pada wilayah kecamatan-kecamatan miskin di DIY. Pengembangan kawasan dibagi dua menjadi pengembangan kawasan

perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan. Pada kawasan perkotaan terdapat 4 Kecamatan Miskin yang terletak di Kota Yogyakarta, meliputi: Kec. Tegalrejo, Kec. Umbulharjo, Kec. Mergangsan, dan Kec. Gedongtengen.

Pada kawasan perkotaan terdapat 125 lokasi yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Pada akhir tahun 2012 sejumlah 66 lokasi atau 53% yang tersebar di 4 kecamatan miskin telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan. Pada TA 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan berupa pembangunan sarana prasarana jalan lingkungan di 14 lokasi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013 aksesibilitas di kawasan perkotaan yogyakarta khususnya pada kecamatan miskin telah meningkat menjadi 80 lokasi atau 64 % yang mana diatas target sebesar 57% . Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, sampai tahun 2013 ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan meningkat 11%

### III.2.8.Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan perdesaan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin.

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja indikator yaitu persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin.	39%	43%	47%	109,30%	59%	80%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Di DIY terdapat kawasan pedesaan yang terdapat di 16 kecamatan yang dikategorikan miskin yaitu:

1. Kab. Sleman (3 Kecamatan): Kec. Gamping, Kec. Seyegan, dan Kec. Prambanan;
2. Kab. Bantul (4 Kecamatan): Kec. Kasihan, Kec. Sewon, Kec. Banguntapan dan Kec. Imogiri;
3. Kab. Kulon Progo (3 Kecamatan): Kec. Kokap, Kec. Kalibawang, dan Kec. Samigaluh;
4. Kab. Gunungkidul (6 Kecamatan): Kec. Playen, Kec. Karangmojo, Kec. Semanu, Kec. Semin, Kec. Ponjong, dan Kec. Gedangsari.

Secara keseluruhan di DIY terdapat 2.375 lokasi pada kawasan pedesaan yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Pada akhir tahun 2012 sejumlah 926 lokasi atau 39% wilayah yang telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan.

Pada TA 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan pedesaan melalui pembangunan infrastruktur pedesaan/jalan lingkungan di 196 ,sehingga aksesibilitas kawasan miskin di wilayah pedesaan telah meningkat menjadi 1.122 lokasi atau 47% yang mana diatas target tahun 2013 sebesar 43 % . Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, sampai tahun 2013 ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan pedesaan meningkat sebesar 8% . Jumlah lokasi pembangunan jalan lingkungan di kabupaten disajikan pada tabel III.10

Tabel III.12. Jumlah Lokasi Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten

No	Kabupaten	Jumlah Lokasi
1	Bantul	56
2	Kulon Progo	26
3	Gunungkidul	47
4	Sleman	67
	Jumlah	196

III.2.9. Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi.

Tabel III.13 Target dan Realisasi Kinerja indikator persentase dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	28%	34%	34%	100,00%	58%	59%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian kawasan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Pada akhir tahun 2012 telah teridentifikasi 30 Kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial yang tersebar di Kab Sleman (8 kawasan), Kab. Bantul (7 kawasan), Kab. Kulon Progo (7 kawasan) dan Kab. Gunungkidul (8 kawasan), dari jumlah kawasan tersebut baru sekitar 8 kawasan atau 28% yang telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung.

Pada tahun 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Infrastruktur di Kawasan Ngemplak Sleman dan Kawasan Desa Pertumbuhan Srandakan Bantul, sedangkan melalui fasilitasi APBN telah terfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar di Kawasan Minapolitan Sindumartani dan Ngemplak di Kabupaten Sleman, Kawasan Agropolitan Banjaroyo di Kabupaten Kulon Progo dan Kawasan Agropolitan Dlingo dan Sanden di Kabupaten Bantul, sehingga selama tahun 2013 telah terfasilitasi sejumlah 6 Kawasan Agropolitan/Minapolitan, dan dari 6 kawasan tersebut 2 kawasan telah dinyatakan tuntas penanganannya adalah Kawasan

Agropolitan Banjaroyo dan Sanden, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dibangun dukungan infrastruktur di 10 kawasan agropolitan/minapolitan telah tertangani atau mencapai 34% sesuai target . Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, sampai tahun 2013 ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi telah meningkat sebesar 6%.

### III.2.10. Sasaran berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta

Tolok ukur capaian sasaran berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pengurangan Jumlah Titik Genangan

Tabel III.14 Target dan Realisasi Kinerja indikator Pengurangan Jumlah Titik Genangan

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pengurangan Jumlah Titik Genangan	27,90%	33,90%	35,29	104%	57,90%	60,95%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pengurangan jumlah titik genangan dicapai melalui pelaksanaan program-program pendukung penyediaan sarana dan prasarana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan subbidang infrastruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang dimulai dari saluran primer-sekunder-tersier. Fokus penanganan drainase oleh Bidang Cipta Karya adalah permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Pada akhir tahun 2012 telah tertangani 14 titik genangan (27,90%) dari 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2013 melalui pendanaan APBN telah dilakukan penyediaan jaringan drainase untuk menangani 2 titik genangan di Kawasan Janti dan Kawasan Samirono di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan melalui pendanaan APBD DIY telah ditangani 2 titik genangan di Kawasan Sewon Kabupaten Bantul dan Kawasan Mantrijeron Kota Yogyakarta, sehingga pada tahun 2013, sejumlah 18 titik genangan telah tertangani atau mencapai 35,29%.

### III.2.11. Sasaran meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase kehandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel III.15 Target dan Realisasi Kinerja indikator yaitu persentase kehandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	persentase kehandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	78%	80%	82%	102,50%	88%	93%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan rumah negara, bantuan teknis pembangunan rumah negara dan pembangunan rumah negara. Dari 50 Gedung pemerintah DIY, hingga tahun 2012 sejumlah 39 gedung telah dinyatakan andal sesuai peraturan yang berlaku atau 78%.

Pada tahun 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan Pembangunan dua Gedung Laboratorium PIPBPJK dan Balai IPAL yang andal

sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada tahun 2013 gedung yang andal mencapai 41 unit atau 82%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, sampai tahun 2013 fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku meningkat sebesar 4%. Selain itu pada tahun 2013 juga telah dilaksanakan kegiatan Inventarisasi Pengelolaan Gedung-gedung Pemerintah.

III.2.12. Sasaran meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Tabel III.16 Target dan Realisasi Kinerja indikator persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap	71,09%	72,04%	72,75%	100,99%	74,44%	97,73%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pencapaian terhadap target penyediaan Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dilakukan melalui Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta Peningkatan Jalan dan Jembatan. Adapun untuk mencapai target indikator cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi dilakukan melalui kegiatan Inspeksi Jalan dan Jembatan.

Panjang total jalan provinsi di DIY adalah 619,34 km. Pada tahun 2012 panjang jalan provinsi DIY dalam kondisi mantap (baik dan sedang) telah mencapai 440,30 km. Dalam upaya meningkatkan capaian jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap, pada tahun 2013 dilakukan :

1. Rehabilitasi Jalan sepanjang 53,20 Km dan Rehabilitasi Jembatan panjang 7,00 M,
2. Peningkatan Jalan Provinsi panjang 5,50 km,

3. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi sepanjang 524,27 km,
4. Peningkatan jembatan provinsi sepanjang 100 m.

Pada akhir tahun 2013, kondisi jalan berstatus Jalan Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Jalan Kondisi mantap 450,60 KM (72,75 %), terdiri dari jalan dalam kondisi baik 147,20 KM (23,77 %) dan jalan dalam kondisi sedang 303,39 KM (48,99 %),
2. Kondisi tidak mantap 168,75 KM (27,25 %), terdiri dari jalan rusak ringan 121,48 KM (19,61 %) dan jalan rusak berat 47,26 KM (7,63 %).

Dari data diatas, capaian keberhasilan kondisi Jalan Provinsi melebihi target yang direncanakan pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 72,04% (446,20 KM). Hal tersebut tercapai karena adanya anggaran tambahan pada APBD Perubahan yang menangani beberapa ruas jalan ex jalan kabupaten yang naik statusnya menjadi jalan provinsi.

### III.2.13. Sasaran meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan baru.

Tabel III.17 Target dan Realisasi Kinerja indikator yaitu persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan baru

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan baru	24,2%	26,97%	28,55%	105,86%	38,74%	73,70%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Total luas lahan untuk aksesibilitas kawasan strategis dan baru yang diperlukan adalah 169,93 ha. Pada tahun 2012 telah disediakan/dibebaskan lahan seluas 40,82 ha atau 24,02% dan dilanjutkan di tahun 2013 dengan upaya penyediaan lahan/pembebasan tanah untuk aksesibilitas pengembangan kawasan selatan/ Jaringan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul seluas 75.394 m<sup>2</sup>. Sebagai tambahan juga telah dilakukan upaya untuk mendukung pengembangan kawasan strategis lainnya melalui penyediaan lahan/pembebasan lahan untuk pengembangan ruas jalan saluran mataram seluas 1.590 m<sup>2</sup>, sehingga total lahan yang telah disediakan/dibebaskan seluas 76.984 m<sup>2</sup> atau 7,69 ha.

Total penyediaan luas lahan untuk aksesibilitas kawasan strategis mencapai 48,51 ha atau sebesar 28,55% telah melampaui target sebesar 26,97%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru meningkat sebesar 4,53 %.

#### III.2.14.. Sasaran meningkatnya layanan jaringan irigasi.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya layanan jaringan irigasi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi.

Tabel III.18 Target dan Realisasi Kinerja indikator yaitu persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	75,06%	76,50%	77%	100,41%	82,5%	93%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Di Wilayah DIY terdapat 44 Daerah Irigasi (DI) seluas 17.112,87 Ha. Pada tahun 2012 luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi seluas 12.844,54 Ha atau 75,06% dari total luas daerah irigasi.

Pada tahun 2013 untuk layanan air irigasi terhadap daerah irigasi telah dilakukan kegiatan:

- 1) perencanaan pembangunan jaringan irigasi berupa penyusunan Inventarasi dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 4 (empat) daerah irigasi dengan total areal seluas 2.497,93 Ha; yaitu pada D.I. Canden (1.109 Ha), D.I. Blawong (1.077 Ha), dan D.I. Trini (151,93 Ha) serta D.I. Sidomulyo (160 Ha);
- 2) Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi yang tersebar pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, yaitu 44 daerah irigasi. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan pada 14 (empat belas) daerah irigasi yaitu D.I. Simo, Prangkok, Pendowo, Kuton, Tanjung, Payaman, Sapon, Pijenan, Blawong, Engkuk-engkukan, Ponggok, Tirtorejo, Pengasih dan Canden. Kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi: babat semak, gali walet (sedimen), buka tutup pintu bendung, pengecatan dan pelumasan pintu air.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, pada tahun 2013 Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi yaitu seluas 13.144,32 Ha atau 76,81 % yang mana diatas target sebesar 76,50 %. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 , sampai tahun 2013 layanan jaringan irigasi meningkat 1,75%.

### III.2.15. Sasaran meningkatnya ketersediaan air baku.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan air baku terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu penambahan penyediaan air baku

Tabel III.19 Target dan Realisasi Kinerja indikator penambahan penyediaan air baku

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	penambahan penyediaan air baku	600 Lt/det	700 Lt/det	767,6 Lt/det	109,66%	2.100 Lt/det	36,55%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Penambahan penyediaan air baku dicapai melalui Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya dan Program Penyediaan Air Baku. Kegiatannya meliputi pembangunan embung baru dan pemeliharaan embung, pembangunan jaringan irigasi air tanah, peningkatan distribusi air baku, survey kondisi bangunan prasarana sungai, serta pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi.

Pembangunan prasarana embung yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Embung Bimomartani di Kecamatan Ngemplak, Sleman, Embung Tegaltirto di Kecamatan Berbah, Sleman, dan Embung Merdeka di Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, dengan total tampungan 48.065,55 m<sup>3</sup> dengan debit andalan sebesar 29 lt/dtk yang diarahkan untuk penyediaan air irigasi seluas 256,92 Ha, pemenuhan kebutuhan domestik masyarakat serta keperluan lainnya. Adapun embung Tegal Tirto di Kecamatan Berbah, Sleman, belum dimanfaatkan untuk irigasi karena masih memerlukan perencanaan lebih lanjut terkait adanya situs geologi (singkapan lava bantal) yang mempunyai nilai dan manfaat yang tinggi dalam bidang pendidikan.

Pembangunan prasarana embung juga didukung oleh Pemerintah melalui BBWS Serayu Opak sebanyak 10 (sepuluh) unit yang tersebar di Kecamatan Tepus, Ponjong, Panggang, dan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul dengan potensi penambahan penyediaan air baku sebesar 22 lt/dt. Selain pembangunan embung juga dilakukan pembangunan jaringan irigasi air tanah yang dilaksanakan di Kecamatan Paliyan, Gunung Kidul dengan kapasitas pompa sebesar 5 lt/dtk untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada lahan seluas 35 Ha.

Sampai dengan tahun 2012 penambahan penyediaan air baku mencapai 711,6 lt/detik. Pada tahun 2013 telah dicapai penambahan 56 liter/detik, sehingga capaian target penambahan penyediaan air baku adalah sebesar 767,6 lt/det, melampaui target yang ditetapkan sebesar 700 lt/det. Secara rinci capaian target penambahan air baku dapat dilihat pada tabel III.16 berikut :

Tabel III.20 Potensi Pemanfaatan Air Baku

No	Nama Bangunan Prasarana Penyediaan Air Baku	Lokasi	Potensi Pemanfaatan Air Baku (lt/det)	
			TH 2012	TH 2013
1	Embung Bimomartani	Sleman	-	15
2	Embung Tegal Tirto	Sleman	-	6
3	Embung Merdeka	Bantul	-	8
4	Pompa Pampang	Gunung Kidul		5
Total Penyediaan melalui APBD			306,00	34
Total Penyediaan melalui APBN				22
Realisasi Penambahan Penyediaan Air Baku			711,60	767,60
Target Penambahan Penyediaan Air Baku			600	700

III.2.16. Sasaran meningkatnya kualitas pengendalian banjir.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pengendalian banjir terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu jumlah titik rawan banjir yang ditangani.

Tabel III.21 Target dan Realisasi Kinerja indikator jumlah titik rawan banjir yang ditangani

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	jumlah titik rawan banjir yang ditangani	20 titik	40 titik	43 titik	107,50%	120 Titik	36%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Di wilayah DIY terdapat 120 titik daerah rawan/potensi banjir . Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilakukan melalui Program Pengendalian Banjir dan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai di Sungai Winongo di wilayah Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.
- 2) Pemeliharaan bangunan prasarana sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan prasarana sungai dan pemeliharaan sungai, yaitu Sungai Sen dan Sungai Nagung di Kabupaten Kulon Progo, serta Sungai Gajahwong dan Sungai Code di wilayah Kabupaten Bantul
- 3) Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan yaitu pemberian bantuan bahan banjiran berupa bronjong sebanyak 875 buah dan sudah digunakan sebagai penguat tebing pada 12 titik lokasi. Karung plastik sebanyak 66.000 buah pada 11 titik lokasi yang digunakan untuk pengamanan tebing tersebar di DIY.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya dilakukan melalui fasilitasi kepada sepuluh kelompok masyarakat dalam wadah Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) dan Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Gadjahwong (FORSIDAS Gadjahwong).

Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Sampai dengan tahun 2013 penanganan potensi banjir yang sudah dilaksanakan BBWS Serayu Opak meliputi kegiatan normalisasi sungai, pembangunan/ rehabilitasi tebing, pembangunan Checkdam dan pembangunan pemecah gelombang.

Capaian target penanganan banjir terhadap daerah potensi pada Tahun 2013 adalah sebanyak 43 titik yang ditangani oleh APBD sebanyak 35 titik pada 11 desa di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, serta yang ditangani oleh APBN sebanyak 8 titik pada 8 desa di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo. Capaian ini melampaui target sebesar 40 titik.

III.2.17. Sasaran meningkatnya Kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya Kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu

Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin.

Tabel III.22 Target dan Realisasi Kinerja indikator persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin	23,20%	29%	32,71%	112,79%	51%	64,14%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pengurangan kawasan kumuh di DIY dilakukan melalui program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh. Berdasarkan data Review RP4D TA 2011, terinventarisasi 69 kawasan kumuh yang berlokasi di Kabupaten Bantul sebanyak 9 kawasan, Kabupaten Kulonprogo 10 kawasan, Kabupaten Gunungkidul 9 kawasan, Kabupaten Sleman 11 kawasan dan Kota Yogyakarta 29 kawasan. Dari 69 kawasan kumuh tersebut teridentifikasi 107 lokasi kumuh.

Sampai dengan tahun 2012 telah tertangani 25 lokasi kumuh. Upaya penataan kawasan kumuh pada tahun 2013 telah dilakukan di 10 lokasi sehingga capaian penanganan lokasi kumuh adalah sebanyak 35 lokasi atau 32,71% dari total lokasi kumuh di DIY. Capaian ini melebihi target kinerja 2013 yang ditetapkan sebesar 29%. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 telah meningkat 9,51%

III.2.18. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya Kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase komunitas perumahan yang telah diberdayakan

Tabel III.23 Target dan Realisasi Kinerja indikator persentase komunitas perumahan yang telah diberdayakan

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase komunitas perumahan yang telah diberdayakan	38,58%	44%	50,00%	105,16%	64%	78,13%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Jumlah komunitas perumahan total di DIY tercatat 438 komunitas. Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan fasilitasi bagi komunitas perumahan sebanyak 169 komunitas. Pada tahun 2013 dilakukan kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan rincian meliputi :

- a) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, telah dilakukan bagi komunitas perumahan di 45 (empatpuluh lima) Komunitas.
- b) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan, dilakukan melalui penyuluhan kepada komunitas perumahan pada 5 (lima) komunitas.

Selama tahun 2013, ada 50 (lima puluh) Komunitas Perumahan yang difasilitasi Pemerintah Daerah DIY untuk membangun sarana dan prasarana permukimannya, dengan lokasi sebagai berikut :

1. Kabupaten Gunungkidul, dengan lokasi :
  - 1) Desa Ngeposari, Gedongrejo dan Pancarejo, Semanu.
  - 2) Desa Bedoyo, Ponjong.
  - 3) Desa Karangwuni, Rongkop.
  - 4) Desa Logandeng, Playen.
  - 5) Desa Krambil Sawit, Saptosari.

- 6) Desa Klumpit, Tepus.
  - 7) Desa Girisekar, Panggang.
2. Kabupaten Bantul, dengan lokasi :
- 1) Desa Sabdodadi, Bantul.
  - 2) Desa Potoronodan Jambitan, Banguntapan.
  - 3) Desa Tamantirto, Bangunjiwo.
  - 4) Desa Ngestiharjo, Guvosari, Pajangan.
  - 5) Desa Argorejo, Sedayu.
  - 6) Desa Triharjo, Gilangharjo, Pandak.
  - 7) Desa Sumber Mulyo, Sidomulyo dan Mulyodadi, Bambanglipuro.
  - 8) Desa Seloharjo, Pundong.
  - 9) Desa Panjangrejo, Kretek.
  - 10) Desa Trimulyo, Imogiri.
  - 11) Desa Patalan, Sumberagung.
  - 12) Desa Pokoh, Dlingo.
  - 13) Desa Ringinharjo, Sewon.
  - 14) Desa Wonokromo, Pleret.
  - 15) Desa Srimulyo, Piyungan.
3. Kabupaten Sleman, dengan lokasi :
- 1) Desa Sumberharjo, Prambanan.
  - 2) Desa Wedomartani. Sindumartani, Ngemplak.
  - 3) Desa Caturtunggal dan Desa Maguwoharjo, Depok.
  - 4) Desa Kalitirto, Berbah.
  - 5) Desa Sumpersari, Moyudan.
  - 6) Desa Sidoarum, Godean.
  - 7) Desa Margodadi, Seyegan.
  - 8) Desa Sariharjo dan Pendowoharjo, Sleman.
4. Kabupaten Kulonprogo, dengan lokasi :
- 1) Desa Srikayangan, Sentolo.
  - 2) Desa Sendangsari, Pengasih.
  - 3) Desa Sumberrejo dan Jatimulyo, Girimulyo.
  - 4) Desa Pleret, Panjatan.
  - 5) Desa Kedundang, Temon.
5. Kota Yogyakarta, dengan Lokasi :

- 1) Kelurahan Tegalorejo, Wirobrajan.
- 2) Kelurahan Gowongan, Jetis.
- 3) Kotagede.
- 4) Kelurahan Brontokusuman, Mergangsan.

Dari data diatas, jumlah Komunitas Perumahan yang telah tertangani sampai dengan tahun 2013 sebesar 219 komunitas atau 50%. Bila dibandingkan capaian tahun 2012, sampai tahun 2013 pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat telah meningkat sebesar 12,42%

### III.2.19. Sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani

Tabel III.24 Target dan Realisasi Kinerja indikator yaitu Persentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani	8,50%	8,00%	8,00%	100,00%	6,00%	75,00%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Upaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2013 melalui pendanaan APBD 2013 dilakukan dengan memfasilitasi perbaikan kualitas sebanyak 1234 rumah yang terdiri dari : 317 rumah di Kabupaten Gunungkidul, 323 rumah di Kabupaten Bantul, 294 rumah di Kabupaten Sleman, 190 rumah di Kabupaten Kulonprogo, dan 110 rumah rumah di Kota Yogyakarta. Adapun penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan APBN 2013 dilakukan pada 2.669 rumah.

Pada tahun 2012 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tertangani sejumlah 86.966 rumah (8,37% dari total jumlah rumah di DIY). Target tahun 2013 adalah menurunkan angka tersebut menjadi 8,0%. Pada tahun 2013 telah ditangani 1234 rumah melalui dana APBD DIY dan 2.669 rumah dari dana APBN, sehingga jumlah rumah tidak layak huni menjadi 83.063 rumah atau sebesar 8% sesuai target tahun 2013. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, sampai tahun 2013 kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni telah meningkat 0,50%

### III.2.20. Sasaran terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah.

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu rerata penurunan muka air tanah

Tabel III.25 Target dan Realisasi Kinerja indikator rerata penurunan muka air tanah

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rerata penurunan muka air tanah	< 20%	< 20%	< 20%	100,00	< 20%	100,00

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Kewenangan Pemda DIY dalam pengelolaan air tanah berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman yang secara umum memiliki ketebalan rata-rata akuifer sebesar 100 meter. Pelaksanaan konservasi air tanah dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah CAT Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah < 20%.

Untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah < 20%, melalui APBD Provinsi DIY Tahun 2013 optimalisasi pengelolaan air tanah dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pembangunan 120 unit sumur resapan air tanah yang berada di :
  - a. Kabupaten Bantul : Dusun Depok, Desa Gilangharjo, Pandak sebanyak 20 unit; Dusun Blabak, Desa Triwidadi, Pajangan sebanyak 20 unit;

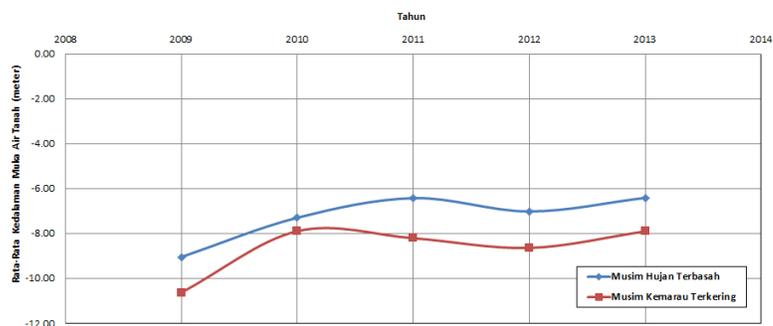
- Dusun Jasem, Desa Srimulyo, Piyungan sebanyak 20 unit; Dusun Muntuk, Desa Muntuk, Dlingo sebanyak 20 unit;
- b. Kabupaten Gunungkidul : Dusun Mojosari, Desa Kedungpoh, Nglipar sebanyak 20 unit;
  - c. Kabupaten Sleman : Dusun Watulangkah, Desa Ambarketawang, Gamping sebanyak 20 unit;
  - d. Pembangunan 1 unit sarana pemantauan air tanah dalam di Desa Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- 2) Pemeliharaan/perbaikan di 3 lokasi sarana pemantauan air tanah dalam di Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta;
  - 3) Pemantauan perubahan muka air tanah melalui sumur pantau
  - 4) Pengadaan 2 unit alat monitoring dan evaluasi air tanah

Berdasarkan hasil pemantauan muka airtanah pada tahun 2012 di 20 lokasi sumur pantau yang ditempatkan tersebar di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul rerata kedalaman muka airtanah sebesar 7,02 meter pada musim hujan terbasah dan 8,64 meter pada musim kemarau terkering. Adapun pada tahun 2013 rerata kedalaman muka air tanah pada musim penghujan terbasah sebesar 6,41 meter sehingga terjadi kenaikan muka airtanah rata-rata sebesar 0,61 meter. Sedangkan pada musim kemarau terkering kedalaman muka airtanah sebesar 7,90 meter atau terjadi kenaikan muka airtanah sebesar 0,74 meter .

Jika mendasarkan ketebalan rata-rata akuifer pada Cekungan Air tanah sebesar 100 meter, maka kedalaman rerata muka airtanah masih < 20% atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

Gambar III.4

Perbandingan Rata-rata Muka Air Tanah saat Musim Hujan Terbasah dan Musim Kemarau Terkering pada Tahun 2009 - 2013



III.2.21. Sasaran terwujudnya pengembangan kegiatan pengolahan dan permunian pertambangan.

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya pengembangan kegiatan pengolahan dan permunian pertambangan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan

Tabel III.26 Target dan Realisasi Kinerja indikator yaitu pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	8%	9%	9%	100,00	13%	69,23

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Wilayah DIY memiliki komoditas tambang yang terdiri dari mineral logam, mineral non logam dan batuan. Mineral logam meliputi : mangan dan pasir besi, mineral non logam meliputi : fosfat, bentonit, zeolit, dan kaolin, sedangkan batuan meliputi : andesit, tanah urug, pasir, sirtu, batu kali, batu gamping, dan breksi batuapung. Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan nilai tambah komoditas tambang yaitu (a) pengolahan dan/atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam, (b) pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan (c) pengolahan untuk komoditas tambang batuan di 22 lokasi kegiatan pertambangan yang potensial dikembangkan

Sampai tahun 2012 telah dicapai peningkatan nilai tambah komoditas tambang melalui fasilitasi pengolahan komoditas tambang batuan di 9 lokasi atau sebesar 41% dari total lokasi dengan peningkatan nilai tambah komoditas di masing-masing lokasi sebesar 20%, sehingga kinerja pengelolaan usaha pertambangan mencapai sebesar 8%.

Pada tahun 2013 telah dibangun pengolahan komoditas tambang batu andesit di 1 (satu) lokasi di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan

Kokap, Kabupaten Kulonprogo sehingga kegiatan pengolahan komoditas tambang sejumlah 10 lokasi . Dari 10 lokasi pengolahan bahan tambang tersebut, capaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan di tahun 2013 sebesar 9%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, sampai tahun 2013 pengembangan kegiatan pengolahan dan permunian pertambanga telah meningkat seebstar 1%.

Tabel III.27 Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan sampai Tahun 2013

Tahun	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengolahan	Persentase peningkatan nilai tambah bahan tambang	Persentase kinerja pengelolaan usaha pertambangan
a	b	c	d (b/22 X c)
2012	9	20%	8%
2013	10	20%	9%

Catatan:

Jumlah lokasi kegiatan pertambangan yang potensial dikembangkan: 22 Lokasi

III.2.22. Sasaran terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi.

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi

Tabel III.28 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	3%	3%	3,33%	111,00	15%	22,20

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pelaksanaan konservasi energi menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat mencakup seluruh tahapan pengelolaan energi yang meliputi pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi. Untuk mendukung pengelolaan energi dengan prinsip konservasi energi, dilakukan audit energi pada gedung, bangunan dan industri.

Sampai dengan tahun 2013, capaian pelaksanaan konservasi energi melalui audit energi di DIY sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah) dari 150 gedung pemerintah DIY. Dari pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2013, Pemda DIY yang didukung oleh APBN telah melakukan audit energi di Dinas PUP-ESDM DIY Bumijo, Gedung Setda Kota Yogyakarta; Balai IPAL Sewon, Bantul; Rumah Sakit Ghrasia, Pakem, Sleman dan PD Tarumartani.

### III.2.23. Sasaran Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Rasio Elektrifikasi

Tabel III.29 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rasio Elektrifikasi

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rasio Elektrifikasi	76,80%	77,40%	80,60%	104,13	79,80%	101,00

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Sub bidang ketenagalistrikan diprogramkan untuk dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Disisi lain ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain;

sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemenuhan Pencapaian Rasio Elektrifikasi pada APBD tahun 2013 diarahkan pada peningkatan penyediaan listrik melalui kegiatan :

- 1) Perencanaan pembangunan jaringan listrik pedesaan di 30 Dusun yang berada di:
  - a) Kabupaten Bantul sebanyak 6 dusun;
  - b) Kabupaten Kulonprogo sebanyak 14 dusun;
  - c) Kabupaten Gunungkidul sebanyak 6 dusun;
  - d) Kabupaten Sleman sebanyak 4 dusun;
- 2) Pembangunan jaringan listrik pedesaan di 9 dusun yang berada di :
  - a) Kabupaten Bantul : Dusun Nogosari II Desa Wukirsari, Imogiri; Dusun Banjarharjo, Desa Muntuk, Dlingo;
  - b) Kabupaten Kulonprogo : Dusun Depok, Desa Sukorejo, Sentolo; Dusun Ngrandu, Desa Salamrejo, Sentolo; Dusun Pereng Desa Ngentakrejo, Lendah; Dusun Gayam Desa Banyuroto, Nanggulan;
  - c) Kabupaten Gunungkidul : Dusun Tegalweru Desa Tepus, Tepus; Dusun Kajar III Desa Kaarangtengah, Wonosari;
  - d) Kabupaten Sleman Dusun Nawung Desa Gayamharjo, Prambanan;
- 3) Pemasangan instalasi rumah sebanyak 718 rumah tangga (RT), terdiri dari
  - a) Kabupaten Bantul sebanyak 383 RT
  - b) Kabupaten Kulonprogo sebanyak 202 RT
  - c) Kabupaten Gunungkidul sebanyak 133 RT
- 4) Pengadaan dan Pemasangan PLTS sebanyak 37 unit di Desa Kalirejo, Kokap Kabupaten Kulonprogo.
- 5) Pemasangan Lampu Masuk Desa (LAMDA) sebanyak 200 rumah tangga (RT) yang berada di :

- a) Kabupaten Kulonprogo : Dusun Kaliapak Desa Banjarsari; Dusun Dukuh dan Dusun Duwet Desa Purwoharjo, Samigaluh;
- b) Kabupaten Gunungkidul : Desa Tepus dan Desa Purwodadi, Tepus.

Pada akhir tahun 2012 jumlah rumah tangga (RT) berlistrik di DIY sebesar 824.506 RT sehingga capaian rasio elektrifikasi (RE) sebesar 76,80%. Pada tahun 2013 jumlah rumah tangga di DIY sebanyak 1.073.607 RT. Penambahan rumah tangga berlistrik melalui APBD DIY, APBD Kabupaten Sleman dan APBN/program listrik pedesaan sebanyak 40.818 RT, sehingga jumlah rumah tangga berlistrik sampai dengan tahun 2013 sebanyak 865.324 RT dan capaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2013 sebesar 80,6% atau telah melampaui target sebesar 77,4%.

Tabel III.30 Capaian Rasio Elektrifikasi DIY Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pemasangan Instalasi Rumah	718	RT
2	Pemasangan PLTS	37	RT
3	Pemasangan Lampu Masuk Desa (LAMDA)	200	RT
4	APBD Kab.Sleman (Listrik pedesaan)	189	RT
5	APBN (Program Listrik Pedesaan)	39.674	RT
Penambahan jumlah RT berlistrik TH.2013		40.818	RT
Jumlah RT berlistrik s.d TH.2012		824.506	RT
Jumlah RT berlistrik s.d TH.2013		865.324	RT
Jumlah Total Rumah Tangga DIY TH.2013		1.073.607	RT
<b>Capaian Rasio Elektrifikasi s.d TH 2013</b> (Perbandingan antara RT Berlistrik dengan Total RT X 100%)		<b>80,60</b>	<b>%</b>

III.2.25. Sasaran Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar.

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan.

Tabel III.31 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Pencapaian Penyediaan Energi Baru Terbarukan

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	104.720 SBM	107.790 SBM	114.035,02 SBM	105,79	130.100 SBM	87,65

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di daerah antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, angin, surya dan biogas.

Target pencapaian pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY pada tahun 2013 sebesar 107.790 SBM diupayakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya dan Angin oleh Kementerian ESDM sebesar 20 kW di Kabupaten Bantul.
- 2) Pemasangan 37 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Plampang III, Dusun Sangon II dan Dusun Sengir, Desa Kalirejo, Kokap, Kabupaten Kulonprogo.
- 3) Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 30 kW di Dusun Blumbang, Banjararum dan 600 kW di Dusun Semawung, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo
- 4) Pembangunan 10 unit Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLT Biogas) di :
  - a) Kabupaten Bantul : Dusun Gluntung, Desa Caturharjo, Pandak sebanyak 1 unit; Dusun Karanganyar, Desa Gadingharjo, Sanden sebanyak 1 unit; Dusun Tluren dan Dusun Seropadan, Desa Tirtomulyo, Kretek sebanyak 2 unit; Dusun Bondalem, Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro sebanyak 1 unit; Dusun Pentung, Desa Seloharjo, Pundong sebanyak 1 unit;
  - b) Kabupaten Kulonprogo: Dusun Ngrajun, Desa Banjarharjo, Kalibawang sebanyak 1 unit;

- c) Kabupaten Gunungkidul : Dusun Temon, Desa Giripurwo, Purwosari sebanyak 1 unit;
  - d) Kabupaten Sleman : Dusun Dukuh, Desa Pondokrejo, Tempel sebanyak 1 unit; Dusun Sejatidukuh, Desa Sumberarum, Moyudan sebanyak 1 unit;
- 5) Pembangunan 72 unit Digester Biogas Rumah Tangga untuk bahan bakar alternatif di :
- a) Kabupaten Bantul : Dusun Jetis Desa Selopamioro, Imogiri sebanyak 18 unit; Dusun Bawuran Desa Bawuran, Pleret sebanyak 16 unit.
  - b) Kabupaten Kulonprogo : Dusun Lendah dan Botokan Desa Jatirejo, Lendah sebanyak 18 unit;
  - c) Kabupaten Gunungkidul : Dusun Serut Desa Beji, Ngawen sebanyak 6 unit; Dusun Ngawen dan Candi Desa Kampung, Ngawen sebanyak 8 unit; Dusun Jono dan Wonongso Desa Tancep, Ngawen sebanyak 6 unit;

Capaian pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY pada tahun 2013 yang diperoleh dari tenaga air sebesar 630 kW setara dengan 8.674,84 SBM, tenaga surya 37 unit setara dengan 101,89 SBM, biogas sebanyak 82 unit setara 262,91 SBM, tenaga hybrid surya dan angin 20 kW setara dengan 275,39 SBM.

Total dari keseluruhan program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2013 telah dicapai penyediaan Energi Baru dan Terbarukan sebesar 114.035,02 SBM melampaui dari target sebesar 107.790 SBM.

#### III.2.25. Sasaran Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar.

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar .

Tabel III.32 Target dan Realisasi Kinerja indikator Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar dan gas.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar dan gas	30%	40%	45%	112,50	80%	56,25

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di DIY saat ini hanya dipasok oleh PT.Pertamina (Persero). Pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 93 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi melalui 43 agen anggota Hiswana Migas DIY beserta 3.130 pangkalannya. Dari keseluruhan penyalur bahan bakar bersubsidi tersebut, terdapat 600 penyalur yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya.

Upaya peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi. Sampai tahun 2012 telah dilakukan pembinaan terhadap 180 penyalur (30%). Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap 90 penyalur yang kinerja kelancaran distribusinya belum optimal, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan peningkatan kelancaran distribusi terhadap 270 penyalur atau sebesar 45%. Dalam memperlancar distribusi LPG tabung 3 Kg di Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul telah dibangun satu percontohan sub penyalur LPG.

III.2.26. Sasaran Meningkatnya pencapaian pelaku, proses dan produk konstruksi yang berkualitas.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya pencapaian pelaku, proses dan produk konstruksi yang berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi.

Tabel III.33 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Performance/ Kinerja Jasa Konstruksi.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi	75%	77,5%	78,34 %	101,08	87,5%	88,57

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Indikator Kinerja Pembinaan Jasa Konstruksi diperoleh dari penjumlahan 3 sub program yaitu Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan

Pengaturan : jumlah peraturan perundangan undangan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah tersosialisasikan sampai dengan tahun 2013 sejumlah 5 peraturan dari target 6 peraturan sampai 2017. Bobot pada pengaturan sebesar 40%, sehingga pada tahun 2013 ini telah tercapai 33.33%.

Pemberdayaan : jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikat sampai dengan tahun 2013 sebesar 3266 orang dari target 4000 org. Bobot pada pemberdayaan sebesar 50 % sehingga sampai tahun 2013 ini telah tercapai 40,82%

Pengawasan : indikatornya adalah jumlah layanan dalam SPM yang terupdatekan dalam SIPJAKI. Jumlah layanan dalam SPM ada 7, rata-rata dari 5 Kab/kota layanan dalam SPM yang terupdate sejumlah 3 layanan. Bobot pada pengawasan sebesar 10%, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah tercapai 4,29%.

Dengan demikian pencapaian kinerja pembinaan jasa konstruksi sampai dengan tahun 2013 sebesar 78,44% dengan uraian tercantum pada tabel III.34 berikut

Tabel III.34 Capaian Indikator Persentase Performance/Kinerja Jasa Konstruksi

Sub Program	Bobot	Target	Realisasi	% Realisasi	% Capaian
a	b	c	d	e	f
Pengaturan	40 %	6 peraturan	5 peraturan	83,33 %	33,33 %
Pemberdayaan	50 %	4.000 orang	3.266 orang	81,65 %	40,82 %
Pengawasan	10 %	7 layanan	3 layanan	42,86%	4,29 %
Jumlah	100 %				78,44 %

III.2.27. Sasaran Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (*centre of excellence*) bidang pekerjaan umum.

Tabel III.35 Target dan Realisasi Kinerja indikator Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (*centre of excellence*) bidang pekerjaan umum.

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum	72,50%	75,0%	78,44%	104,59%	85%	92,28%

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Penguasaan teknologi bidang pekerjaan umum dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keandalan bangunan dan peningkatan ketahanan permukiman. Penyebaran informasi bidang pekerjaan umum dicapai melalui media situs PIP2B DIY, layanan perpustakaan, sosialisasi dan seminar. Sasaran dari indikator kinerja adalah : masyarakat, pelajar, mahasiswa dan aparat pemerintah.

Target indikator hingga tahun 2017, untuk unsur penguasaan teknologi bidang pekerjaan umum, adalah 18 kegiatan pendukung keandalan bangunan dan 14 kegiatan pendukung ketahanan permukiman. Sedangkan untuk unsur penyebaran informasi bidang pekerjaan umum adalah 410.000 jiwa. Capaian pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel III.36 berikut.

Tabel III.36. Capaian indikator yaitu Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (*centre of excellence*) bidang pekerjaan umum Tahun 2013.

No.	Unsur	Sub Unsur		Bobot	Kegiatan Pendukung	Capaian Tahun 2013 (%)
a	b	c		d	e	f
1.	Penguasaan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Keandalan Bangunan	Perancangan dan Teknologi	21%	mock up : rumah tahan gempa, teknologi penahan longsor, drainase, limbah RT, bangunan aman angin, bangunan relokasi tsunami, bangunan penahan erupsi GA	15,75
			Efisiensi Bangunan	2%	survei harga satuan bhn bangunan (5 kab/kota dari 2013 - 2017)	0,80
			Kualitas Bangunan	2%	survey quarry (tanah, batu, air, pasir, tanah liat)	1,60
		Peningkatan Ketahanan Permukiman	pengetahuan Bidang ke-PU-an	12,5%	tema: kebakaran, gempa, banjir, longsor, angin, tsunami, erupsi gunung api	8,93
			Simulasi Ketahanan	12,,5%	simulasi penanganan kebakaran, gempa, banjir, longsor, angin, tsunami, erupsi gunung api	8,93
2.	Penyebaran Informasi Bidang Pekerjaan Umum			50%	Kunjungan pada situs, layanan perpustakaan , kegiatan sosialisasi/ seminar = 317.750 orang	38,75
Jumlah				100%		<b>74,76</b>

III.2.28. Sasaran Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/ Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/ Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian.

Tabel III.37 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Yaitu Pencapaian Jumlah Sertifikat/ Laporan Hasil Uji Dalam Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pencapaian jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	70,00%	75,00%	75,00%	100%	100%	75,00

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian dari target jumlah Laporan Hasil Uji 400 LHU dengan parameter terakreditasi terealisasi 310 LHU atau sebesar 77,5 % Sedangkan untuk penerimaan retribusi (PAD) dari target Rp. 165.000.000,- menjadi Rp.286.741.000,- sehingga pada tahun 2013 dapat melampaui target 100%

Dalam pengembangan manajemen laboratorium dari target jumlah parameter terakreditasi 40 parameter tercapai 31 parameter .

### III.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 92,61 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,34%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 63,26%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar (99,33%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi (78,85%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel III.38 berikut:

**Tabel III.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	992.534.800	958.527.320	96,57
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1.012.909.450	905.869.100	89,43
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta penerapan sanksi	837.318.500	801.349.800	95,70
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	4.373.100.000	2.546.028.130	58,22
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	4.358.575.431	4.126.107.225	94,67
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	173.780.000	146.864.360	84,51
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	3.099.950.000	2.884.825.520	93,06
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar	17.499.579.800	16.661.569.420	95,21

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan			
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	1.597.030.000	1.482.870.720	92,85
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan	3.420.226.000	2.899.263.360	84,77
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	127.343.000	103.318.600	81,13
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	178.974.016.102	172.880.177.523	96,60
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	16.346.194.000	16.012.463.967	97,96
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa	26.155.387.793	22.936.467.440	87,69
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	16.795.669.693	15.084.160.529	89,81
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	1.518.497.075	1.415.537.915	93,22
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	3.999.040.000	3.595.182.860	89,90
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	9.959.927.800	9.419.140.180	94,57
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	13.407.250.000	12.616.373.531	94,10
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	3.499.200.000	3.404.529.880	97,29

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
21	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian pertambangan	696.828.672	676.118.800	97,03
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	75.000.000	71.139.320	94,85
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	4.843.000.000	4.270.839.830	88,19
24	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar	1.775.810.000	1.653.534.110	93,11
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	1.225.259.000	1.188.572.800	97,01
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas	925.517.110	868.921.330	93,88
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	693.275.400	684.404.390	98,72
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	678.850.000	674.331.185	99,33
<b>Jumlah</b>		<b>318.807.069.626</b>	<b>300.766.389.145</b>	<b>94,34%</b>
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		<b>18.827.583.808</b>	<b>11.911.221.521</b>	<b>63,26%</b>
<b>Total BelanjaLangsung</b>		<b>337.634.653.434</b>	<b>312.677.610.666</b>	<b>92,61%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2013, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 28 (dua puluh delapan) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PUP-ESDM DIY pada Tahun Anggaran 2013 merupakan tahun ke 1 (satu) dari Rencana strategis Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

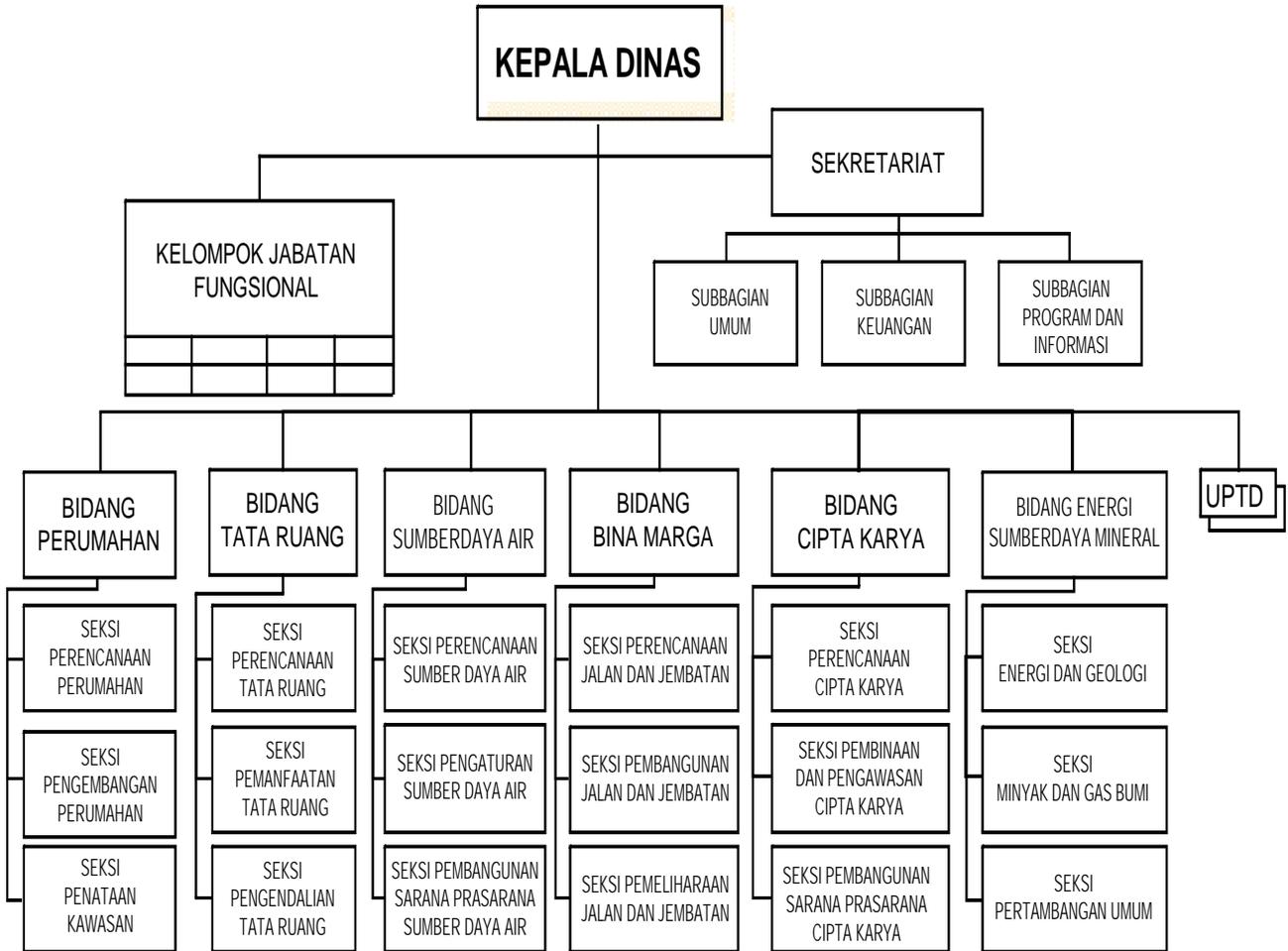
Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 28 (dua puluh delapan) sasaran, terdapat 25 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2013, 28 (dua puluh delapan) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator.
3. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

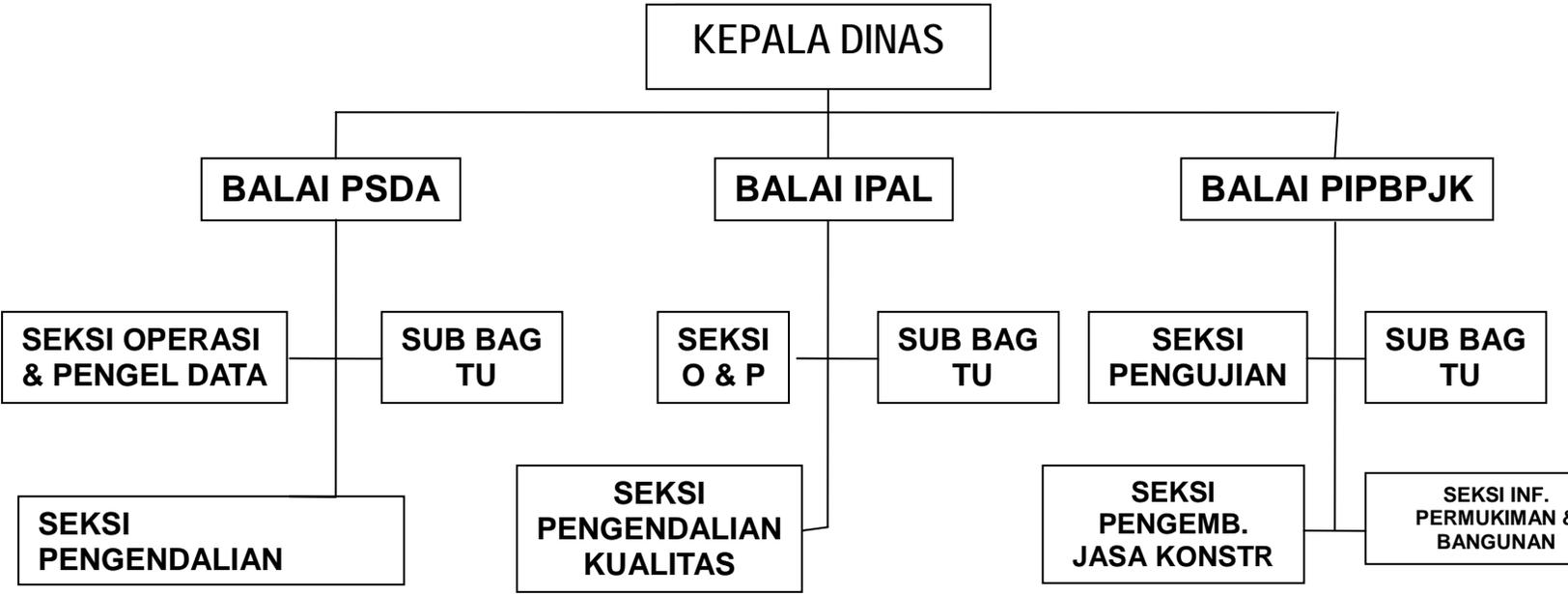
- 1) Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
- 2) Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
SKPD DINAS PUPESDMDIY**



**STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
DINAS PUPESDM DIY**







# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SKPD**

**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN  
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
PEMDA DIY**

**TAHUN 2014**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2014 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja SKPD.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Yogyakarta, Februari 2015  
Kepala Dinas PUP-ESDM DIY

**Ir. Rani Samsinarsi, MT**  
NIP. 19570524 1986 03 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Struktur Organisasi	I-1
I.2 Fungsi dan Tugas	I-3
I.3 Keadaan Pegawai	I-5
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana	I-8
I.5 Keuangan	I-9
I.6 Sistematika LAKIP	I-9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
II.1 Perencanaan Strategis	II-1
II.1.1 Visi dan Misi	II-1
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	II-4
II.1.3 Strategi	II-9
II.1.3.1 Misi 1	II-9
II.1.3.2 Misi 2	II-11
II.1.3.3 Misi 3	II-14
II.1.3.4 Misi 4	II-15
II.1.3.5 Misi 5	II-16
II.1.3.6 Misi 6	II-17
II.1.3.7 Misi 7	II-17
II.1.3.8 Misi 8	II-18
II.1.3.9 Misi 9	II-18
II.1.3.10 Misi 10	II-20
II.1.3.11 Misi 11	II-21
II.1.3.12 Misi 12	II-22
II.1.3.13 Misi 13	II-22
II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)	II-24
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2014	II-26
II.3 Rencana Anggaran	II-38

II.3.1 Target Belanja Dinas/Badan/Kantor/RS/Biro	II-39
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategi	II-39
II.4 Instrumen Pendukung	II-42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2014	III-1
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	III-5
III.3. Akuntabilitas Anggaran	III-81
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
Piagam Penghargaan Bidang PU ESDM Tahun 2014:	
➤ Bidang Jasa Konstruksi (Pembinaa	
➤ n Jasa Konstruksi)	
➤ Bidang Penataan Ruang (Penyelenggaraan Penataan Ruang)	
➤ Penghargaan untuk Kategori Perorangan (Bidang kePUan)	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi Tahun 2012-2017 adalah **“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan”**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 13 misi, yaitu (a) Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar; (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas; (c) Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara; (d) Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi; (e) Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA; (f) Mengurangi resiko daya rusak air; (g) Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni; (h) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; (i) Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; (j) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral; (k) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah; (l) Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan dan (m) Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat

dalam pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012-2017.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dari analisis 28 sasaran, terdapat 29 indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2014, 29 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **I.1 Struktur Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Pimpinan : Kepala Dinas
- 2) Sekretariat : Sekretaris yang terdiri dari sub bagian sub bagian
- 3) Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
  - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
  - Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Program dan Informasi.
- b. Bidang Perumahan, terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Perumahan;
  2. Seksi Pengembangan Perumahan;
  3. Seksi Penataan Kawasan.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
  3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Sumberdaya Air;
  2. Seksi Pengaturan Sumberdaya Air;
  3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumberdaya Air.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
  2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya;
  3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya.
- g. Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terdiri dari :
1. Seksi Energi dan Geologi;
  2. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
  3. Seksi Pertambangan Umum.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), terdiri dari :
    - a) Kepala Balai;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Seksi Operasi dan Pengelolaan Data;
    - d) Seksi Pengamanan dan Pengendalian;
    - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, Pengembangan Jasa Konstruksi (PIPBPJK), terdiri dari :
    - a) Kepala Balai;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Seksi Pengujian;
    - d) Seksi Informasi Permukiman dan Bangunan;
    - e) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi;
    - f) Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Balai Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL), terdiri dari :
    - a) Kepala Balai;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
    - d) Seksi Pengendalian Kualitas;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional

## **I.2 Fungsi dan Tugas**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber

Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan binamarga;
- f. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan cipta karya;
- g. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;
- i. pelaksanaan pengembangan kawasan;
- j. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat;
- k. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- l. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- m. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- n. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan tata ruang;
- o. pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumber daya mineral Kabupaten/Kota;

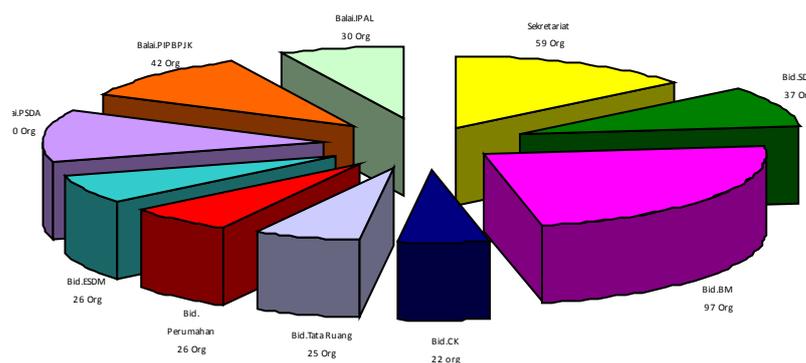
- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- q. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- r. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- s. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

### I.3 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhir tahun 2014 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 414 (empat ratus empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (sekretariat, bidang dan balai) sesuai kondisi real disajikan pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar I.1

Grafik Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Pada Sekretariat, Bidang Dan Balai Per 31 Desember 2014



Sumber Data: Daftar Nominatif Pegawai DPUP-ESDM DIY TH.2014

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2014

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Jabatan Struktural :	
	a. Eselon IIA	1
	b. Eselon IIIA	10
	c. Eselon IVA	30
2	Jabatan Fungsional Umum (6 orang CPNS)	373
3	Jabatan Fungsional Tertentu	0
<b>JUMLAH</b>		<b>414</b>

Sumber data : Daftar Nominatif PNS DPUP-ESDM DIY TH. 2014

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM Pemda DIY Berdasarkan Pangkat / Golongan Per 31 Desember 2014

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda/IVc	1
2	Pembina Tingkat I/IVb	7
3	Pembina/IVA	14
4	Penata Tingkat I/IIId	26
5	Penata/IIIc	27
6	Penata Muda Tingkat I/III b	127
7	Penata Muda/IIIA	30
8	Pengatur Tingkat I/IIId	17
9	Pengatur/IIc	29
10	Pengatur Muda Tingkat I/IIb	95
11	Pengatur Muda/IIA	11
12	Juru Tingkat I/Id	20
13	Juru/IIc	4
14	Juru Muda Tk I/IIb	5
15	Juru Muda/IIA	1
<b>JUMLAH</b>		<b>414</b>

Sumber data : Daftar Nominatif PNS DPUP-ESDM DIY TH. 2014

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2014

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	29
2	Sarjana	79
3	Diploma IV	2
4	Diploma III	24
5	SLTA /sederajat	232
6	SLTP/sederajat	35
7	SD/sederajat	16
<b>JUMLAH</b>		<b>414</b>

Sumber data : Daftar Nominatif PNS DPUP-ESDM DIY TH. 2014

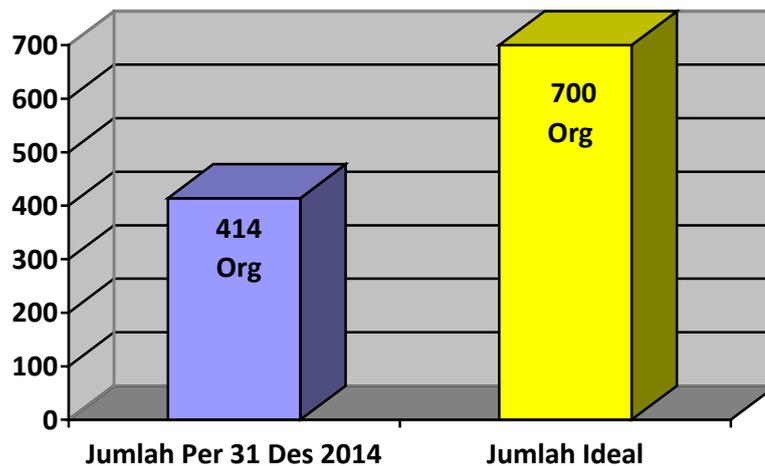
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Berdasarkan Gender per 31 Desember 2014

No	Gender	Jumlah (orang)
1	Pria	348
2	Wanita	66
<b>JUMLAH</b>		<b>414</b>

Sumber data : Daftar Nominatif PNS DPUP-ESDM DIY TH. 2014

Gambar 1.5

Grafik Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Pekerjaan (Berdasarkan Pergub DIY Nomor 66,67 dan 68 Tahun 2012)



#### I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana SKPD yang memadai, adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PUP-ESDM DIY per 31 Desember 2014 disajikan pada tabel 1.4

Tabel. 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas PUP-ESDM DIY per 31 Desember 2014

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (unit)
		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	7			7
2	Kendaraan Roda 6	12			12
3	Kendaraan Roda 4	19	5		24
4	Kendaraan Roda 3	2			2
5	Kendaraan Roda 2	43	16		59
6	Komputer Desktop	82	9	5	96
7	Komputer Laptop	74	7	2	83
8	Printer	50	15	20	85
9	UPS	54	8	2	64
10	Air Conditioning	44	18	8	70

Sumber data : Buku Inventaris DPUP-ESDM DIY TH. 2014

Tabel I.5 Jumlah Ideal Sarana Dan Prasarana Dibandingkan Dengan Beban Pekerjaan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Saat Ini (unit)	Jumlah Ideal Yang Dibutuhkan (unit)	Unit Keja
1	Gedung Kantor	7	11	Dinas dan Balai
2	Kendaraan roda 6	8	16	Dinas dan Balai
3	Kendaraan roda 4	24	37	Dinas dan Balai
4	Kendaraan roda 2	59	114	Dinas dan Balai
5	Kendaraan roda 3	2	6	Dinas dan Balai
6	Komputer <i>Desktop</i>	96	191	Dinas dan Balai
7	Komputer <i>Laptop</i>	83	178	Dinas dan Balai
8	Printer	85	100	Dinas dan Balai
9	UPS	64	159	Dinas dan Balai
10	Pendingin Ruangan (AC)	70	165	Dinas dan Balai

## I.5 Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 503.867.215.808 dengan rincian disajikan pada tabel.7

Tabel.I.6 Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Yang Dikeloka Dinas PUP-ESDM DIY Tahun Anggaran 2014

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>209.515.000</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>209.515.000</b>
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	200.065.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah	9.450.000
5	<b>BELANJA</b>	<b>503.657.700.808</b>
5.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>21.011.591.187</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	21.011.591.187
5.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>482.646.109.621</b>
5.2.1	- Belanja Pegawai	13.712.138.022
5.2.2	- Belanja Barang dan Jasa	191.879.108.678
5.2.3	- Belanja Modal	277.054.862.921
<b>Jumlah Total Anggaran</b>		<b>503.867.215.808</b>

Sumber data : DPA DPUP-ESDM DIY TA 2014

## I.6 Sistematika LAKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY dan sekilas pengantar lainnya

## Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi , misi , tujuan , sasaran, strategi, kebijakan serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja (dokuemen Perjanjia Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY

## Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

## Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY

Lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II.1 Perencanaan Strategis**

##### **II.1.1 Visi dan Misi**

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat, sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan antar wilayah serta mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 serta tugas dan fungsi Dinas PUP-ESDM DIY dalam mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral DIY periode tahun 2012-2017 yakni :

**“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan ”**

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

- a. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
- b. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;

- c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
- d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
- e. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
- g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Makna dari ketersediaan jumlah rumah layak huni bagi pemenuhan visi Perumahan adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- b. Fasilitasi dan dorongan bagi terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- c. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendukung seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
- d. Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
- e. Fasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh terutama bagi masyarakat perkotaan di DIY.

Makna pendayagunaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan bagi pemenuhan visi energi sumber daya mineral adalah :

- a. Peningkatan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- b. Peningkatan nilai tambah energi dan mineral.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas PUP-ESDM DIY sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 maka misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara.
4. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.
5. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA.
6. Mengurangi resiko daya rusak air.
7. Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral.

11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah
12. Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan.
13. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan kata lain, pernyataan misi Dinas PUPESDM adalah mengintegrasikan penataan ruang wilayah dalam kerangka menjamin kinerja tinggi dari pelayanan infrastruktur dasar, kehadiran kelayakan hunian/permukiman, pemanfaatan energi baru terbarukan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya mineral serta konservasi sumber daya air sehingga mampu mendukung pembangunan sektor lain, pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

## **II.1.2 Tujuan dan Sasaran**

### **II.1.2.1 Tujuan**

Untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 3) Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4) Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase, persampahan);
- 5) Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas kawasan;
- 6) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang keistimewaan DIY;
- 7) Meningkatkan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan;

- 8) Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas;
- 9) Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa;
- 10) Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air;
- 11) Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air;
- 12) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
- 13) Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif;
- 14) Mempertahankan kelestarian dan ketersediaan air tanah;
- 15) Mendorong pemanfaatan secara optimal hasil pertambangan;
- 16) Mengimplementasikan pelaksanaan konservasi energi;
- 17) Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi ketenagalistrikan;
- 18) Meningkatkan ketersediaan energi;
- 19) Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar;
- 20) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan;
- 21) Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan Informasi teknologi pembangunan bidang PUPESDM;
- 22) Memberikan pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi;
- 23) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;
- 24) Memberikan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 25) Memberikan layanan penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program.

### II.1.2.2 Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun disajikan pada tabel II.1.2 berikut :

Tabel II.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2013)	TARGET AKHIR 2017
1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan strategis provinsi	1 Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan strategis	12	19
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	2 Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR Kab/kota dan RTR Provinsi	%	63,93	90
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneraan sanksi	3 Peresentase pengaturan zonasi pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan Kawasan lindung bawahan	%	44,85	100
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	4 Presentase penduduk berakses air minum	%	74,25	87,83
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai	5 Layanan jaringan air limbah terpusat di KPYP	SR	16.191	20.000
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai	6 Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	%	53	70

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2013)	TARGET AKHIR 2017
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	7 Presentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	%	64	73
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	8 Presentase aksesibilitas kawasan pedesaan pada wilayah kecamatan miskin	%	47	59
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	9 Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	%	34	58
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	10 Persentase titik genangan yang tertangani	%	35,29	57,90
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	11 Presentase keandalan bangunan gedung Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	82	88
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	12 Presentase aksesibilitas dengan kondisi mantap	%	72,75	77,44
		13 Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	%	100	100
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	14 Presentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	%	28,55	63,75
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	15 Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	%	77,00	82,5
15	Meningkatnya	16 Penambahan	Lt/det	767,6	2.100 lt/det

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2013)	TARGET AKHIR 2017
	ketersediaan air baku	penyediaan air baku			
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	17 Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	43	120
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	18 Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin	%	32,71	51
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	19 Persentase komunitas perumahan yang telah diberdayakan	%	50	64
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	20 Persentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani	%	8	6
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	21 Rerata penurunan muka air tanah	%	<20	<20
21	Terwujudnya pengembangan kegiatan pengelolaan dan permukiman pertambangan	22 Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	%	9	13
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	23 Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	%	3,33	15
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	24 Rasio elektrifikasi	%	80,60	79,80
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	25 Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	114.035,02	130.10
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	26 Persentase kinerja pengelolaan bahan bakar	%	45	80
26	Meningkatnya	27 Persentase	%	77,5	87,5

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (akhir tahun 2013)	TARGET AKHIR 2017	
	pencapaian pelaku, proses dan produk konstruksi yang berkualitas		performence/ kinerja jasa konstruksi			
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	28	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum	%	75,0	85
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/ Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	29	Pencapaian jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	%	75,0	100

### II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

#### II.1.3.1 Misi 1 : Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.

Strategi 1 : Pembuatan RTR pada kawasan Strategis Provinsi

Kebijakan : Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan

Program : Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan  
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

- Strategi 2 : Peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah
- Program : Program Pemanfaatan Ruang
- Kegiatan : 1. Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang  
2. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang  
3. Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Dan Rancangan Peraturan Gubernur
- Strategi 3 : Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi
- Kebijakan : Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
- Program : Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
2. Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
3. Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
4. Pengawasan Pemanfaatan Ruang  
5. Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota  
6. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Strategi 4 : Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan strategis yang mempunyai nilai budaya

- Kebijakan : Mengefektifkan pengendalian pemanfaat ruang pada kawasan strategis yang mampu-nyai nilai budaya
- Program : Program Penataan Ruang Keistimewaan Yogyakarta
- Kegiatan : 1. Fasilitasi Perdais Tata Ruang DIY  
2. Penyusunan Materi Teknis Review RTRW DIY  
3. Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi Pelestarian Sosial Budaya Makam Imogiri  
4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY  
5. Penyusunan Norma, Standard, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Pemanfaatan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten  
6. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta dan Sekitarnya  
7. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Puro Pakualaman dan Sekitarnya  
8. Fasilitasi Penyebaran Informasi Penataan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten  
9. Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian Penataan Ruang di Satuan-Satuan Ruang Keistimewaan  
10. Penyusunan Naskah Akademis Review Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DIY

**II.1.3.2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas**

- Strategi 1 : Peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.
- Program : Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- Kegiatan : 1. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

- Strategi 2 : Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah
- Kebijakan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah
- Program : Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
- Kegiatan : 1. Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah  
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah  
3. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah  
4. Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah  
5. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah
- Strategi 3 : Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh s take-holders dalam upaya mencapai sasaran pem-bangunan persampahan
- Program : Program Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan : 1. Pembangunan Prasarana Dan Sarana Persampahan
- Strategi 4 : Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase.
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh s take-holders dalam upaya mengurangi titik genangan air
- Program : Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Kegiatan : 1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/  
Gorong-Gorong  
2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong  
3. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- Strategi 5 : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh s take-holders dalam

- upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan perkotaan
- Program : Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kegiatan : 1. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan  
2. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
- Strategi 6 : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan
- Kebijakan : Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan perkotaan
- Program : Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
- Kegiatan : 1. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
- Strategi 7 : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung aksesibilitas pembangunan kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- Program : Program Pengembangan kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- Kegiatan : 1. Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan
- Strategi 8 : Peningkatan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan kawasan budaya
- Kebijakan : Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan kawasan budaya
- Program : Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan DIY
- Kegiatan : 1. Penyusunan RTBL Kawasan Budaya Imogiri  
2. Penyusunan RTBL Kawasan Budaya Nglanggeran dan Sekitarnya

3. Penataan / Revitalisasi Kawasan Budaya Ambarbinangun dan Sekitarnya
4. Penataan / Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta
5. Penataan / Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Puro Pakualaman
6. Penataan / Revitalisasi Kawasan Budaya Kotagede
7. Penataan / Revitalisasi Kawasan Budaya Gunung Gambar Sebagai Kawasan Inti Dan Kawasan Pendukungnya
8. Penataan Kawasan Pantai Depok Parangkusumo Bantul
9. Penataan Kawasan Perkotaan ( Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner )
10. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta 2030
11. Penataan Kawasan Pantai Selatan (Pembebasan Lahan Untuk JJLS)
12. Penyusunan Rencana Induk Penataan Kawasan Pantai Depok Parangkusumo Bantul
13. Penataan Kawasan Petilasan Watu Gilang Kotagede
14. Penyusunan RTBL Kawasan Kraton – Krapyak
15. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Kraton
16. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Puro Pakualaman

**II.1.3.3 Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara**

- Strategi : Peningkatan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku
- Kebijakan : Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.
- Program : Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan

Gedung Dan Lingkungan

- Kegiatan : 1. Penataan Bangunan Dan Lingkungan  
2. Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara  
3. Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah

**II.1.3.4. Misi 4 : Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.**

Strategi 1 : Penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap

Kebijakan : Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun

Program 1 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

- Kegiatan
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
  2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
  3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (D A K)
  4. Pemeliharaan Rutin Jalan
  5. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Program 2 : Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

- Kegiatan
1. Peningkatan Jalan
  2. Perencanaan Peningkatan Jembatan
  3. Peningkatan Jembatan

Program 3 : Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

- Kegiatan
1. Inspeksi Kondisi Jalan
  2. Inspeksi Kondisi Jembatan

Strategi 2 : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur untuk aksesibilitas bagi kawasan startegis dan kawasan startegis

Kebijakan : Menyediakan sarana dan prasarna untuk infrastruktur

Program : Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur

Kegiatan : Pengadaan Tanah Untuk Jalan Dan Jembatan

**II.1.3.5. Misi 5 : Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA**

Strategi : Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi

Kebijakan : Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan

Program : Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3. Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (D A K)
5. Pemeliharaan Jaringan Irigasi
6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan
7. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD

Strategi : Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku

Kebijakan : Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air

Program : Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

Kegiatan

1. Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2. Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
3. Pemeliharaan Pos Dan Peralatan Hidrologi

4. Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya
5. Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
6. Koordinasi Kelembagaan S D A

Program : Program Penyediaan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan : 1. Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa

2. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

#### **II.1.3.6. MISI 6 : Mengurangi resiko daya rusak air**

Strategi : Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air

Kebijakan : Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air terutama pada 3 sungai di DIY

Program : Program Pengendalian Banjir

Kegiatan 1. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan bantaran Dan Tanggul Sungai

2. Pengendalian Banjir Dan penanggulangan Kekeringan

#### **II.1.3.7. MISI 7 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman**

Strategi 1 : Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh

Kebijakan : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

Program : Program Pengurangan Kawasan Kumuh

Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh

- Strategi 2 : Pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman
- Kebijakan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat
- Program : Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan perumahan
- Kegiatan
1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
  2. Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
  3. Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan

#### **II.1.3.8. MISI 8: Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan**

- Strategi : Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman
- Kebijakan : Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat
- Program : Program Pengembangan Perumahan
- Kegiatan
1. Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan
  2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual (NSPM)
  3. Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
  4. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

#### **II.1.3.9. Misi 9 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan**

- Strategi 1 : Perlindungan, pelestarian dan pengawetan air tanah
- Kebijakan : Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pengawetan air pada cekungan air tanah
- Program : Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengelolaan Air Tanah
- Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana Prasarana Pemantauan Air Tanah  
2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah  
3. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah  
4. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Air Tanah  
5. Monitoring Dan Evaluasi Pengambilan Air Tanah  
6. Perencanaan Pengelolaan Air Tanah
- 
- Strategi 2 : Pengelolaan usaha pertambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian
- Kebijakan : Meningkatkan nilai tambah pertambangan
- Program : Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan
- Kegiatan : 1. Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Lintas Propinsi  
2. Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian  
3. Pemetaan Geologi Teknik Dan Wilayah Pertambangan
- 
- Strategi 3 : Penyediaan Energi Daerah
- Kebijakan : Meningkatkan upaya penyediaan energi daerah
- Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi
- Kegiatan : 1. Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi  
2. Pelaksanaan Audit Energi

**II.1.3.10. Misi 10 :Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral**

- Strategi 1 : Peningkatan akses rumah tangga DIY berlistrik
- Kebijakan : Meningkatkan rumah tangga di DIY yang ber listrik
- Program : Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan ketenagalistrikan
- Kegiatan
1. Perencanaan Ketenagalistrikan
  2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Ketenagalistrikan
  3. Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan
  4. Monitoring Dan Evaluasi Penyediaan Dan Pemenuhan Ketenagalistrikan
- 
- Strategi 2 : Pemanfaatan energi baru terbarukan
- Kebijakan : Meningkatkan upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan
- Program : Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
- Kegiatan
1. Perencanaan Energi Baru Terbarukan
  2. Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
  3. Pengembangan Biogas Berbasis Listrik
  4. Pengembangan Biogas Berbasis Bahan Bakar
  5. Pengembangan Biogas Berbasis Bahan Bioenergi
  6. Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Terbarukan
  7. Pembinaan Dan Pendawasan Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
- 
- Strategi 3 : Pengelolaan bahan bakar dan gas
- Kebijakan : Meningkatkan kinerja pengelolaan bahan bakar dan gas

- Program : Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar
- Kegiatan : 1. Pembinaan Dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi  
 2. Pembinaan Dan Pengawasan K2LL Usaha Migas  
 3. Peningkatan Fasilitasi Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi  
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Minyak Dan Gas

**II.1.3.11. Misi 11 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah**

- Strategi : Peningkatan pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.
- Kebijakan : Meningkatkan pengaturan , pembinaan dan pengawasan usaha konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional
- Program : Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- Kegiatan : 1. Sosialisasi Dan Diseminasi PeraturanPerundang-Undangan  
 2. Pengelolaan Database Jasa Konstruksi  
 3. Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi  
 4. Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi  
 5. Peningkatan Kualitas Pengguna Jasa Konstruksi  
 6. Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi  
 7. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
 8. Pengawasan Pemanfaatan Jasa Konstruksi  
 9. Pengawasan Perijinan Jasa Konstruksi  
 10. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi  
 11. Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi

## 12. Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan

### **II.1.3.12. Misi 12 : . Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan**

Strategi 1 : Pemberian pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM yang berkualitas.

Kebijakan : Meningkatkan cakupan pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM

Program : Program Pengkaji Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan : 1. Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam  
2. Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum  
3. Survey Bahan Bangunan Keciptakarya  
4. Informasi Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

Strategi 2 : Pemberian pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi yang memenuhi standar.

Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi yang memenuhi standar.

Program : Program Pelayanan Jasa Pengujian

Kegiatan : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
2. Pelayanan Jasa Laboratorium pengujian  
3. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian

### **II.1.3.13. MISI 13 Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.**

Strategi 1 : Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik

Kebijakan : Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran

- Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  10. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
  11. Penyediaan Makanan Dan Minuman
  12. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Strategi 2 : Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- Kebijakan : Meningkatkan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- Program : Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  3. Pengadaan Mebeleur
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman
- Strategi 3 : Pelaporan hasil capaian kinerja dan keuangan yang lebih baik.

- Kebijakan : Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- Kegiatan
1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
  2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data Dan Informasi
  4. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

#### II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas PUP-ESDM Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan	14
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTR kab/kota dan RTRW Provinsi	%	60
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneanaan sanksi	Persentase pengendalian tata ruang pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawah	%	40
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	Persentase penduduk berakses air minum	%	77,36
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai	Layanan jaringan air limbah terpusat di APY	SR	15.800
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	%	55
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Persentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	%	61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin	%	47
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	%	40
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	Persentase titik genangan yang tertangani	%	39,90
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	82
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase prnyediaan aksesibilitas dengan kondisi mantap	%	72,64
		Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	%	100
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan startegis dan kawasan startegis baru	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan startegis dan kawasan startegis baru	%	29,91
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa	Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi	%	78
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	Penambahan Penyediaan air baku	lt/det	900
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	60
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin	%	34
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	Persentase komunitas perumahan yang telah diberdayakan	%	49
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani	%	7,5
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	Rerata penurunan muka air tanah	%	< 20
21	Terwujudnya pengembangan kegiatan pengelolaan dan pemurnian pertambangan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	%	10
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan konservasi Energi	%	6
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	112.000
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	Persentase kinerja pengelolaan bahan bakar	%	50
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas	Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi	%	80
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Prosentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	%	75,5
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	Persentase jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	%	81,25

## II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014 Dinas PUP-ESDM disajikan pada tabel II.2

Tabel II.2 . Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 Dinas PUP-ESDM DIY

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis	14 Kawasan	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.450.000.000
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	1.200.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	dasar & implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	provinsi		Kawasan	
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR	250.000.000
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang terhadap RTR kab/kota dan RTRW Provinsi	60%	<b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>1.419.282.000</b>
				Penyusunan Norma,Standar,Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	700.000.000
				Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang	219.282.000
				Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Dan Rancangan Peraturan Gubernur	500.000.000
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneanaan sanksi	Persentase pengendalian tata ruang pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawah	40%	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>1.829.309.500</b>
				Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	700.000.000
				Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	600.000.000
				Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	62.636.000
				Pengawasan	249.161.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Pemanfaatan Ruang	
				Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	153.225.000
				Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	64.287.500
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	Persentase penduduk berakses air minum	77,36%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM</b>	<b>11.800.000.000</b>
				Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	11.800.000.000
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	Layanan jaringan air limbah terpusat di APY	15.800 SR	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>	<b>6.001.395.000</b>
				Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	2.784.580.600
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	961.721.050
				Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	1.208.723.750
				Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	896.369.600
				Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah	150.000.000
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase penerapan sistem	55%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>1.710.000.000</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	persampahan yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	pengelolaan sampah ramah lingkungan		Pembangunan Prasarana Dan sarana Persampahan	1.710.000.000
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Persentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	61%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN</b>	<b>19.497.240.000</b>
				Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	397.240.000
				Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	19.100.000.000
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin	47%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN</b>	<b>15.700.000.000</b>
				Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	15.700.000.000
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Persentase Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	40%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA POTENSI</b>	<b>4.300.000.000</b>
				Pengembangan desa pusat pertumbuhan	4.300.000.000
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah	Persentase titik genangan yang tertangani	39,90%	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG</b>	<b>4.705.552.000</b>
				Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	255.552.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	perkotaan Yogyakarta			Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4.350.000.000
				Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	100.000.000
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	82%	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN</b>	<b>501.062.500</b>
				Penataan Bangunan Dan Lingkungan	100.000.000
				Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara	201.062.500
				Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah	200.000.000
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase penyediaan aksesibilitas dengan kondisi mantap	72,64%	<b>PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>56.890.946.429</b>
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	25.388.769.500
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	3.899.197.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (D A K)	13.929.229.929
				Pemeliharaan Rutin Jalan	11.075.991.000
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.597.759.000
				<b>PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>95.198.524.000</b>
				Peningkatan Jalan	62.367.384.000
				Perencanaan Peningkatan Jembatan	300.000.000
				Peningkatan Jembatan	32.531.140.000
		Cakupan jalan dan jembatan	100%	<b>PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN</b>	<b>486.854.000</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
		yang diinspeksi		<b>JEMBATAN</b>	
				Inspeksi Kondisi Jalan	242.590.500
				Inspeksi Kondisi Jembatan	244.263.500
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	29,91%	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR</b>	<b>27.646.308.595</b>
				Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	27.646.308.595
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa	Persentase Luasan DI yang terlayani air irigasi	78%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b>	<b>30.475.105.697</b>
				Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	1.600.000.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	5.249.151.170
				Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4.500.000.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	14.081.204.527
				Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.500.000.000
				Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	2.209.750.000
				Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	335.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				(WISMP) - APBD	
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	Penambahan Penyediaan air baku	900 lt/det	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU</b>	1.800.000.000
				Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa	1.500.000.000
				Perencanaan Penyediaan Pengelolaan Air Baku	300.000.000
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA</b>	20.717.335.000
				Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya	15.813.130.000
				Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.500.000.000
				Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi	499.945.000
				Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya	1.250.000.000
				Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	900.000.000
				Koordinasi Kelembagaan S D A	754.260.000
16	Meningkatnya kualitas	Jumlah titik rawan banjir	60 Titik	<b>PROGRAM PENGENDALIAN</b>	2.600.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	pengendalian banjir	yang ditangani		<b>BANJIR</b>	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai				2.000.000.000	
Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan				600.000.000	
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin	34%	<b>PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH</b>	<b>3.600.000.000</b>
Penataan kawasan kumuh				3.600.000.000	
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	Persentase Pemberdayaan berbasis masyarakat	49%	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN</b>	<b>11.706.500.000</b>
				Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	7.656.500.000
				Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	150.000.000
				Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan	3.900.000.000
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Prosentase berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni	7,5%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>10.326.000.000</b>
				Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan	350.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	dan produktif			Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual (NSPM)	100.00.000
				Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	9.826.000.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	Rerata penurunan muka air tanah	<20%	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN AIR TANAH</b>	<b>3.700.000.000</b>
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Air Tanah	400.000.000
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah	2.385.000.000
				Pengendalian Daya Rusak Air Tanah	500.000.000
				Pembinaan Dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah	250.000.000
				Monitoring Dan Evaluasi Pengambilan Air Tanah	65.000.000
				Perencanaan Pengelolaan Air Tanah	100.000.000
21	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian pertambangan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	10%	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN</b>	<b>1.039.600.000</b>
				Perencanaan Pengelolaan Usaha Pertambangan	604.600.000
				Peningkatan Nilai	345.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Tambah Sumber Daya Mineral	
				Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Pertambangan	90.000.000
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan konservasi Energi	6%	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI</b>	<b>600.000.000</b>
				Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi	200.000.000
				Pelaksanaan Audit Energi	400.000.000
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	Rasio Elektrifikasi	78%	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>4.178.100.000</b>
				Perencanaan Ketenagalistrikan	360.000.000
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Ketenagalistrikan	3.468.100.000
				Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan	250.000.000
				Monitoring Dan Evaluasi Penyediaan Dan Pemenuhan Ketenagalistrikan	100.000.000
24	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	112.000 SBM	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	<b>2.982.000.000</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	listrik dan bahan bakar			Perencanaan Energi Baru Terbarukan	100.000.000
				Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	1.200.000.000
				Pengembangan Biogas Berbasis Listrik	340.000.000
				Pengembangan Biogas Berbasis Bahan Bakar	627.000.000
				Pengembangan Biogas Berbasis Bahan Bioenergi	165.000.000
				Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Baru Terbarukan	150.000.000
				Pembinaan Dan Pendawasan Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	400.000.000
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	40%	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR</b>	<b>607.500.000</b>
				Pembinaan Dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	157.500.000
				Pembinaan Dan Pengawasan K2LL Usaha Migas	50.000.000
				Peningkatan Fasilitas Distribusi Bahan Bakar	300.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Bersubsidi	
				Pengelolaan Sistem Informasi Minyak Dan Gas	100.000.000
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas	Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi	80%	<b>PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>1.037.707.000</b>
				Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-Undangan	60.000.000
				Pengelolaan Database Jasa Konstruksi	130.000.000
				Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	76.200.000
				Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	91.999.000
				Peningkatan Kualitas Pengguna Jasa Konstruksi	59.400.000
				Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi	64.872.000
				Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	70.000.000
				Pengawasan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	65.000.000
				Pengawasan Perijinan Jasa Konstruksi	70.000.000
				Pengawasan Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi	70.000.000
				Pengawasan Keselamatan Dan	68.276.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
				Kesehatan Kerja Konstruksi	
				Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan	211.960.000
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Persentase penguasaan teknologi dan penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum	77,5%	<b>PROGRAM PENGKAJI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>	<b>879.994.925</b>
				Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam	100.000.000
				Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	399.999.975
				Survey Bahan Bangunan Keciptakarya	49.995.000
				Informasi Teknologi Bidang PU	329.999.950
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	Persentase jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	81,25%	<b>PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN</b>	<b>3.146.249.850</b>
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	66.000.000
				Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	2.972.710.000
				Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian	107.539.850

### II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas PUP-ESDM DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 497.357.898.438,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2014 menjadi Rp. 503.657.700.808,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 21.011.591.187,- dan Belanja

Langsung Rp 482.646.109.621,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 410.290.164.488,- (81,46%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 20.594.457.391,- (98,01%) belanja langsung sebesar Rp 389.695.707.097,- (80,74%).

### II.3.1 Target Belanja Dinas PUP-ESDM DIY

Tabel II.3. Target Belanja Dinas PUP-ESDM DIY

Uraian	Target	Prosentase
BelanjaTidakLangsung	Rp. 21.011.591.187,-	100 %
BelanjaLangsung	Rp. 482.646.109.621,-	100 %
Jumlah	Rp. 503.657.700.808,-	100%

### II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2014 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas PUP-ESDM DIY adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	1.286.852.000	88,75	-
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1.138.776.000	80,24	Efisiensi
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneanaan sanksi	1.635.254.500	89,39	-
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	11.360.678.780	96,28	
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai	4.652.179.450	92,31	-

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai	1.462.512.000	85,53	
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	18.420.357.990	94,48	-
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	14.220.722.850	90,58	-
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	3.343.280.700	77,75	-
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan	4.360.821.500	92,67	Sisa pengadaan barang/jasa
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	485.876.100	96,97	Sisa pengadaan barang/jasa
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	148.793.630.991	97,52	-
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	23.087.156.828	83,51	-
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa	23.760.082.075	91,47	Sisa pengadaan barang/jasa
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	20.180.584.382	89,62	Sisa pengadaan barang/jasa
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	1.518.497.075	93,22	-
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	3.225.775.700	89,60	Sisa pengadaan barang/jasa
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	11.278.145.500	96,34	-
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	10.018.343.031	97,02	-
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air	3.587.710.550	96,97	-

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
	tanah			
21	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengelolaan dan pemurnian pertambangan	1.017.377.500	97,86	-
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	595.153.930	99,19	-
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	3.861.032.000	92,41	Sisa pengadaan barang/jasa
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar <i>(review PK: Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar)</i>	2.749.063.150	92,19	-
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	563.546.200	92,76	-
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas	1.017.394.475	98,04	-
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	874.696.950	99,40	-
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	2.610.265.375	82,96	-

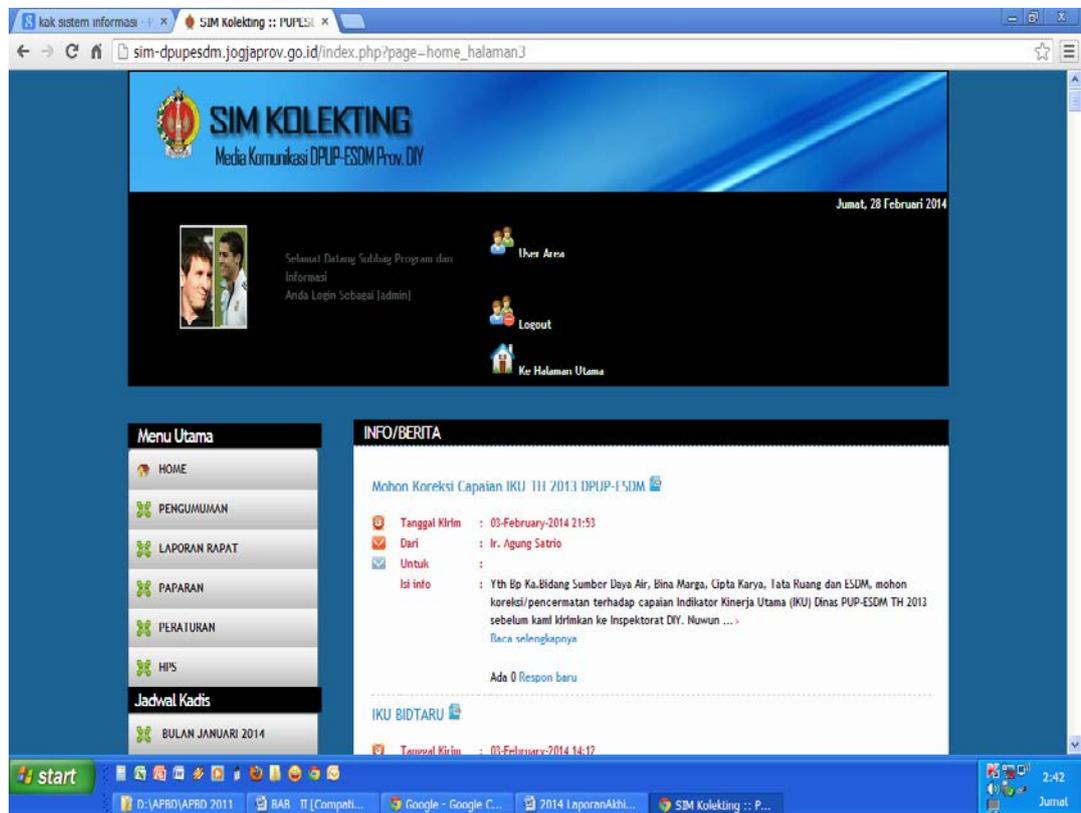
#### II.4 Instrumen Pendukung

Kebutuhan Teknologi Informasi (TI) di masa sekarang ini merupakan sebuah keniscayaan untuk memperoleh kinerja yang lebih optimal. Semua proses pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD harus dapat berjalan dengan baik tanpa saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Salah satu peran TI adalah membantu meringankan beban pekerjaan dengan melakukan proses otomasi, sehingga kesalahan yang muncul dari sisi *human error* dapat diminimalkan.

Untuk mendukung komunikasi dalam penyampaian data dan informasi, Dinas PUP-ESDM DIY telah menyusun sistem informasi manajemen berbasis WEB yang dikenal dengan SIM Kolekting . Melalui SIM Kolekting tersebut penyampaian data dan informasi dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif.

Tampilan SIM Kolekting Dinas PUP-ESDM dapat dilihat pada Gambar I.3

Gambar I.3. Tampilan Halaman Depan SIM Kolekting Dinas PUP-ESDM DIY



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. Capaian Kinerja Tahun 2014

Dinas PUP-ESDM DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel III.1.

Tabel III.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Keterangan : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas PUP-ESDM DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti pada tabel III.2 di bawah ini:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan strategis provinsi	1	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan strategis	14	14	100,00%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR Kab/kota dan RTR Provinsi	%	60	64,21	107,02%	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	3	Persentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan Kawasan lindung bawahan	%	40	47,88 %	119,70%	Sangat Baik
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	4	Persentase penduduk berakses air minum	%	77,36	77,65	100,37%	Sangat Baik
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai	5	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	15.800	18.701	118,36%	Sangat Baik
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai	6	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	%	55	57,26	104,11%	Sangat Baik
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	7	Persentase aksesibilitas kawasan perkotaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	%	61	76	124,59%	Sangat Baik
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan	8	Persentase aksesibilitas kawasan perdesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan	%	47	52,8	112,34%	Sangat Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
	perdesaan		miskin					
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa potensi	9	Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa potensi	%	40	56	140%	Sangat Baik
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	10	Pengurangan jumlah titik genangan	%	39,90	49,2	123,31%	Sangat Baik
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	11	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	82	84	102,44%	Sangat Baik
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	12	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	72,64	73,70	101,46%	Sangat Baik
		13	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	%	100	100	100%	Sangat Baik
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	14	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	%	29,91	32,35	108,15%	Sangat Baik
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	15	Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	%	78	79,74	101,91%	Sangat Baik
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	16	Penambahan ketersediaan air baku	Lt/det	900	1.018,53	113,17%	Sangat Baik
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	17	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	60	72	120,00%	Sangat Baik
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	18	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada	%	34	39,25%	115,44%	Sangat Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
			kecamatan miskin					
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	19	Persentase program Pemberdayaan Berbasis Komunitas	%	49	64,61	131,86%	Sangat Baik
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	20	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	%	7,5	7,49	100,15%	Sangat Baik
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	21	Rerata penurunan muka air tanah	%	< 20	< 20	100,00%	Sangat Baik
21	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengelolaan dan pemurnian pertambangan	22	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	%	10	11	110,00%	Sangat Baik
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	23	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	%	6	10	166,67%	Sangat Baik
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	24	Rasio elektrifikasi	%	78	82,7	106,03%	Sangat Baik
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	25	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	112.000	116.543,20	104,06%	Sangat Baik
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	26	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	%	50	60	120,00	Sangat Baik
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses dan produk konstruksi yang berkualitas	27	Persentase peningkatan performance/ kinerja jasa konstruksi	%	80	80,06	100,08%	Sangat Baik
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi	28	Persentase peningkatan penguasaan teknologi	%	77,5	77,74	100,3%	Sangat Baik



Menindaklanjuti penetapan sasaran strategis tahun 2014, telah disusun dan ditetapkan 2 kawasan strategis propinsi, yaitu:

1. Kawasan Koridor Tempel – Parangtritis,
2. Kawasan Ekogeowisata Karst

Berdasarkan hal di atas, sampai dengan tahun 2014 telah tercapai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi sejumlah 14 Kawasan dari target 14 kawasan strategis yang ditargetkan dalam RPJMD 2014 dengan presentase pencapaian sasaran sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian sasaran pada tahun 2013 sebesar 12 kawasan strategis maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan yaitu 2 kawasan strategis, sedangkan bila dibandingkan dengan 19% Target akhir RPJMD 2017 maka pencapaiannya sebesar 73,68% dengan realisasi anggaran sebesar 88,75% dari pagu anggaran yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUP-ESDM DIY.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	<b>Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kws strategis provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar &amp; implementasi program pembangunan daerah</b>						
1.1	<i>Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar &amp; implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi</i>						
1.1.1	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	12	14	14	100	19	73.68
	Faktor Penghambat : keterbatasan SDM						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, sarpras dan SDM						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Pada tahun 2014 Sasaran meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan strategis provinsi, pada tahun 2014 dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : program perencanaan tata ruang dan 2 (dua) kegiatan, yaitu : 1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan; 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR. Total alokasi anggaran program perencanaan tata ruang sebesar Rp. 1.450.000.000,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.4 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program perencanaan tata ruang	1.450.000.000	1.286.852.000	88,75	100
I.1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1.200.000.000	1.078.492.000	89,87	100
I.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR	250.000.000	208.360.000	83,34	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 88,75% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program dapat dirasakan oleh masyarakat, utamanya dalam pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan strategis provinsi.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai. Keberhasilan kinerja tersebut diatas dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja SATRIYA sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor

penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi.

### **III.2.2. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR Kab/Kota dan RTR provinsi.

Luas Total wilayah pemanfaatan ruang DIY sebesar : 318.580 Ha. Berdasarkan audit pemanfaatan ruang menggunakan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang diperoleh hasil kesesuaian pemanfaatan ruang DIY Tahun 2014 dengan pola ruang RTRW DIY seluas 204.572,30 Ha, atau sebesar 64,21% dari target 60% pada RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan sebesar 4,21% atau dengan presentase pencapaian sebesar 107,02%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 presentase kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai sebesar 63,93% maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 diatas mmenunjukkan adanya peningkatan 0,28%, sedangkan bila dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD 2017 sebesar 90% maka presentase kesesuaian pemanfaatan ruang DIY pencapaiannya sebesar 71,34% dengan realisasi anggaran sebesar 80,24% dari pagu anggaran yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.5 Capaian kinerja sasaran

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang						
2.1	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang provinsi						
2.1.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTR kab/kota dan RTRW Provinsi	63,93	60	64,21	107.02	90	71.34
	Faktor Penghambat : data perubahan pemanfaatan ruang sulit didapatkan, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan Tata Ruang belum dapat dilaksanakan						
	Faktor Pendorong : tersedianya regulasi, dana, sarpras, SDM, Penyedia Jasa Konsultansi						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Pada tahun 2014 sasaran meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : program pemanfaatan ruang dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1)Penyusunan Norma, Standar, Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang; 2)Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang dan 3)Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Dan Rancangan Peraturan Gubernur. Total alokasi anggaran program pemanfaatan ruang sebesar Rp. 1.419.282.000,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.6 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
II	Program pemanfaatan ruang	1.419.282.000	1.138.776.000	80,24	100
II.1	Penyusunan Norma, Standar, Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	700.000.000	477.680.000	68,24	100

II.2	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang	219.282.000	211.320.000	96,37	100
II.3	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Dan Rancangan Peraturan Gubernur	500.000.000	449.776.000	89,96	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 80,24% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai. Keberhasilan kinerja tersebut diatas dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara faktor penghambat berupa data perubahan pemanfaatan ruang sulit didapatkan, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan Tata Ruang belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya sumber daya manusia / PPNS bidang tata ruang.

### **III.2.3. SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PENETAPAN PERATURAN ZONASI, PERIJINAN, PEMBERIAN INSENTIF SERTA PENGENAAN SANKSI.**

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Peresentase

pengaturan zonasi pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan kawasan lindung bawahan.

Kinerja pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada 2 bagian besar target kinerja, yaitu :

- a. Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang terdiri dari 66 Blok dengan total bobot 50%.
- b. Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Bawahan (KLB) terdiri dari 5 Kawasan yang tersebar di Kabupaten Sleman 2 Kawasan, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo, masing-masing 1 Kawasan, dengan total bobot 50%.

Jumlah Blok Pengaturan zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang sudah dikerjakan pada tahun 2014 sebanyak 50 blok sedangkan pada Kawasan Lindung Bawahan yang sudah dikerjakan sebanyak 1 blok Kawasan Lindung Bawahan, sehingga capaian presentase Pengaturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebesar 47,88% dari target 40% pada RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan sebesar 7,88% dalam setahun dengan presentase pencapaian sebesar 119,70%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 20% maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan signifikan sebesar 27,88%, sedangkan bila dibandingkan dengan 100% Target Akhir dalam RPJMD 2017 maka presentase pengaturan zonasi kawasan perkotaan Yogyakarta pencapaiannya sebesar 47,88% dengan realisasi anggaran sebesar 89,39% dari pagu anggaran yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang						
3.1	<i>Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta peneraan sanksi</i>						
3.1.1	Peresentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan Kawasan lindung bawahan	44,85	40	47,88	119,70	100	47,88
	Faktor Penghambat : Upaya penegakan hukum terhadap pengendalian tata ruang belum dapat dilaksanakan karena belum adanya PPNS tata ruang						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, sarpras, SDM, Penyedia Jasa Konsultansi						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Pada tahun 2014 sasaran Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui 1 (satu) program yaitu : program pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu: 1) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 2) Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 3) Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 4) Pengawasan Pemanfaatan Ruang; 5) Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota; 6) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Total alokasi anggaran program pengendalian pemanfaatan ruang sebesar Rp. 1.829.309.500,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.8 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
III	<b>Program pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>1.829.309.500</b>	<b>1.635.254.500</b>	<b>89,39</b>	<b>100</b>
III.1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	700.000.000	623.591.000	89,08	100
III.2	Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	600.000.000	542.981.000	90,50	100
III.3	Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	62.636.000	52.256.000	83,43	100
III.4	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	249.161.000	220.974.000	88,69	100
III.5	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	153.225.000	133.630.000	87,21	100
III.6	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	64.287.500	61.822.500	96,17	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 89,39% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja Urusan Tata Ruang tahun 2014 seluruh indikator telah melampaui target. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai, Tersedianya regulasi, Penyedia Jasa Konsultansi serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja SATRIYA sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### III.2.4. SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM YANG MEMADAI BAIK ASPEK KUANTITAS DAN KUALITAS.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase penduduk berakses air minum .

Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perkotaan dan juga perdesaan.

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum yang didukung oleh APBD dan APBN pada tahun 2014 telah memfasilitasi jumlah penduduk berakses air minum layak mencapai 2.774.014 jiwa atau sebesar 77,65% dari target 77,36% pada RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan capaian dalam setahun sebesar 0,29% atau dengan presentase pencapaian sebesar 100,37%.

Jika pada tahun 2013 dapat memfasilitasi penduduk berakses air minum layak sebanyak 2.631.014 jiwa atau sebesar 74,25%. maka capaian jumlah penduduk berakses air minum layak pada tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,40%, sedangkan bila dibandingkan dengan 87,85% Target Akhir dalam RPJMD 2017 maka presentase penduduk berakses air minum layak pencapaiannya sebesar 88,39% dengan realisasi anggaran sebesar 96,28% dari pagu anggaran yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		

4	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase dan persampahan, jalan lingkungan)					
4.1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas					
4.1.1	Persentase penduduk berakses air minum	74,25	77,36	77,65	100,37	87,85 88,39
Faktor Penghambat :						
Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras dan penyedia barang						
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Pada tahun 2014 sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : program yaitu Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum; terdiri atas 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan : 1) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum. Total alokasi anggaran program Pengembangan Pengelolaan Air Minum sebesar Rp. 11.800.000.000,-.

Sebagai wujud nyata pencapaian sasaran dan indikator kinerja di atas, telah dijabarkan dalam program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.10 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengembangan pengelolaan air minum	11.800.000.000	11.360.678.780	96,28	100
I.1	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	11.800.000.000	11.360.678.780	96,28	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 96,28% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam

melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja SATRIYA sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai..

### **III.2.5. SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR LIMBAH YANG MEMADAI BAIK KUANTITAS DAN KUALITAS.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu layanan jaringan air limbah terpusat di KPY.

Untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga, melalui program *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) sejak tahun 2009 telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta pipa jaringannya di wilayah KPY. Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY dicapai melalui pelaksanaan program-program pendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.

Pada tahun 2014 cakupan pelayanan instalasi pengelolaan air limbah Sewon telah mencapai 18.701 SR dari target 15.800 SR dalam RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 2.901 SR atau dengan presentase pencapaian sebesar 118,36%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 16.191 SR maka cakupan pelayanan instalasi pengelolaan air limbah Sewon pada tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan kinerja capaian sebesar 2.510 SR, sedangkan bila dibandingkan dengan Target Akhir dalam RPJMD 2017 20.000 SR maka cakupan pelayanan IPAL Sewon pencapaiannya sebesar 93,51% dengan realisasi anggaran sebesar 93,38% dari pagu anggaran yang tersedia.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase dan persampahan, jalan lingkungan)						
4.2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai						
4.2.1	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	16.191	15.800	18.701	118.36	20.000	93,51
	Faktor Penghambat : masih kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyambungan saluran limbah rumah tangga						
	Faktor Pendorong : Tersedianya dan, personila dan penyedia jasa/pemborong						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Tabel III.12. Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem Ipal Terpusat Sewon Tahun 2014

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah
1	Kabupaten Bantul	1.465
2	Kota Yogyakarta	15.270
3	Kabupaten Sleman	1.966
Jumlah Total		18.701

Sumber Data: Pemerintah Kabupaten/Kota

Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : program yaitu Program Pengembangan Air Limbah; terdiri atas 5 (lima) kegiatan, yaitu: 1)Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah; 2)Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah; 3)Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah; 4)Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah; 5)Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah. Total alokasi anggaran Program Pengembangan Air Limbah sebesar Rp. 6.001.395.000,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.13. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	<b>Program pengembangan pengelolaan air limbah</b>	6.001.395.000	5.604.215.050	93,38	100
I.1	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	2.784.580.600	2.409.958.000	86,55	100
I.2	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	961.721.050	952.035.600	98,99	100
I.3	Pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah	1.208.723.750	1.197.723.300	99,09	100
I.4	Pemantauan kualitas air dan lingkungan sistem jaringan limbah	896.369.600	894.789.150	99,82	100
I.5	Penguatan kelembagaan pengelolaan limbah	150.000.000	149.709.000	99,81	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 93,38% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.6. SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN YANG MEMADAI.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian indikator persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Pengelolaan persampahan menjadi kunci utama bagi kesehatan lingkungan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Hingga saat ini di DIY telah terbangun dua TPA Sanitary Landfill yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Capaian target kinerja sasaran di atas pada tahun 2014 melalui program Pengelolaan Persampahan telah dibangun Prasarana Dan Sarana Persampahan sejumlah 2 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R. Sedangkan melalui dukungan APBN dilakukan pembangunan TPST 3R sejumlah 3 unit, optimalisasi TPST 3R sejumlah 3 Unit dan optimalisasi TPA sanitary landfill di 2 lokasi. Hal ini menunjukkan target kinerja sasaran telah tercapai sebesar 57,26% dari target 55% pada RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan sebesar 2,26% atau dengan presentase pencapaian sebesar 104,11%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 pencapaian target pengelolaan sampah ramah lingkungan DIY secara kumulatif sebesar 53% maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,26%, sedangkan bila dibandingkan dengan 70% Target Akhir RPJMD 2017 maka pencapaiannya sebesar 81.80% dengan realisasi anggaran sebesar 85,53% dari pagu anggaran yang tersedia sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.14. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase dan persampahan, jalan lingkungan)						
4.3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai						
4.3.1	Persentase penerapan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan	47	55	57,26	104,11	70	81,80
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : tersedianya regulasi, dana, SDM ,Sarpras anggaran dan penyedia barang/jasa						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angka - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : program pengelolaan persampahan; 1 (satu) kegiatan, yaitu: 1) Pembangunan prasarana dan sarana persampahan. Total alokasi anggaran Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 1.710.000.000,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.15. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengelolaan persampahan	1.710.000.000	1.462.512.000	85,53	100
I.1	Pembangunan Prasarana Dan sarana Persampahan	1.710.000.000	1.462.512.000	85,53	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 85,53% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien

dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.7. SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PENDUKUNG AKSESIBILITAS KAWASAN PERKOTAAN.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin.

Pengembangan kawasan perkotaan difokuskan pada kegiatan penyediaan aksesibilitas kawasan pada wilayah kecamatan-kecamatan miskin di DIY yakni Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Gedongtengen. Pada kawasan perkotaan terdapat sebanyak 125 lokasi yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Pada tahun 2013 telah dilakukan upaya peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan di 80 lokasi atau telah tercapai 64 %.

Pada tahun 2014 melalui program Program Pengembangan Kawasan Perkotaan telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan sejumlah 15 lokasi di Kota Yogyakarta serta kegiatan Penataan Kawasan Tegalpanggung, Gemawang dan N gabean, sehingga persentase peningkatan aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perkotaan telah meningkat menjadi 95 lokasi atau 76% dari target 61% pada RPJMD 2014 sehingga terjadi

peningkatan sebesar 15% atau dengan presentase pencapaian sebesar 124,59%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 telah dilakukan upaya peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan di 80 lokasi atau telah tercapai 64% maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan yaitu 12%, sedangkan bila dibandingkan dengan 73% Target akhir RPJMD 2017 maka pencapaiannya sebesar 104,11% dengan realisasi anggaran sebesar 94,48% dari pagu anggaran yang tersedia sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.16. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase dan persampahan, jalan lingkungan)						
4.5	<i>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan</i>						
4.5.1	Persentase aksesibilitas kawasan perkotaan pada wilayah kecamatan miskin	64	61	76	124.59	73	104.11
	Faktor Penghambat : -						
	Faktor Pendorong : tersedianya regulasi, dana, SDM ,Sarpras anggaran dan penyedia barang/jasa						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 201

Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan perkotaan dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : program

pengembangan kawasan perkotaan; 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1) Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan; 2) Pembangunan Infrastruktur Perkotaan. Total alokasi anggaran program pengembangan kawasan perkotaan sebesar Rp. 19.497.240.000,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.17. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengembangan kawasan perkotaan	19.497.240.000	18.420.127.990	94,48	100
I.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	397.240.000	2.409.958.000	96,79	100
I.2	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	19.100.000.000	18.035.645.990	94,43	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 94,48% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai hal ini dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja SATRIYA sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi.

### **III.2.8. SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PENDUKUNG AKSESIBILITAS KAWASAN PERDESAAN.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan perdesaan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin.

Pada kawasan perdesaan terdapat 16 kecamatan miskin yaitu :1) Kecamatan Gamping, 2)Kecamatan Seyegan, 3)Kecamatan Prambanan, 4)Kecamatan Kasihan, 5)Kecamatan Sewon, 6)Kecamatan Banguntapan , 7)Kecamatan Imogiri; 8)Kecamatan Kokap, 9)Kecamatan Kalibawang, 10)Kecamatan Samigaluh, 11)Kecamatan Playen, 12)Kecamatan Karangmojo, 13) Kecamatan Semanu, 14)Kecamatan Semin, 15)Kecamatan Ponjong dan 16)Kecamatan Gedangsari. Secara keseluruhan diwilayah 16 kecamatan miskin tersebut terdapat 2.375 lokasi yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya.

Pada tahun 2014 melalui program pengembangan infrastruktur pedesaan telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan melalui pembangunan jalan lingkungan di 47 lokasi di Kabupaten Bantul, 35 lokasi di Kabupaten Gunungkidul, 15 lokasi di Kabupaten Kulon Progo, dan 33 lokasi di Kabupaten Sleman serta pembangunan jembatan di Moyudan, Kabupaten Sleman dan Argorejo, Sedayu Kabupaten Bantul . Secara total pada tahun 2014 tertangani 130 lokasi sehingga persentase peningkatan aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perdesaan secara kumulatif meningkat menjadi 1.252 lokasi atau sebesar 52,80% melampaui target 47% pada RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan sebesar 5,80% atau dengan presentase pencapaian sebesar 112,34%.

Jika dibandingkan dengan capaian peningkatan aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perdesaan pada tahun 2013 sebanyak 1.122 lokasi atau 47% maka capaian kinerja sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perdesaan yaitu sebesar 5,80%, sedangkan bila dibandingkan dengan 59% Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 maka pencapaiannya sebesar 89,49% dengan realisasi anggaran sebesar 90,58% dari pagu anggaran yang tersedia sehingga dapat disimpulkan capaian

sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian RPJMD 2014 dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.18. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase dan persampahan, jalan lingkungan)						
4.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan						
4.6.1	Persentase aksesibilitas kawasan perdesaan pada wilayah kecamatan miskin	47	47	52,8	112.34	59	89.49
Faktor Penghambat : -							
Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras dan, penyedia jasa/pemborong							
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angka - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan							

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan perdesaan dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : Program Pengembangan kawasan Perdesaan; 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan : 1) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Total alokasi anggaran Program Pengembangan kawasan Perdesaan sebesar Rp. 15.700.000.000,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.19. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program Pengembangan kawasan Perdesaan	15.700.000.000	14.220.722.850	90,58	100
I.1	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	15.700.000.000	14.220.722.850	90,58	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 90,58% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.9. SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PENDUKUNG AKSESIBILITAS KAWASAN AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA POTENSI.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi terdiri dari 1 ( satu) indikator yaitu persentase dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi.

Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung

kawasan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian kawasan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Di wilayah DIY telah teridentifikasi 30 Kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial yang tersebar di Kabupaten Sleman (8 kawasan), Kabupaten Bantul (7 kawasan), Kabupaten Kulon Progo (7 kawasan) dan Kabupaten Gunungkidul (8 kawasan).

Pada tahun 2013 telah terfasilitasi infrastruktur di 10 kawasan atau 34%. Tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Infrastruktur di 1) Kawasan Minapolitan Temon Kabupaten Kulonprogo, 2) Kawasan Minapolitan Sanden Kabupaten Bantul dan 3) Kawasan Agropolitan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan melalui fasilitasi APBN telah dilaksanakan fasilitasi penyediaan infrastruktur dasar di 1) Kawasan Agropolitan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, 2) Kawasan Minapolitan Ngemplak Kabupaten Sleman, 3) Kawasan Minapolitan Playen Kabupaten Gunungkidul dan 4) Kawasan Minapolitan Pasir Mendit Temon Kabupaten Kulon progo sehingga selama tahun 2014 telah terfasilitasi sejumlah 7 Kawasan Agropolitan/Minapolitan, sehingga pada tahun 2014 secara kumulatif telah terfasilitasi infrastruktur sebanyak 17 kawasan dari 30 kawasan agropolitan/minapolitan atau sebesar 56% dari target 40% pada RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan secara signifikan sebesar 16% atau dengan presentase pencapaian sebesar 140%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 34% maka capaian kinerja sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 22%, sedangkan bila dibandingkan dengan target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 58% maka telah terfasilitasi infrastruktur di beberapa kawasan dengan presentase capaian sebesar 96,55% dengan realisasi anggaran sebesar 77,75% dari pagu anggaran yang tersedia sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian RPJMD 2014 dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.20 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase dan persampahan, jalan lingkungan)						
4.7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi						
4.7.1	Dukungan infrastruktur kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	34	40	56	140	58	96,55
	Faktor Penghambat : -						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarpras dan penyedia jasa/pemborong						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : Program pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi; 1 (satu) kegiatan, yaitu: 1) Pengembangan desa pusat pertumbuhan. Total alokasi anggaran Program Pengembangan kawasan Perdesaan sebesar Rp. 4.300.000.000,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan seperti dalam capaian program/kegiatan dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.21 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	4.300.000.000	3.343.280.700	77,75	100
I.1	Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan	4.300.000.000	3.343.280.700	77,75	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 77,75% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.10. SASARAN BERKURANGNYA JUMLAH TITIK GENANGAN AIR AKIBAT KURANG OPTIMALNYA DRAINASE DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA.**

Tolok ukur capaian sasaran berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pengurangan Jumlah Titik Genangan

Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan subbidang infrastruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang dimulai dari saluran primer-sekunder-tersier. Fokus penanganan drainase adalah permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pada akhir tahun

2013 telah tertangani 18 titik genangan atau 35,29% di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Pada tahun 2014 melalui Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorongtelah dilaksanakan pembangunan drainase untuk menangani 3 titik genangan di Kawasan Tegalrejo, Kawasan Kotagede di Kota Yogyakarta dan Kawasan Imogiri Barat di Kabupaten Bantul. Dengan dukungan APBN telah dilaksanakan kegiatan penyediaan jaringan drainase untuk menangani 3 titik genangan di Kabupaten Sleman meliputi: 1)Jln Kaliurang-Pandegasakti, Condongcatur, Depok; 2)Jln Samirone, Caturtunggal dan 3) Pasar Godean, Sidoluhur, Godean, serta 1 titik genangan di Kabupaten Bantul di Jalan Parangteritis, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Sehingga pengurangan t titik genangan sejumlah 7 titik genangan . Secara komulatif jumlah titik genangan yang tertagai sejumlah 25 titik genangan atau mencapai 49,20% melampaui target pada RPJMD 2014 sebesar 39,90% sehingga terjadi peningkatan secara signifikan sebesar 9,30% atau dengan presentase pencapaian sebesar 123,31%.

Jika dibandingkan dengan capaian 35,29% pada tahun 2013 maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 13,91%, sedangkan bila dibandingkan dengan 57,9% Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 maka jumlah titik genangan yang tertangani pencapaiannya sebesar 84,97% dengan realisasi anggaran sebesar 92,67% dari pagu anggaran yang tersedia sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut melampaui target capaian dalam RPJMD 2014.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.22. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase dan persampahan, jalan lingkungan)						

4.4	<i>Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta</i>						
4.4.1	Presentase titik genangan yang tertangani	35,29	39,9	49,2	123.31	57,9	84.97
	Faktor Penghambat : -						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, sarpras , SDM penyedia barang/jasa						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1)Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; 2) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; 3) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan. Total alokasi anggaran Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp. 4.705.552.000,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.23. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	4.705.552.000	18.420.127.990	92,67	100
I.1	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	255.552.000	253.387.000	99,15	100
I.2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4.350.000.000	4.012.687.500	92,25	100
I.3	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	100.000.000	94.747.000	94,75	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 92,67% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien

dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan kinerja tersebut diatas dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja SATRIYA sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi.

### **III.2.11. SASARAN MENINGKATNYA FUNGSI PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase kehandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan difokuskan pada tingkat kehandalan Gedung-gedung Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 16/PRT/M/2010 tentang pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung bahwa dalam setiap pemeriksaan keandalan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya yang selalu dalam kondisi laik fungsi. Dari 50 gedung pemerintah DIY, hingga tahun 2013 dari hasil identifikasi diketahui bangunan/gedung pemerintah yang handal sejumlah 41 unit atau 82%.

Pada tahun 2014 teridentifikasi kehandalan Bangunan gedung negara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku mencapai 42 unit atau 84% dari target 82% dalam RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan sebesar 2% atau dengan presentase pencapaian sebesar 102,44%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 82% maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2%, sedangkan apabila dibandingkan

dengan Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 88% maka identifikasi kehandalan Bangunan gedung negara yang sesuai dengan peraturan pencapaiannya sebesar 95,45% dengan realisasi anggaran sebesar 96,97% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut melampaui target capaian dalam RPJMD 2014 dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.24. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5	<b>Meningkatkan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan</b>						
5.1	<i>Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku</i>						
5.1.1	Persentase kendalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	82	82	84	102.44	88	95.45
Faktor Penghambat :							
Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana , SDM dan sarpras							
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 :							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>							

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan; 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Penataan Bangunan Dan Lingkungan; 2) Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara; 3) Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah. Total alokasi anggaran Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan Rp. 501.062.500,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.25. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	501.062.500	485.876.100	96,97	100
I.1	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	100.000.000	93.071.000	93,07	100
I.2	Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara	201.062.500	196.561.100	97,76	100
I.3	Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah	100.000.000	94.747.000	98,12	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 96,97% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Keberhasilan kinerja tersebut diatas dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja SATRIYA sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.12. SASARAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI DALAM KONDISI MANTAP.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan indikator cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Guna mempermudah aksesibilitas antar wilayah, di DIY telah terbangun infrastruktur jalan Provinsi sepanjang 619,34 Km.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2014 ditargetkan jalan dalam kondisi mantap sebesar 72,64 % .

Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2014 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 456,43 km atau 73,70% dari target 72,64% pada RPJMD 2014 sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,06% atau dengan presentase pencapaian sebesar 101,46%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap ( Kondisi baik dan sedang) telah mencapai 451,30 km atau 72,87% maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 0,83%, sedangkan apabila dibandingkan dengan 77,44% Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 maka pencapaian sasaran tahun berjalan sebesar 95,17% dengan realisasi anggaran sebesar 97,52% dari pagu anggaran yang tersedia sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut melampaui target capaian dalam RPJMD 2014 melalui program inspeksi jalan dan jembatan, program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan dan program peningkatan jalan dan jembatan.

Tabel III.26 Kondisi Jalan Provinsi di DIY

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan				Kondisi Jalan	Panjang Jalan			
		Th.2013		Th.2014			Th. 2013		Th.2014	
		Km	%	Km	%		Km	%	Km	%
1	Mantap	451,300	72,87	456,430	73,70	Baik	142,100	22,94	188,590	30,45
						Sedang	308,493	49,81	267,840	43,25
2	Tidak Mantap	168,040	27,13	162,910	26,30	Rusak Ringan	120,082	19,39	132,350	21,37
						Rusak Berat	48,665	7,86	30,560	4,93
		619,340	100,00	619,340	100,00	Jumlah	619,340	100,00	619,340	100,00

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.27. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
6	Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan						
6.1	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap						
6.1.1	Persentase penyediaan aksesibilitas dalam kondisi mantap	72,75	72,64	73,7	101.46	77,44	95.17
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras dan penyedia jasa/pemborong						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angka - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu: 1)Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan memiliki 5 (lima) kegiatan yaitu: 1.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, 2.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan, 3.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (D A K), 4.Pemeliharaan Rutin Jalan, 5.Pemeliharaan Rutin Jembatan. 2)Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan memiliki 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1.Inspeksi Kondisi Jalan, 2.Inspeksi Kondisi Jembatan. 3)Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu 1.kegiatan Peningkatan Jalan, 2. Perencanaan Peningkatan Jembatan, 3.Peningkatan Jembatan. Total alokasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp. 152.576.324.429,-.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.28. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>I</b>	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>56.890.946.429</b>	<b>54.871.185.891</b>	<b>96,45</b>	<b>100</b>
I.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	25.388.769.500	24.630.498.920	97,01	100
I.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	3.899.197.000	3.434.489.100	88,08	100
I.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (D A K)	13.929.229.929	13.325.125.650	95,66	100
I.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.075.991.000	10.923.774.577	98,63	100
I.5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.597.759.000	2.557.297.644	98,44	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</b>	<b>95.198.524.000</b>	<b>93.460.664.600</b>	<b>98,17</b>	<b>100</b>
II.1	Peningkatan Jalan	62.367.384.000	61.579.137.500	98,74	100
II.2	Perencanaan Peningkatan Jembatan	300.000.000	279.647.500	93,22	100
II.3	Peningkatan Jembatan	32.531.140.000	31.601.879.600	97,14	100
<b>III</b>	<b>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</b>	<b>486.854.000</b>	<b>461.780.500</b>	<b>94,85</b>	<b>100</b>
III.1	Inspeksi Kondisi Jalan	242.590.500	231.652.000	95,49	100
III.2	Inspeksi Kondisi Jembatan	244.263.500	230.128.500	94,21	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 97,52% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Keberhasilan kinerja tersebut atas komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.13. SASARAN MENINGKATNYA PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BAGI KAWASAN STRATEGIS DAN KAWASAN STRATEGIS BARU.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan baru.

Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pada kawasan strategis. Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru meliputi pembangunan jalan selokan mataram yang menghubungkan jalan arteri utara barat sampai dengan jalan arteri utara timur dengan membangun jalan di sisi utara dan selatan selokan mataram serta pembangunan jalur pantai selatan (Pansela) yang direncanakan berfungsi sebagai jalan arteri di dalam sistem jaringan jalan primer. Jalur Pansela membentang di sepanjang pantai selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul).

Kebutuhan total lahan untuk pembangunan aksesibilitas kawasan strategis dan kawasan strategis baru seluas 169,93 Ha. yang meliputi pengadaan lahan untuk pembangunan jalan selokan mataram seluas 6,664 ha dan untuk pembangunan jalur Pansela seluas 163,266 ha.

Sampai dengan tahun 2013 lahan yang telah disediakan/dibebaskan untuk pembangunan aksesibilitas kawasan strategis dan kawasan strategis baru seluas 48,51Ha atau 28,55%.

Pada tahun 2014 telah diupayakan pembebasan lahan/penyediaan lahan untuk pembangunan jalan selokan mataram seluas 5.749 m<sup>2</sup>. Dengan dukungan anggaran keistimewaan telah diupayakan pula pembebasan lahan/penyediaan lahan untuk percepatan pembangunan jalur pansela seluas 58.931 m<sup>2</sup>, sehingga total lahan yang telah disediakan/dibebaskan pada tahun 2014 adalah 64.680 m<sup>2</sup> atau 6,468 ha. Total kumulatif hingga tahun 2014 penyediaan lahan untuk aksesibilitas kawasan strategis mencapai 54,978 ha atau 32,35%. Luasan tersebut telah melampaui target pada RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 29,91% sehingga terjadi peningkatan sebesar 2,44% atau dengan presentase pencapaian sebesar 108,16%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 28,55% maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 3,80%, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 63,75% maka pencapaian sasaran tahun berjalan (2014) sebesar 50,75% dengan realisasi anggaran sebesar 83,51% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.29 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJM D 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
6	Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan						
6.2	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan startegis dan kawasan startegis baru						
6.2.1	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	28,55	29,91	32,35	108.16	63,75	50,75
	Faktor Penghambat : Kesepakatan harga, proses administrasi di BPN, pemahaman masyarakat terhadap penetapan harga						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi,dana, SDM, Sarparas dan konsultan						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : program pengadaan tanah untuk infrastruktur; 1 (satu) kegiatan yaitu: Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan. Total alokasi anggaran Program pengadaan tanah untuk infrastruktur Rp. 27.646.308.595,-.

Untuk menindaklanjuti target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.30. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	27.646.308.595	23.087.156.828	83,51	83,51
I.1	Pengadaan Tanah Untuk Jalan Dan Jembatan	27.646.308.595	23.087.156.828	83,51	83,51

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik tidak mencapai 100% atau hanya terealisasi 83,51% disebabkan belum ada kesepakatan harga tanah sedangkan realisasi anggaran 83,51% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Keberhasilan kinerja tersebut atas komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat berupa belum adanya kesepakatan harga, proses administrasi di BPN, pemahaman masyarakat terhadap penetapan harga yang belum selaras membuat kegiatan pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan secara fisik tidak terealisasi 100%. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja di atas dapat ditingkatkan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.13.1. Permasalahan Dan Solusi**

#### **A. Permasalahan**

1. Belum ada kesepakatan harga dengan masyarakat
2. Proses administrasi di BPN

#### **B. Solusi**

1. Terus berupaya melakukan rembug dengan warga agar memperoleh kesepakatan harga.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi luar yang berkaitan langsung dengan pembebasan lahan/pengadaan tanah

### **III.2.14.. SASARAN MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN IRIGASI.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya layanan jaringan irigasi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/2007, Luas Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY sebesar 17.112,87 Ha yang terdiri dari 44 Daerah Irigasi. Untuk meningkatkan layanan penyediaan air irigasi, ditetapkan target persentase luasan DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2014 sebesar 78% atau seluas 13.348,04 Ha. melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator persentase luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya: Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Permen Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan jaringan irigasi terdiri dari operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.

Kegiatan perencanaan jaringan irigasi dilaksanakan pada DI Sapon, DI Tanjung, DI Gamping, DI Sambeng Cs, DI Madean, DI Pendowo dan DI Blawong. Sedangkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pada DI

Trini, DI Kanoman, DI Sidomulyo, DI Ngebruk, DI Pogung, DI Semoyo, DI Kuton, DI Sekarsuli, DI Sambeng dan DI Brongkol.

Kegiatan operasi jaringan irigasi terdiri dari pengaturan air irigasi dan pembuangannya, yaitu membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana pembagian air serta melaksanakan kalibrasi pintu air dan alat ukur. Sedangkan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi adalah memelihara jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Jenis pemeliharaan terdiri dari pemasangan 40 buah patok hektometer dan pemasangan 60 buah papan larangan. Pemeliharaan rutin berupa gali sedimen dan pembersihan semak/sampah. Pemeliharaan berkala berupa perbaikan lining di 17 D aerah Irigasi dan perbaikan pintu air di 11 Daerah Irigasi.

Pada tahun 2014 luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 79,49% atau 13.603,24 Ha dari target 13.348,04 Ha atau 78% dalam RPJMD 2014 atau sehingga capaian sasaran di atas terjadi peningkatan sebesar 1,74% atau dengan presentase pencapaian sebesar 102,23%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 77% maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,74%, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 82,50% maka pencapaian sasaran tahun berjalan (2014) sebesar 96,65% dengan realisasi anggaran sebesar 92,46% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014 dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.31 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
7	Meningkatkan kehandalan sistem jaringan irigasi dan rawa						
7.1	Meningkatnya layanan jaringan irigasi						
7.1.1	Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi	77	78	79,74	102.23	82,5	96.65

	Faktor Penghambat :
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarpras dan penyedia jasa/pemborong
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya layanan jaringan irigasi dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 7 (tujuh) kegiatan, yaitu: 1.Pencapaian Pembangunan Jaringan Irigasi, 2.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, 3.Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, 4.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), 5.Pemeliharaan Jaringan Irigasi, 6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – Loan, 7.Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – APBD. Total alokasi anggaran Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rp. 30.475.105.697,-

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.32 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	30.475.105.697	28.178.727.088	92,46	100
I.1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	1.600.000.000	1.462.518.175	91,41	100,00
I.2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	5.249.151.170	4.746.684.415	90,43	100,00
I.3	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4.500.000.000	4.418.645.013	98,19	100,00
I.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (D A K)	14.081.204.527	12.803.529.455	90,93	100,00
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.500.000.000	2.450.135.100	98,01	100,00

	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)-Loan	2.209.750.000	2.111.664.455	95,56	100,00
	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)-APBD	335.000.000	185.550.475	55,39	100,00

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 92,46% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Keberhasilan kinerja tersebut atas komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

### **III.2.15. SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN AIR BAKU.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan air baku terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu penambahan penyediaan air baku

Ketersediaan air baku sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Air baku tersebut dipergunakan untuk penyediaan air irigasi serta kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI). Penyediaan air baku sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 767,6 liter/detik.

Melalui program pengembangan, pengelolaan dan konservasi Sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan program penyediaan air baku telah dibangun 1 buah embung di Kabupaten Sleman, 4 buah embung di Kabupaten Gunungkidul dan 1 buah embung di Kabupaten Kulonprogo. Dari 6 buah embung tersebut dapat diperoleh ketersediaan air baku sebesar 45,71 liter/detik.

Atas dukungan APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun 10 telaga yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul, mampu menyediakan air baku sebesar 5,22 liter/detik. Adapun dalam pemanfaatan air sungai Progo pada program pengembangan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional sitem Bantar tahap I yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera mampu menyediakan air baku sebesar 200 liter/detik.

Pada tahun 2014 total penambahan air baku sebesar 250,93 liter/detik atau secara komulatif ketersediaan air baku mencapai 1.018,53 liter/detik atau dengan presentase pencapaian sebesar 113,17%. Capaian ketersediaan air baku tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJM sebesar 900 liter/detik sehingga terjadi peningkatan sebesar 118,53 lt/det.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yaitu sebesar 767,60 lt/det maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan terjadinya peningkatan penyediaan air baku sebesar 250,93 lt/det sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 2.100 lt/det maka capaiannya sebesar 48,50% dengan realisasi anggaran per sasaran sebesar Rp. 20.180.584.382 (89,62%) dari pagu an ggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 201.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.33. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
8	Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air						
8.1	Meningkatnya ketersediaan air baku						
8.1.1	Penambahan Penyediaan air baku	767,6	900	1.018,53	113.17	2.100	48.50
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi,dana, SDM, sarpras dan penyedia jasa/pemborong						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya ketersediaan air baku dicapai melalui 2 (dua) program yaitu : 1) Program penyediaan dan pengelolaan air baku, 2) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. Jumlah kegiatan sebanyak 8 (delapan) kegiatan yaitu: 1) Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa, 2) Perencanaan Penyediaan Pengelolaan Air Baku, 3) Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya, 4) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya, 5) Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi, 6) Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya, 7) Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, 8) Koordinasi Kelembagaan SDA. Total alokasi anggaran Rp. 22.517.335.000

Target asaran dan indikator diatas dicapai melalui program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.34 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	<b>Program penyediaan dan pengelolaan air baku</b>	1.800.000.000	1.646.947.480	91,50	100
I.1	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	1.500.000.000	1382227785	92,15	100
I.2.	Perencanaan penyediaan dan pengelolaan air baku	300.000.000	264.719.695	88,24	100
II	<b>Program pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sda lainnya</b>	20.717.335.000	18.533.636.902	89,46	100
II.1	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	15.813.130.000	13.764.090.594	87,05	100
II.2	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	1.500.000.000	1.452.090.594	96,81	100
II.3	Pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi	499.945.000	488.156.440	97,64	100
II.4	Perencanaan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	1.250.000.000	1.196.479.730	95,72	100
II.5	Pemeliharaan bangunan prasarana sungai, danau dan sumber daya air lainnya	900.000.000	893.593.413	99,29	100
II.6	Koordinasi kelembagaan SDA	754.260.000	738.500.975	97,91	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 89,62% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Keberhasilan kinerja tersebut atas komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja di atas dapat ditingkatkan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.16. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN BANJIR.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pengendalian banjir terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu jumlah titik rawan banjir yang ditangani.

Daya dukung tebing sungai yang lemah merupakan lokasi yang dapat menyebabkan terjadinya banjir bagi daerah sekitarnya. Dari hasil identifikasi terdapat 120 titik lokasi sebagai daerah rawan banjir. Pada tahun 2013 secara kumulatif telah tertangani 43 titik rawan banjir.

Lokasi titik rawan banjir yang ditangani pada tahun 2014 di wilayah Kabupaten Sleman sejumlah 5 titik, Kabupaten Bantul sejumlah 14 titik, Kabupaten Kulon Progo sejumlah 3 titik dan Kota Yogyakarta sejumlah 7 titik yang dilaksanakan melalui program pengendalian banjir.

Pada tahun 2014 titik rawan banjir yang dapat ditangani secara kumulatif mencapai 72 titik, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 60 titik atau dengan presentase pencapaian sebesar 120%. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 29 titik.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yaitu sebesar 43 titik maka capaian tahun 2014 diatas menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 29 titik sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 120 titik maka capaiannya sebesar 60% dengan realisasi anggaran per sasaran sebesar (89,71%) dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.35 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
9	Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air						
9.1	<i>Meningkatnya kualitas pengendalian banjir</i>						
9.1.1	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	43	60	72	120	120	60.00
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran dan penyedia jasa/konsultan						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya ketersediaan air baku dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : 1) Program Pengendalian Banjir terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu 1) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; 2) Pengendalian Banjir Dan Penanggulangan Kekeringan. Total alokasi anggaran program pengendalian banjir sebesar Rp. 2.600.000.000

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.36. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengendalian banjir	2.600.000.000	2.332.410.660	89,71	100
I.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	2.000.000.000	1.813.133.660	90,66	100,00
I.2.	Pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan	600.000.000	519.277.000	86,55	100,00

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 89,71% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Keberhasilan kinerja tersebut atas komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja diatas dapat ditingkatkan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.17. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PADA PERMUKIMAN YANG PADAT DAN KUMUH.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya Kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh terdiri dari 1 ( satu) indikator yaitu Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin.

Pencapaian Indikator Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Difokuskan Wilayah Kecamatan Miskin diarahkan pada pengurangan kawasan kumuh di DIY yang diwujudkan melalui Program Pengurangan Kawasan Kumuh.

Data Review RP4D TA 2011 menyebutkan bahwa di DIY, terinventarisasi 69 kawasan kumuh yang berlokasi di Kabupaten Bantul sebanyak 9 kawasan, Kabupaten Kulonprogo 10 kawasan, Kabupaten Gunungkidul 10 kawasan, Kabupaten Sleman 11 kawasan dan Kota Yogyakarta 29 kawasan. Pada 69 kawasan kumuh terdiri dari 107 lokasi kumuh yang menjadi target utama penyelesaian indikator ini.

Pada akhir tahun 2013 telah tertangani sebanyak 35 lokasi kumuh, dari total 107 kawasan kumuh. Melalui dana APBD DIY Tahun Anggaran 2014 ditangani 6 lokasi kumuh dengan rincian Kabupaten Bantul 1 lokasi, Kabupaten Kulonprogo 2 lokasi, Kabupaten Sleman 1 lokasi, Kabupaten Gunungkidul 1 lokasi dan Kota Yogyakarta 1 lokasi dari total lokasi kumuh di DIY.

Capaian penanganan lokasi kumuh sampai akhir tahun 2014 adalah sebanyak 41 lokasi atau setara dengan 39,25% melampaui target dalam RPJMD 2014 sebesar 34% sehingga terjadi peningkatan sebesar 5,25% atau dengan presentase pencapaian sebesar 115,44%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 33,64% atau sebanyak 107 kawasan kumuh maka

capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,61%, sedangkan apabila dibandingkan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 51% maka pencapaian sasaran tahun 2014 telah mencapai 76,96% dengan realisasi anggaran sebesar 89,60% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014 dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.37 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
10	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat						

10.2	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh						
10.2.1	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan pada kecamatan miskin	33,64	34	39,25	115.44	51	76,96
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras dan penyedia jasa/pemborong						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh dicapai melalui 1 (satu) program : Program pengurangan kawasan kumuh; 1 kegiatan yaitu: Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh. Total alokasi anggaran Program pengurangan kawasan kumuh sebesar Rp. 3.600.000.000,-

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.38. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengurangan kawasan kumuh	3.600.000.000	3.225.775.700	89,60	100
I.1	Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan kumuh	3.600.000.000	3.225.775.700	89,60	100,00

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 89,60% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Keberhasilan kinerja tersebut atas komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran

yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja diatas dapat ditingkatkan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.18. SASARAN MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA LINGKUNGAN PERMUKIMAN BAGI TERWUJUDNYA KOMUNITAS YANG SEHAT.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas.

Jumlah total komunitas perumahan yang tersebar di seluruh DIY tercatat sebanyak 438 komunitas (setara dengan satuan kelurahan). Program pemberdayaan komunitas perumahan ini diwujudkan dengan program fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan. Sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan fasilitasi pemberdayaan bagi 219 komunitas.

Melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan pemberdayaan bagi 64 komunitas perumahan meliputi : 4 komunitas di Kota Yogyakarta, 15 komunitas di Kabupaten Sleman, 14 Komunitas di Kabupaten Kulonprogo, 16 komunitas di Kabupaten Bantul dan 15 komunitas di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga sampai akhir 2014 secara kumulatif telah tertangani sebanyak 283 komunitas perumahan atau setara 64,61% dari total komunitas yang ada di DIY.

Capaian penanganan pemberdayaan komunitas perumahan sampai akhir tahun 2014 secara kumulatif telah tertangani sebanyak 283 komunitas perumahan atau setara dengan 64,61% hal ini menunjukkan telah melampaui target dalam RPJMD 2014 sebesar 49% sehingga terjadi peningkatan penanganan pemberdayaan komunitas perumahan secara signifikan sebesar 15,61% atau dengan presentase pencapaian sebesar 131,86%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 50% atau sebanyak 219 komunitas maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14,61% sedangkan apabila dibandingkan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 64% maka capaian penanganan pemberdayaan komunitas perumahan tahun 2014 telah **melampaui** sebesar **100,95%** dengan realisasi anggaran sebesar 89,60% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014 dan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2017.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.39 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
10	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat						
10.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat						
10.1.1	Persentase komunitas perumahan yang telah diberdayakan	50	49	64,61	131.86	64	100.95
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM,sarpras dan penyedia jasa/konsultan						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 :						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang dicapai melalui 1 (satu) program : program pemberdayaan komunitas perumahan, 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1) kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat; 2) Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan, 3) Peningkatan

Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan. Total alokasi anggaran Program pemberdayaan komunitas perumahan sebesar Rp. 11.706.500.000,-

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.40. Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pemberdayaan komunitas perumahan	11.706.500.000	11.278.145.500	96,34	100
I.1	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	7.656.500.000	7.409.856.290	96,78	100
I.2	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	150.0000.000	51.394.400	34,26	100
I.3	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan	3.900.000.000	3.816.894.810	97,87	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran per program 96,34% dari pagu yang tersedia. Untuk program di atas ada 1 ( satu) kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan realisasi uangnya di bawah 50% karena menyesuaikan SBU/SBK sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja di atas pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Keberhasilan kinerja tersebut atas komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai dengan budaya kerja sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja diatas dapat ditingkatkan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### III.2.19. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN PRODUKTIF.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani

Program pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan. Pada awal 2012 ada 91.200 unit RTLH. Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah RTLH yang tersebar di DIY menurun menjadi 83.063 unit atau setara dengan 7,92% dari jumlah total unit rumah yang ada di DIY. Target kinerja tahun 2014 yang ditetapkan dalam RPJMD DIY adalah menurunkan angka tersebut menjadi 7,5%.

Selama kurun tahun 2014, target tersebut dicapai melalui penanganan oleh berbagai pihak, meliputi :

- Pemerintah Daerah DIY dengan dana APBD DIY : 1.099 Unit,
- Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui dana APBD dan APBN: 2.755 Unit,
- Swadaya masyarakat, BKM dan NGO lainnya : 1.445 Unit.

Total RTLH yang ditangani pada tahun 2014 adalah 5299 unit, secara komulatif pengurangan jumlah RTLH sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 77.764 Unit atau 7,49% dari jumlah total unit rumah di DIY. Angka ini telah melampaui target dalam RPJMD 2014 sebesar 7,50% sehingga terjadi pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 0,01% atau dengan presentase pencapaian sebesar 131,86%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 7,52% atau sebanyak 83.063 unit RTLH maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,43% sedangkan apabila dibandingkan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2014 sebesar 6% maka capaian pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar tahun 2014 sebesar **100,95%** dengan realisasi anggaran sebesar 97,02% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut

sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014 dan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2017.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.41. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)( %)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
11	Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif						
11.1	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif						
11.1.1	Prosentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani	8	7,5	7,49	100.13	6	124.83
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras dan penyedia jasa/pemborong						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif dicapai melalui 1 (satu) program yaitu program pengembangan perumahan; 4 (empat) kegiatan : 1) Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan, 2) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual (NSPM), 3) Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Total alokasi anggaran program pengembangan perumahan sebesar Rp. 10.326.000.000,-

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.42 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengembangan perumahan	10.326.000.000	10.018.343.031	97,02	100
I.1	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	350.000.000	327.463.000	93,56	100
I.2	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (nspm)	100.000.000	1.452.090.594	94,57	100
I.3	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	9.826.000.000	9.562.636.031	97,32	100
I.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan	50.000.000	33.673.000	67,35	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 97,02% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.20. SASARAN MENINGKATNYA AKSES KETERSEDIAAN ENERGI LISTRIK.**

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan akses ketersediaan energi listrik terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Rasio Elektrifikasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akses energi listrik yang diprediksi meningkat setiap tahunnya, telah dilakukan upaya peningkatan penyediaan

sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Pembangunan jaringan listrik perdesaan melalui APBD DIY dan APBN diprioritaskan untuk Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul, sedangkan pemasangan instalasi listrik rumah bagi masyarakat tidak mampu diprioritaskan di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan sebagian kecil di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pada akhir tahun 2013, rasio elektrifikasi di DIY tercapai sebesar 80,60 %. Secara keseluruhan capaian rasio elektrifikasi di DIY pada tahun 2014 sebesar 82,70% dari target RPJMD 2014 sebesar 78%, sehingga selama tahun 2014 terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 4,70% dengan presentase pencapaian sebesar 106,03% atau penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 22.799 RT yang dicapai melalui :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2014, sebanyak 577 RT,
- b. pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten tahun 2014, sebanyak 248 RT
- c. pelaksanaan program dan kegiatan APBN 2014, sebanyak 1.300 RT,
- d. pelaksanaan program dan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 48 RT,
- e. dari dana Non PLN dan swadaya masyarakat, sebanyak 20.626 RT.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 80,60% maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,10%, sedangkan apabila dibandingkan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 79,80% maka pencapaian sasaran tahun 2014 telah mencapai 103,63% dengan realisasi anggaran sebesar 92,41% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.43 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
15	Meningkatkan akses masyarakat DIY terhadap energi komersial						
15.1	<i>Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik</i>						
15.1.1	Rasio elektrifikasi	80,6	78	82,7	106,03	79,8	103,63
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras dan penyedia jasa/pemorong						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya akses ketersediaan energi listrik dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan; 4 (empat) kegiatan : 1) Perencanaan Ketenagalistrikan, 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan, 3) Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan, 4) Monitoring Dan Evaluasi Penyediaan Dan Pemenuhan Ketenagalistrikan. Total alokasi anggaran program Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan sebesar Rp. 4.178.100.000,-

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.44 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan	4.1783.100.000	3.861.032.000	92,41	100
I.1	Perencanaan Ketenagalistrikan	360.000.000	358.281.600	99,52	100
I.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	3.468.100.000	3.172.187.000	91,47	100
I.3	Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan	250.000.000	232.404.400	92,96	100

I.4	Monitoring Dan Evaluasi Penyediaan Dan Pemenuhan Ketenagalistrikan	100.000.000	98.159.000	98,16	100
-----	--	-------------	------------	-------	-----

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 92,41% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.21. SASARAN TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN UNTUK LISTRIK DAN BAHAN BAKAR.**

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan.

Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tahun 2014 dilakukan dengan mendorong pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bioenergi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 Kg dan sebagai pembangkit listrik bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Capaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Tahun 2013 sebesar 114.035,02 SBM, sedangkan realisasi tahun 2014 sebesar 116.543,20 SBM dari target sebesar 112.000 SBM. Realisasi pencapaian target di tahun 2014 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM sebesar 15 kW di Kabupaten Gunungkidul atau setara 206,54 SBM;
- 2) Pemasangan 65 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari APBD DIY di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY atau setara 179,00 SBM;
- 3) Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 15 kW dari APBD DIY di Kabupaten Kulonprogo atau setara 206,54 SBM;
- 4) Pembangunan 85 unit Digester Biogas dari APBD DIY di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 590.19 SBM;
- 5) Pembangunan 120 unit Digester Biogas dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 722.80 SBM;
- 6) Pembangunan 89 unit Digester Biogas dari Kementerian ESDM di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 602.975 SBM

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.45 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
16	Mewujudkan pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi						
16.1	<i>Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar</i>						
16.1.1	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	114.035,20	112.000	116.543,20	103.52	130.100	90
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras dan penyedia jasa/pemborong						

- |  |
|--|
| Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 :<br>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA<br>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas<br>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan |
|--|

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.46 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan	2.982.000.000	3.861.032.000	92,19	100
I.1	Perencanaan Energi Baru Terbarukan	100.000.000	98.276.000	98,28	100
	Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	1.200.000.000	1.177.724.050	98,14	100
	Pengembangan Biogas Berbasis Listrik	340.000.000	215.379.600	63,35	100
	Pengembangan Biogas Berbasis Bahan Bakar	627.000.000	615.508.000	98,17	100
	Pengembangan Biogas Berbasis Bahan Bioenergi	165.000.000	149.624.000	90,68	100
	Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Baru Terbarukan	150.000.000	144.683.500	96,46	100
	Pembinaan Dan Pendawasan Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	400.000.000	347.868.000	86,97	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 92,19% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya

manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.22. SASARAN TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN AIR TANAH.**

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu rerata penurunan muka air tanah

Kegiatan mempertahankan rerata penurunan muka air tanah APBD DIY Tahun 2014, diprioritaskan dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan dan pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah CAT Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata – rata akuifer yaitu sebesar 100 meter.

Kondisi rerata muka air tanah di CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2013 adalah sebesar 6,41 meter pada musim hujan terbasah dan 7,90 meter pada musim kemarau terkering. Adapun rerata kedalaman muka air tanah pada tahun 2014 di CAT Yogyakarta – Sleman pada musim penghujan terbasah mengalami penurunan muka air tanah rata-rata sebesar 0,87 meter menjadi 7,28 meter atau 7,28 % terhadap rata-rata tebal akuifer di CAT Yogyakarta – Sleman, sedangkan pada musim kemarau terkering mengalami penurunan 1,45 meter menjadi 9,35 meter atau 9,35 % terhadap rata-rata tebal akuifer di CAT Yogyakarta – Sleman. Sehingga rerata penurunan muka air tanah di tahun 2014 masih <20%, sesuai dengan target di tahun 2014.

Untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah tetap pada kondisi <20% di Tahun 2014, dilakukan peningkatan upaya konservasi dan pemantauan muka air tanah melalui kegiatan :

- a. Pembangunan 200 unit sumur resapan air tanah yang berada di Kabupaten Bantul dan Sleman;
- b. Pembangunan 1 unit sarana pemantauan air tanah dalam di Kabupaten Sleman;

- c. Pemeliharaan/perbaikan di 3 lokasi sarana pemantauan air tanah dalam di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.47 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
12	Mewujudkan perlindungan, pelestarian dan pengawetan air tanah						
12.1	<i>Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah</i>						
12.1.1	Rerata penurunan muka air tanah	-20	-20	-20	100	-20	
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran dan penyedia jasa/konsultan						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.48 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah	3.700.000.000	3.587.710.550	96,97	100
I.1	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Air Tanah	400.000.000	398.156.900	99,54	100
I.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah	2.385.000.000	2.373.322.750	99,51	100
I.3	Pengendalian Daya Rusak Air Tanah	500.000.000	435.240.400	87,05	100
I.4	Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Air Tanah	250.000.000	228.772.000	91,51	100
I.5	Monitoring Dan Evaluasi	65.000.000	52.957.500	81,47	100

	Pengambilan Air Tanah				
I.6	Perencanaan Pengelolaan Air Tanah	100.000.000	99.261.000	99,26	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 96,97% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.23. SASARAN TERWUJUDNYA PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN EFISIENSI PEMANFAATAN ENERGI.**

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi

Pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Untuk mencapai target pelaksanaan konservasi energi dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Prioritas pelaksanaan konservasi energi APBD DIY Tahun 2014 di sektor publik yaitu gedung pemerintah dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik pemerintah daerah. Dari hasil pelaksanaan audit energi tersebut dihasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik.

Capaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi di Tahun 2013 sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah). Target sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 6% (9 gedung pemerintah), dengan realisasi sebesar 10 % (15 gedung pemerintah) dengan persentase 166,67% hal ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi capaian 4% dalam RPJMD 2014.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah) maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,67% sedangkan apabila dibandingkan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 15% maka pencapaian sasaran tahun 2014 telah mencapai 66,67% dengan realisasi anggaran sebesar 99,19% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014 dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.49 Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
14	Mewujudkan penyediaan energi daerah, berbasis bahan bakar nabati						
14.1	<i>Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi</i>						
14.1.1	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan konservasi Energi	3,33	6	10	166,67	15	66,67
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Capaian program dan kegiatan 2014 yang mendukung indikator di atas seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.50 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	600.000.000	595.153.930	99,19	100
I.1	Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi	200.000.000	196.904.500	98,45	100
I.2	Pelaksanaan Audit Energi	400.000.000	398.249.430	99,56	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 99,19% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.24. SASARAN TERWUJUDNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DITRIBUSI DAN PASOKAN BAHAN BAKAR.**

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar.

Untuk menjamin pasokan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di DIY, pemerintah di tahun 2014 menugaskan PT.Pertamina (Persero) dan PT. Aneka

Kimia Raya (AKR) selaku badan usaha untuk melakukan distribusi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi jenis premium, solar dan LPG tabung 3 Kg. Untuk bahan bakar minyak bersubsidi didistribusikan melalui 96 S tasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan 2 S tasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan melalui 43 agen anggota Hiswana Migas DIY beserta 3.713 pangkalannya.

Sampai tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 270 penyalur (45 % dari 600 penyalur bahan bakar yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya). Target peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar tahun 2014 sebesar 50% (300 penyalur) dengan realisasi sebesar 60 % (360 penyalur) meningkat 10% dalam RPJMD 2014 dengan persentase capaian 120%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 45% (600 penyalur bahan bakar yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya) maka capaian sasaran tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan sebesar 15% sedangkan apabila dibandingkan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 80% maka pencapaian sasaran kelancaran distribusi tahun 2014 telah mencapai 75% dengan realisasi anggaran sebesar 92,76% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014 dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian realisasi tersebut dilakukan melalui :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar bersubsidi terhadap 90 penyalur;
- b. Pembangunan 5 unit pangkalan LPG tabung 3 Kg di Kabupaten Kulonprogo.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.41. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/ Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
17	Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap bahan bakar minyak dan gas						
17.1	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar						
17.1.1	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	45	50	60	120	80	75
	Faktor Penghambat : -						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Capaian program dan kegiatan 2014 yang mendukung indikator di atas seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.4 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bahan bakar	607.500.000	563.546.200	92,76	100
I.1	Pembinaan Dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	157.500.000	149.367.200	94,84	100
I.2	Pembinaan Dan Pengawasan K2LL Usaha Migas	50.000.000	40.368.200	80,74	100
I.3	Peningkatan Fasilitas Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	300.000.000	276.066.000	92,02	100
I.4	Pengelolaan Sistem Informasi Minyak Dan Gas	100.000.000	97.745.000	97,75	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 92,76% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.21. SASARAN TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PERMUNIAN PERTAMBANGAN.**

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya pengembangan kegiatan pengolahan dan permunian pertambangan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan. Peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan APBD 2014 dilakukan melalui pemberian bantuan alat pengolah hasil tambang, meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial kelompok masyarakat, menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kegiatan operasi dan produksi pertambangan.

Sampai dengan tahun 2013, telah dicapai peningkatan nilai tambah komoditas tambang melalui fasilitasi pengolahan komoditas tambang batuan sebesar 9 % (10 lokasi dari total 22 lokasi kegiatan pertambangan yang potensial dikembangkan). Target Peningkatan nilai tambah di tahun 2014 sebesar 10 % (11 lokasi) dengan realisasi sebesar 11 % (12 lokasi) meningkat 1% dari target RPJMD 2014 dengan persentase capaian sebesar 110,00%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 9% (10 lokasi dari total 22 lokasi kegiatan pertambangan yang potensial dikembangkan) peningkatan nilai tambah komoditas tambang melalui fasilitasi pengolahan komoditas tambang batuan tahun 2014 diatas menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2% sedangkan apabila dibandingkan terhadap Target Capaian/Akhir RPJMD 2017 sebesar 13% maka pencapaian sasaran kelancaran distribusi

tahun 2014 telah mencapai 84,62% dengan realisasi anggaran sebesar 92,76% dari pagu anggaran yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dan melampaui target capaian dalam RPJMD 2014. Capaian realisasi peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui pemberian bantuan alat pengolah batu sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman.

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.16. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
13	Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian						
13.1	<i>Terwujudnya pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian pertambangan</i>						
13.1.1	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	9	10	11	110	13	84.62
Faktor Penghambat : -							
Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran dan penyedia jasa/konsultan							
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>							

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran terwujudnya pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian pertambangan dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan, 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) perencanaan pengelolaan usaha pertambangan; 2) peningkatan nilai tambah sumber daya mineral; 3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan. Total alokasi anggaran Rp. 1.039.600.000

Sebagai wujud nyata pencapaian sasaran dan indikator kinerja di atas, telah dijabarkan dalam program/kegiatan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.4 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	1.039.600.000	1.017.377.500	97,86	100
I.1	Perencanaan Pengelolaan Usaha Pertambangan	604.600.000	589.681.000	97,53	100
I.2	Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral	345.000.000	342.834.500	99,37	100
I.3	Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Pertambangan	90.000.000	84.862.000	94,29	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 97,86% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.26. SASARAN MENINGKATNYA PENCAPAIAN PELAKU, PROSES DAN PRODUK KONSTRUKSI YANG BERKUALITAS.**

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan pencapaian pelaku, proses dan produk konstruksi yang berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi.

Performance/ Kinerja Jasa Konstruksi diukur dengan pencapaian pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi. Dalam rangka pengaturan jasa konstruksi, jumlah peraturan perundangan undangan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah tersosialisasikan sampai dengan tahun 2014 sejumlah 5 peraturan dari target 6 peraturan sampai 2017. Bobot pada pengaturan sebesar 40%, sehingga pada tahun 2014 ini telah tercapai 33,33%.

Dalam upaya pemberdayaan jasa konstruksi, sertifikasi tenaga konstruksi sampai dengan tahun 2014 sebanyak 3395 orang dari target 4000 org. Bobot pada pemberdayaan sebesar 50 % sehingga sampai tahun 2014 ini telah tercapai 42,44%

Upaya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, diukur berdasarkan implementasi 7 jenis layanan Standard Pelayanan Minimal (SPM) melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Pada tahun 2014 layanan SPM yang dilaksanakan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota sebanyak 3 jenis. Bobot pada pengawasan sebesar 10%, sehingga sampai dengan tahun 2014 telah tercapai 4,29%. Dengan demikian pencapaian kumulatif kinerja jasa konstruksi sampai dengan tahun 2014 sebesar 94,94%, melampaui target sebesar 80%.

Tabel III.30 Capaian Indikator Persentase Performance/Kinerja Jasa Konstruksi Tahun 2014

Sub Program	Bobot	Target	Realisasi	% Realisasi	% Capaian
a	b	c	d	e	f
Pengaturan	40 %	6 peraturan	5 peraturan	83,33 %	33,33 %
Pemberdayaan	50 %	4.000 orang	3.395 orang	84,88 %	42,44 %
Pengawasan	10 %	7 layanan	3 layanan	42,86%	4,29 %
Jumlah	100 %				94,94 %

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.16. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
18	Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan						
18.1	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas						
18.1.1	Persentase performance/ kinerja jasa konstruksi	77,5	80	94,94	118,67	87,5	108,50
	Faktor Penghambat : -						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dapa, SDM, sarpraspenyedia jasa/konsultan						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan						

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya pencapaian pelaku, proses dan produk konstruksi yang berkualitas dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Pembinaan Jasa konstruksi, 12 (dua belas) kegiatan, yaitu: 1) Sosialisasi dan di seminati peraturan perundang-Undangan; 2) Pengelolaan Database Jasa Konstruksi; 3) Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi; 4) Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi; 5) Peningkatan Kualitas Pengguna Jasa Konstruksi; 6) Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi; 7) Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 8) Pengawasan Pemanfaatan Jasa Konstruksi; 9) Pengawasan Perijinan Jasa Konstruksi; 10) Pengawasan Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi; 11) Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi; 12) Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan. Total alokasi anggaran Rp. 1.037.707.000

Capaian program dan kegiatan 2014 yang mendukung indikator di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.4 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	<b>Program Pembinaan Jasa konstruksi</b>	<b>1.037.707.000</b>	<b>1.017.394.475</b>	<b>98,04</b>	<b>100</b>
I.1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-Undangan	60.000.000	59.999.475	99,99	100
I.2	Pengelolaan Database Jasa Konstruksi	130.000.000	129.330.000	99,48	100
I.3	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	76.200.000	69.800.000	91,60	100
I.4	Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	91.999.000	91.999.000	100	100
I.5	Peningkatan Kualitas Pengguna Jasa Konstruksi	59.400.000	59.400.000	100	100
I.6	Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi	64.872.000	64.872.000	100	100
I.7	Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	70.000.000	70.000.000	100	100
I.8	Pengawasan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	65.000.000	65.000.000	100	100
I.9	Pengawasan Perijinan Jasa Konstruksi	70.000.000	70.000.000	100	100
I.10	Pengawasan Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi	70.000.000	70.000.000	100	100
I.11	Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi	68.276.000	68.276.000	100	100
I.12	Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan	211.960.000	198.718.000	93,75	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 98,04% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam

menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.27. SASARAN MENINGKATNYA ARUS INFORMASI DAN RUJUKAN TEKNIK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BIDANG PUPESDM.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (*centre of excellence*) bidang pekerjaan umum.

Pada tahun 2013, indikator Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (*Centre Of Excellence*) Bidang Pekerjaan Umum telah tercapai sebesar 75%.

Melalui Program Pengkaji Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum, pencapaian target Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (*centre of excellence*) capaian Bidang Pekerjaan Umum secara kumulatif hingga tahun 2014 adalah sebesar 79,65% dari target RPJMD sebesar 77,5 %. Hal tersebut dilakukan melalui 2 (dua) aspek yaitu :

- 1) Persentase Capaian Kegiatan Pendukung Penguasaan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum dengan bobot 50% . Target hingga tahun 2017 adalah sebanyak 32 kegiatan dan capaian hingga tahun 2014 adalah sebanyak 22 kegiatan, sehingga capaian aspek Penguasaan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum sebesar 34,11 % melalui sub unsur Perancangan dan Teknologi, Efisiensi Bangunan, Kualitas Bangunan, Pengetahuan Bidan Ke-Pu-an dan simulasi ketahanan
- 2) Persentase Capaian Orang Terlayani Penyebaran Informasi bidang Pekerjaan Umum dengan bobot 50%. Target sampai tahun 2017 adalah sebanyak 410.000 orang dan capaian hingga tahun 2014 adalah sebanyak 355.655 orang, sehingga capaian aspek Orang Terlayani Penyebaran Informasi bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar 43,4%.

Secara lebih rinci, capaian Persentase Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (*Centre Of Excellence*) Bidang Pekerjaan Umum hingga tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.32 Capaian Persentase Penguasaan Teknologi Dan Penyebaran Informasi (*Centre Of Excellence*) Bidang Pekerjaan Umum

No	Aspek/ Unsur	Sub Unsur		Bobot	Target (Pada Th. 2017)	Realisasi (Hingga Th. 2014)	Prosentase Realisasi 7÷6	Prosentase Capaian 8×5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penguasaan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Keandalan Bangunan	Perancangan dan Teknologi	20%	14 Kegiatan	11 Kegiatan	78,6%	15,7%
			Efisiensi Bangunan	8%	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60,0%	4,8%
			Kualitas Bangunan	8%	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60,0%	4,8%
		Peningkatan Ketahanan Permukiman	Pengetahuan Bidang ke- PU-an	8%	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60,0%	4,8%
			Simulasi Ketahanan	6%	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,7%	4%
Sub jumlah								34,1 %
2.	Penyebaran Informasi Bidang Pekerjaan Umum			50,00%	410.000 orang	355.655 orang	86,7%	43,4%
<b>Jumlah Total</b>				100,00%				<b>79,65%</b>

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.16. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
19	Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan Informasi teknologi pembangunan bidang PUP dan ESDM						
19.1	<i>Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM</i>						
19.1.1	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi ( <i>centre of excellence</i> ) bidang pekerjaan umum	75	77,5	79,65	102,77	85	93,71
Faktor Penghambat : -							
Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpraspenyedia jasa/konsultan							
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : - Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angka - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan							

❖ Sumber: e-sakip 2014

Sasaran meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Pengkaji dan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum, 4 (empat) kegiatan, yaitu: 1) Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam; 2) Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum; 3) Survey Bahan Bangunan Keciptakarya; 4) Informasi Teknologi Bidang PU. Total alokasi anggaran Rp. 879.994.925

Capaian program dan kegiatan 2014 yang mendukung indikator di atas seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.4 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp. )	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengkaji dan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum	879.994.925	874.696.950	99,40	100
I.1	Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam	100.000.000	99.830.000	99,83	100
I.2	Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	399.999.975	396.836.000	99,21	100
I.3	Survey Bahan Bangunan Keciptakarya	49.995.000	49.895.000	99,80	100
I.4	Informasi Teknologi Bidang PU	329.999.950	328.135.950	99,44	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 99,40% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capain sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### **III.2.28. SASARAN MENINGKATNYA PENCAPAIAN PEROLEHAN HASIL UJI/ SERTIFIKAT HASIL UJI DALAM RANGKA PELAYANAN YANG MEMENUHI STANDAR.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/ Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian.

Pencapaian indikator kinerja Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji Dalam Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian pada tahun 2014 sebesar 96% , sehingga pada tahun 2014 dapat melampaui target dari 81,25 %. Pencapaian ini diperoleh dari : 1) Sub unsur pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian dengan bobot 10%. Pada tahun 2014 target perolehan jumlah Laporan Hasil Uji 400 LHU (8000 parameter) terealisasi 899 LH U (10.200 parameter) sehingga pencapaian sub unsur LHU sebesar  $899/400 \times 10\% \times 100\% = 22\%$ . Sedangkan untuk penerimaan retribusi (PAD) dari target Rp. 170.065.000.000,- sedangkan realisasinya Rp. 319.734.000,- 2) Sub unsur pengembangan manajemen laboratorium dengan bobot 90%.

Target jumlah parameter terakreditasi sebanyak 40 parameter . Pada tahun 2014 parameter terakredetasi tercapai 33 parameter , sehingga pada tahun 2014 pencapaian sub unsur ini sebesar  $33/40 \times 90\% \times 100\% = 74\%$ .

Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.16. Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian / Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
20	Memberikan pelayanan jasa pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi						
20.1	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar						
20.1.1	Persentase jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	75	81,25	81,25	100	100	81.25
	Faktor Penghambat :						
	Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, sarpras dan penyedia jasa/konsultan						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja SDM melalui budaya SATRIYA</li> <li>- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai angkas</li> <li>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan</li> </ul>						

Sasaran meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/ Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Pelayanan Jasa Pengujian, 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 2) Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian; 3) Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian. Total alokasi anggaran Rp. 3.146.249.850

Capaian program dan kegiatan 2014 yang mendukung indikator di atas seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.III.4 Realisasi program/kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program pengkaji dan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum	3.146.249.850	2.610.265.375	82,96	100
I.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	66.000.000	65.974.200	99,96	100
I.2	Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	2.972.710.000	2.450.170.250	82,42	100
I.3	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian	107.539.850	94.120.925	87,52	100

Hingga akhir tahun 2014 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran 82,96% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2014 telah melampaui target dalam RPJMD 2014. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

### III.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 93,88% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 93,91%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,09%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel III.38 berikut:

**Tabel III.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	1.450.000.000	1.286.852.000	88,75

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1.419.282.000	1.138.776.000	80,24
3	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta penerapan sanksi	1.829.309.500	1.635.254.500	89,39
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas	11.800.000.000	11.360.678.780	96,28
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur limbah yang memadai	6.001.395.000	5.604.215.050	93,38
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai	1.710.000.000	1.462.512.000	85,53
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	19.497.240.000	18.420.127.990	94,48
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	15.700.000.000	14.220.722.850	90,58
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	4.300.000.000	3.343.280.700	77,75
10	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan	4.705.552.000	4.360.821.500	92,67
11	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	501.062.500	485.876.100	96,97
12	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	152.576.324.429	148.793.630.991	97,52
13	Meningkatnya penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	27.646.308.595	23.087.156.828	83,51
14	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa	30.475.105.697	28.178.727.088	92,46
15	Meningkatnya ketersediaan air baku	22.517.335.000	20.180.584.382	89,62

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
16	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	2.600.000.000	2.332.410.660	89,71
17	Meningkatnya kualitas lingkungan pada permukiman yang padat dan kumuh	3.600.000.000	3.225.775.700	89,60
18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	11.706.500.000	11.278.145.500	96,43
19	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	10.326.000.000	10.018.343.031	97,02
20	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	3.700.000.000	3.587.710.550	96,97
21	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian pertambangan	1.039.600.000	1.017.377.500	97,86
22	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	600.000.000	595.153.930	99,19
23	Meningkatnya akses ketersediaan energi listrik	4.178.100.000	3.861.032.000	92,41
24	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik dan bahan bakar	2.982.000.000	2.749.063.150	92,19
25	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	607.500.000	563.546.200	92,76
26	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas	1.037.707.000	1.017.394.475	98,04
27	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang PUPESDM	879.994.925	874.696.950	99,40
28	Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar	3.146.249.850	2.610.265.375	82,96
<b>Jumlah</b>		<b>348.532.566.496</b>	<b>327.290.131.780</b>	<b>93,91%</b>
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		<b>10.493.543.125</b>	<b>9.768.369.551</b>	<b>93,09%</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>359.026.109.621</b>	<b>337.058.501.331</b>	<b>93,88%</b>

## **Penghargaan**

Pada Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014, Pemerintah Daerah DIY telah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional yaitu:

1. Peringkat Terbaik Kesatu Kategori Provinsi Sub Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.
2. Peringkat Terbaik Ketiga Kategori Provinsi Sub Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Melalui pembinaan teknis terhadap pekerja konstruksi dan petugas Operasional dan Pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, telah diperoleh beberapa penghargaan tingkat nasional yaitu :

1. Pemenang I Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Juru Ukur;
2. Pemenang I Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Listrik;
3. Pemenang I Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Mandor Pelaksanaan Pekerjaan Jalan;
4. Pemenang II Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Listrik;
5. Pemenang II Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Operator Excavator;
6. Pemenang II Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Mandor Pelaksanaan Pekerjaan Gedung;
7. Pemenang III Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Mador Pelaksanaan Pekerjaan Jalan;
8. Pemenang III Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Batu;
9. Pemenang III Lomba Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan.

## **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **Permasalahan**

1. Alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, dikhawatirkan keberlanjutan prasarana sumber daya air yang telah dibangun menjadi tidak efisien karena kemanfaatan yang tidak optimal.
2. Keterbatasan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pembangunan infrastruktur dasar bagi permukiman.

3. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan strategis terkendala kesepakatan harga tanah dengan masyarakat sehingga tidak sesuai jadwal pelaksanaan pengadaan/pembebasan lahan .

### **Solusi**

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota segera menetapkan lokasi lahan sawah yang berkelanjutan, dengan memberikan insentif yang memadai bagi para pemilik lahan.
2. Advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai dengan kewenangannya.
3. Meningkatkan komunikasi dan mediasi dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan harga tanah dan redesain jadwal pelaksanaan pengadaan/pembebasan lahan untuk infrastruktur.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 28 (dua puluh delapan) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PUP-ESDM DIY pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Rencana strategis Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 28 (dua puluh delapan) sasaran, terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2014,

29 (dua puluh sembilan) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator.

3. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah SKPD dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1) Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2) Perlu adanya kebijakan yang memudahhi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.